



seri literasi digital

demokrasi damai era digital



penerbit: siberkreasi

Seri Literasi Digital
DEMOKRASI DAMAI ERA DIGITAL

Editor

Wicaksono

Asisten Editor

Adya Nisita

Alvidha Septianingrum

Dedy Permadi

Penulis

Ade Irma Sukmawati	Made Dwi Anjani
Aldinshah Vijawabwana	Marvin F. Laurens
Astri Dwi	Muna Madrah
Adya Nisita	M. Said Hasibuan
Cahya Suryani	Ni Ras Amanda
Debby Dwi Elsha	Novi Kurnia
Diena Haryana	Olivia Lewi
Donny BU	Puji Rianto
Edi Santoso	Radityo Widyatmojo
Ellen Yasak	Ratri Rizki Kusumalestari
Firly Annisa	Rita Gani
Frida Kusumastuti	Rita Nurlita Setia
Gilang Desti Parahita	Unggul Sagena
Gilang Jiwana Adikara	Wisnu Martha
Ignatius Aryono Putranto	Yohanes Widodo
Indriyatno Banyumurti	Zainuddin Muda
Lintang Ratri Rahmiaji	Amy Kamila

Desain & Tata Letak

Adityo Rachmanto

**Gerakan Nasional Literasi Digital
Siberkreasi
Jakarta
2019**

Diterbitkan oleh **Siberkreasi**

Cetakan I, 2019

ii + 239 halaman; 13 cm x 19 cm

ISBN: 978-623-90693-0-8

Buku ini juga dapat diunduh bebas di www.literasidigital.id

ISBN 978-623-90693-0-8



9 786239 069308

Kata Pengantar

Perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan, yang paling kentara ialah cara kita berinteraksi dan berpendapat. Sayangnya, masyarakat masih belum seluruhnya dewasa dalam memanfaatkan internet. Konten negatif berseliweran dalam beragam bentuk, hoaks menjadi yang paling sering ditemui dan berdaya rusak tinggi.

Intensitas sirkulasi hoaks kian tinggi setiap bulannya. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 1.224 hoaks sejak Agustus 2018 sampai Maret 2019. Tren merebaknya hoaks secara bertahap meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir: 175 hoaks di bulan Januari, 353 hoaks di bulan Februari, dan 453 hoaks di bulan Maret 2019. Di beberapa kasus global, hoaks dapat mengancam kualitas demokrasi.

Penanganan konten negatif terus diupayakan melalui ragam pendekatan. Dari hilir, kebijakan dan penindakan hukum dilakukan oleh Kemkominfo, Polri, dan pemangku kepentingan terkait. Sementara di sisi hulu, penguatan literasi digital masyarakat terus digalakkan sebagai usaha bersifat preventif dan berkelanjutan. Salah satunya melalui penerbitan buku bertajuk "Demokrasi Damai Era Digital" yang disusun oleh 34 penulis dari perwakilan 101 mitra pendukung Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Guna menjangkau khalayak luas, buku ini terbagi dalam lima (5) tema besar: anak muda, jurnalisme digital, ranah domestik, perihal demokrasi, dan media sosial. Buku bunga rampai ini diharapkan mampu menyumbang semangat dan harapan berdemokrasi dengan akal sehat. Selamat membaca.

Jakarta, 1 April 2019

Dedy Permadi
Ketua Umum GNLD Siberkreasi

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
JURNALISME DIGITAL	
Era Digital, Adu Clickbait, dan Jurnalisme Tabloid	1
Narasi Damai Jurnalis Warga	9
Literasi Digital dalam Berita Daring tentang Papua di Era Demokrasi	18
Disinformasi Digital, Populisme, dan Solusi Jurnalisme	24
Literasi Visual sebagai Penangkal Foto Hoaks di Era Digital	32
Peran Media Dalam Mewujudkan Demokrasi Damai Melalui Gerakan Literasi Digital	39
ANAK MUDA	
Generasi Milenial Golput, Kok Bisa?	47
Kolaborasi Literasi Digital Bukan Kerja Picisan	52
Literasi Digital dalam Era Disrupsi	66
Suara Generasi Milenial dan Demokrasi Digital	70
Tantangan Membangun Perdamaian di Era Milenial	83
MEDIA SOSIAL	
“Trending Topic” dan Hilangnya Ruang Publik yang Sehat	94
Apa yang Bisa Kita Lakukan untuk Media Sosial?	100
Fenomena Nurhadi-Aldo dalam Ruang Banal Media Sosial	107
Hidup di Media Sosial bagai Katak dalam Tempurung	111

Mengharap Kehadiran Pakar di Media Sosial	115
Sesat Informasi di Era Informasi	121
Demokrasi Ala Media Sosial di Kontestasi Politik 2019	127

RUANG DOMESTIK

(Mencari) Kedamaian di Tengah Hiruk Pikuk Demokrasi 4.0	137
Emak, Jangan Tabur Benci Di Dadaku	144
Keluarga dan Pendidikan Demokrasi di Era Digital	152
Pendidik Unggul bagi Generasi Milenial	157
Pertemanan : Perbedaan adalah keniscayaan	164
Mendidik Keluarga Digital	171

PERIHAL DEMOKRASI

Digitalisasi Demokrasi vs Demokrasi Digital	176
Etika Media Baru: Pengintegrasian Kebebasan dan Tanggung Jawab demi Demokrasi Damai	180
Keberagaman dan Dinamika Demokrasi Indonesia di Era Digital	188
Mengembangkan Literasi Digital, Merawat Demokrasi yang Damai	195
Menyongsong Demokrasi Damai Indonesia	203
Netizen, Kewargaan Digital, dan Kepemimpinan Digital	210
Overkomodifikasi Konflik: Bahan Bakar Kebencian di Era Digital	218

PROFIL PENULIS	225
-----------------------	-----

Furnalisme Digital



Era Digital, Adu Klikbait, dan Jurnalisme Tabloid

Penulis: Olivia Lewi Pramesti (Japelidi)

Saya teringat curhatan seorang teman yang bekerja di sebuah media nasional. Katanya, dia harus pintar membuat judul yang mengandung clickbait, karena itu akan meningkatkan page view dari berita yang dibuatnya. Kegetiran tersirat melalui kata-katanya ini, “Sebenarnya aku malas membuat judul receh, tapi bagaimana lagi. Kalau nggak begitu, kami nggak bisa bersaing.” Di sisi lain, ketika saya mengajar salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan media massa, banyak mahasiswa saya mengaku selalu terpancing dengan judul-judul lucu, receh, bombastis, meski isinya tidak sesuai. Mereka cukup terhibur dengan judul seperti itu. Receh dalam KBBI adalah turunan dari recean yang berarti uang. Kata “receh” saat ini banyak digunakan

oleh mahasiswa saya untuk menganggap hal yang remeh-temeh.

Cerita di atas merupakan gambaran atas fenomena clickbait. Tak hanya di Indonesia, fenomena ini terjadi di ranah media global. Fenomena ini muncul ketika jurnalisme memasuki era digital di mana pengelola media harus tahu cara meningkatkan traffic dari berita yang mereka buat. Klik dari pengguna pun akan dapat diukur, dan menjadi pemasukan bagi mereka. Menurut Kwak, Hong, & Lee (2018, h. 6), clickbait ini merupakan bentuk baru dari jurnalisme tabloid. Jurnalisme tabloid juga disebut jurnalisme kuning, yang mengutamakan sensasi dan skandal sebagai komoditas. Jurnalisme ini sudah

diperbicangkan pada awal 1800-an, dan pertama kali hadir di Amerika Serikat. Jurnalisme ini dinilai melemahkan jurnalisme profesional karena menyebarkan rumor yang tidak diverifikasi kebenarannya. Disebut tabloid karena merupakan kata tersebut menggambarkan tiga hal sekaligus, yaitu format ukuran surat kabar, periodisasi terbitan, dan tampilan gaya serta isi yang sensasional, menarik, dan khas (Wasserman dalam Rahmitasari, 2013, h. 99).

Clickbait adalah judul yang menjebak, yang biasanya dipakai oleh pembuat konten untuk menarik pembaca. Untuk membuat judul *clickbait* pun, pembuat konten perlu memikirkan rumus tertentu saat membuat judul berita. Menurut Chen, Conroy, dan Rubin (2015, h. 5), karakteristik *clickbait* di antaranya tidak ada penyelesaian kata, menggunakan kata langsung/ajakan, kata provokatif, kata hiperbola/bombastis, bahasa menegangkan, bahasa ambigu, serta kata ganti yang tidak terselesaikan. Beberapa judul *clickbait* seperti “wow”, “astaga”, “ckckc”, “yuk”, dan lainnya. Zaenudin (2018) menyatakan *clickbait* adalah fenomena di media karena memuja-muja page view.

Abhijan Cakraborty (dalam Zaenudin, 2018) mengungkapkan bahwa *clickbait* mengeksploitasi sisi kognitif manusia yang disebut curiosity gap. Curiosity gap adalah kesenjangan pengetahuan yang memiliki konsekuensi emosional. Judul *clickbait* memantik emosional pembaca, mereka terpuaskan emosinya. Menariknya, meskipun sadar bahwa *clickbait* adalah jebakan, mereka tetap mengkliknya. Mereka menganggap judul itu menarik dan menghibur. Ironisnya, judul yang menarik tersebut tidak sesuai isi beritanya. Bahkan, beritanya seringkali hanya berisi informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Fenomena *clickbait* adalah bentuk baru dari jurnalisme tabloid. Penulis berasumsi bahwa di era digital ini, media dalam jaringan (daring) atau online di Indonesia menerapkan jurnalisme tabloid. Asumsi ini merujuk pada judul yang memicu respons emosional dan cenderung sensasional. Tak hanya itu, isi berita pun sering tidak diverifikasi sehingga belum teruji kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan hKitch (dalam Rahmitasari, 2013, h. 100), di mana jurnalisme tabloid sering menyertakan dramatisasi untuk mengagetkan dan memicu

respons emosional pembaca, yang justru sangat dihindari oleh jurnalisme pada umumnya. Bob Franklin (dalam Rahmitasari, 2013, h. 100), pun menyebut bahwa jurnalisme tabloid menghilangkan fungsi jurnalisme sebagai penyedia informasi, sehingga para jurnalis lebih mengutamakan untuk menyampaikan berita yang menarik bagi publik daripada berita yang ada di ranah publik.

Penelitian Awaluddin Yusuf (dalam Rahmitasari, 2013, h. 101) menunjukkan bahwa jurnalisme tabloid dulu dipraktikkan oleh surat kabar. Ia meneliti headline empat surat kabar tabloid di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, yaitu Pos Kota, Lampu Merah, Merapi, dan Meteor. Keempat surat kabar tersebut menggunakan bahasa sensasional dalam headline untuk menarik pembaca. Bila kita menilik fenomena clickbait, headline ini dimunculkan dalam judul berita di media online. Fungsi headline di surat kabar, dan judul di media online relatif sama, yakni menarik perhatian pembaca. Hal ini membuktikan bahwa saat ini media online tengah mempraktekkan jurnalisme tabloid. Menariknya, hal ini dilakukan oleh baik media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers maupun yang belum. Meski penulis belum meneliti seberapa banyak media online yang melakukan ini, ada kecenderungan di kalangan media online menggunakan judul yang sensasional.

Tantangan Jurnalisme di Era Clickbait

Internet menjadi angin segar bagi pelaku media. Ia memberikan akses tak terbatas ruang dan waktu kepada pembaca. Selain memangkas ongkos produksi yang mahal, media online ini juga lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Media-media tradisional pun berbondong-bondong memanfaatkan internet sebagai sebagai kanal informasi.

Menjamurnya media online di Indonesia mendorong tingginya fenomena clickbait. Fenomena ini pun turut dipengaruhi oleh pengguna yang memanfaatkan media online sebagai media yang dikonsumsi. Riset Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia (APJII) pada 2017, total pengguna internet meningkat dari 132,7 juta (2016)

menjadi 143,26 juta. Dari jumlah tersebut, 89,35 persen pengguna menggunakannya untuk chatting, media sosial, mengunduh gambar/video, menonton gambar/video, serta mencari informasi. Berdasar riset tersebut, fenomena clickbait kemungkinan besar akan terus mewarnai jurnalisme media online di Indonesia, seiring bertambahnya pengguna internet.

Fenomena clickbait memiliki konsekuensi bagi jurnalisme di Indonesia, terutama berkaitan dengan akurasi data. Temuan riset dari Kwak, Hong, & Lee (2018) mengenai clickbait di Korea Selatan cukup menarik. Di Korea Selatan, clickbait dikenal dengan sebutan news abuse. News abuse adalah penyalahgunaan berita dengan cara menyalin berita yang viral (menarik dan sensasional) tanpa izin, dan menyebarkannya kembali dengan harapan akan diklik pengguna. Berita yang viral tersebut biasanya adalah berita ringan. Biasanya peningkatan news abuse ini dilakukan pada pukul 18.00 ketika masyarakat memiliki waktu luang untuk membaca berita.

Berkaca dari fenomena clickbait dan news abuse di Korea Selatan, sebenarnya gejala ini juga sudah terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya ketika masyarakat digegerkan oleh berita mengenai aktivisi Ratna Sarumpaet yang dikabarkan dipukuli hingga babak belur. Berita yang terjadi pada Oktober 2018, isu tersebut sempat menjadi trending topic di semua media. Semua media mengarahkan pada judul bahwa Ratna Sarumpaet babak belur, meski yang bersangkutan belum bisa dikonfirmasi secara langsung. Judul berita di berbagai media pun dibuat bombastis, seolah-olah media menggiring opini publik untuk percaya bahwa berita tersebut benar. Perbedaannya dengan di Korea Selatan, konteks news abuse di Indonesia dilakukan dengan menyebarkan berita viral, namun pemilihan narasumber dari berbagai media tetap berbeda, dengan kata lain tidak sekadar salin-tempel berita dari situs lain.

Teknologi memang memungkinkan informasi dapat tersebar luas. Namun, teknologi menyebabkan akurasi data dipertanyakan. Kecenderungan yang terjadi, hanya untuk meningkatkan traffic, redaksi mengesampingkan fakta dan data yang lengkap. Meski sebuah

informasi belum diverifikasi, redaksi memutuskan mengunggahnya terlebih dahulu. Narasumber pun, tanpa menimbang kompetensinya, dimasukkan terlebih dahulu dalam beritanya. Bagi redaksi, berita cenderung dibuat untuk menaikkan jumlah pembaca terlebih dahulu, setelah itu baru mencari data pelengkap untuk berita selanjutnya. Sering kali, berita di awal sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini menyebabkan media akan meralat berita yang sudah dinaikkan. Ini membuktikan bahwa kecepatan masih menjadi faktor utama dalam proses produksi berita di media daring (online). Kovach & Rosenstiel (2014, h.121) pun menyatakan demikian, "Simply put, the Web makes redistributing content so convenient, and accelerates the pace of news flow so much, that the combination increases the potential that erroneous information will be passed on." Web membuktikan pendistribusian konten secara gampang dan nyaman, mempercepat laju pencarian berita, sehingga meningkatkan kekeliruan informasi.

Tentu saja informasi yang tidak berlandaskan pada akurasi data membuat masyarakat panik. Padahal, esensi kegiatan jurnalisme (Kovach & Rosenstiel, 2014, h. 30) memberikan informasi bagi warga negara untuk bebas, serta dapat mengatur dirinya sendiri dengan sejahtera. Jurnalisme membuat bahasa umum yang bisa diterima masyarakat dan mencari akar persoalan dalam masyarakat. Jurnalisme menjadi layanan bagi masyarakat mengenai pengetahuan dan koneksi sosial. Berdasarkan pernyataan Kovach & Rosenstiel dapat disimpulkan bahwa jurnalisme menitikberatkan pada informasi yang mengandung kebenaran yang menyejahterakan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa fenomena clickbait memudahkan esensi jurnalisme. Hal ini pun sejalan dengan karakteristik jurnalisme tabloid, di mana tujuan utamanya adalah hanya menampilkan berita sensasional, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Persoalan akurasi data merupakan cerminan dari terpankasnya

kerja jurnalistik. Jurnalisme tradisional menawarkan proses akurasi dan verifikasi data secara terus menerus. Kerja jurnalistik dikerjakan serius, karena mengemban amanat besar, yakni sebagai penyampai kebenaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses pencarian fakta pun dilakukan dengan berbagai cara, yakni observasi langsung, wawancara, hingga riset dokumentasi. Narasumber pun tidak asal pilih. Narasumber dipilih betul-betul yakni mereka yang memang kompeten dan terlibat dalam peristiwa.

Jurnalisme tradisional menampilkan berita dengan fakta utuh. Hal ini berbeda dengan karakteristik media daring, yang menyediakan sedikit waktu untuk memeriksa fakta. Kecepatan berita yang diunggah justru membuat media rentan akan komentar dari pengguna. Komentar terbentuk berdasarkan persepsi berbeda dari pengguna. Tak menutup kemungkinan juga, komentar itu dapat digunakan media online menjadi sumber berita. Hal ini pun makin menjauhkan media dari pengecekan fakta yang paling dalam. Kovach & Rosenstiel (2014, h. 73), menyatakan, "An open networked media environment also means that more rumors, more misinformation are passed along in public—creating more confusion for users and more pressure on news organizations". Dari pernyataan ini, mereka menegaskan bahwa rumor, serta berita tidak benar, memberi tekanan pada redaksi. Tekanan yang dimaksudkan adalah tekanan untuk memilah berita yang benar dan palsu. Konsekuensinya, redaksi harus memperkuat verifikasi.

Komitmen Verifikasi

Komitmen untuk melakukan verifikasi secara terus menerus harus dipegang teguh oleh semua pekerja media, termasuk media daring. Komitmen ini bukanlah persoalan mudah lantaran media tak lepas dari tujuannya, yakni bertahan hidup dengan pendapatannya. Kovach dan Resenstiel (2014, h. 126-140) memberikan panduan menerapkan prinsip intelektual dari kegiatan jurnalisme.

Pertama, jangan pernah mengarang fakta atau menambahkan fakta apa pun bila belum terbukti kebenarannya.

Kedua, jangan menipu khalayak. Ketika seseorang melaporkan sebuah

peristiwa, tapi tidak menyaksikannya, jurnalis perlu memberitahu hal tersebut pada masyarakat. Sumber data jurnalis pun perlu diberitahukan kepada publik.

Ketiga, transparan. Jurnalis harus memberikan informasi yang kredibel.

Keempat, mengandalkan laporan yang dilakukan sendiri.

Kelima, kerendahan hati untuk lebih terbuka saat mendengarkan cerita orang lain di mana hal tersebut dapat mengubah persepsi jurnalis akan sesuatu. Kerendahan hati ini juga berkaitan dengan kemampuan diri untuk terus belajar memahami sebuah peristiwa sehingga terhindar dari kesalahan.

Menyampaikan fakta dengan benar dan verifikasi adalah esensi kegiatan jurnalisisme. Kode etik jurnalistik tetap harus menjadi pegangan semua pekerja media dengan mengesampingkan kepentingan apa pun. Seorang rekan yang bekerja di salah satu media online di Solo mengungkapkan, tantangan media online adalah mendatangkan pembaca. Meskipun demikian, kode etik tetap harus dipegang dalam membuat berita maupun judul yang berbau clickbait. Judul clickbait yang sesuai kode etik jurnalistik pun juga bisa mendatangkan pembaca, katanya.

Tantangannya saat ini adalah apakah pekerja media mau berkomitmen untuk disiplin pada verifikasi? Salah satu elemen jurnalisisme menyatakan bahwa jurnalisisme bertanggung jawab pada hati nurani. Jurnalisisme merupakan profesi yang mengemban misi mulia, yakni membawa kebenaran bagi publik. Profesi ini bertumpu pada kode etik jurnalistik, di mana dalam prakteknya tidak ada yang bisa mengatur sebaik mana atau seburuk mana kegiatan jurnalistik dilakukan. Penilaian ini ditentukan oleh masing-masing pihak, dan semua berbalik pada diri untuk mengilhami arti profesionalitas dari profesi ini. Profesionalitas pun tak sekadar mahir dalam berbagai teknik jurnalistik, melainkan mampu menerapkan etika dalam kegiatan jurnalistik. Di sisi lain, internet merupakan ruang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi produsen. Hanya saja, tidak semua dari produsen berita memahami

profesi jurnalis yang tunduk pada kode etik jurnalistik.

Media daring di Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas, karena kehadirannya berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Media sebaiknya dapat menyeimbangkan fungsi sosial dan ekonominya, yakni mencerdaskan masyarakat dan mencari keuntungan. Kedua fungsi ini memang akan terus mengikuti, hanya saja bagaimana pelaku media mampu meletakkan profesionalisme mereka untuk bisa menjalankan kedua fungsi ini. Media perlu menyadari bahwa masyarakat makin kritis dan cepat menanggapi sebuah isu yang dimunculkan. Akan lebih indah ketika media terus membawa misi baik untuk menyebarkan kebenaran dalam masyarakat. Demokrasi di era digital pun akan lebih sehat pastinya.

Daftar Pustaka

- Chen, Y., Conroy, N. dan Rubin, V. (2015) Misleading online content: Recognizing clickbait as “false news”, <https://www.researchgate.net/publication/283721117_Misleading_Online_Content_Recognizing_Clickbait_as_False_News>
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014) *The elements of journalism*, New York: Three Rivers Press
- Kwak, K. T., Hong, S. C. & Lee, S. W. (2018) An analysis of a repetitive news display phenomenon in the digital news ecosystem, *Sustainability*, 10(12), 4736. DOI: 10.3390/su10124736
- Rahmitasari, D., H. (2013) Jurnalisme tabloid di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 99- 111
- Zaenudin, A. (2018) Clickbait jebakan judul berita yang menipu pembaca, *Tirto.id*, <<https://tirto.id/clickbait-jebakan-judul-berita-yang-menipu-pembaca-cF7b>>

Narasi Damai Jurnalis Warga

Penulis: Edi Santoso (Japeli)

Suharti tak pernah membayangkan akan menjadi jurnalis. Dia hanya lulusan SMP, tinggal di sebuah desa di pinggiran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sampai kemudian datang seorang aktivis yang memotivasi Suharti untuk bergabung dalam komunitas jurnalis warga. Dengan penuh kesabaran, dia belajar menulis, mengirimkan berita, hingga bisa tayang di sebuah portal berita lokal (suarapaguyangan.com).

Suharti kini jauh lebih percaya diri. Tak semata yakin bisa menulis berita, tetapi juga percaya bahwa jurnalisme adalah jalan pengabdian. Sebagai jurnalis warga, tentu saja, dia tak dibayar. Meski sepenuhnya aktivitas itu bersifat sukarela, tapi dia bahagia karena bisa membantu sesama. Yani, tetangganya, adalah orang yang merasakan jasa baik Suharti.

Gadis yang mulai menginjak dewasa itu mengidap polio. Kemiskinan orang tuanya tak memungkinkan Yani punya kursi roda. Suharti trenyuh, kemudian menuliskan kisah Yani menjadi cerita human interest. Setelah dimuat di suarapaguyangan.com, banyak pembaca yang berempati. Para donatur pun berdatangan. Kini, Yani tak hanya punya kursi roda, rumah orang tuanya yang reot pun tergantikan oleh rumah yang lebih layak huni.

Di Kabupaten Brebes, geliat jurnalisme warga tak lepas dari kepeloporan Bahrul Ulum, pria muda yang kenyang asam garam di dunia aktivisme sosial. Alumnus Universitas Jenderal Soedirman inilah yang pertama kali merintis terbentuknya komunitas jurnalis warga di Brebes, lewat grup Facebook

Celoteh Brebes Membangun (CBM). Bahrul Ulum meyakini, media sosial membawa peluang yang besar untuk mendorong partisipasi masyarakat, melalui kemampuannya menciptakan opini publik.

Bahrul Ulum mengoptimalkan grup Facebook tersebut dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Grup ini mempunyai lebih dari 21 ribu anggota. Hampir semua pejabat Pemerintah Daerah Brebes tergabung dalam grup ini, baik bupati ataupun jajaran Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD).

Dari dunia maya, berbagai aksi sosial menjadi nyata. Bagi Bahrul, media sosial bisa menjadi ruang kritik. "Kami mengkritik dengan memberikan solusi. Kritik yang membangun," ujarnya. Demikian Bahrul menunjukkan perspektif konstruktifnya sebagai warganet. Salah satu contoh aksi besarnya melalui media sosial, dia menggerakkan aksi penanaman mangrove di lahan seluas 25 hektare di Pantai Brebes. Di bidang pendidikan, bersama komunitasnya Bahrul tak pantang lelah untuk terus mengembalikan anak putus sekolah ke ruang kelas. Di bidang lingkungan, Bahrul dan kawan-kawan turut serta dalam program pembuatan jamban murah bagi warga.

Suharti dan Bahrul adalah dua dari beberapa jurnalis warga di Kabupaten Brebes yang mengabdikan diri di jalur sunyi. Internet dan media sosial, bagi mereka, adalah peluang untuk menggalang kolaborasi, lebih dari sekadar tempat unjuk eksistensi. Sosok mereka seperti antitesis warganet yang hanya membuat gaduh dunia maya dengan berbagai sampah informasi, baik berupa disinformasi (hoaks, fake news) ataupun ujaran kebencian (hate speech).

Kehadiran internet pada awalnya memang membawa optimisme, bahwa demokratisasi media (massa) semakin nyata. Dengan internet, siapa pun bisa menjadi produsen dan penyebar informasi. Era dominasi pemilik modal dalam bisnis informasi perlahan luruh. Ide jurnalisisme warga semakin menemukan bentuknya, terutama sejak kemunculan media sosial. Akses internet yang makin mudah dan murah, membuat orang semakin terkoneksi. Ide kolaborasi dalam berbagi informasi sungguh mudah terealisasi.

Namun, jurnalisisme lebih dari sekadar memproduksi atau mereproduksi dan membagi informasi. Jurnalisme adalah sebuah laku moral, kata wartawan senior Goenawan Muhamad. Dalam studi jurnalisme, jurnalis itu 'defining agency', karena di tangan jurnalislah fakta dicari, disusun, dan diberi makna. Jurnalis memberikan perspektif terhadap realitas. Tanpa landasan moral, praktik produksi dan distribusi informasi hanya akan membawa masalah baru, yakni maraknya konten bohong dan narasi penuh negasi.

Harapan akan demokratisasi komunikasi massa seperti pupus, ketika yang marak di internet adalah praktik disinformasi: fakta dan fiksi sulit dibedakan. Dalam istilah Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2010), teknologi telah membantu kaburnya batas antara kenyataan dan rekaan, sehingga porsi tanggung jawab untuk tahu yang benar dan yang tidak, kini berada di tangan kita sebagai individu.

Praktik disinformasi ini yang kemudian memperkuat fenomena post-truth, ketika orang lebih diarahkan oleh prasangka ketimbang fakta. Saking populernya, Oxford Dictionaries menyebut 'post-truth' sebagai word of the year pada tahun 2016. Singkatnya, di era digital ini, masalah kita adalah 'krisis kepercayaan'. Ini terjadi, justru di saat orang berlimpah informasi. Jika dulu masalah manusia adalah minimnya kabar, kini yang terjadi justru sebaliknya. Kita berlimpah informasi, tetapi krisis kepercayaan.

Jurnalisme warga

Menurut Nip (2006), jurnalisme warga merujuk pada aktivitas produksi dan publikasi berita tanpa campur tangan atau partisipasi jurnalis profesional atau media yang sudah mapan. Nah et.al (2017) juga menggambarkan jurnalis warga sebagai jurnalis amatir atau jurnalis akar rumput (*grassroots journalist*). Lebih lanjut dia mengatakan, teknologi komunikasi baru telah meningkatkan peran warga, mengarahkan orang untuk menjadi jurnalis warga, misalnya dengan menjadi *blogger*, *wikimedian*, jurnalis siber. Sejatinya, kata Rutigliano (2007), blogging merupakan awal dari berita daring (online) yang berorientasi pada warga. Senada dengan itu, Ryfe dan Mensing (2010) mendeskripsikan jurnalisme warga sebagai '*blogging, opensource*

newsgathering, wikis, informational “mash-ups” and citizen journalism sites’.

Jurnalisme warga dipahami sebagai bentuk reportase yang melengkapi, bukan mengganti, liputan berita media arus utama (Jurrat, 2011). Dalam banyak kasus, media warga berposisi sebagai bentuk resistensi atas narasi hegemonik media mainstream (Rodríguez, 2011). Jurnalisme warga bisa berperan sebagai jurnalisme alternatif dan independen, sebagaimana disampaikan Forde (2009) ataupun Atton dan Hamilton (2008), yang menggambarkan jurnalisme alternatif pada realitas di mana jurnalis komunitas, baik yang terlatih atau tidak, melaporkan suara-suara yang selama ini tak terwakili di media arus utama.

Praktik jurnalisme warga semakin signifikan seiring dengan pertumbuhan internet yang memberikan peluang akses media lebih luas pada masyarakat. Realitas ini antara lain ditandai oleh tren ‘user generated content’ (Chung, et al, 2017), di mana warga secara sukarela memproduksi dan membagi informasi. Di sini, jurnalis warga diwakili para blogger atau para warganet secara umum yang memproduksi atau mereproduksi pesan melalui media sosial.

Salah satu sisi strategis jurnalisme warga adalah pada kemampuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa riset mengonfirmasi hal ini, antara lain yang ditulis Mody dan Bella (2011), bahwa proyek jurnalisme warga telah mendorong partisipasi sipil dalam isu kemanusiaan di Darfur. Begitu juga dengan penelitian Nah et al (2017) yang menegaskan bahwa praktik jurnalisme warga memiliki efek langsung dalam mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan jiwa kerelawanan dalam berbagai organisasi sosial.

Narasi Damai

Sebagai sebuah praktik, jurnalisme warga memang punya banyak wajah. Ada yang berjalan secara individual, ada yang berjejaring dalam komunitas seperti di Kabupaten Brebes. Kelebihan mereka yang berjejaring, ada upaya peningkatan kapasitas, termasuk penanaman komitmen etis dalam berbagi informasi. Jika prinsip-prinsip jurnalisme

diterapkan, maka tidak mungkin ada hoaks. Karena sudah menjadi nilai dasar dalam jurnalisme, setiap berita harus berangkat dari fakta. Karena alasan ini pula, istilah 'fake news' banyak dikiritik, karena mengandung paradoks. Berita tak mungkin palsu. Kalau ada yang palsu, maka tak bisa disebut sebagai berita. Begitu logikanya.

Visi dalam jurnalisme warga menjadi penting. Ini menjelaskan apa yang menjadi muara dari segala aktivitas jurnalisme mereka. Seperti di Brebes, Bahrul Ulum menegaskan visinya adalah untuk 'memberdayakan masyarakat', sesuai dengan nama komunitasnya: Celoteh Brebes Membangun. "Saya pakai nama 'celoteh', karena ini (pada dasarnya adalah) perbincangan. (Dan kami) pakai nama 'membangun', karena tujuannya memang membangun, memberdayakan. Jadi, kami mengkritik dengan memberi solusi," kata dia.

Dalam visi pemberdayaan seperti itu, satu aspek yang paling dihindari para jurnalis warga, (mestinya) adalah narasi 'perang' terhadap liyan. Karena, pemberdayaan berarti menyatukan, bukan menceraiberaikan. Dengan kata lain, memberdayakan berarti pula membawa visi atau narasi damai. Kohesi, bukan segregasi sosial.

Kita memang tak bisa menutup kenyataan, aspek 'individuasi' dalam jurnalisme warga rawan penyimpangan. Sementara pemahaman etis kita rendah, tren menjadi otonom dalam berjejaring dan membagi informasi terus menguat. Akhirnya, yang kita lihat, dalam ruang publik dunia maya ini, penuh dengan konten yang jauh dari etika. Pesan kebencian (hate speech) misalnya, kini semakin meningkat jumlahnya di ranah online.

Di Inggris, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari Freedom of Information Request yang dibuat oleh Metropolitan Police). BBC pernah menyebut tahun 2015 sebagai 'The Year that Angry Won The Internet', berdasarkan data yang menunjukkan tingginya

pesan kebencian di internet. Sebagai contoh, berdasarkan analisis Demos, rata-rata 480 ribu pesan berisi kebencian ras di tweet-kan melalui Twitter tiap bulan pada tahun 2015. Bandingkan dengan angka 10 ribu pada tiga tahun sebelumnya. Dalam pandangan UN Human Rights Council Special Rapporteur on Minority Issues (HRC, 2015), pesan kebencian di ranah online menjadi tantangan baru.

Sementara statistik yang memberikan gambaran global tentang fenomena ini belum tersedia, platform jejaring sosial dan organisasi yang diciptakan untuk memerangi kebencian telah menunjukkan bahwa pesan kebencian yang disebarkan secara online semakin umum dan telah menimbulkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut HateBase-aplikasi berbasis web yang mengumpulkan contoh pesan kebencian online di seluruh dunia, sebagian besar kasus kebencian atas individu terjadi berdasarkan etnis dan kebangsaan. Hasutan untuk kebencian yang berfokus pada agama dan kelas juga telah meningkat.

Di Indonesia memang belum ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan pesan kebencian di ranah online. Namun, beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalahpahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial. Orang yang menerima pesan tanpa memahami persoalan sesungguhnya kemudian tersulut amarah, dan turut menyebarkan pesan itu. Pesan yang sambung menyambung itu kemudian memunculkan kemarahan massa, hingga mengakibatkan perusakan sebuah tempat ibadah. Sebelum kasus ini, pesan kebencian juga marak terutama pada saat hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Pilpres 2014 tercatat sebagai kontestasi yang menyedot perhatian besar para netizen. Dua kelompok pendukung saling berhadapan dan sama-sama 'militan'. Dari sinilah kemudian populer istilah 'hater', karena memang pesan-pesan kebencian diproduksi dan direproduksi secara massal oleh masing-masing kubu untuk menegasikan kelompok lainnya. Suasana ini tak serta merta meredup seiring berlalunya pilpres. Pada saat menjelang pilkada DKI 2017 misalnya, suasana pilpres 2014 kembali

terjadi. Masing-masing kelompok saling serang dengan pesan-pesan kebencian di ranah online. Dan kini, menjelang pemilu 2019, kecenderungan serupa juga terulang.

Regulasi dan Literasi

Dari praktik jurnalisme warga yang bervisi damai, kita mencatat bahwa hal yang paling penting bagi para netizen adalah kecerdasan bermedia (literasi media). Netizen tak hanya bisa mengakses dan menggunakan media, tetapi juga memahami dampak konten media bagi individu ataupun kehidupan sosial. Mereka paham bahwa dunia maya adalah ruang publik, sehingga segala tingkah lakunya selalu berdimensi etis. Ada banyak pilihan sikap dalam bermedia sosial. Mereka yang memiliki tingkat literasi tinggi akan memilih jalan konstruktif, dengan mengunggah konten-konten yang membawa manfaat bagi masyarakat, sebagaimana pilihan para jurnalis warga di Kabupaten Brebes. Tak hanya anti-hoax dan hate speech, mereka bahkan sudah menggariskan semacam standar menjadi jurnalis warga. Mereka membuat istilah “story of change”: sejauh mana tulisan itu membawa perubahan yang baik dalam masyarakat.

Dalam kondisi yang memang tingkat literasinya rendah, kadang pendekatan hukum menjadi tak terelakkan. Di Indonesia, terdapat seperangkat regulasi yang membatasi orang dalam bertukar informasi, misalnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika melihat maraknya pesan kebencian di Indonesia, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan edaran khusus yang memberi ancaman terhadap pelaku penyebar kebencian. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Aspek regulasi memang diperlukan, tetapi tak akan pernah cukup untuk mengendalikan disinformasi dan pesan kebencian. Sanksi

hukum lebih berfokus pada wilayah hulu, yakni mereka yang memproduksi pesan kebencian. Dalam logika 'supply and demand', para produsen hoaks dan pesan kebencian itu eksis karena banyak yang menikmatinya. Karena itu, dalam jangka panjang, strategi kultural, dengan terus meningkatkan literasi media, akan lebih menjanjikan.

Daftar Pustaka

- Atton C and Hamilton JF.2008. *Alternative Journalism*. London: Sage.
- Chung, Deborah S & Nah, Seungahn. 2017. Conceptualizing citizen journalism: US news editors' views. *Journalism* 18 (1): 1-19
- Deacon, Liam. 2015. Massive Increase In Arrests For 'Hate Speech' On Social Media, diakses pada 6/11/2016 di <http://www.breitbart.com/london/2016/06/04/massive-increase-in-arrests-for-hate-speech-on-social-media/>
- Forde S .2009. What's so alternative about 'alternative' journalism? Journalism education in the digital age: Sharing strategies and experiences. *Paper presented at the JEA conference, Perth, WA, 30 November–2 December.*
- Jurrat N. 2011. *Mapping Digital Media: Citizen Journalism and the Internet*. London: Open Society Foundations.
- Kovach, Bill & Rosentiel, Tom. 2010. *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. New York: Bloomsbury
- Mody, Bella. 2011. Student Civic Engagement with Humanitarian Disasters: Collaborative Cross-National Research on Darfur Reporting. *Journal of African Media Studies* 3 (3): 349-366.
- Nah, Seungahn. et.al. 2017. Citizen journalism practice increases civic participation. *Newspaper Research Journal* 38(1): 62–78
- Nip JYM. 2006. Exploring the second phase of public journalism. *Journalism Studies* 7(2):212–236.
- Rodríguez C, Ferron B and Shamas K. 2014. Four challenges in the field of alternative, radical and citizens' media research. *Media, Culture & Society* 36(2): 150–166.
- Rutigliano L.2007. Emergent communication networks as civic journalism. In: Tremayne M(ed.) *Blogging, Citizenship, and the*

Future of Media. London: Routledge

Ryfe DM and Mensing D. 2010. Citizen journalism in a historical frame.

In: Rosenberry J and St. John B III (eds) *Public Journalism 2.0:*

The Promise and Reality of a Citizen-Engaged Press. New

York: Taylor & Francis

Literasi Digital Dalam Berita Daring Tentang Papua di Era Demokrasi

Penulis: Unggul Sagena (SAFENet)

Demokrasi di Papua?

Dalam konteks bernegara dan berbangsa Indonesia, dengan konsep “dari Sabang hingga Merauke”, tentu tak salah memberitakan pembangunan di ujung timur Indonesia, yakni Papua. Pulau kedua terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia ini dihuni penduduk asli sub-Melanesia (Pasifika) yang menjadi bagian dari Indonesia dengan dominasi ras Melayu.

Sebab pembangunan infrastruktur memang nyata adanya, ada bentuknya. Namun itu hanya salah satu dari

beberapa masalah di Papua yang membutuhkan solusi, yang menurut salah satu peneliti LIPI, Aisyah Putri Budiarti, ketika berdiskusi soal Papua pada acara yang diadakan Amnesty Internasional di Jakarta, 14/2/2019 lalu.

Hal ini ditambahkan masalah penting lain yaitu perlunya demokrasi, sebagaimana juru bicara gerakan pembebasan Papua, Surya Anta, pada kesempatan yang sama. Baginya, dalam demokrasi memuat hak untuk bebas berekspresi termasuk menentukan nasib sendiri.

Dalam berdemokrasi saat ini, Papua memiliki sistem yang khas yang

diakui. Sistem noken yang menjadi ciri khas demokrasi di Papua. Ada dua praktik sistem noken di Papua yang telah diakui dan disahkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 ini.

Pertama, surat suara yang dicoblos diletakkan di sebuah tas noken (tas khas Papua yang terbuat dari kulit serat kayu) bukan di dalam kotak suara. Kedua, kepala suku memilih untuk dan atas nama warga pemilik hak pilih yang merupakan anggota sukunya.

Beberapa suku dan komunitas adat di Papua menganut sistem pemilihan “diwakilkan” melalui kepala adat atau kepala suku dalam menentukan pilihan politik. Bukan “one man one vote” di dalam bilik suara. Di sana ada unsur musyawarah untuk mufakat dan bagian dari adat istiadat yang saat ini diakui pula hak dan kewenangannya sebagai bagian dari masyarakat adat yang tercantum di UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagaimana gema demokrasi dapat berjalan di Papua, membutuhkan amplifikasi dari informasi dan berita yang berasal dari tanah Papua. Celakanya, yang tersebar dari bumi Papua hanya “yang baik-baik saja”. Padahal begitu banyak persoalan, termasuk praktik di atas yang sedikit sekali muncul di permukaan. Komedian asal Papua, Arie Kriting pernah berkata, “pemerintah harus jujur, agar dapat melihat permasalahannya, bukan menutupinya.” Soal “baik-baik saja” ini memang terkait citra di mata komunitas internasional, katanya pula.

Soal informasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan bahwa akses jurnalis terhadap Papua (datang ke lokasi kejadian maupun mendapat informan langsung dari masyarakat) sangat sulit. Terutama daerah yang dijaga oleh aparat seperti Nduga. Apalagi, media nasional jarang mengirimkan personel ke Papua dikarenakan keterbatasan sumber daya finansial, terkait situasi dan kondisi logistik dan akses informasi yang mahal. Akibatnya, publik sulit mengetahui informasi yang ada di Papua.

Media Daring “Siluman”?

Amplifikasi informasi ini di era digital seharusnya tidak sulit. Ketika masyarakat lokal mampu mengakses Internet dan media sosial dan terliterasi bagaimana akses penggunaan dan perilaku penggunaannya.

Kebutuhan informasi dari masyarakat lokal, ataupun jurnalis yang berada di Papua akan menjadi informasi yang berimbang. Bukan hanya dari satu sisi “narasi tunggal Jakarta” atau dari informasi aparat keamanan dan tentara yang bisa dihubungi oleh media lokal maupun internasional. Mengingat akses informasi hanya diperkenankan berasal dari yang berwenang.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi, menentukan pilihan, dan menyuarakan keinginan, adalah hal yang fundamental dan dilindungi. Dengan demikian, peran internet (berita jurnalistik) yang kredibel dan media sosial (opini/kejadian yang dialami) faktual sangat penting di era demokrasi digital yang damai untuk Papua dan Indonesia pada umumnya.

Celakanya, informasi di Internet pun tak luput dari “citra” dan “sensor”. Awal Desember 2018 lalu, Tirto bekerjasama dengan Tabloid Jubi mencatat setidaknya ada 18 media “siluman” penyebar kabar soal Papua yang kredibilitasnya diragukan. Angka ini belum memuat beberapa media yang menggunakan platform blog seperti wordpress dan blogspot.

Dalam laman khusus, Tirto membongkar beberapa media yang tidak memiliki kadar jurnalistik dan bahkan melakukan pembohongan melalui wawancara tokoh Papua fiktif. Beberapa media ini juga ternyata ada yang dimiliki oleh satu orang. Misalnya enam media berbahasa Inggris yang sengaja diciptakan dengan dalih “memperbaiki citra Indonesia di mata internasional terkait Papua, agar orang-orang luar negeri yang sedang mencari berita tentang Papua bakal menemukan media pencitraan tersebut”. Hal ini dikatakan sendiri oleh Arya Sandiyudha, seorang staf ahli DPR dan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika dihubungi redaksi Tirto via telepon.

Ujaran kebencian dan konten negatif yang merusak upaya diskursus soal Papua banyak tercecer di ranah maya. Dewan Pers mencatat, jumlah situs daring yang mengaku sebagai situs berita berjumlah 43.000 dan dari jumlah tersebut hanya 200-an situs yang terverifikasi—beberapa lainnya terdaftar sebagai anggota AJI. Sisanya adalah platform yang mendaku sebagai media.

Cerdas Membaca dan Menulis Soal Papua

Literasi digital adalah salah satu komponen penting dalam mencerna sebuah berita. Kemampuan paling sederhana ialah membedakan antara produk jurnalistik dengan utaraan opini yang seringkali tidak kredibel.

Selain pembaca, produsen tulisan perlu sadar atas perannya. Media berupa blog harus menulis disclaimer guna mengabarkan bahwa isi konten situs tersebut merupakan opini, pengalaman pribadi, dan tidak dalam rangka menyerupai media arus utama. Sebab ia akan rentan disalahgunakan pembaca sebagai rujukan yang benar. Apalagi jika media blog opini tersebut berisi pemutarbalikan fakta yang bertujuan menggiring opini publik. Dengan demikian, warganet yang tidak berada di Papua sendiri dapat saja menyimpulkan sesuatu yang salah.

Ketika berita pembakaran masjid di Tolikara beredar luas, hoaks mengiringinya. Padahal jika kita mampu melakukan kontak dan mengakses informasi ke sumber di Papua, informasinya bisa saja 180 derajat berbeda. Dalam sistem demokrasi, pertentangan pendapat begitu lumrah. Begitu pula apabila membahas tentang Papua. Isu mengenai separatisme, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi, hingga potensi pariwisata dan kekayaan alam; semuanya dibingkai dalam perspektif yang beragam. Munculnya tren konsumsi dan produksi informasi secara daring perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis agar tidak terjebak pada opini yang tendensius dan meruyak demokrasi.

Dalam hal ini, baik pembaca dalam maupun luar negeri ketika mencari berbagai berita mengenai Papua perlu pandai mencerna. Laku-tindak membagi berita dengan kemudahan-kemudahan tombol share di



laman media daring ke platform media sosial dan chatting membuat penyebaran berita menjadi lebih masif. Diperparah pula dengan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk termakan judul clickbait dan tergesa mempercayai kabar yang sesuai dengan persepsi atau keyakinan pribadi.

Tatkala menemukan portal berita, pembaca diimbau untuk mengecek rubrik “tentang kami” berikut susunan redaksinya. Jangan mempercayai platform berita yang tidak mencantumkan dengan jelas dan benar alamat kantor atau nomor yang bisa dihubungi. Selain itu, pembaca harus jeli menilai isi konten. Ketiga, waspadai situs berita yang mencoba melakukan social engineering dengan memiripkan situsnya dengan nama media tertentu. Jika ingin lebih yakin, Dewan Pers telah menghimpun data mengenai media kredibel yang bisa dicek secara daring via kode QR maupun melalui fitur search.

Kabar dari situs berita siluman dan abal-abal umumnya mengangkat tulisan dan pembingkaihan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Apa yang dituliskan seolah mencitrakan masyarakat Papua hidup aman, damai, dan nyaman, tanpa ada sedikit pun perlakuan dari aparat yang sifatnya menindas. Pada portal serupa juga mengesankan bahwa ada upaya asing atau negara lain yang hendak campur tangan, berniat menjajah, hingga memecah belah.

Urgensi Literasi Digital

Dilihat dari situs webnya, SAFENet mencatat hingga akhir tahun 2018 sudah terjadi 261 kasus menyangkut UU ITE. Bahkan terhitung dari bulan Januari 2019 saja, sudah terjadi empat kasus di Surabaya, Kendari, Mataram, dan Buleleng. Belajar dari kasus yang terjadi, jelas bahwa literasi digital merupakan agenda nasional yang sangat penting. Literasi digital dimaksudkan agar persebaran konten negatif atau hoaks bisa ditekan serta tidak ada celah lagi bagi pengaduan serampangan UU ITE.

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi ialah salah satu agenda nasional yang dibentuk dari beragam komponen masyarakat sipil dan pemerintah. Siberkreasi telah berjejaring dengan komunitas

lokal Relawan TIK Papua serta menyambangi bumi Cendrawasih dengan agenda literasi digitalnya. Relawan TIK di ujung timur Indonesia dapat menjadi mata dan telinga untuk kita yang berada di Ibu Kota. Terlepas siapa presiden yang bakal terpilih nanti, kerja-kerja literasi akan tetap berlanjut.

Niscaya dengan literasi digital dan pemahaman mengenai hak digital, perdamaian di Papua bukan cita-cita yang mustahil dicapai. Pembangunan tidak hanya perlu menysar infrastruktur, namun juga pemberdayaan manusia dan penjaminan atas kebebasan berekspresi. Alih-alih membuat narasi tunggal bahwa Papua baik-baik saja, pemangku kepentingan terkait justru perlu mengajari warga Papua memanfaatkan setiap media dan saluran informasi yang ada untuk bersuara dengan santun dan damai.

Disinformasi Digital, Populisme dan Solusi Jurnalisme

Penulis: Gilang Desti Parahita (Japeli)

Revolusi digital telah mendorong demokratisasi dan perubahan sosial di banyak negara. Di Indonesia, Internet membantu jejaring aktivis untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi terkait upaya penggulingan Soeharto di akhir 1990-an. Penggunaan media sosial secara strategis untuk protes-protes kolektif, dibarengi dengan aksi-aksi riil lainnya telah menggerakkan protes global konektif dan menimbulkan gelombang perubahan, seperti Musim Semi Arab, Occupy Wall Street, Los Indignados, Movement for Black Lives, Zapatista dan Gerakan 19 April di Nikaragua. Internet, terutama

melalui Google, Facebook, Instagram, dan Twitter juga dituding menggelar karpet merah bagi Donald Trump melenggang ke Gedung Putih, dan menjerumuskan warga Inggris dalam referendum untuk memilih keluar dari Uni Eropa (Brexit). Disinformasi politik di ranah digital, terutama melalui media sosial, dijadikan alat oleh sebagian kelompok untuk meraih suara populis di tengah lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kelompok elit.

Bagaimana disinformasi politik (juga misinformasi) pada era digital dikaitkan dengan politik

populis? Apa tawaran solusi dari ranah jurnalisme?

Kognisi, Reproduksi Sosial, dan Eksploitasi Politik Populis

Persoalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dan kaitannya dengan demokrasi tidaklah lagi tentang kebebasan pers dan berekspresi, melainkan adanya forum ide-ide publik terkonsentrasi di tangan sebagian kecil pemilik privat. Di sisi lain, diseminasi informasi terfasilitasi Internet tidak serta-merta mendorong tumbuhnya heterogenitas maupun membantu redistribusi kuasa. Kesenjangan akses warga terhadap teknologi, konten, dan representasi masih menjadi persoalan di banyak negara sehingga informasi terdiseminasi di dunia online justru mereproduksi prasangka dan kesetiaan faksional klasik.

Persoalan lainnya adalah erosi legitimasi terhadap partai-partai politik maupun elit-elit di kekuasaan, bersamaan dengan eskalasi kesenjangan ekonomi. Akibatnya, aktor-aktor politik kharismatik muncul dengan jargon-jargon melawan elit, dan membela rakyat kecil. Kita tak lagi dikonfrontasi dengan pertanyaan mendasar seperti bagaimana melindungi kebebasan pers dari cengkeraman kuasa negara, melainkan siapa yang memiliki “suara populis” dan pengaruh pada politik massa di era demokrasi. Melalui fake news, juga konten-konten lain yang mengandung kebencian dan hasutan, sejumlah aktor politik mengeksploitasi prasangka dan kesetiaan kuno itu didukung dengan penggunaan TIK.

Mudahnya fake news beredar di berbagai media dapat diterangkan oleh studi-studi di bidang kognisi manusia. Sejumlah riset di bidang tersebut telah memperingatkan bahwa orang cenderung mencari, menginterpretasi, menyukai, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Informasi yang berbeda dari preexisting beliefs tersebut membuat orang tidak nyaman, sehingga ia cenderung menghindari atau menganggap sumber informasi itu bias apabila informasi itu inkonsisten dengan sikapnya. Terlebih lagi, saat ini proliferasi konten mengalir tiada henti, sementara media-media legacy semakin bias dan terkonsentrasi. Meski

simplistik, dekontekstual, atau tidak dapat dinalar. Tahun lalu rumor jutaan tenaga kerja asing dari Cina diperkerjakan di Morowali, Sulawesi Tengah, beredar di masyarakat. Rumor itu terbukti tak berdasar, namun kepercayaan orang terhadap rumor itu telanjur sulit diubah.

Meluasnya populisme, dan fake news juga tidak lepas dari algoritma Google dan Facebook yang didesain untuk menghasilkan keuntungan. Outlet-outlet berita online bergantung pada dua raksasa pengontrol distribusi berita itu. Google dan segolongannya membaca perilaku serta menghujani users dengan konten-konten yang selaras dengan minat, keyakinan, dan perilaku users. Media berita, individu-individu, atau siapa saja dapat membuat konten-konten yang disukai Google dan Facebook, terlepas dari konten-konten itu bermutu, kredibel atau tidak, agar kontennya terus menerus mendapatkan hits tinggi. Hypersegmentation algoritma Google dan kawan-kawannya itu lantas menciptakan ruang-ruang gema (echo chamber), enklaf politik, polarisasi, mereproduksi diskriminasi dan eksklusi, dan menyurutkan dialog publik.

Di luar fake news, wacana publik tentang isu-isu bersama kerap direduksi menjadi perdebatan identitas kelompok. Reduksi konteks peristiwa tergolong sebagai misinformasi. Misinformasi pun menjadi duri dalam upaya peningkatan demokrasi berkualitas. Wacana publik tentang Rencana Undang-undang Penghapusan Kekerasan (RUU PKS) terhadap Perempuan hanya dinarasikan oleh media mainstream (terutama televisi) Indonesia secara simplistik sebagai perdebatan antara kelompok anti-Pancasila dan kelompok pro-kebebasan seks. Hal itu diamplifikasi oleh akun-akun di media sosial. Contoh lain reduksi kompleksitas isu publik lainnya ialah kemunculan stereotip “cebong” dan “kampret” untuk kedua pendukung Capres-cawapres pada Pilpres 2019. Fenomena itu mempertautkan populisme dengan rendahnya wawasan maupun literasi digital para pengguna medsos Indonesia: kebiasaan menyerang integritas pembawa pesan ketimbang budaya mendiskusikan isi pesannya itu sendiri. Tanpa bermaksud menimpakan kesalahan sepenuhnya pada jurnalisme, pemusatan pada elemen mikro (personal) dari suatu isu merupakan kebiasaan lama jurnalisme sejak hadirnya teknologi satelit dan televisi di tengah masyarakat, yaitu personalisasi politik.



Kehadiran platform-platform baru memungkinkan siapa saja menyusun konten faktual (maupun fiktional) dan menjadi penyedia informasi alternatif. Ke sanalah warga di negara-negara demokrasi mencari informasi sebagai kompensasi kekecewaan terhadap media arus utama. Dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan organisasi media dan menguatnya konvergensi teknologi di tiap tahapan jurnalisme, jurnalisme kontemporer masih dianggap tidak merayakan keberagaman, bersikap elitis, dan mengabaikan kepentingan publik. Kemenangan Trump sebagai Presiden AS dianggap sebagai salah satu kegagalan terbesar jurnalisme arus utama. Jurnalisme politik kerap terjebak pada horse race reporting, yaitu mengekspos politik pada sikap dan tingkah laku politisi pada suatu waktu dan tempat, perkembangan statistik popularitas kandidat politik pada sejumlah polling selama masa kampanye, dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk diskusi isu publik sesungguhnya. Sementara itu, warga dari kelompok marjinal, dari dulu hingga sekarang, tak sepenuhnya mendapatkan representasi yang seimbang di media arus utama. Tidak mencengangkan apabila informasi alternatif, di luar jangkauan media arus utama, menjadi rujukan warga yang merasa tidak terwakili oleh media. Sayangnya, tak semua informasi di Internet benar, dan warga mencari informasi berdasarkan batasan pengetahuan yang telah dimilikinya.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa krisis demokrasi akibat disinformasi digital melibatkan banyak pihak dan elemen: kelompok kapitalis, raksasa teknologi global, media, politisi, pemegang kebijakan, anggota masyarakat, dan malaise struktural yang telah lama bercokol di masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan demokrasi damai tidaklah semudah membalik telapak tangan. Meningkatkan literasi digital di masyarakat hanyalah seperti memakai lotion anti serangga di hutan lebat yang penuh dengan hewan liar dan serangga. Perlu kerja sama dari berbagai pihak agar demokrasi di era digital berwatak inklusif dan damai, salah satunya dari pers. Pers merupakan sektor di mana warga selalu menaruh harapan untuk menciptakan dialog publik inklusif demi peningkatan kualitas demokrasi.

Mengembalikan Kepercayaan Warga Pada Jurnalisme

Jurnalisme selalu diharapkan mampu mengemban tugasnya sebagai penyedia informasi berkualitas terkait permasalahan publik. Di tengah guncangan terhadap jurnalisme sebagai sebuah prinsip, praktik, profesi, identitas maupun organisasi, jurnalisme juga mengalami krisis kepercayaan. Meluasnya disinformasi, misinformasi maupun lontaran kebencian mengindikasikan berpalingnya audiens dari media berita untuk mendapatkan berita. Akan tetapi, disinformasi digital justru semakin menuntut hadirnya jurnalisme berkualitas di tengah masyarakat kita. Sebab, ke manakah warga akan mencari informasi pembanding untuk meme hoax selain dari sebuah proses pemeriksaan fakta yang ketat oleh komunitas yang dipercayai? Retorika tersebut sejatinya mengandung dua elemen yang perlu diperiksa lebih lanjut: kredibilitas dan kepercayaan terhadap jurnalisme.

Fungsi jurnalis sebagai fact-checker atas rumor yang beredar di masyarakat sebetulnya bukanlah hal baru bagi jurnalis. Memverifikasi informasi dan memeriksa kejujuran dan kesahihan klaim-klaim dari narasumber atau konten suatu dokumen merupakan aktivitas integral dalam jurnalisme. Bedanya, fact-checking dalam penggunaan populer akhir-akhir ini merujuk pada aktivitas memeriksa ketelitian, kesahihan dan ketepatan dari sebuah konten (yang seakan) non-fiksional yang tersebar di masyarakat dalam beragam genre maupun melalui berbagai platform (terutama digital). Berbagai media di Indonesia, terutama media daring (online) telah turut melibatkan diri dalam fact-checking tersebut. Akan tetapi, fungsi itu tidak cukup untuk membuat warga kembali ke jurnalisme dan memercayai media pers. Lantas, apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari proses jurnalistik dan untuk membangun kepercayaan?

Secara akademik, diskusi tentang bagaimana membangun kepercayaan dan mempertahankan kredibilitas serta kualitas jurnalisme di era digital masih terus berlangsung pada berbagai jurnal ilmiah. Lebih jauh lagi, tanpa mengesampingkan faktor-faktor struktural penghambat praktik-praktik jurnalisme bersetia pada publik, banyak jurnalis telah menyadari pentingnya meyakinkan pembaca

dan masyarakat bahwa jurnalisisme adalah kredibel. Untuk membangun kepercayaan tersebut, eksperimen jurnalistik di berbagai belahan dunia berkonsentrasi pada dua prinsip, yaitu transparansi dan partisipasi.

Prinsip transparansi menuntut jurnalisisme untuk membuka sumber-sumber pendanaan produksi berita, menjelaskan proses kerja redaksional dan pemilihan berita, mengakui apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses jurnalistik. Prinsip transparansi pada jurnalisisme Amerika, menurut Bill Kovach dan Tim Rosenstiel, dapat dilacak hingga era 1920'an. Dengan memberitahukan kepada publik siapa sosok dan organisasi di balik berita, bagaimana berita diproduksi, siapa sumber dan apa saja bahan berita, serta terbuka terhadap segala bentuk koreksi dari audiens melalui kolom komentar atau sejenisnya, jurnalis tampak lebih humanis, personable dan relatable, dan karenanya (diharapkan) lebih mudah dipercayai. Riset terbaru menemukan bahwa secara umum, transparansi tidak berpengaruh pada kepercayaan audiens terhadap produk jurnalistik. Alih-alih dinilai positif, transparansi yang menuntut partisipasi pengguna justru dievaluasi secara negatif. Meski begitu, menyediakan hyperlink ke sumber-sumber orisinal, menjelaskan proses seleksi dan framing berita, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan dipandang positif oleh audiens. Pada situasi rutin transparansi tidak menjadi salah satu faktor audiens memercayai produk jurnalistik atau organisasi berita, namun audiens cenderung ingin melihat transparansi media berita manakala krisis melanda media tersebut. Baik jurnalis maupun pengamat harus mencermati jenis transparansi apa yang dapat melayani kebutuhan publik pada berbagai situasi.

Transparansi didukung oleh prinsip partisipasi, yaitu memberikan pembaca suara pada produksi dan pos-produksi berita, terutama dalam hal membuat keputusan-keputusan redaksional juga bisnis, menyertakan keahlian-keahlian pembaca dalam melaporkan, melakukan verifikasi, maupun menyunting dan mengkoreksi berita, serta berkolaborasi dengan outlet media lain, bahkan dengan kompetitor. Jurnalisisme profesional perlu membuka diri terhadap kemungkinan terciptanya "jurnalisisme baru" yang memperbesar keterlibatan audiens produksi maupun pos-produksi berita, serta

meninggalkan tradisi jurnalisme (baca: jurnalis atau organisasi berita) yang eksklusif, elitis, berjarak, dan berpendekatan “*top down*”. Jurnalisme tak lagi tentang segelintir orang menceramahi audiens, melainkan bercakap-cakap dengan warga, dan melibatkan warga pada “*gatewatching*”. Sejumlah inisiasi telah dilakukan untuk menerapkan prinsip partisipasi tersebut, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tautan ini .

Mengembalikan kepercayaan audiens terhadap jurnalisme bukanlah pekerjaan mudah dan instan, dan menguatnya kepercayaan tersebut belum tentu berkontribusi signifikan pada pembatasan efek negatif disinformasi digital di tengah masyarakat yang terpengaruh politik populis. Akan tetapi, momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh jurnalisme untuk merenungkan ulang perannya dalam membangun demokrasi damai. Media pers berpeluang memberikan solusi integral dan komprehensif, sebab melalui media perslah warga, politisi, dan pemangku kebijakan dapat berdialog secara terarah dan sehat mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan dan masalah bersama.

Literasi Visual Sebagai Penangkal Foto Hoaks di Era Digital

Penulis: Radityo Widiatmojo (Japeli)

Fotografi selalu saja hinggap di kehidupan manusia sedari kelahirannya. Fungsinya sebagai medium rekam dwi matra telah membuat manusia sungguh terpesona, termasuk dalam membekukan sejarah perjuangan bangsa. Dalam konteks sejarah, fotografi turut menjadi salah satu pembakar semangat kemerdekaan. Adalah Frans Mendur dan Alex Mendur yang berhasil mendokumentasikan peristiwa bersejarah, yaitu Proklamasi 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Foto itulah yang kelak menjadi bukti bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Menyadari foto memiliki kekuatan seperti itu, tentara Jepang merampas kamera milik Mendur bersaudara. Namun, sebelum kameranya dirampas,

Mendur bersaudara mengubur roll film di halaman kantor Asia Raya. Ketika keadaan berangsur aman, Mendur bersaudara mencetak foto proklamasi di kamar gelap Kantor Berita Domei.

Apa yang dilakukan Mendur bersaudara menunjukkan kesadaran akan pentingnya sebuah foto, yang tak ubahnya sebagai barang bukti. Kesadaran ini sebenarnya adalah wujud dari literasi visual di era fotografi analog. Proses yang rumit, dengan melibatkan berbagai cairan kimia untuk menghasilkan citra positif dari sebuah lembaran negatif, merupakan salah satu faktor penyebab mengapa fotografi di era analog bisa dikatakan sebagai barang bukti yang sah. Dengan kompleksitas fotografi analog,

maka sebuah kejadian yang sudah direkam akan sangat sulit untuk di edit. Di era inilah, fotografi bersifat eksklusif dan mahal.

Perubahan teknologi digital membuat fotografi tidak lagi mahal dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui gawai pintar berteknologi tinggi, masyarakat sudah bisa melakukan aktifitas fotografi berikut kegiatan berbagai, tanpa kamar gelap ataupun tanpa cairan kimia yang pengap. Teknologi digital ini membuat semua pemilik gawai pintar adalah produsen visual sekaligus konsumen visual. Mata manusia digital menyerap informasi yang bersifat visual, sejak bangun tidur hingga sebelum lelap tertidur. Inilah bentuk demokratisasi fotografi, di mana masyarakat bisa menikmati fotografi dari caranya sendiri, bukan lagi diatur oleh sebuah rezim yang selalu melakukan pembredelan ketika ada informasi yang tidak sejalan dengan sang rezim. Fotografi pun telah bertransformasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan lagi dari fotografer oleh penguasa untuk masyarakat.

Ketika fotografi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, maka foto membutuhkan "rumah" huni yang bisa diakses oleh siapa pun. Rumah tersebut tak lain adalah media sosial, yang mempertemukan setiap manusia di berbagai belahan dunia dengan teknologi digital. Tidak bisa dimungkiri, mata manusia mengonsumsi informasi visual dari media sosial. Yang tanpa disadari, perilaku manusia pun turut dipengaruhi oleh asupan informasi visual tersebut. Sungguh media sosial merupakan sebuah arena pertarungan yang diperebutkan dengan cara membagi simbol-simbol secara visual. Dalam kacamata Pierre Bourdieu, sebuah arena bisa dipandang sebagai sistem relasi objektif kekuasaan di antara titik-titik simbolik berupa karya seni, manifesto artistik ataupun unsur politik.

Foto sebagai sebuah karya seni tidak akan berlaku lagi di media sosial, karena tidak lagi menjadi barang bukti, namun sudah menjadi salinan yang dibagikan. Tidak ada lagi hak eksklusif atas kepemilikan sebuah foto dalam sosial media, karena setiap pengguna sosial media di dunia maya bisa dengan bebas mencomot, membagikan, dan melakukan manipulasi tanpa izin. Dengan kata lain, sebuah foto dengan mudah

sekali dianiaya. Inilah titik di mana foto hoaks lahir.

Foto hoaks bisa diartikan sebagai sajian visual yang berisi informasi palsu, tidak benar, serta tidak bisa dipertanggung jawabkan secara moral. Dunia maya dan media sosial akan selalu melahirkan jejak digital. Foto hoaks merupakan sisi gelap dari jejak digital. Dia adalah residu yang mampu membangkitkan emosi manusia digital yang nirliterasi visual. Brian Kennedy mengemukakan bahwa 90 persen informasi yang didapat manusia berasal dari mata. Oleh karena itu, literasi visual menjadi hal yang sangat krusial agar foto hoaks tidak menjadi konsumsi yang bersifat banal.

Literasi Visual Foto Hoaks

Istilah literasi visual pertama kali diperkenalkan oleh John Debes di tahun 1969. Debes mendenfinisikan literasi visual sebagai sekumpulan kompetensi visual manusia yang mampu dikembangkan dengan cara diintegrasikan dengan kemampuan indrawi lainnya. Pada awal berkembangnya kajian literasi visual di tahun 1970-an, definisi ini masih bersifat tentatif sehingga perlu penyempurnaan, terutama terkait dengan parameter atau batasan-batasan ruang lingkup literasi visual. Dalam buku *Handbook of Visual Communication*, Sandra Morierty menempatkan literasi visual dalam rizomatic maps yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana hubungan interdisipliner berbagai subjek ilmu pengetahuan. Terdapat dua hal yang Sandra sampaikan, yaitu berpikir visual dan pengayaan kognitif. Sebuah sajian visual akan mampu mempengaruhi perilaku manusia berikut kekayaan literasinya. Semakin kaya daya analisis visual, maka semakin kuat pula benteng dalam dirinya untuk tidak mudah mempercayai sebuah visual. Berdasarkan hasil penelitiannya bersama Paul Messaris, Sandra pun menyadari bahwa literasi visual sangat bergantung pada kondisi psikologi, latar pendidikan, sosial budaya seseorang dalam menyerap informasi yang bersifat visual.

Untuk mengerti bagaimana cara kerja sebuah foto di dunia maya dan media sosial mempengaruhi manusia, maka perlu diketahui secara komprehensif sifat dari foto digital. Pertama, dimensi waktu. Fotografi adalah teknologi yang berhasil membekukan waktu. Menurut seorang

estetikus pada abad 19, Mallarme, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir dalam sebuah buku. Susan Sontag justru melihat segala sesuatu yang eksis akan berakhir pada foto. Maka, sebuah foto akan bersifat timeless (tidak bergantung waktu) di dunia maya. Dimensi waktu akan menjadi longgar dan tidak seketat era analog. Setiap sajian foto tidak memiliki waktu tayang, tidak terdeteksi waktu pengambilan gambar. Bahkan di dalam software Adobe Lightroom, dimensi pengambilan foto pun bisa dimanipulasi. Teknologi membawa dampak terhadap konteks kapan sebuah foto dihasilkan. Ketika konteks waktu ini kabur, maka dengan sangat mudah foto itu akan dianiaya konteksnya oleh manusia. Foto zaman dulu bisa disebut sebagai foto aktual. Sifat timeless inilah yang membuat foto hoaks langgeng di dunia maya. Sebagai bentuk literasi visual, maka setiap manusia digital haruslah sadar bahwa foto digital bersifat timeless dan perlu diperiksa kembali dengan mencarinya di Google Image. Dengan mengetahui kapan foto tersebut tayang, maka foto hoaks akan bisa ditangkal sedini mungkin, sehingga tidak akan dipercaya begitu saja.

Kedua, dimensi makna. Foto digital memiliki keberagaman makna yang arbiter atau semau yang melihat. Dalam konsepsi Roland Barthes, makna dalam foto hidup dan bersemayam di dalam tiga dimensi, yaitu dimensi operator (pengkarya), dimensi spectrum (subjek/objek di dalam sebuah foto) dan dimensi pemirsa atau spectator. Pesan yang ingin disampaikan sang fotografer tidak akan pernah sama dengan penonton. Pengalaman hidup pengkarya juga tidak akan pernah sama dengan pengalaman hidup sang pemirsa. Yang menarik dari pemikiran Barthes dan masih relevan dengan kondisi foto digital adalah makna dalam dimensi spectrum. Dalam dunia maya, sang spectrum sangat berpotensi memiliki makna yang sangat berkebalikan dengan makna aslinya ketika sudah diamputasi dimensinya. Spectrum bisa diperalat oleh spectator, yaitu pengguna media sosial. Memang sial nasib sebuah foto digital ketika berhadapan dengan orang yang sengaja merusak akal, dengan berbagi visual yang telah diubah konteksnya. Maka dari dimensi makna ini sebenarnya pemaknaan foto bisa ditunda dan dicari lagi kebenarannya, sehingga tidak termakan disinformasi dari foto hoaks.

Ketiga, dimensi narasi. Secara visual, sajian foto memang bisa



menghasilkan beragam makna. Dalam kenyataannya, kata-kata bersuara lebih lantang daripada sebuah foto, maka sebuah takarir bisa saja mengalihkan makna yang terdapat dalam foto itu sendiri, bahkan pengalihan makna tersebut bisa bersifat permanen.

Dimensi narasi inilah yang sering kali membuat masyarakat resah. Narasi pada foto yang telah dipenggal dimensi waktunya adalah bumbu penyedap layaknya candu, membuat orang bisa merasa pilu, ngilu, terharu, menderu sekaligus layu karena pemilihan diksi yang begitu mendayu. Ngeri, biadab, inilah, nomer 4 bikin sesak, tragis, memilukan, dan beragam diksi lain yang sifatnya bombastis akan selalu menjadi duet maut foto hoaks. Narasi ini tidak pernah memedulikan siapa jenis orang yang membacanya, entah itu intelektual, atau orang yang sedikit berakal, narasi dalam foto hoaks sangatlah mengikis nalar dan akal sehat manusia digital.

Keempat, dimensi topik. Dengan narasi dan diksi tertentu, foto hoaks memiliki topik seputar isu-isu yang sensitif. Produksi makna sangat dikerucutkan kepada topik yang bisa membuat orang sangat termakan emosi sesaat setelah membacanya. Foto hoaks sering dibalut dengan isu tragedi, bencana, kemanusiaan, agama, dan ras. Pemilihan topik hoaks sedikit demi sedikit mengikis kemampuan analisis kritis. Dampaknya adalah orang dengan sangat mudah merasa miris begitu melihat foto hoaks yang diterimanya. Berbekal jempol yang manis, foto hoaks disebar atas nama kepedulian terhadap sesama

Kelima, dimensi distribusi. Perlu dipahami bahwa foto digital sungguh menjadi foto tak bertuan karena sudah pernah didistribusikan atau disebar berulang-ulang oleh siapa pun. Dalam konteks di dunia maya, produksi makna bisa dipengaruhi oleh siapa yang menyebarkannya daripada sang pengkarya. Konten bisa menjadi nomor dua, yang jauh lebih dipercaya justru siapa yang menyebarkannya. Karakter masyarakat Indonesia yang kolektifis menyebabkan penyebar foto hoaks lebih dipercaya karena faktor kedekatan, bisa kedekatan keluarga, rekan kerja, ataupun teman dan saudara.

Keenam, dimensi editing. Foto hoaks adalah foto hasil editan dengan cara menggabung beberapa elemen visual dari foto lain ataupun

mengganti elemen visual dalam satu foto. Hasil editing pun bisa dilakukan oleh seorang amatir yang baru saja belajar Photoshop, yakni dengan cara mengompres hasil editan menjadi foto dengan pikselasi kecil. Foto pun akan terlihat seperti kotak-kotak tidak tajam dan blur, seolah-olah foto tersebut memang dihasilkan oleh kamera gawai pintar beresolusi rendah. Pada akhirnya, hasil editing tertutupi oleh rendahnya kualitas imaji. Ketika kualitas foto bukan barometer utama foto hoaks, maka kuantitas justru tujuan foto hoaks. Banyaknya foto hoaks dengan resolusi rendah, justru dimaknai sebagai sebuah kebenaran yang sebenarnya tak tentu arah.

Enam dimensi ini setidaknya adalah langkah awal mengenali bagaimana sebuah foto hoaks bekerja. Jauh sebelum era digital ini, para kritikus fotografi seperti Susan Sontag (1977), John Berger (1984), Alan Sekula (1986), John Tagg (1988) dan Trinh Minh-Ha (1992) banyak menulis isu-isu terkait dengan konten, konteks, framing, serta kekuatan institusional sebuah foto dalam mengonstruksi sebuah nilai (11).

Sudah saatnya generasi milenial ini tidak meremehkan kekuatan sebuah visual, karena sudah banyak kekeruhan yang berasal dari foto hoaks yang tidak masuk akal. Jagalah demokrasi ini dengan literasi visual agar tidak terjadi konflik horizontal.

Daftar Pustaka

- Wijaya, Taufan. 2018. Literasi Visual, Manfaat dan Muslihat Fotografi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halaman xviii.
- Ibid, Taufan menyebutkan beberapa fungsi fotografi dalam literasi visual, salah satunya adalah sebagai barang bukti.
- Harker, Richard. Mahar, Cheelan. Wilkes, Chris. 1990. An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory. London. Macmillan Press Ltd. Halaman 10.
- Disampaikan oleh Brian Kennedy, Direktur Toledo Museum of Art di berbagai tempat, termasuk di konferensi TED.
- Avgerinou, Maria. Ericson, John. 1997. A Review of the Concept of Visual Literacy, on British Journal of Educational Technology, vol. 28 no. 4 page 280-291. Blackwell Publishers.
- Moriarty, Sandra. 2005. Handbook of Visual Communication. London.

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Sontag, Susan. 1977. *On Photography*. Penguin. New York. Halaman 18.

Barthes, Roland. *Camera Lucida: Reflections on Photography*.
Halaman 9.

Sontag, Susan. 1977. *On Photography*. Penguin. New York. Halaman 84.

Martin, N Judith. Nakayama, Thomas. 2010. *Intercultural
Communication in Contexts*. New York. McGraw-Hill. Martin
dan Nakayama menyebutkan bahwa negara-negara di Asia,
termasuk Indonesia sebagai masyarakat yang bersifat
kolektifis karena sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah dan
budaya.

McQuire, Scott. *Photography's afterlife: Documentary images and
the operational archive*. *Journal of Material Culture*.
18 (3). 2013. mcu.sagepub.com. Halaman 224.

Peran Media Dalam Mewujudkan Demokrasi Damai Melalui Gerakan Literasi Digital

Penulis: Novi Kurnia (Japeldi)

Meluapnya informasi politik menjelang Pilpres 2019 tak hanya menimbulkan kekacauan informasi namun juga menciptakan polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu yang saling membenci serta terus menerus berseteru, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kondisi yang 'panas' ini berpotensi besar merusak suasana damai pemilu sebagai ajang pesta demokrasi tertinggi di Indonesia. Apalagi tahun 2019 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan seluruh jenis pemilihan umum secara bersamaan, yakni pemilihan legislatif dari tingkat kota atau kabupaten hingga tingkat

provinsi, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden (lih. Wisnu Martha Adiputra dkk., 2019).

Kekacauan informasi politik berupa misinformasi, disinformasi, dan mal-informasi (lih. Ireton dan Posetti, 2018) yang seringkali disederhanakan sebagai hoaks politik ini diproduksi dan disebar oleh banyak pihak. Pertama, para politisi dan/atau tim kampanye mereka yang punya kepentingan untuk menyerang lawan politik. Kedua, warganet pendukung capres-cawapres yang memuja calon pujaan namun menutup mata pada calon lainnya. Ketiga, media baik media

massa konvensional, media baru, maupun media 'abal-abal', yang secara sengaja atau tidak sengaja memproduksi atau mereproduksi kecacauan informasi (lih. Krisiandi, 2019).

Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: mengapa media sebagai salah satu pilar demokrasi ikut terseret dalam pusaran produksi dan distribusi kecacauan informasi politik? Sejauh mana media bertanggung jawab turut ambil bagian dalam gerakan literasi digital guna mengurangi kecacauan informasi politik? Bagaimana media turut berperan dalam mewujudkan demokrasi damai melalui literasi digital?

Media, Demokrasi, dan Kekacauan Informasi

Dalam sistem demokrasi, media dianggap mempunyai posisi yang penting sebagai pilar keempat. Media, secara ideal, diharapkan berfungsi sebagai penjamin akuntabilitas elit politik dan kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (lih. Gunther dan Mughan ed., 2000). Dengan kata lain media menjembatani komunikasi politik antar-pelbagai aktor dalam sistem demokrasi, sehingga proses mediasi tersebut bisa berlangsung baik maupun buruk (Benner dan Entman, 2001:5).

Mediasi berlangsung baik jika dalam komunikasi politik, media bisa menempatkan diri sebagai saluran netral dalam menyampaikan informasi secara transparan dari satu aktor politik dengan aktor politik lainnya dalam tugasnya melayani kepentingan masyarakat. Sebaliknya, media berlangsung buruk jika media menjadi lebih kuat dari aktor politik lainnya seperti negara dan masyarakat dan lebih berfokus melayani kepentingan pemiliknya dan/atau kapital.

Persoalan kuasa media yang lebih banyak mengabdikan pada kepentingan politik ini semakin jelas terlihat di Indonesia dua dekade belakangan ini. Jika pada masa Orde Baru media dikuasai oleh negara, maka pada pasca-reformasi media dikuasai oleh pemilik media. Selain itu, kuasa pemilik media semakin menguat di era digitalisasi media. Revolusi digital menjadikan industri media mengalami pemusatan yang

memungkinkan pemilik media semakin mempunyai kekuasaan baik secara kapital maupun politik. Media partisan kian kuat sebab media menjadi ruang dominasi para pemilik media yang juga elit politik dalam menancapkan kuasanya di era digital (Tapsell, 2018).

Dalam posisi media seperti itu, objektivitas jurnalis semakin tergerus kepentingan pemilik media sehingga praktik jurnalisisme buruk mungkin saja terjadi. Alih-alih mengedepankan kepentingan publik, jurnalis mengutamakan kepentingan pemiliknya. Faktor lain penyebab jurnalisisme buruk adalah ketika jurnalis tak lagi menaati standard dan etika profesi jurnalistik akibat proses serampangan pencarian data dan buruknya verifikasi informasi. Hal ini menjadi peluang bagi munculnya kekacauan informasi (Ireton dan Posetti, 2018:44-45). Dalam kondisi ini media mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Posisi genting media dan jurnalisisme di era pasca-kebenaran, yang ditandai dengan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap media, didiskusikan secara mendetail dalam buku *Journalism, 'Fake News', & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training* yang diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 2018. Dalam buku itu disebutkan bahwa jurnalis tenggelam dalam hiruk pikuk informasi baik sebagai korban maupun pelaku. Sebagai korban, jurnalis dihadapkan pada intimidasi dan pelecehan daring kala berupaya mengungkapkan kebenaran. Sebagai pelaku, jurnalis tengah dimanipulasi oleh produsen kekacauan informasi yang bisa jadi berasal dari pelaku luar media atau justru malah pemilik media itu sendiri.

Dalam posisi media yang 'rawan' terjebak sebagai pelaku maupun korban kekacauan informasi, salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan perannya dalam gerakan literasi digital. Bisa dengan cara menguatkan kompetensi literasi digital, baik bagi jurnalisnya maupun bagi masyarakat luas.

Media dan Gerakan Literasi Digital

Dalam sejarah gerakan literasi media dan informasi di Indonesia yang dimulai pada awal tahun 1990-an, media, meskipun tidak dominan namun tetap memegang peran penting. Studi yang dilakukan oleh



Pusat Kajian Media dan Budaya Populer menunjukkan bahwa media adalah salah satu penggerak literasi media dan informasi, selain lembaga swadaya masyarakat dan sekolah (Poerwaningtyas, 2013). Saat itu, fokus gerakan literasi adalah meningkatkan kemampuan literasi media masyarakat dalam mengkonsumsi produk cetak maupun siaran televisi.

Data yang kurang lebih sama ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Pegiat Literasi Media (Japelidi) pada tahun 2017. Media (0.4%) merupakan salah satu pelaku kegiatan literasi digital selain perguruan tinggi, instansi pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, korporasi, asosiasi profesi, dan organisasi massa (Kurnia dan Astuti, 2017). Studi ini juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2017, media digital menjadi bagian yang vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab, gerakan literasi media dan informasi berfokus pada media digital. Dengan begitu, nama gerakannya pun beralih dari gerakan literasi media menuju gerakan literasi digital.

Sebagai salah satu pelaku gerakan literasi digital, meskipun masih terbatas, media melakukan beragam program. Baik yang ditujukan bagi jurnalisnya maupun bagi masyarakat luas. Media biasanya melakukan beragam pelatihan jurnalistik untuk membekali wartawan agar mempunyai bekal cukup supaya tidak terjebak dalam praktik jurnalisisme buruk yang bisa menyeret ke dalam pusaran kekacauan informasi. Program semacam ini dilakukan oleh banyak institusi media. Beberapa contoh adalah Tirta (Arlin, 2017), Tempo dengan Tempo Institute-nya, hingga Kompas dengan Kompas Institute. Yang menarik, sayap media yang menangani pelatihan jurnalistik sebagaimana Tempo Institute maupun Kompas Institute tidak hanya melayani pelatihan bagi jurnalis, melainkan juga melayani masyarakat umum yang tertarik pada dunia jurnalistik.

Selain melakukan program literasi digital secara mandiri, media juga melakukan kolaborasi dengan media lain, dengan komunitas, ataupun dengan organisasi lain yang sebagian besar berupaya menekan dampak kekacauan informasi di era pasca-kebenaran. Misalnya ketika Tempo Institute berkolaborasi dengan Yukepo, ICT Watch, Gerakan

Nasional Literasi Digital Siberkreasi, dan MAFINDO menyelenggarakan Tempo Goes to Campus (SGTC) di Cilegon, Bandung, Aceh, Batam, Pontianak, Palu, Makassar, Halmahera, Ambon dan Manado. Tur keliling 10 kota SGTC bertujuan untuk mengajak kaum muda Indonesia meningkatkan kompetensi literasi digital mereka. Kaum muda yang mempunyai pikiran dan sikap kritis dalam mengelola informasi dianggap sebagai salah satu benteng dalam upaya menangkal kekacauan informasi, baik yang berupa misinformasi, disinformasi, maupun mal-informasi.

Kolaborasi tampaknya menjadi isu penting dalam meningkatkan peran media dalam gerakan literasi digital. Utamanya sebagai salah satu solusi alternatif menghadapi kekacauan informasi politik pada tahun kritis Pemilu 2019.

Media, Pemilu, dan Demokrasi Damai

Jelang pesta demokrasi tahun 2019, media tampaknya cukup intens dalam melakukan program cek fakta sebagai salah satu komponen penting dalam literasi digital. Cek atau verifikasi fakta dalam jurnalisme merupakan upaya media untuk meluruskan keraguan masyarakat terhadap kebenaran konten di media digital. Melakukan verifikasi fakta juga merupakan salah satu dari 10 kompetensi literasi digital yang dikembangkan Japelidi yakni: mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi (lih. Kurnia, Monggilo, dan Adiputera, 2018).

Peran aktif media dalam kegiatan literasi digital dapat disimak melalui upaya cek fakta jelang Pilpres 2019 oleh Kompas.com yang bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) (Pratawa dan Galih, 2019). Kolaborasi media dan perguruan tinggi dalam melakukan verifikasi fakta debat kedua Pilpres bertujuan untuk menyajikan klarifikasi data agar informasi yang diterima masyarakat bersifat faktual. Dengan begitu, kekacauan informasi bisa diminimalkan.

Setali tiga uang dengan usaha kolaboratif di atas, 24 jurnalis yang

berasal dari Times Indonesia, Kontan.co.id, Tempo.co, Merdeka.com, Suara.com, Liputan6.com, KBR, Medcom, Riauonline, The Conversation, Kabar Makasar, Kabar Medan, Kompas.com, Vivanews, Detik.com, dream.co.id, beritasatu.com, katadata, bisnis.com, melakukan cek fakta secara aktual selama debat Pilpres 2019 berlangsung (Muhammad, 2019). Sebagai catatan, Cekfakta.com sebenarnya merupakan kolaborasi cek fakta yang diluncurkan pada Mei 2018. Kolaborasi ini melibatkan beberapa media daring yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Google News Initiative, Internews, First Draft dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).

Beberapa contoh keterlibatan media dalam melakukan program literasi digital di tahun politik 2019 menunjukkan betapa signifikan peran media dalam membangun sistem demokrasi. Tangguhnya media dalam menghadapi tantangan di era pasca-kebenaran bergantung pada penguatan kompetensi literasi digital bagi jurnalisnya. Sementara, penguatan kompetensi literasi digital bagi masyarakat yang dilakukan oleh media dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, melalui program literasi digital, media juga berperan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati mengelola informasi dan memahami fakta agar tidak terjebak dalam polarisasi kebencian karena berbeda pilihan politik. Dengan begitu, demokrasi yang damai, yang menjadikan masyarakat bisa hidup bersama meskipun berbeda pilihan, bisa terwujud. Memang tidak mudah dilakukan. Namun perlu disadari bahwa upaya media dalam menguatkan kompetensi literasi digital baik bagi jurnalis maupun bagi masyarakat luas adalah bentuk tanggung jawab media dalam rangka merawat demokrasi pun memelihara perdamaian.

Daftar Pustaka

Adiputra, Wisnu Martha dkk (2019), Yuk, Lawan Hoaks Politik, Ciptakan Pemilu Damai!, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

- Bennet, W. Lance dan Entman, Robert M (penyunting) (2001), *Mediated Politics: Communication in the Future Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press
- Gunther, Rochard dan Mughan, Anthony (penyunting) (2000), *Democracy and the Media: A Comparative Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press
- Ireton, Cherilyn dan Posetti, Julie (2018), *Journalism, 'Fake News' & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training*. Paris: UNESCO
- Krisiandi, Krisiandi (2019), Kompas.com, 11 Februari 2019, Dewan Pers Bentuk Satgas untuk Bubarkan Media Abal-Abal, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/11/20145921/dewan-pers-bentuk-satgas-untuk-bubarkan-media-abal-abal>>, diakses pada 4 Maret 2019
- Kurnia, N, Monggilo, ZMZ dan Adiputra, WM (2018), *Yuk, Tanggap dan Bijak: Berbagi Informasi Bencana Alam melalui Aplikasi Chat*, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi UGM
- Kurnia, Novi & Astuti, Santi Indra (2017), *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra*, Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi, Vol. 47, No 2, Desember 2017
- Poerwaningtyas, Intan (penyunting) (2013), *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer dan Yayasan TIFA
- Pratawa, Aswab Nanda & Galih, Bayu (2019), Kompas.com, 14 Hasil Cek Fakta Berdasarkan "Restricted Search Method", 18 Februari 2019, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/18/16105351/14-hasil-cek-fakta-berdasarkan-restricted-search-method>>, diakses pada 19 Februari 2019
- R, Arlin (2017), Poros Maju, 11 Desember 2017, *Jurnalists Trto: Kolaborasi adalah Kunci Journalistik*, <<http://porosmaju.com/2017/12/11/jurnalists-tirto-kolaborasi-itu-kunci-journalistik/>>, diakses pada 2 Maret 2019
- Tapsell, Ross (2018), *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*, diterjemahkan oleh Wisnu Prasetyo

Utomo, Tangerang: Margin Kiri
Tempo Institute, TGTC 2018: 'Mr & Ms Smart Melawan Kabar Kibul',
<<https://tempo-institute.org/berita/smart-tgtc/>>, diakses pada
3 Februari 2019

Anak Muda



Generasi Milenial Golput, Kok Bisa?

*Penulis: Amy Kamila (Kreator Nongkrong
Siberkreasi)*

Saya terheran-heran ketika banyak teman yang berasal dari kalangan generasi milenial di lingkungan saya memutuskan untuk golput. Sebelum lanjut membicarakan pilihan politik mereka, baiknya menyamakan persepsi dulu mengenai generasi milenial. Penyebutan anak muda sebagai generasi milenial merupakan usaha untuk mendeskripsikan karakter kolektif.

Dalam buku *Digital Parentthink: Tips Mengasuh Kids Zaman Now* (Ratuliu, 2017) disebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981-1995. Kira-kira, sekarang usia mereka merentang di angka 24 sampai 37 tahun. BPS (2019) melabeli jenjang usia ini sebagai usia kerja atau usia produktif. Semestinya generasi ini sedang banyak-banyaknya beraktivitas, termasuk menyuarakan aspirasi

bahkan terjun ke dunia politik. Namun mengapa banyak yang memutuskan golput dan apatis, ya?

Hadirnya Internet memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi pola perilaku berikut cara berinteraksi penggunaannya. Tidak terkecuali dengan apa yang terjadi pada generasi milenial. Setiap perjumpaan tentu memiliki dampak, begitu pula dengan teknologi. Positifnya, Internet melahirkan arus informasi yang dinamis, menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya secara real time sehingga mendorong terciptanya inovasi baru yang lebih kreatif. Sementara efek negatif diantaranya, muncul model kejahatan baru, perundungan siber, luapan konten pornografi, hingga hoaks yang membanjiri.



Hoaks di Masa Politik

Di masa kampanye, hoaks semakin bertumbuh subur. Hoaks berasal dari masing-masing pendukung pasangan calon. Kekisruhan di linimasa membuat gerah generasi milenial, isu-isu politik dicemari konten negatif sehingga hanya dilewati tanpa dibaca. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi dan Internet, anak-anak muda cenderung bisa memilah informasi yang sekiranya tidak benar.

Pada saat generasi X (generasi dengan tahun kelahiran 1965-1980) dan generasi baby boomer (generasi dengan tahun kelahiran 1946-1964) tumbuh, informasi yang bisa diterima sangatlah terbatas. Terlebih, siara tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah dan segelintir pihak saja yang kredibel. Dengan demikian, informasi cenderung sudah terkurasi dang tersaring dengan baik. Hoaks bukan masalah ketika itu.

Akan tetapi saat generasi milenial tumbuh, zaman telah berubah. Sumber informasi tidak berjalan satu arah, tetapi sifatnya interaktif. Teknologi pelengkappun kian berkembang. Internet yang semakin cepat mendorong munculnya informasi yang tidak berdasar. Generasi milenial lintas belajar untuk memilah informasi dengan hanya mempercayai sumber yang valid. Apalagi dengan adanya mesin pencarian seperti Google, aktivitas verifikasi keaslian data atas pelbagai informasi di Internet sangat memudahkan. Pengguna Internet usia muda percaya bahwa data yang benar bakal muncul dalam mesin pencarian dengan gaya penulisan yang formal dan berasal dari platform berita terpercaya.

Sayangnya, masih banyak pihak yang berniat merebut dukungan generasi milenial dengan jalan yang keliru. Hoaks bernada sinis dan kebencian, konten yang memancing emosi negatif, dan hasutan yang menyudutkan pihak lain, seringkali dipakai sebagai senjata. Padahal generasi milenial sangat alergi dengan pendekatan macam itu. Ujung-ujungnya, konstituen politik muda menumbuhkan persepsi bahwa semua kandidat sama saja. Persepsi tersebut kemudian berkembang sehingga melahirkan pernyataan bahwa aksi memilih atau tidak memilih adalah dua hal yang sama. Lantas, apa efeknya jika milenial

memilih tidak bersuara?

Kekuatan Generasi Milenial

Tercatat sejumlah 14 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kategori pemilih pemula. Apabila dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap maka diperoleh perhitungan: sebesar 21.875% ialah pemilih pemula dari generasi muda. Apabila mereka sepakat melakukan aksi golput karena berbagai pertimbangan di atas, maka hilang sudah hampir seperlima suara di pemilu serentak tahun 2019. Hal ini tentunya berdampak panjang, terutama bagi keberlangsungan pesta demokrasi ke depan.

Generasi milenial banyak yang memilih golput dikarenakan mereka tidak merasakan efek langsung dari bergantinya kepemimpinan. Padahal anggapan tersebut sangatlah keliru. Menurut saya, generasi ini justru bakal menjadi pihak yang terdampak sangat serius. Salah satu efek langsung yang dirasakan contohnya pada faktor ekonomi. Apabila negara gagal menstabilkan kekuatan rupiah di mata dolar, maka biaya traveling tentu bisa membengkak. Penentuan harga, fasilitas yang dinikmati, kebebasan mengutarakan pendapat di media sosial, sampai ekosistem ekonomi digital yang melahirkan banyak perusahaan rintisan (startup) sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri.

Absennya generasi milenial dalam proses demokrasi elektoral dapat mendampak situasi sosial politik. Dengan kekuatan berupa kuantitas dan potensi yang sebegitu besar, maka sangat disayangkan apabila generasi milenial tidak menggunakannya untuk melimpahkan kekuasaan politik pada pihak yang tepat. "Tapi banyak sekali calon pemimpinnya, mau pilih yang mana?" Inilah pertanyaan yang kerap terlontar. Di sini generasi milenial perlu sekali lagi mengecek privilesenya: akses Internet memadai, pengetahuan cukup, dan gawai canggih. Bukankah bisa melakukan cek latar belakang calon pemimpin menggunakan ponsel pintar yang sehari-hari ditenteng?

Memilih Untuk Kepentingan Bersama

Mengutip pernyataan Najwa Shihab, ada tiga hal yang perlu

diperhatikan generasi milenial dalam menentukan pilihan pada pemilu 2019. Pertama, memeriksa rekam jejak kandidat dengan aktif mencari tahu program yang ditawarkan, serta mengenali karakternya. Poin ke satu ini sungguh mudah dilakukan, baik melalui mesin pencarian maupun memantau berita daring yang bersliweran di lini masa. Kedua, proses mengenal kandidat juga dapat dilakukan dengan mampir ke media sosial mereka—tentu perlu dipastikan bahwa akun tersebut sudah terverifikasi. Terakhir, perlu sekali untuk mengawasi serta mengawal janji politik dan visi serta misi yang ditawarkan kandidat. Tentu kita semua tidak ingin tanggung jawab yang menentukan kemaslahatan bersama diberikan kepada seseorang karena alasan yang tidak rasional, bukan?

Saya hendak menutup tulisan ini dengan pesan bahwa sebagai anak muda, yang nantinya bakal mewarisi dan melanjutkan Indonesia, kita perlu ambil bagian dalam proses demokrasi elektoral. Memilih di bilik suara adalah hal paling sederhana yang bisa generasi muda lakukan untuk bangsa. Donasi satu suara dari anak muda yang memilih menggunakan pertimbangan rasional dan akal sehat, akan mengalahkan satu pilihan yang didasarkan pada prasangka atau pengaruh hoaks. Jika segenap generasi milenial, yakni seperlima dari keseluruhan daftar pemilih tetap, menggunakan hak pilihnya dengan bijak maka sebenarnya kita tengah berinvestasi untuk Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, <<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>>, diakses pada 23 Maret 2019

CNN Indonesia, *KPU Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta*, 15 Desember 2018, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>>, diakses pada 23 Maret 2019

Karmadewi, dkk., (2017), *Ayah Peran Vitalnya dalam Pengasuhan*, Jakarta: Yayasan Bhakti Suratto

Kustiani, Rini, Tempo.co, *Pemilih Pemula Bingung di Pemilu 2019, Ada Tips dari Najwa Shihab*, <<https://gaya.tempo.co/read/1168248/pemilih-pemula-bingung-di-pemilu-2019-ada-tips-dari-najwa-shihab/full&view=ok>>, diakses pada 23 Maret 2019

Ramdhani, Gilang, Liputan6.com, *Agar Jadi Pemilih Pemula Cerdas dan Berdaulat*, 26 Oktober 2018, <<https://www.liputan6.com/news/read/3676554/ketahui-informasi-penting-ini-agar-jadi-pemilih-pemula-cerdas-dan-berdaulat>>, diakses pada 23 Maret 2018

Ratuliu, Mona, (2017), *Digital Parentthink: Tips Mengasuh Kids Zaman Now*, Jakarta: Noura

Warta Kota, *14 Juta Pemilih Pemula di 2019 Diharap Tidak Golput*, 6 April 2018, <<http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/06/14-juta-pemilih-pemula-di-2019-diharap-tidak-golput>>, diakses pada 23 Maret 2019.

Kolaborasi Literasi Digital Bukan Kerja Picisan

Penulis: Donny BU (ICT Watch) & Adya Nisita (Siberkreasi)

Internet dan media sosial kerap kali dituding sebagai penyebab perubahan-perubahan radikal di dunia politik. Siapa menyangka, Amerika Serikat yang pernah punya sejarah panjang diskriminasi rasial dan trauma pemboman menara WTC bakal memiliki presiden kulit hitam dengan nama tengah kearab-araban pula. Barack Hussein Obama berhasil memanfaatkan momentum euforia publik atas kehadiran media sosial. Faktor sukses Obama dipengaruhi oleh strategi kampanye media sosial dan teknologi sehingga mampu mengumpulkan dana—dan yang paling penting: memberdayakan relawan sehingga mereka merasa sedang mengubah sesuatu (Aaker dan Chang, 2010:16).

Selain memunculkan aktor baru

yang progresif, platform media baru yang diakomodasi oleh Internet turut membantu proses demokratisasi (Tapsell, 2018: 185). Interaksi serta mobilisasi melalui media sosial menjadi katalis munculnya gelombang pembangkaman sipil dan protes Arab Spring di wilayah Afrika Utara yang didominasi sistem pemerintahan otoriter. Di Hong Kong, anak muda mengorganisasi gerakan dan menciptakan kanal informasi alternatif kala Revolusi Payung meletup. Fitur unggah status, bagikan, dan sukai, di media sosial menjadikan protes damai ini sebagai gerakan sosial yang paling terdokumentasi dengan baik dalam sejarah (Kaiman, 2014).

Namun teknologi tidak pernah bersifat deterministik. Karenanya tumbuh kebaikan, pun berkatnya

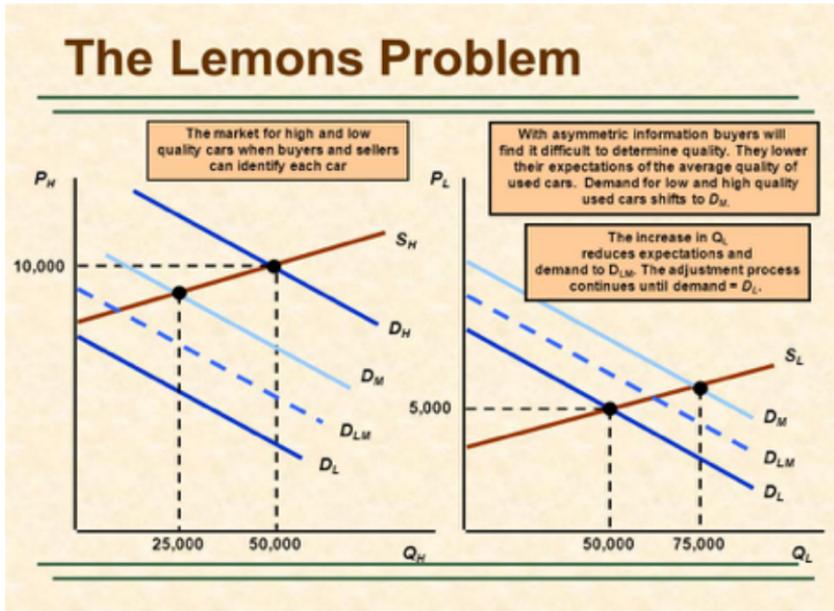
muncul pula keburukan. Strategi microtargeting yang mengeksploitasi prasangka rasial melalui sejumlah media sosial diyakini menjadi salah satu kunci kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika Serikat 2016. Akibatnya, hampir setengah dari penduduk Amerika Serikat pernah beradu argumen dengan seseorang (baik teman, keluarga, rekan kerja ataupun kerabat.) tentang pilihan politiknya (Edwards-Lewy, 2016). Friksi akibat beda pendapat melampaui pagar diskursus politik hingga ke tahap personal. Apalagi dengan adanya media sosial, ekspresi politik semakin kentara sehingga keberpihakan politik sudah merasuk hingga membentuk identitas sosial. Bahkan terbukti mengubah pola interaksi masyarakat Amerika Serikat dengan orang yang berhaluan politik lain (McConell dkk., 2017).

Berkat fitur interkonektivitasnya, media sosial menyusul peran media massa sebagai pembentuk opini publik. Meski konten di dalamnya bersifat sporadis, tidak teregulasi, dan terbuka pada kontribusi; media sosial semakin menjadi andalan masyarakat dalam mencari sumber informasi (Pertwi, 2018). Media sosial memainkan peran lebih besar selain sebagai sumber informasi, yakni sebagai ruang berkomunikasi dengan lingkaran internal yang sifatnya intim, sekaligus sebagai ruang diskusi yang sifatnya publik. Dengan durasi rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam 26 menit, dari total 8 jam 36 menit terhubung ke Internet (Kemp, 2019), maka tidak berlebihan jika apa yang dikonsumsi di dunia maya akan mempengaruhi persepsi dan perilaku di dunia nyata. Hal ini dapat menjadi masalah jika kemudian informasi yang tersaji melulu sampah yang tak baik dikonsumsi bagi nalar.

Kualitas Picisan

Sebagai ruang publik, Internet setali tiga uang dengan lapangan fisik terbuka di mana semua orang dapat berkumpul. Terdapat kesepakatan mengenai apa yang bisa dilakukan dan tidak, berikut konsekuensi tindakan. Guna mencapai fungsi optimal yang menjamin asas inklusivitas, kebebasan berpendapat, dan diimbangi dengan bobot bahasan, maka perlu ada pengawalan penuh agar pengunjungnya betah. Hal ini dipertegas pula oleh Profesor Ang Peng Hwa selaku

Direktur Singapore Internet Research Center Nanyang Technological University. Menurutnya, ketika ditemui secara khusus oleh penulis di kantornya pada September 2018, mekanisme pasar “Market for Lemons” oleh ekonom George A. Akerloff dapat pula berlaku pada kecondusifan ekosistem diskusi publik di media sosial.



Gambar 1. Penjelasan konsep *Market for Lemons*

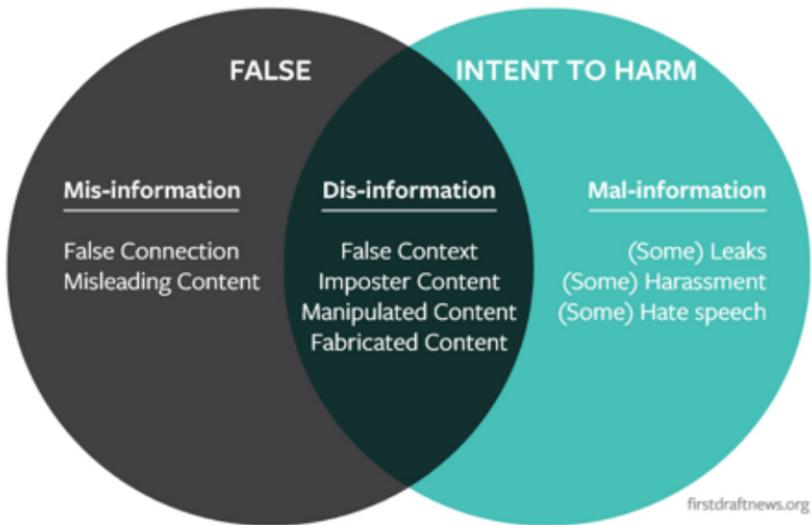
Akerloff mengamati pasar mobil bekas dan memformulasikan sebuah konsep. Ketika ada dua jenis barang dengan kualitas berbeda lalu penjualnya memonopoli informasi mengenai kualitas barang tersebut, maka barang dengan kualitas picisan akan dihargai lebih mahal sementara harga barang yang bagus bakal merosot. Sehingga produk berkualitas rendah (alias lemons) akan menenggelamkan produk berkualitas baik dari pasar. Ini berlaku pula dalam peredaran informasi di dunia maya. Silakan ganti posisi mobil bekas dengan kepingan-kepingan informasi yang tersirkulasi, sementara penjual bisa diibaratkan institusi atau individual yang menciptakan informasi tersebut; salah atau benar, valid atau tidak, yang paling tahu adalah

produsen, bukan konsumen. Di sini dapat digambarkan bahwa ketika pengguna Internet tidak lagi bisa membedakan mana informasi yang bernilai dan mana yang sampah; lantas menjadi jengah karenanya, maka yang rentan terjadi adalah generalisasi bahwa informasi yang ada di Internet bernilai rendah kadar kebenaran pun kredibilitasnya.

Menurut Profesor Ang, Indonesia memiliki tantangan lebih berat di masa pemilu serentak tahun ini jika dibandingkan dengan Singapura. Selain skala cakupan wilayah, durasi masa kampanye juga jauh berbeda: Singapura hanya berlangsung selama sembilan hari sementara Indonesia hingga enam bulan. Banjir bandang konten sampah seperti hoaks dikhawatirkan mampu mempengaruhi iklim dan kualitas pengambilan keputusan para generasi milenial, termasuk dalam urusan politik.

Dari sisi persentase, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per 2017-2018, setidaknya 49,52 persen pengguna Internet Indonesia berusia antara 19-34 tahun—atau populer dilabeli sebagai generasi milenial. Ketika persentase tersebut dipetakan dari total 150 juta pengguna Internet (Kemp, 2019) atau sekitar 56 persen dari total 268,2 juta penduduk Indonesia, maka terdapat sekitar 75 juta generasi milenial pengguna Internet yang berpotensi menjadi pemilih muda atau pemilih pemula pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) bulan April 2019.

Sebelum lanjut membahas tentang generasi milenial dan perannya dalam pemilu, mari kita urai terlebih dahulu tentang konten sampah berjejuduk hoaks ini. UNESCO dalam publikasinya berjudul “Journalism, Fake News and Disinformation” yang dirilis tahun 2018 telah membagi hoaks alias kabar bohong ini menjadi 3 (tiga) kategori: misinformasi, disinformasi dan malinformasi.



Gambar 2. Tipologi penyakit informasi (Wardle dan Derakhshan, 2018)

Pertama, misinformasi adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut sah dan dapat dipercaya. Sejatinnya tidak ada tujuan buruk bagi mereka yang menyebarkan konten misinformasi, selain sekedar untuk “mengingatkan” atau “berjaga-jaga”. Kedua, disinformasi adalah informasi yang juga tidak benar namun memang direayasa (fabricated) sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu darinya. Sedangkan yang terakhir malinformasi adalah informasi yang memang dapat dirunut kebenarannya, berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta obyektif, namun dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak atau kondisi tertentu, ketimbang berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa bentuk pelecehan (verbal), ujaran kebencian dan diskriminasi, serta penyebaran informasi hasil pelanggaran privasi dan data pribadi adalah ragam bentuk malinformasi.

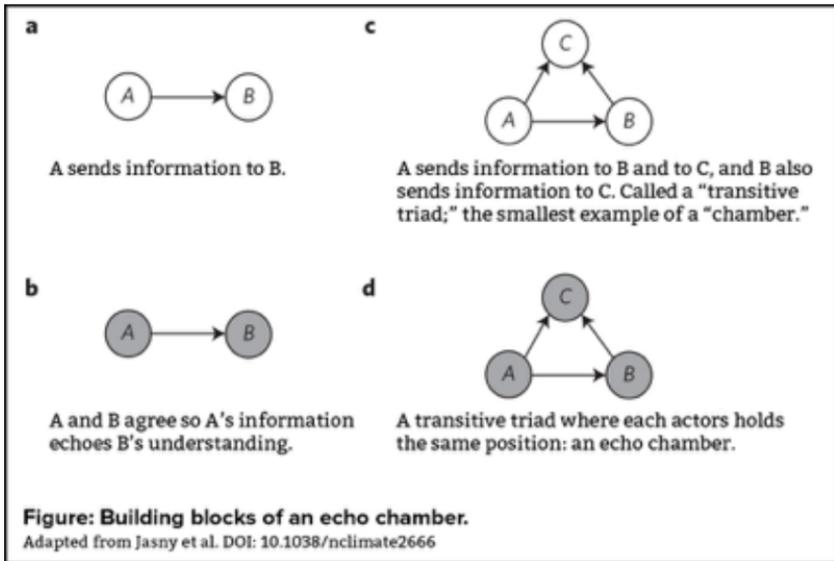
Dengan memahami konsep kategorisasi yang ditawarkan UNESCO di

atas, kita bisa memahami bahwa isu hoaks tak bisa dipandang sebagai suatu yang sederhana, apalagi sekedar ditangani dengan solusi yang disimplifikasi. Ada aktor dengan motif dan metodenya, ada medium dengan karakteristik pesannya, dan ada khalayak sebagai penerima pesan dengan kematangan checking behaviour-nya secara individual. Karakter dan keunikan inilah yang kemudian mesti disikapi dengan hati-hati, karena tidak bisa satu metode penanganan bias bekerja mengatasi ragam jenis hoaks yang beredar di ranah maya.

Lebih gawat lagi ketika hoaks memiliki kemampuan menyebar lebih cepat ketimbang fakta. Inilah momen ketika berita kebenaran harus tertatih-tatih mengejar kabar bohong yang telah lebih jauh melesat di depan. Hal ini terbukti melalui riset oleh MIT terhadap set data Twitter pada rentang tahun 2006 hingga 2017, yang menganalisis sekitar 126 ribu rumor yang disebar oleh sekitar 3 juta penggunanya. Didapatkan fakta bahwa diseminasi kisah yang benar (termasuk berita klarifikasi-red.) membutuhkan waktu enam (6) kali lebih lama ketimbang kabar bohong untuk mencapai tingkat cakupan paparan dengan jumlah orang yang sama. Tak hanya itu, kabar bohong ternyata 70 persen lebih banyak diteruskan (retweet) ketimbang versi kisah yang sebenarnya (Aral, 2018). Menurut kajian tersebut disebabkan karena kabar bohong, baik judul maupun kontennya, memang diracik untuk mudah mendapatkan atensi dan disebar oleh banyak pihak tanpa proses klarifikasi sebelumnya.

Polarisasi Kebencian

Ketika memfasilitasi kebebasan berekspresi, media sosial pun ternyata rentan mendorong penggunanya untuk mempraktikkan kebebasan membenci. Kebebasan menyuarakan opini ditunggangi aksi membungkam yang lain (Lim, 2017). Seperti yang dinyatakan oleh sarjana politik Noam Chomsky bahwa upaya-upaya konstruktif platform media sosial juga menyimpan kekuatan besar untuk mengikis demokrasi (Chomsky, 2018). Filter bubble atau dikenal juga dengan istilah echo chamber (ruang gema) menutup akses pengguna media sosial dari perspektif yang berlainan dengan preferensinya. Media sosial menyediakan asupan yang sangat kaya bagi tumbuhnya polarisasi sosial (Hull, 2017).



Gambar 3. Ilustrasi cara kerja *filter bubble* (Jansey dkk., 2015)

Dewasa ini, media sosial sudah berkelindan dengan begitu eratnya dengan dunia politik. Dampaknya akan sangat dirasakan bagi generasi muda khususnya di kelompok usia 18-34 tahun—yang notabene konsumen utama media sosial (Kemp, 2019). Kelompok usia milenial tersebut juga merupakan warga negara yang diharapkan aktif berpartisipasi politik. Generasi milenial mengambil porsi 23,77 persen dari total populasi dan menyumbang hampir seperlima dari total keseluruhan DPT pada pemilu 2019 (Garnesia, 2018). Menurut survei terbaru dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, kaum muda Indonesia yang sehari-sehari menjadikan media sosial sebagai rujukan mencari, berbagi, dan merespon informasi, beranggapan bahwa mutu demokrasi di Indonesia masih dalam taraf buruk atau sangat buruk. Sesuai dugaan, bagi mereka hoaks adalah salah satu penyebab kekusaran paling utama yang mereka temukan atau rasakan di Internet (Indiro Adinugroho, dkk., 2019).

Polarisasi yang tumbuh di media sosial menjadikan kualitasnya sebagai ruang diskusi publik menukik tajam, khususnya di tahun politik kini. Penggunaan label "cebond vs kampret" yang mengurangi kemanusiaan

kedua belah kubu pendukung menenggelamkan kelompok lain yang sebetulnya tengah benar-benar mengklaim haknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi politik. Selama ranah siber tercemar oleh ujaran kebencian dan kurangnya partisipasi karena ketakutan dan kehati-hatian yang berlebih, praktik demokrasi digital tidak bakal berkembang (dalam Perbawani dkk., 2019).

Menurut survei kolaboratif dari Tempo.co dan Orb Media Network (2018), anak-anak muda yang peduli pada pemerintahan malah menolak terlibat dalam politik praktis bahkan mereka pun enggan memberikan suara dalam pemilu. Kanal-kanal politik informal seperti pembangkangan sipil, petisi daring, protes di jalanan, dan aktivisme media sosial, merupakan pilihan anak muda. Preferensi berdemokrasi ini perlu diakomodasi melalui berbagai cara, yakni dengan menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi, memperbaiki iklim diskusi publik dengan meminimalkan peredaran disinformasi, serta menciptakan debat yang konstruktif di media sosial agar kepercayaan pada Internet sebagai ruang diskusi pulih.

Ketidakpercayaan generasi muda pada platform media sosial bukan fenomena eksklusif di Indonesia, karena tren ini juga ditemui di Thailand. Dominasi junta militer Thailand termanifestasi dalam ranah siber melalui fungsi Lembaga Nasional untuk Ketertiban dan Perdamaian. Cengkeraman tajam rezim menghambat partisipasi kaum muda dalam merespon isu politis.

Ditemui dalam wawancara khusus di kampusnya pada September 2018, Profesor Pirongrong Ramasoota selaku Wakil Rektor sekaligus Direktur Thai Media Center pada Universitas Chulalongkorn menyampaikan fakta tentang ketidakpercayaan yang sangat tinggi dari anak muda pada informasi yang beredar di media sosial. Fabrikasi dan filtering konten dikawinkan dengan bayang-bayang pasal le majeste bukanlah kondisi yang ideal bagi generasi muda di sana. Maka dari itu, Profesor Pirongrong meyakini bahwa Internet sebagai ruang publik perlu dibuka seluasnya agar pengguna mampu mengakses seluruh informasi tanpa terpotong-potong sehingga masyarakat dapat terdidik memutuskan kebutuhannya sendiri.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan warganet muda di sejumlah kota di Indonesia dalam mengklarifikasi hoaks teridentifikasi masih rendah. Hal ini ditandai oleh ketidakpedulian warganet terhadap penyebaran hoaks serta rendahnya upaya untuk secara kritis merespon informasi hoaks yang diterimanya. Adapun ketidakmampuan warganet untuk memproses informasi di dunia digital dapat menyebabkan persebaran hoaks yang lebih besar, sehingga provokasi, prasangka, atau kebencian yang irasional tumbuh subur. Untuk itulah maka warganet perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menghindari jebakan-jebakan yang tersembunyi dalam kemudahan pencarian informasi di Internet (Daniswara, 2018).

Kerja Kolaborasi

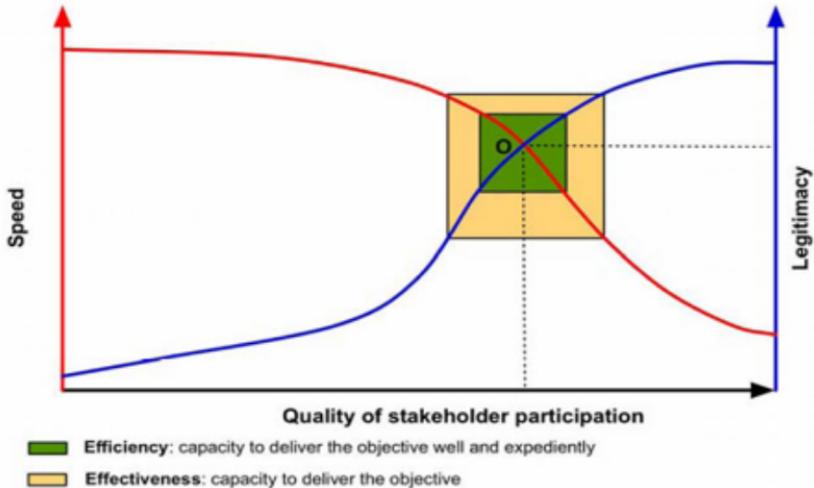
Dalam sebuah artikel ilmiah berjudul *The Science of Fake News* yang dimuat dalam majalah jurnal bergengsi *Science*, dijelaskan bahwa pada dasarnya kita akan lebih menyukai informasi yang menegaskan sikap dan posisi kita selama ini. Manusia akan merasa lebih nyaman mendapatkan informasi yang konsisten dengan keyakinan yang telah mereka miliki sebelumnya. Untuk itulah intervensi pendidikan sangat diperlukan untuk mengkonstruksi kemampuan dalam berpikir kritis, terutama di era post-truth saat ini (Lazer, 2018). Meskipun membangun kemampuan masyarakat umum dalam memilih dan memilih informasi melalui jalur pendidikan formal adalah intervensi jangka panjang, namun sudah saatnya untuk dilakukan segera. Edukasi literasi digital, perlu sedini mungkin dimulai dari institusi keluarga, yang lantas perlu diperkuat dengan pelibatan institusi sekolah (Kurnia, 2017).

Ibarat perjalanan pada padang pasir nan terik dan tandus, ternyata masih dapat ditemui sejumlah oase yang menyediakan ragam asupan bagi para pegiat literasi digital. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 terkait masuknya mata pelajaran informatika ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, adalah salah satu sinyal positif yang membahagiakan. Peraturan tersebut menetapkan kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran, salah satunya terkait sub-bahasan tentang Dampak Sosial Informatika.

Pada Februari 2019 telah diadakan konsinyering penyusunan bahan ajar informatika untuk tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK yang melibatkan sejumlah guru bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Inilah langkah awal yang perlu senantiasa dikawal serta didukung,

GNLD Siberkreasi sendiri telah memiliki jejaring kolaborasi tak kurang dari 100 institusi/lembaga, dengan kegiatan unggulan semisal School of Influencer dan Pandu Digital (pandudigital.id). Ada pula program Smart School Online (smartschoolonline.id) yang menyediakan sejumlah rujukan edukasi literasi digital secara gratis, melengkapi yang telah disimpan pula pada situs repositori khusus materi literasi digital di laman web literasidigital.id. Kemudian sejumlah inisiatif akar rumput juga telah hadir terlebih dahulu seperti kampanye Internet Sehat (internetsehat.id) sejak 2002 silam dan Relawan TIK Indonesia (relawantik.or.id) yang ribuan anggotanya tersebar dari Aceh hingga Papua. Inisiatif baru pun hadir dari gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah yang memiliki satuan karya (saka) Milenial (sakamilenial.scouts.id), dengan dua unggulan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) yaitu Bijak Media Sosial dan Pembicara Literasi Digital.

Sejumlah inisiatif unggulan sebagai medium perilaku konfirmasi (*checking behaviour*) juga telah dilakukan oleh sejumlah pihak. Sebutlah oleh mereka yang berkolaborasi dalam situs jejaring informasi cekfakta.com, stophoaks.id, dan turnbackhoax.id, dengan salah satu motornya dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (mafindo.or.id) yang secara berkala memberikan pembaharuan informasi dan penjelasan tentang beredarnya sejumlah kabar bohong terkini di Internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun secara mingguan merilis laporan ke publik terkait isu hoaks dan penjelasannya, serta membungkusnya secara kekinian via ikon “Miss Lambe Hoaks” via akun Instagram [@misslambehoaks](https://www.instagram.com/misslambehoaks) dan kanal YouTube di [s.id/lambehoaks](https://www.youtube.com/s.id/lambehoaks).



Gambar 4. Ilustrasi kualitas partisipasi pemangku kepentingan (Vallejo dan Hauselmann, 2014)

Tentu saja melakukan kerja-kerja kolaborasi multistakeholder ini adalah tantangan tersendiri mengingat kompleksitasnya terkait dengan legitimasi pemangku kepentingan, partisipasi dialog, dan efektifitas berikut efisiensi proses (Donny B.U., ed., 2018). Pun mengembangkan dan menyepakati sebuah standar umum yang perlu dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, tentu perlu kesabaran ekstra dalam melakukan hal sebagai berikut:

- a. menghargai kompetensi dan kultur masing-masing mitra/ pemangku kepentingan (stakeholder),
- b. adanya pendefinisian peran yang transparan dan dapat diandalkan dari setiap stakeholder,
- c. kapabilitas (kemampuan) dari para stakeholder untuk turut serta dalam proses dialog, dan
- d. keterbukaan di antara sesama stakeholder.

Para pekerja dan pegiat sektor literasi serta edukasi tentu paham, tidak ada yang instan dalam proses pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Ketika berkolaborasi dengan basis multistakeholder,

sejatinya menuntut kesabaran ekstra. Mengutip ungkapan dari seorang filsuf kenamaan, Aristotle, “the roots of education are bitter, but the fruit is sweet”, maka tak ada buah dari kesabaran selain perbaikan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan. Maka kolaborasi kerja para pegiat literasi digital Indonesia, bukanlah kerja picisan demi mengisi pundi-pundi pribadi semata. Ini adalah kerja untuk Indonesia yang lebih baik, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak kita siapa lagi. Salam literasi digital!

Daftar Pustaka

- B.U., Donny (penyunting), “Pengantar Tata Kelola Internet”, IGF Indonesia, 2018 <<http://literasidigital.id/books/pengantar-tata-kelola-internet/>>, diakses pada 19 Maret 2019
- Chomsky, Noam, wawancara oleh Al-Jazeera English pada 22 Desember 2018, <<https://www.youtube.com/watch?v=pf-tQYcZGM4>>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Christopher McConell, dkk, “Research: Political Polarization is Changing How Americans Work and Shop”, Harvard Business Review, 19 Mei 2017, <<https://hbr.org/2017/05/research-political-polarization-is-changing-how-americans-work-and-shop>>, diakses pada 11 Maret 2019
- Daniswara, Fahreza, “Fact Checking: The Missing Skill of the Social Media Generation”, CfDS UGM, 17 Oktober 2018, <<http://cfds.fisipol.ugm.ac.id/article/340/fact-checking-media-sosial-commentaries>>, diakses pada 19 Maret 2019
- Edwards-Levy, Ariel, “Nearly Half of Americans Have Gotten Into A Fight About The Election”, Huffington Post, 6 September 2016, <https://www.huffingtonpost.com/entry/nearly-half-americans-fight-election_us_57cb226ae4b0e60d31df66a2>, diakses pada 11 Maret 2019
- Garnesia, Irma, “Sana Sini Ngaku Milenial, Bagaimana Peta Milenial Indonesia?”, Tirto ID, 12 September 2018, <https://tirto.id/sana-sini-ngaku-milenial-bagaimana-peta-milenial-indonesia-cX5W>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Hull, Gordon, “Why social media may not be so good for democracy”, The Conversation, 6 November 2017, <https://theconversation.com/why-social-media-may-not-be-so-good->

- for-democracy-86285, diakses pada 11 Maret 2019.
- “Imperfect Information: Quality Uncertainty and the Market for Lemons”, diakses melalui <<https://www.slideserve.com/deanne/imperfect-information-quality-uncertainty-and-the-market-for-lemons>> pada 19 Maret 2019
- Indro Adinugroho, dkk., “Pandangan Kaum Muda Perkotaan terhadap Demokrasi di Tahun Politik 2019”, Institute of Public Policy Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Februari 2019, dapat diunduh melalui <<https://www.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-Rilisrisetpandangankaummillennialperkotaan.pdf>>
- Jansey dkk., “Building Blocks of an Echo Chamber”, 2015, diakses melalui <<https://phys.org/news/2015-05-climate-debate-fueled-echo-chambers.html>> pada 19 Maret 2019
- Kaiman, Jonathan, “Hong Kong protests bring crisis of confidence for traditional media”, The Guardian, 29 Oktober 2014, <<https://www.theguardian.com/world/2014/oct/29/hong-kong-protests-confidence-media>>, diakses pada 11 Maret 2019
- Kemp, Simon, “Digital Report of Indonesia 2019”, We Are Social and Hootsuite, 2019.
- Kurnia, Novi dan Astuti, Santi Indira, “Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Mitra”, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/download/16079/pdf_1>, diakses pada 19 Maret 2019
- Lazer, David dkk., “The Science of Fake News”, Science Magazine, Vol. 359 Issue 6380, <https://www.researchgate.net/publication/323650280_The_science_of_fake_news>, diakses pada 19 Maret 2019
- Lim, Merlyna, “Beyond fake news: social media and market-driven political campaigns”, The Conversation, 5 September 2017, <https://theconversation.com/beyond-fake-news-social-media-and-market-driven-political-campaigns-78346?utm_source=facebook&utm_medium=facebookbutton>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Perbawani, Pulung S. dkk., “Online Political Participation and Netizen Anonymity in Indonesia’s Digital Democracy”, PCD Journal Vol. VI, No. 2, 2018

- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, "Media Sosial Ungguli Koran Cetak Sebagai Sumber Berita", Kompas.com, 13 Desember 2018, <<https://tekno.kompas.com/read/2018/12/13/08374317/media-sosial-ungguli-koran-cetak-sebagai-sumber-berita>>, diakses pada 11 Maret 2019
- Posetti, Julie dan Ireton, Cherilyn, "Journalism, 'Fake News', and Disinformation", Paris: UNESCO, 2018
- Tapsell, Ross, "Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital", Yogyakarta: Marjin Kiri, 2018
- Tempo.co, <https://investigasi.tempo.co/generasi-muda-dan-politik/>, diakses pada 11 Maret 2019
- Vallejo dan Hauselmann, "Speed versus Legitimacy", 2004, diakses melalui <https://www.researchgate.net/figure/Speed-versus-legitimacy-Vallejo-and-Hauselmann-2004_fig1_312942139> pada 19 Maret 2019
- Vosaughi, Soroush dkk., "The Spread of True and False News Online", MIT Initiative on the Digital Economy Research Brief, 2017, <<http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/2017%20IDE%20Research%20Brief%20False%20News.pdf>>, diakses pada 19 Maret 2019
- Wardle, Claire dan Derakhshan, Hossein, "Module 2: Thinking about 'Information Disorder': formats of misinformation, disinformation, and mal-information", UNESCO, 2018, diakses melalui <https://en.unesco.org/sites/default/files/f_jfnd_handbook_module_2.pdf> pada 19 Maret 2019

Literasi Digital Dalam Era Disrupsi

Penulis: Firly Annisa (Japelidi)

Kegaduhan politik nasional pasca-pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2016 menjadi ujian berdemokrasi bangsa Indonesia. Resonansi politik identitas yang berujung pada ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta menguatnya sentimen agama menjadi kondisi riil peranan media sosial dalam mendiseminasikan gagasan dan informasi. Berita-berita bernada propaganda tidak hanya menyoal pada momentum pilihan politik, tetapi lebih daripada itu. Perubahan masyarakat dalam bermedia sesungguhnya tidak hanya membuat gesekan sosial dalam konteks kontestasi politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dua tahun terakhir, istilah disrupsi sering dibicarakan dalam forum akademis di Indonesia. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan kebiasaan bermedia masyarakat

hingga memberi pengaruh dalam pilihan politik individu maupun kelompok. Seringkali dibicarakan dalam konotasi yang negatif. Lantas apa sesungguhnya yang disebut disrupsi? Clayton Christensen dalam buku *The Innovator's Dilemma* (1997) menekankan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya bertemu dan melayani kebutuhan konsumen, melainkan harus pula mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa depan. Inovasi menjadi kata kunci sebab teknologi dan kreativitas menjawab setiap perubahan zaman. Inovasi menurut Christensen dalam konteks bisnis dimaknai sebagai kekuatan perusahaan kecil yang mampu memaksimalkan sumber daya minim untuk berkompetisi dalam pasar dan dapat menggusur sistem yang sebelumnya telah berjalan.

Literasi Digital untuk Menyambut Perubahan Zaman

Lalu apa hubungannya antara teori disrupsi dengan literasi digital dan masyarakat di era Revolusi Industri 4.0? Menurut Castell (2004), diperlukan waktu seratus tahun pada setiap jenjang revolusi industri. Berturut-turut Industri 1.0 berawal dari penemuan mesin uap pada tahun 1784, disusul penemuan energi listrik pada tahun 1870 sebagai penanda masuknya Revolusi Industri 2.0. Kemudian masuk ke era Revolusi Industri 3.0 tahun 1969 saat ditemukannya komputer dan listrik. Menariknya, perjalanan menuju ke jenjang Revolusi Industri 4.0 tidak memerlukan waktu 100 tahun. Tentu saja ini kenyataan yang menarik atas kemudahan hidup manusia dari waktu ke waktu, sekaligus tantangan yang menuntut kesiapan perubahan seluruh elemen bangsa di dunia termasuk di Indonesia.

Tidak hanya di negara berkembang, era disrupsi juga mengacaukan aturan ketenagakerjaan di negara maju seperti Perancis. Perubahan ini terjadi saat aplikasi taksi daring Uber mulai muncul pada pertengahan tahun 2015. Ancaman atas keberadaan sopir taksi konvensional tidak hanya menyoal pada tarif, tetapi juga menerabas aturan mengenai aturan izin mengemudi. Pasalnya sebelum bisa meluncur ke jalan, sopir taksi harus membayar lisensi sebesar 300.000 euro atau setara dengan empat milyar rupiah sebagai jaminan dana pensiun. Aturan ini sudah terkoneksi dengan undang-undang ketenagakerjaan negara Perancis.

Aplikasi Uber tentu mengacaukan sistem yang telah turun-temurun terbangun. Apalagi untuk menjadi pengemudi Uber, seseorang tidak perlu lagi terdaftar di bawah perusahaan resmi yang dilindungi undang-undang sebab siapapun yang mengendarai mobil dapat bekerja untuknya. Situasi yang sangat dinamis ini kemudian langsung direspon oleh pemerintah Perancis dengan mengeluarkan "Le Taxi" platform aplikasi baru yang bertujuan menyaingi Uber pada tahun 2016.

Perubahan ini di satu lain menguntungkan karena membentuk sharing economy tanpa adanya sekat institusi formal, umur, latar belakang profesi, bahkan kelas sosial. Hal ini juga membuat posisi individu di era

disrupsi sangat cair. Dalam sharing economy, seorang dapat bekerja sebagai dokter di pagi hari dan bisa lanjut bekerja untuk Uber lepas jam kantor. Peniadaan strata sosial karena teknologi terjadi dapat dimaknai sebagai hilangnya struktur kelas yang disebut oleh Karl Marx sebagai masyarakat sosialis. Mimpi Marx justru terjadi di era ekonomi neoliberal yang berpijak pada poin-poin kebebasan pasar, pengurangan jaminan keamanan bagi kelompok miskin, dan privatisasi sektor-sektor yang mengurus hajat hidup orang banyak.

Namun di lain sisi, disrupsi menciptakan banyak dilema baru. Perusahaan modern mulai mengandalkan inovasi teknologi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja masa kini membutuhkan keterampilan yang tinggi seperti analisis bisnis, auditor, dan teknisi digital. Sementara lowongan bagi pekerja kurang terampil semakin berkurang. Hal ini perlu direspon dengan penyesuaian kurikulum pelajaran literasi digital.

Disrupsi dalam Konteks Literasi Digital

Pada buku *The Participatory Culture in a Networked Era* (2016), Professor Henry Jenkins dan Danah Byod menjelaskan bahwa praktik komunikasi dalam era jaringan akan selalu terkait dengan teknologi yang tersambung Internet. Dalam partisipasi ini, kemampuan literasi digital menjadi instrumen penting yang memberdayakan masyarakat. Instrumen-instrumen ini menjadi bekal bagi individu untuk beradaptasi dan berkarya di era digital.

Instrumen pertama adalah afiliasi: dalam menggunakan teknologi, individu harus mampu aktif membagi dan mengkritisi informasi. Kedua ialah ekspresi, bahwa pengguna media Internet mampu mencipta konten kreatif seperti video resep masakan, tutorial, maupun parodi musik yang tujuannya merespon kinerja pemerintah. Ketiga adalah kolaborasi, yang tercermin dari aktivitas mencari solusi bersama seperti yang bisa disaksikan melalui platform kontributif Wikipedia—ketika masyarakat saling menambahkan informasi sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru. Terakhir sirkulasi, ketika media sosial memiliki dampak signifikan dalam kerja-kerja meneruskan informasi dari satu sumber ke pembacanya. Masyarakat pun bisa turut secara

aktif berperan menentukan agenda publik.

Ini yang membuat budaya partisipatoris berkembang, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media tetapi juga urun rembug dalam membentuk arah peradaban. Dalam era disrupsi, literasi digital hendaknya tidak terhenti pada langkah antisipasi persebaran, ujaran kebencian, radikalisme, atau semacamnya. Literasi digital perlu dimantapkan dengan poin-poin ajar yang lebih mutakhir, seperti komunikasi publik dan berpikir kritis. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia dapat bertransformasi menjadi insan yang lebih produktif dan inovatif—supaya tidak terlindas roda perkembangan zaman dan pemerataan akses ekonomi dapat lebih merata.

Daftar Pustaka

- Castells, M., 2004. *The network society: A cross-cultural perspective*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Clayton, Christensen, Clayton., 1997. *The Innovator Dilemma's*. United States: Harvard Business Review Press
- Jenkins, H. 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Intersect*. New York: New York University Press.

Suara Generasi Milenial & Demokrasi Digital

Penulis: Rita Gani & Ratri Rizki Kusumalestari (Japelidi)

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Kehadiran teknologi digital tak dapat dimungkiri telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia, apalagi di dalam masyarakat yang saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kesenjangan bukan lagi ditentukan oleh perbedaan kelas-kelas sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam mengakses informasi. Keberadaan media baru yang berbasis internet membuat arus informasi semakin tidak terbendung, sehingga tercipta istilah realitas kedua, yakni realitas dunia maya. Realitas dunia nyata dan dunia maya

seolah merupakan dua hal yang tidak boleh saling bertentangan, karena seharusnya dunia maya merupakan pencerminan dari dunia nyata. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Tak jarang keduanya justru sangat bertentangan. Realitas yang dikonstruksi di dunia maya sering kali ditanggapi secara salah oleh warganet atau netizen. Ini disebabkan oleh realitas dunia maya yang bersifat mereduksi realitas yang ada di dunia nyata.

Keberadaan media sosial dan chat group sebagai salah satu bentuk nyata perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sekali lagi memiliki sifat seperti dewa Janus yang pada satu sisi memberikan dampak positif dan di sisi lain

memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang paling merusak adalah menyebarnya berita bohong dan kebenaran semu yang tak jelas lagi mana hal yang nyata dan tidak nyata. Media sosial dan chat group telah menjadi ruang baru bagi penggunaannya untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa batasan sosial. Orang merasa tidak perlu bertanggungjawab setelah memaki, mencemooh dan menghina orang lain di dunia maya. Orang juga tidak merasa bertanggungjawab atas sebuah 'klik' yang menyebarkan berita bohong atau konten lain yang tidak benar. Hal yang membahayakan sebenarnya terjadi ketika berbagai pernyataan yang bertebaran di dunia maya dijadikan dasar dan pijakan untuk memutarbalikkan fakta, sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Contoh nyata yang belakangan ini sangat dirasakan terjadi di Indonesia adalah dalam proses demokrasi.

Kehadiran era digital akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat selama hampir dua dasawarsa terakhir berdampak pada semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya meliputi proses demokrasi. Perubahan ruang demokrasi kita, terutama dalam tahun politik 2019 ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Setiap individu yang menjadi bagian masyarakat memiliki peran fundamental sebagai pengawas, sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini mereka dapat mengawasi kinerja pemerintah, bahkan menanggapi hingga memberikan solusi. Perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia berlangsung dalam sebuah ranah yang baru yakni ranah digital. Demokrasi digital meningkatkan interaktifitas dalam hal komunikasi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politik, atau antara kelompok kepentingan dan pembuat kebijakan. Masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, di mana penggunaannya mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh konsekuensi langsung atas pesan (Severin dan Tankard, 2001: 370). Fenomena ini menempatkan demokrasi digital Indonesia dalam posisi harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Salah satu tantangan terbesar demokrasi digital dan media

sosial adalah masuknya era post-truth. The Oxford Dictionaries mendefinisikan “post-truth” sebagai “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.” Dalam kondisi demikian, berita bohong seolah mendapatkan kesempatan untuk tumbuh subur dan menjamur, yang mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan atau kepercayaan pribadi. Dalam konteks politik dan pesta demokrasi, menurut Michael A. Peters dkk.

“The ‘creation’ of opinion and dissent is not only more speedy than ever it has been. What starts off inside social media may also be taken up by interests other than the distraught potential voter. They may equally be amplified and given further tweaking by lobbies and by the popular press, which occupy an intermediary position between political party stricto sensu and public opinion.” (Peters., et.al., 2018:7)

Terbentuknya pendapat dan terciptanya perbedaan pendapat tidak hanya lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang bermula di media sosial juga dapat diambil oleh kepentingan lain selain dari calon pemilih yang masih bingung dengan pilihan mereka. Ini sangat rentan bagi para pemilih muda, karena banyak di antara mereka yang masih menjadi ‘swing voters’, mudah berpindah dari satu pilihan ke pilihan lainnya. Mereka juga dapat diperkuat dan dipengaruhi lebih lanjut oleh lobi-lobi dan media atau pers populer, yang menempati posisi perantara di antara partai politik “stricto sensu” dan opini publik. Dikatakan pula bahwa dalam menganut pandangan yang sangat menarik dan tegas pada teori politik, ‘post-truth’ mengingatkan bahwa tahap suram dari perkembangan politik yang nampak terburu-buru, sangat terlihat nyata.

Tantangan lain dalam demokrasi digital adalah munculnya orang-orang dan golongan yang ingin didengar pendapatnya oleh orang lain. Mereka ramai memperjuangkan nilai, ideologi, kepentingan, dan tendensi lainnya yang menurut mereka benar. Dalam konteks

pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan, riuhnya ruang publik siber yang dipenuhi dengan pertarungan pendapat virtual ini seringkali tidak jelas arahnya dan membingungkan bagi para pemilih pemula.

Menurut Frans Djalong dan Hendrikus Kaunang dalam Paper Jurnal Depkoinfo 2017, masalah utama di balik praktik demokrasi digital antara lain adalah depolitisasi kaum muda, oportunistik oligarki, dan normalisasi konflik elit serta eskalasi politik identitas. Argumen utamanya adalah bahwa teknologi informasi, media sosial khususnya, menjadi instrumen dan arena belajar demokrasi yang efektif sepanjang praktik tersebut berlaku sebagai kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penguatan kewarganegaraan yang aktif, dan mendorong pelembagaan representasi politik (<http://democracydevelopmentsecurity.org>). Masalah pertama yang terkait dengan kaum muda merupakan masalah yang cukup serius mengingat posisi mereka sebagai digital native yang sangat akrab dengan media digital. Dalam proses demokrasi yang salah satunya adalah pesta demokrasi, kaum muda merupakan suara yang sangat potensial untuk kepentingan politik partai dan golongan tertentu.

Suara Generasi Milenial

Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia selalu memunculkan beragam hal yang unik, baik yang berkaitan dengan tokoh yang terlibat dalam kontestasi pemilihan tersebut, maupun berbagai peristiwa yang menyertainya. Tahun 2019 merupakan kali pertama pemilihan umum dilakukan secara serentak. Pada tanggal 17 April 2019 mendatang, pemilih akan menerima lima surat suara untuk mencoblos presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPRD 2, dan DPD. Masing-masing surat suara di tandai dengan warna yang berbeda yaitu warna Kuning untuk DPR RI, Merah untuk DPD RI, Biru untuk DPRD Provinsi, Hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan Abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden/Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif merupakan tantangan bagi Komisi pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu yang sukses dan damai. Karena dominasi pemberitaan seputar pemilihan Presiden/Wakil Presiden, akibatnya cukup banyak masyarakat yang kurang tahu tentang

pemilihan anggota legislatif, terutama bagi pemilih pemula yang notabene belum mempunyai pengalaman ikut serta dalam pemilu. Maka tak heran, bila sejauh ini angka golput meningkat di kalangan mereka, ini merupakan bentuk partisipasi politik yang rendah.

Partisipasi Pemilih Pemula

Sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu tahun ini sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu atau dalam kegiatan politik, baik berupa aktivitas masyarakat dalam memilih para calon pemimpin, tidak menyebarkan hoaks politik, melakukan kampanye damai dan sebagainya. Huntington dan Nelson (1990:10) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini kita melihat bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pemilu selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Merujuk pada definisi tersebut, maka bentuk partisipasi politik dilakukan individu dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri, sedangkan sifat partisipasi politik tersebut adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

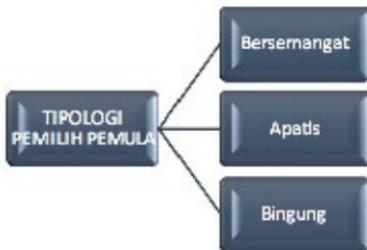
Ramadhanil dkk (2015:2) menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu, antara lain diwujudkan berupa:

1. Melaksanakan sosialisasi pemilu;
2. Melaksanakan pendidikan pemilih;
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu;
4. Memberikan suara sebagai pemilih;
5. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu;
6. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu;
7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu;
8. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran

- pemilu;
9. Melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon;
 10. Melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (quick count).

Terkait dengan bentuk partisipasi tersebut, maka menarik kiranya melihat bagaimana partisipasi para pemilih pemula terhadap pelaksanaan Pemilu tahun ini, terutama di tengah berbagai silang pendapat dan debat para calon pendukung (tim sukses) presiden dan wakil presiden yang semakin marak di media sosial.

Untuk menunjang data dalam tulisan ini, Kami melakukan survei kecil terhadap 6 kelas yang terdiri dari mahasiswa semester empat dan semester dua. Rata-rata setiap kelas beranggotakan 40 orang mahasiswa. Mereka adalah anak-anak muda yang berada di kisaran usia 17-19 tahun yang notabene adalah sebagai pemilih pemula. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang dilakukan secara acak kepada laki-laki dan perempuan, ada beberapa tipologi pemilih pemula yang kami dapatkan seperti gambar berikut ini :



Gambar : Tipologi Pemilih Pemula

Dalam gambar di atas kita melihat ada tiga tipologi pemilih pemula, berbagai alasan juga dikemukakan untuk menjelaskan tipologi tersebut, antara lain:

1. Pemilih pemula yang semangat (antusias): hal ini disebabkan karena Pemilu 2019 merupakan pengalaman pertama mereka sebagai pemilih (jumlahnya sangat sedikit dan umumnya yang bersemangat adalah mahasiswa perempuan). Beberapa menjelaskan kalau pengalaman pertama memilih ini bisa menjadi konten yang menarik di media sosial yang mereka miliki.
2. Pemilih pemula yang apatis: umumnya disebabkan oleh informasi yang beredar seputar calon pemimpin sangat membingungkan dan

banyak berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (jumlahnya cukup banyak dan umumnya adalah mahasiswa laki-laki). Untuk pemilihan presiden, sikap apatisisme juga muncul dari debat yang tak berkesudahan para pendukung dan tim sukses.

3. Pemilih pemula yang bingung: karena sejauh ini masih belum melihat calon presiden dan wakil presiden yang mumpuni untuk memimpin negara ini. Mereka juga bingung dengan banyaknya surat suara dan caleg yang tidak dikenal. Beberapa responden menjelaskan bahwa mereka juga tidak begitu paham perbedaan antara DPD, DPR, DPRD (jumlah ini cukup mendominasi baik laki-laki maupun perempuan)

Tipologi tersebut tidak jauh berbeda dengan data beberapa mahasiswa tingkat akhir yang sebelumnya sudah pernah memilih pada tahun 2014. Menariknya, dalam beberapa perbincangan terlihat bahwa mahasiswa perempuan cenderung bersemangat mengikuti pemilu, tetapi di sisi lain malas membicarakan tentang politik. Bila merujuk pada sepuluh poin bentuk partisipasi di atas, maka partisipasi politik yang ditunjukkan oleh kalangan milenial di beberapa kelas yang terdata dalam penelitian kecil ini cukup rendah, karena partisipasi mereka masih dalam bentuk memilih dan mendukung para kondestan.

Suara generasi millennial adalah “suara kekinian” yang hendaknya menjadi bagian khusus yang harus diperhatikan oleh para calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan “bertarung” nanti. Ini menjadi salah satu alasan mengapa peserta pemilu tahun ini di semua tingkatan pemilihan seolah berlomba-lomba “memudahkan” diri demi menarik hati para milenial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Generational Lifestyles Survey (2015), usia mahasiswa berada pada klasifikasi generasi Z (usia 15-20) dan generasi milenial (usia 21-34 tahun), atau secara umum dikenal dengan istilah digital native. Mereka adalah generasi yang lahir dari revolusi teknologi, terhitung sangat akrab dengan teknologi digital dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan perangkat digital. Karena itu, menonton acara televisi (yang sering menjadi media pilihan untuk menayangkan acara debat capres dan jenis talkshow politik lainnya), dan membaca surat kabar bukan lagi menjadi bagian kebiasaan mereka. Televisi dan surat kabar adalah jenis media massa yang bagi mereka hanya sekadar ada

tetapi kurang menarik untuk diakrabi.

Generasi milenial ini mengalami perubahan pada pola konsumsi media, ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mick Counihan (1972) dalam Morley dan Brunsdon bahwa "orientasi "apa yang dilakukan media pada khalayak" kini telah bergeser menjadi " apa yang dilakukan khalayak pada media". Hal ini disebabkan oleh khalayak yang kini cenderung lebih aktif memilih produksi media sesuai cara pandang dan kebutuhan media. Bagi mereka, kegiatan menonton acara televisi atau membaca surat kabar seperti "paksaan" dan tidak menyenangkan. Karena itu kanal Youtube dan berbagai situs berita daring (online) adalah pilihan utama mereka untuk mengetahui berbagai perkembangan dan peristiwa di sekitarnya.

Dalam survei yang kami lakukan di berbagai kelas saat pertama masuk, terungkap saat ini rata-rata mahasiswa memiliki akun media sosial antara 6-8 jenis dan digunakan aktif setiap hari. Akun media social favorit masih didominasi oleh Instagram dan Twitter, beberapa memiliki Facebook tetapi banyak yang tidak aktif. Dari bangun hingga menjelang tidur, mereka mendapatkan informasi, hiburan, belajar sekaligus berbagai pengaruh dari berbagai jenis media baru tersebut. Kondisi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baran dan Davis (2003:10) bahwa perkembangan teknologi dalam industri komunikasi menyebabkan konsumen media kontemporer lebih memiliki kontrol atas muatan sekaligus seleksi media. Karena pilihan media mereka saat ini adalah media massa baru yang berbasis internet (digital), wajar kiranya bila rangkaian informasi yang tersalurkan lewat televisi dan surat kabar tidak mereka ketahui.

Menyimak berbagai kondisi ini, maka para pasangan calon yang akan "bertarung" program demi menduduki berbagai posisi dalam pemilu 2019 perlu memikirkan berbagai pendekatan dan strategi untuk menjangkau suara generasi milenial ini, khususnya jenis media massa yang digunakan untuk menyampaikan visi dan misi program. Kampanye tidak lagi cukup hanya sekadar halo-halo program dan kegiatan menarik para pasangan di berbagai media sosial, karena pada kenyataannya tidak semua pasangan calon diikuti (follow) oleh para pemilih pemula. Akan lebih menarik bila setiap pasangan calon

bisa memanfaatkan antusiasme pengalaman pertama mereka sebagai pemilih pemula, dalam berbagai kegiatan nyata.

Kecenderungan Golput

Salah satu hal yang kerap muncul dalam setiap pemilu adalah terjadinya fenomena golongan putih (golput/tidak memilih) yang biasanya terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Tingginya angka golput dalam setiap pemilu menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, dan kondisi ini terjadi di negara manapun. Di Indonesia, angka golput cenderung mengalami peningkatan pada setiap pelaksanaan pemilu, belakangan ini terjadi pada kalangan anak-anak muda atau generasi milenial.

Secara ideal, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Karena tingginya angka partisipasi politik pemilih dalam setiap pemilu merupakan potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi pemilih, khususnya dalam empat pemilu terakhir pasca reformasi, merupakan tantangan besar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Indikasi penurunan ini sudah terasa di Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 serta dalam pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah, di mana tingkat partisipasi pemilih terlihat semakin rendah dibandingkan pada Pemilu 1999. Penurunan ini tentu berdampak secara politik pada legitimasi hasil pemilu itu sendiri, meskipun tidak menjadi problem dalam prosedural demokrasi. Secara detail, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa angka golput menunjukkan tren yang meningkat yang menunjukkan rendahnya angka partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu. Pada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955, tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60%, lalu turun sebanyak 5,2% menjadi 3,4 % pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.

Hadirnya era reformasi dengan sistim pemilihan langsung ternyata tidak mengurangi masyarakat yang memilih untuk golput. Pemilu

yang diadakan sejak era reformasi, yakni pada tahun 2004, 2009, dan 2014 juga memunculkan angka golput yang cukup tinggi. Dibanding pelaksanaan pemilu 1999, pada tahun 2004 tercatat jumlah angka golput meningkat sebesar 15,90% untuk pemilihan legislatif. Sementara untuk pemilihan presiden yang waktu itu mengalami dua putaran, angka golputnya adalah 21,80% (putaran pertama) dan 23,40% (putaran kedua). Angka ini kembali naik pada pemilu 2009, yakni 29,10% untuk pileg dan 28,30% untuk pilpres. Jumlah angka golput untuk pemilihan legislatif pada pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi 24,89% namun untuk pemilihan presiden ketidakpercayaan masyarakat yang diungkapkan melalui golput naik menjadi 29,01%.

Dalam beberapa bulan menjelang hari pemilihan April mendatang, berbagai kampanye damai dilakukan oleh berbagai pihak untuk menarik para pemilih. Para calon pemimpin dan wakil rakyat sepakat untuk memenangkan hati pemilih dan membujuk masyarakat untuk tidak menjadi golput. Sasaran kampanye tidak saja kalangan masyarakat umum, tetapi juga membidik kalangan-kalangan yang lebih spesifik seperti alumni, “emak-emak”, generasi milenial yang tergabung dalam berbagai komunitas, dan sebagainya.

Ada banyak alasan mengapa para generasi milenial dalam konteks riset kecil ini melakukan golput. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja misalnya, mereka merasa kedua pasangan calon tersebut tidak menarik. Banyak yang memberikan alasan memilih golput karena mereka tidak suka dengan berbagai orang yang ada di sekeliling capres dan cawapres (terutama tim sukses) yang selalu berdebat di berbagai ruang media massa, seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa berikut :

“Kalau untuk capres dan cawapres sebenarnya baik-baik saja, Bu. Tapi saya tidak suka dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya contohnya tim suksesnya itu, yang membela seolah para calon tersebut tak ada salah.” (Hasil wawancara di kelas, Selasa 26 Februari 2019)

Sedangkan untuk konteks pemilihan wakil rakyat, golput umumnya

beralasan karena mereka kurang mengenal para caleg, meskipun wajah-wajah mereka sudah “memenuhi” ruang publik selama masa kampanye. Persoalan tidak ada program yang “menarik dan inovatif” menjadi alasan lainnya untuk golput, seperti beberapa pernyataan berikut ini:

“Kalau untuk pemilihan wakil rakyat, saya tak tahu siapa saja yang kompeten. Banyak foto mereka di pinggir jalan, jadi bingung milihnya, tak tahu juga program kerjanya, apalagi yang dari artis.” (Hasil wawancara di kelas, Selasa 26 Februari 2019)

“Mungkin akan golput terutama untuk milih caleg. Saya tak tahu siapa saja yang layak saya pilih. Foto-foto yang bertebaran di baliho dan spanduk banyak sekali, bikin bingung. (Hasil wawancara di kelas, Rabu 27 Februari 2019)

Beberapa petikan wawancara tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan para pemilih pemula pada calon-calon pemimpin negeri, dan ini merupakan salah satu bentuk sikap yang dipilih dan dilakukan secara sadar. Dalam konteks psikologi, ini dikenal juga dengan sikap apatis. Sikap apatis yang ditunjukkan melalui tidak memilih ini memang bukan barang baru dalam panggung politik di negeri ini, karena data-data golput di atas membuktikan bahwa hal ini sudah ada sejak dulu. Ada beberapa penyebab apatis muncul dalam diri masing-masing individu, di antaranya adalah matinya nilai-nilai di masyarakat, matinya rasa kepedulian, hilangnya respek atau nurani, serta pandangan tentang keadilan yang membutuhkan masyarakat akan hukum. Tindakan apatis ini sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik, dan kehidupan bernegara.

Apatisme politik adalah sikap masyarakat yang masa bodoh terhadap berbagai gejala politik. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh rendahnya ketertarikan dan kepercayaan masyarakat kepada politik selain juga dominasi politik yang diciptakan oleh beberapa golongan tertentu untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri ataupun golongannya. Jika dikaitkan dengan pilihan politik dalam pemilu dan pilpres, menurut Alfan Alfian dalam buku “Demokrasi Pilihlah Aku”, terdapat dua ekspresi yang ditunjukkan terkait sikap apatis ini, salah satunya adalah dengan memilih untuk menjadi golput dan tidak

memilih partai apa pun menjadi pilihan politiknya.

Penutup

Kehidupan demokrasi di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, namun persoalan klasik tak bisa dihilangkan begitu saja meskipun perkembangan teknologi seharusnya mengiringi situasi demokrasi yang positif. Karena itu, menjadi tugas bersama dari berbagai kalangan untuk menyebarkan informasi yang positif terutama pada pemilih pemula sehingga menaikkan angka partisipasi memilih dalam setiap pemilu. Semoga pemilihan umum tahun ini menjadi acuan bagi terciptanya demokrasi yang positif di tahun-tahun mendatang.

Daftar Pustaka

- Alfian, Alfian. 2012. *Demokrasi Pilihlah Aku*. In-Trans Publishing.
- Kusumalestari, Ratri R. *Demokrasi a la Netizen: Fenomena Ruang Publik Pemicu Kegagalan Pemilih Muda*. 2014. *Lustrum Komunikasi: Konferensi Nasional Komunikasi Politik*.
- Lievrouw, Leah A. & Livingstone, Sonia M. (2006). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. SAGE. London.
- McIntyre, Lee. 2018. *Pos-Truth*. Massachusetts Institute of Technology.
- Michael A. Peters et.al. (2018). *Post-Truth, Fake News: Viral Modernity & Higher Education*. Springer. Singapore.
- Preston, Paschal. (2001). *Reshaping Communications: Technology, Information and Social Change*. SAGE. London.
- Ramadhanil, Junaidi, dan Ibrahim (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta
- Severin, Joseph Werner. & Tankard, James W. (2001). *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. Longman. New York.
- Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. 2013. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12. Partisipasi Warga Masyarakat dalam*

Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Sumber lain :

Gani, Rita, 2018, Suara Generasi Milenial, Tulisan Opini di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, 20 Maret 2018

Tantangan Membangun Perdamaian di Era Milenial

Penulis: Astri Dwi Andriani (NXG)

Era Milenial dan Generasi “Y”

Saat ini kita memasuki era digital di mana seluruh aspek kehidupan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dalam satu dasa warsa pertama di abad 21 (Schmidt, 2014:xii), jumlah orang yang terhubung ke Internet di seantero dunia melesat dari 350 juta jiwa menjadi lebih dari 2 miliar jiwa. Pada tempo yang sama, jumlah pelanggan telepon seluler melambung dari 750 juta hingga 5 miliar (kini lebih 6 miliar jiwa).

Berdasarkan data statistik pengguna Internet di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia

menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per-hari. Sementara penggunaan Internet melalui smartphone atau telepon genggam sekitar 2,5 jam perhari (Santosa, 2015:65). Masa ini juga disebut sebagai masa milenial. Era yang merupakan kelanjutan dari era global ini telah menimbulkan tantangan-tantangan baru yang harus diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kosakata milenial berasal dari bahasa Inggris millennium atau millennia yang berarti masa seribu tahun (Echols, dalam Nata 2018:11).

Generasi yang hidup di masa ini disebut sebagai generasi milenial atau biasa disebut generasi “Y”, dikenal lahir antara tahun 1980 sampai 2000. Masih sedikit studi

di Indonesia yang menyinggung generasi milenial, namun di beberapa negara seperti Amerika sudah ada riset mengenai generasi ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika dalam Hasibuan (2018) yang menemukan bahwa generasi milenial memiliki suatu keunikan dibanding generasi sebelumnya (generasi X). Perbedaannya terletak pada penggunaan teknologi dan budaya pop. Generasi milenial lebih cenderung membutuhkan teknologi, Internet, dan hiburan dibandingkan makanan. Bahkan bisa juga dikatakan teknologi merupakan kebutuhan primer bagi generasi milenial, bukan lagi menjadi barang tersier seperti yang diajarkan ketika Sekolah Dasar (SD) dulu.

Generasi milenial ini sangat kental dipengaruhi oleh teknologi digital. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorisasi sebagai generasi digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir (Kemendikbud RI, Juli 2016:9). Generasi digital ini memiliki ciri-ciri yang dapat ditelaah dari aspek identitas, privasi, kebebasan berekspresi dan proses belajar.

Rahmat (2018:144) menyebutkan bahwa ciri utama generasi milenial masa kini dirangkum dalam 3C, yakni connected, creative, dan confidence:

- Connected berarti generasi ini merupakan pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang diikuti. Generasi ini juga aktif berselancar di media sosial dan internet. Generasi milenial sangat fasih menggunakan facebook, Twitter, Path, dan Instagram maupun media sosial lainnya.
- Creative berarti generasi ini terdiri dari orang-orang yang biasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Generasi milenial termasuk generasi kreatif, salah satu bukti yang menunjukkan adalah tumbuhnya industri startup dan industri kreatif lain yang dimotori anak muda.
- Confidence berarti bahwa anak generasi ini merupakan kumpulan orang-orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan berdebat di depan

publik. Karakter tersebut terkonfirmasi jika kita melihat generasi milenial tidak sungkan berdebat melalui media sosial.

Di sisi lain, John Naisbitt (2004) berpendapat bahwa ketergantungan generasi milenial terhadap internet menimbulkan kondisi yang disebut sebagai Zona Mabuk Teknologi. Sebutan ini merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan kondisi masyarakat saat ini, yang menurutnya tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi. Menurutnya ada enam hal yang disebut dengan Gejala Zona Mabuk Teknologi, yakni: 1). lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi, 2) takut sekaligus memuja teknologi, 3) mengaburkan perbedaan antara yang nyata dengan semu, 4) menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar, 5) mencintai teknologi dalam wujud mainan, dan 6) menjalin kehidupan yang berjarak. Dalam konteks ini, ia menggambarkan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang niscaya dan dibutuhkan oleh semua orang, termasuk yang mengecam, atau membentuk kehadiran teknologi itu sendiri, meski secara tidak sadar para pihak pengecam tersebut tetap membutuhkannya.

Dalam era ini banyak tantangan yang dihadapi generasi milenial. Dua utama diantaranya adalah hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam demokrasi dan mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Hoaks, Tantangan Demokrasi di Era Milenial

Hoaks berkaitan dengan ketidakjujuran atau tindakan berbohong. Berbohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) diartikan sebagai menyatakan sesuatu yang tidak benar. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Mitchell dalam Gani, 2016: 16). Coleman dan Kay (1981) merumuskan tiga karakteristik berbohong. Pertama, pembicara menyatakan sesuatu yang tidak benar. Kedua, pembicara yakin bahwa yang dia katakan tersebut memang salah. Ketiga, pembicara memang bertujuan untuk mengelabui mitra bicara. Karakteristik ketiga tersebut sesuai dengan pendapat Peterson (1995), Suckerman, DePaulo, dan Rosenthal (1981), dan Paul Ekman (2007) yang dirangkum oleh Gani (2016: 18) bahwa bohong adalah “sebuah aksi (ekspresi/ perkataan/tindakan)

tanpa pemberitahuan sebelumnya yang bertujuan untuk mengubah pendirian seseorang agar menjadi percaya.”

Baryadi (2013: 360-361) menyebutkan ada tujuh macam cara berbohong. Yang pertama adalah berbohong dengan mengganti hal yang sebenarnya dengan hal lain yang tidak sebenarnya. Kedua, berbohong dengan mengurangi atau memperkecil hal yang sebenarnya, seperti melakukan tindakan plagiat parsial. Ketiga, berbohong dengan menambah hal yang sebenarnya dengan hal lain sehingga menjadi berlebihan, seperti me-mark up anggaran. Keempat, berbohong dengan merekayasa suatu cerita yang tidak didasarkan pada peristiwa yang tidak sungguh-sungguh terjadi seperti mengarang cerita. Kelima, berbohong dengan cara tidak menepati janji. Keenam, berbohong dengan mengaku dirinya memiliki status atau profesi tertentu yang sebenarnya tidak dimilikinya, seperti mengaku masih bujang padahal sudah berkeluarga. Ketujuh, berbohong dengan tidak mengakui kesalahannya.

Informasi bohong atau hoaks yang disebar di ruang digital cukup beragam. Mulai bidang politik, kesehatan, sosial ataupun keamanan dan ketertiban. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan menyesatkan di kalangan masyarakat. Dalam perspektif konstruktivis, realitas sosial tidak terlepas dari konstruksi pemikiran. Dengan begitu, informasi palsu yang terus menerus memapar masyarakat lama-lama akan dianggap sebagai realitas atau kebenaran. Dampak lebih jauh, muncul pula kekhawatiran informasi hoaks bisa mengganggu kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia.

Muhtadiah (2018:37) mengatakan bahwa negara yang fondasi demokrasinya lebih maju dari Indonesia juga lebih dahulu mengalami hal ini. Pemilihan Presiden Amerika Serikat akhir 2016 kerap menjadi rujukan soal dampak negatif informasi palsu dan penuh kebohongan. Kekalahan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton disebut-sebut dampak dari informasi palsu yang menyebar luas di media sosial menjelang pemungutan suara pada November 2016. Implikasinya, hingga kurang sepekan sebelum pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, rakyat AS masih terpecah. Perpecahan itu juga diperuncing perang kata-kata antara pendukung Trump dan mereka

yang mengkritik.

Hoaks umumnya disebar menggunakan teks atau gambar yang menggiring kesimpulan pembaca untuk meyakini sesuatu. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi sering kali juga ditunggangi oleh kabar bohong melalui penggunaan gambar atau video yang konteksnya tidak terkait sama sekali. Atau sebuah rekaman peristiwa yang sudah lama terjadi dibungkus oleh narasi seolah baru saja berlangsung.

Motivasi menyebarkan hoaks pun beragam, mulai dari sekadar iseng demi lelucon semata hingga menebarkan kerisauan atau memprovokasi demi agenda politik. Beredar melalui media sosial maupun layanan perpesanan yang terpasang sebagai aplikasi di gawai, hoaks pun tidak bisa dipisahkan dari mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah akrab dengan perangkat seperti ponsel pintar.

Sementara itu, sepanjang tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam Astrini (2017:93) telah memblokir hampir 800 ribu situs daring terkait dengan konten negatif yang mana diantaranya dikategorikan ke dalam konten fitnah dan hoax. Dan di ujung Februari 2017, Badan Intelijen Negara (BIN) merekomendasikan penutupan 760 ribu situs dan akun media sosial yang berkonten hoaks dan konten negatif lainnya. Dari sajian data tersebut di atas, hoax menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pemilu 2019 diprediksi masih akan diwarnai dengan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Polri dalam Munir (2018) mendeteksi, hingga kini sedikitnya ada 3.500 konten hoaks yang tersebar di media sosial.

Septiaji Eko Nurgoroho dalam Muhtadiah (2018:40) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran literasi menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran hoaks. Dengan budaya baca yang rendah, masyarakat menelan informasi secara instan tanpa berupaya mencerna utuh. Bangsa Indonesia, bagi dia, adalah bukan bangsa pembaca tetapi bangsa ngerumpi. Informasi yang diterima langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran, lalu berupaya membagi informasi tersebut kepada orang lain. Hal ini relevan dengan catatan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-

bangsa). Indeks membaca bangsa Indonesia menurut UNESCO (2012) hanya 0,001. Artinya, di antara 1.000 orang, hanya satu orang yang membaca secara serius. Demikian pula catatan survey Most Literated Nation in The World (2015) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara. Namun, dosen Filsafat Universitas Indonesia, Tommy F Awuy dalam Muhtadiah (2018:40) meluruskan bahwa penyebaran berita bohong kadang tidak selalu relevan dengan tingkat literasi. Sejumlah grup media sosial tertentu juga dihuni oleh orang dengan tingkat literasi yang memadai.

Informasi hoax ini dapat mengancam popularitas seseorang. Gara-gara hoaks, nama baik dan harga diri seseorang dapat tercemar di masyarakat dan akan memicu konflik kepentingan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, aktivitas penyebaran hoaks ini dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang diancam oleh UU No.19/2016 tentang ITE, di mana tindakan hoaks merupakan kategori kejahatan siber. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa bagi siapa saja yang suka mengirimkan kabar bohong (hoaks) atau bahkan cuma sekedar iseng mendistribusikan (forward) akan diancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar (Tempo, 2016).

Ujaran Kebencian di Ranah Daring

Hate speech atau ujaran kebencian adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan kebencian terhadap kelompok yang menjadi sasaran atau dimaksudkan untuk menghina, mempermalukan, atau untuk menghina anggota kelompok (Davidson, et al., 2017). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 (dalam Mangantibe (2016:59) tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian, diantaranya: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong.

Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan

- atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.
- Tidak hanya di dunia nyata, aktivitas hate speech juga marak terjadi di dunia maya. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2017 tercatat ada 13.829 konten negatif berupa ujaran kebencian yang marak di media sosial, 6.973 berita bohong dan 13.120 konten pornografi. Selain itu, hingga 18 September 2017 terdapat 782.316 situs yang telah diblokir oleh pemerintah. Hal ini membahayakan stabilitas NKRI karena dapat memicu perpecahan masyarakat. Karenanya kejahatan diancam hukuman.

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Contohnya adalah Britania Raya, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan “mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan” terhadap “warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis”. Di Brazil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dan lain sebagainya.

Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Adapun di Kanada, “Piagam Kanada” untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan. (Wikipedia, 2018)

Di Indonesia sendiri, perangkat hukum guna menjerat pelaku ujaran kebencian terdapat di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4 dan 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 dan 311 KUHP. Aturan tersebut terkait dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik

(pencemaran) serta menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu (SARA). Pelaku ujaran kebencian terancam pidana 6 hingga 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 miliar bila terbukti melakukan perbuatannya.

Budaya Literasi adalah Kunci

Angka literasi Indonesia menurut survey PISA dalam Saputra (2018) memang dalam angka yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Dengan peringkat 64 dari 65 Negara, dan dalam penelitian yang sama juga menempatkan Indonesia pada peringkat 57 dalam hal membaca. Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia tak terlalu suka dengan kegiatan membaca. Jika kita artikan literasi adalah kegiatan yang terpusat pada sebuah media buku saja. Menurut National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Jika kita persempit lagi, maka perlu daya minat membaca terlebih dahulu untuk bisa memulainya.

Literasi pada akhirnya menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi damai di era digital. Setiap informasi yang datang kepada kita harus disikapi secara bijaksana dan kritis sehingga terhindar dari fitnah. Derasnya arus informasi itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi hal-hal yang produktif. Tunjukkan bahwa kita sebagai generasi millennial dengan fasilitas yang begitu canggih mampu jadi generasi yang arif dan bijaksana dalam menggunakan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani, H. 2016. Mendeteksi Kebohongan. Jakarta: Mediakita.
- Hardiman, F Budi. 2004. Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herimanto dan Winarno. 2012. Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Cet. VI. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Seri Pendidikan Orang Tua: Mendidik Anak di Era Digital,

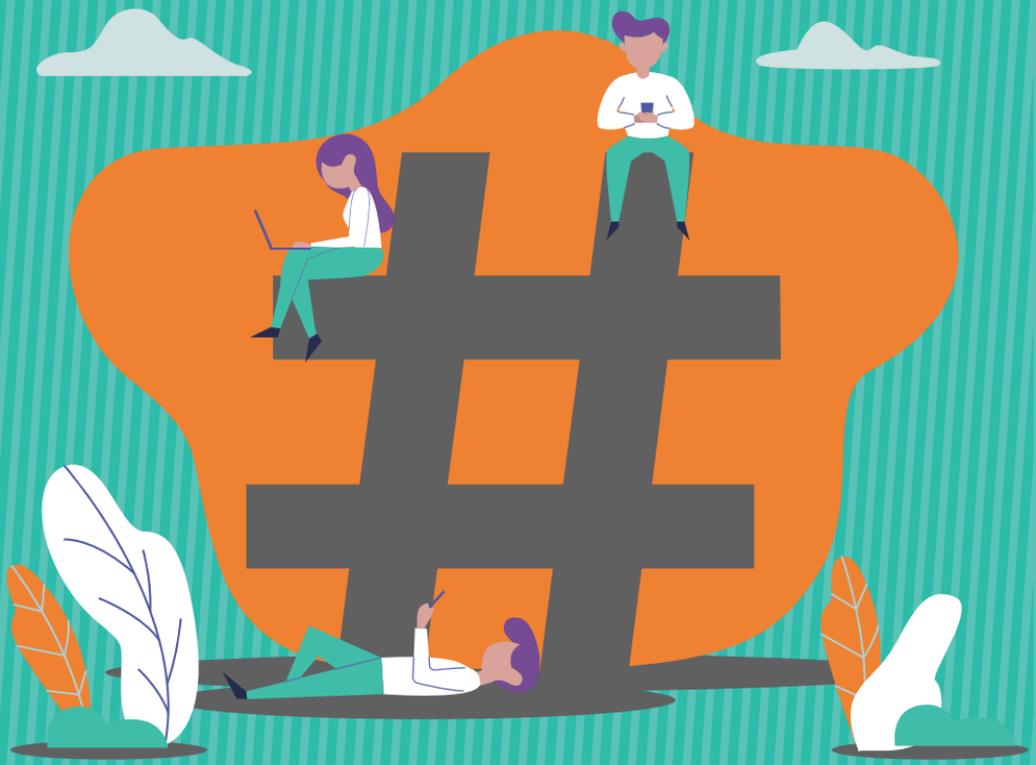
- Cet. I. Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 Naisbitt, John, et.all. 2004. Hight Tech Hing Touch. Pencarian
 Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi. Bandung:
 Mizan.
- Prihantini, Ainia. 2015. Master Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Mizan.
- Raharjo, Mudjia. 2011. Genta Pemikiran Islam Dan Humaniora. Malang:
 UIN-Maliki Press.
- Raharjo, Mudjia, dan Rurohman, Kholil. 2008. Sociolinguistik Qurani.
 Malang: UIN-Maliki Press.
- Santosa, T. Elizabeth. 2015. Raising Children In Digital Era – Pola
 Asuh Efektif untuk Anak di Era Digital. Jakarta: PT Gramedia.
- Schmidt, Eric, dan Cohen, Jared. 2014. The New Digital Age: Cakrawala
 Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita. Jakarta: KPG (Kepustakaan
 Populer Gramedia).
- Affandi, Nurholik. (2012).Harmoni dalam keberagaman. Sebuah
 Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama.
 Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, Vol: XV, No.
 1, halaman 71-84.
- Andhika, Tri. (2016). Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital:
 Tinjauan Teori dan Hukum Internasional. Jurnal Bina Mulia
 Hukum Volume 1, Nomor 1.
- Astrini, Atik. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka
 tentang fenomena hoax dan keterkaitannya dengan Banalitas
 Kejahatan). Jurnal Transformasi No. 32 Tahun 2017 Volume II,
 halaman 76 – 167.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. (2011). Laporan Tahunan Kehidupan
 Beragama di Indonesia. CRCS UGM, halaman 33-34.
- Baryadi, I. P. (2013). Bahasa dan Kebohongan. Prosiding Pertemuan
 Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXXV, halaman 359—363.
- Coleman, L. dan Kay, P. 1981. Prototype semantics: The English word lie.
 Language, Vol. 57, No. 1 (Mar., 1981), halaman 26-44.
- Davidson, T., Warmsley, D., Macy, M. & Weber, I., (2017). Automated Hate
 Speech Detection and the Problem of Offensive Language.
 Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on
 Web and Social Media (ICWSM).
- Mangantibe, Veisy. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran
 Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan
 Ucapan Kebencian (Hate Speech). Lex Crimen Vol. V/

No. 1/Jan/2016.

- Muhtadiah, Dian. (2017). Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax. *Jurnal Dakwah Tabligh Vol 18, No 2*.
- Nata, Abuddin. (2018). Pendidikan Islam Milenial. *Jurnal Peradaban Islam. Conciencia Jurnal Pendidikan Islam*, halaman 10-28.
- Nashihuddin, Wahid. (2017). Pustakawan Penangkal Informasi Hoax di Masyarakat. *Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI*, halaman 1-5.
- Pembayun, Jaduk Gilang. (2017). Rekontruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 1, Nomor 1*, halaman 1-14.
- Retnasari, Lisa. (2018). Strategi Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Mencegah Radikalisme di Era Globalisasi. *Seminar Nasional Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, halaman 161-170.
- Rustam Aji. (2016). Digitalisasi, Zaman Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Zaman Digital. *Islamic Communication Journal 1, no. 1*, halaman 48.
- Suud, Fitriah M. (2018). Pendidikan Kedamaian di Era Digital (Telaah Model Forgiveness dalam Psikologi Islam. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 7, Nomor 1*, halamm 695-715.
- Turibus, Stephanus. (2018). Pola Asuh yang Efektif untuk Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 10, Nomor 2*, halaman 137-273.
- Wiguna. (2014). *Media Sosial Dan Komunikasi Politik Era Digital* *Komunikasi Indonesia III, no. 2*, halaman 150.
- Zainuddin, Ammar. (2018). Bahasa sebagai Piranti Kohesi Perdamaian Zaman Digital. *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars. Kopertis Wilayah IV Surabaya*, halaman 314-320.
- Arifianto, Bambang. (2018). Bijaklah Berbahasa Agar Tak Terkena Jerat Pasal Ujaran Kebencian. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/05/23/bijaklah-berbahasa-agar-tak-terkena-jerat-pasal-ujaran-kebencian-424877> diunduh pada 05 Maret 2019.

- Aziz, Abd. (2018). Religiusitas Masyarakat Urban di Era Digital. Diakses dari https://issuu.com/abdaziz9/docs/religiusitas_masyarakat_urban_di_er diunduh pada 05 Maret 2019.
- Hasibuan, M. Andre Bakhtiar. (2018). Generasi Milenial dalam Literasi. Diakses dari <http://kotakata.id/generasi-milenial-dalam-literasi/> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Berbohong. Diakses dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbohong> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Kominfo. (2018). Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media diunduh pada 05 Maret 2019.
- Munir, Saiful. (2018). Polri Temukan 3.500 Konten Hoax Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1340358/12/polri-temukan-3500-konten-hoax-tersebar-di-media-sosial-jelang-pemilu-1537591477> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Saidi, Anas. (2016). Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus. Jakarta : LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Saputra, Wahyu Aji. (2018). Kenapa Literasi di Era Millennial Merupakan Hal Penting? Diakses dari <https://www.idntimes.com/opinion/social/wahyuajisaputra/opini-kenapa-literasi-di-era-millennial-merupakan-hal-penting-c1c2> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Siddiq, Taufiq. (2018). Mafindo: Konten Politik Mendominasi Penyebaran Hoax. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1136933/mafindo-konten-politik-mendominasi-penyebaran-hoax/full&view=ok> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Wikipedia. (2018). Ucapan Kebencian. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian diunduh pada 05 Maret 2019.

Media Sosial



“Trending Topic” dan Hilangnya Ruang Publik yang Sehat

Penulis: Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel S.Sos M.Si (Japelidi)

Trending topic yang merupakan hasil perang tagar oleh mesin atau kelompok yang terorganisir di media sosial khususnya Twitter menimbulkan kekhawatiran bahwa pihak-pihak tertentu mendominasi ruang publik di Indonesia. Ruang publik yang sehat dan mampu menyuarakan suara rakyat terancam hilang. Udara segar di ruang publik tercemari konten-konten rekayasa sehingga kualitas demokrasi pun dikhawatirkan akan menurun.

Dalam berkembangnya demokrasi di era keterbukaan informasi, ruang publik adalah salah satu harapan di mana informasi dapat berkembang sehat. Media sosial adalah cerminan ruang publik masa kini.

Ruang publik dalam konsepsi politis sebagai syarat demokrasi, sejalan dengan esensi media sosial yang juga dinilai sebagai pilar kelima dalam demokrasi. Ruang publik atau dikenal dengan public sphere yang dikemukakan Jurgen Habermas, adalah ruang di mana terjadi pertarungan antar isu dan wacana yang ada di masyarakat dan negara. Ruang publik berperan vital dalam demokrasi, sebab di sanalah proses komunikasi politik berlangsung antara individu warga negara atau masyarakat sipil dengan negara. Di sanalah terjadi hubungan pertukaran informasi antar-dua pihak.

McNair (2011) menggambarkan

dalam unsur komunikasi politik: media adalah penghubung antara warga atau rakyat dengan organisasi politik termasuk pemerintah/negara. Begitupun dengan media sosial, yang menjadi salah satu bentuk penghubung komunikasi antara warga dengan negaranya. Kerap terjadi bias antara media daring dengan media sosial. Persinggungan antara media massa khususnya media daring dan media sosial menguat. Media daring kerap kali bias akibat isu dan wacana yang berkembang di media sosial. Contohnya ketika media massa mengkaji suatu wacana hanya dengan berbekal opini, status, kicauan, atau publikasi seseorang di Internet sampai berkembang menjadi agenda nasional. Kicauan di Twitter idealnya berasal dari akun yang nyata pun valid. Namun pada kenyataannya, banyak kicauan berasal dari rekayasa akun maupun akun-akun yang terorganisir secara politis. Fenomena ini berisiko menciptakan opini publik atau agenda publik yang bias dan penuh rekayasa. Penulis melihat bahwa hilangnya ruang publik di media sosial akan mengancam demokrasi di Indonesia, mengingat media sosial adalah pilar kelima dalam demokrasi.

Media Sosial sebagai Pilar Demokrasi

Media sosial digadang-gadang sebagai pilar kelima dalam demokrasi. Trias politika yang dikenal sebagai pilar demokrasi adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perkembangannya, kekuasaan negara diawasi oleh media massa yang kemudian dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Hal ini dinilai penting karena media massa dianggap menjadi watchdog jalannya pemerintahan dan demokrasi. Media massa pun dinilai sebagai institusi yang seharusnya terlepas dari sumber kekuasaan. Menurut ilmuwan komunikasi massa, McQuail (1987), media massa memiliki peran informasi, hiburan, dan pendidikan. Media massa khususnya jurnalisme dinilai sepatutnya mampu menyuarakan suara rakyat atau yang selama ini tidak mendapat saluran atau voiceless.

Media massa diharapkan berperan sebagai alat penekan atau pressure group dalam proses komunikasi politik. Namun dalam perkembangannya, media massa khususnya di Indonesia kerap kali berkelindan dengan kekuasaan. Kelindan tidak hanya dilakukan

institusi tetapi juga oknum-oknum penggiat media itu sendiri. Hal ini tanpa disadari membuat independensi media dipertanyakan; masyarakat kembali merasa kehilangan satu-satunya sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka. Media memiliki kecenderungan terkooptasi dengan kepentingan dan kekuasaan. Masyarakat atau rakyat pun kembali pada posisi kehilangan saluran, pilar demokrasi keempat ini dinilai tidak lagi pada pihak rakyat tetapi memilih berpihak pada kepentingan dan kekuasaan tertentu. Kondisi ini mendorong lahirnya media sosial sebagai pilar kelima dalam demokrasi.

Media Sosial dan Ruang Publik

Media sosial hadir dengan memberikan ruang-ruang yang lebih inklusif, egaliter, dan murah. Kondisi ini adalah antitesis dari media massa yang cenderung eksklusif dan mahal. Flew (2005) menyebutkan bahwa Internet adalah tulang punggung era media baru. Ia menyebutkan lima karakteristik dari media baru ini, (1) manipulable, bahwa informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan; (2) networkable, bahwa informasi dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus menerus oleh sejumlah besar pengguna di seluruh dunia; (3) dense, bahwa informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil atau penyedia layanan jaringan; (4) compressible, bahwa ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat diperkecil melalui proses kompres dan dapat dikembalikan saat dibutuhkan; (5) impartial, bahwa informasi digital yang disebarluaskan melalui jaringan bentuknya sama dengan yang direpresentasikan dan digunakan oleh pemilikinya.

Sifat yang manipulable ini yang menyebabkan mesin-mesin fabrikasi tagar dapat bermain sesukanya di media-media sosial—memenuhi lini masa para pengguna media sosial di mana pun berada. Tujuan utamanya adalah menjadi trending topic di media-media sosial, dengan harapan topik atau isu ini kemudian menjadi perhatian penuh para pengguna media sosial. Harapan terakhir adalah mengubah opini publik atau bahkan mempertegas opini yang

berkembang.

Sifat networkable menjadikan perang tagar di media sosial pun semakin marak, di mana informasi dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus menerus oleh sejumlah besar pengguna di seluruh dunia. Informasi yang sama, gambar meme yang sama dengan kalimat yang sama kerap kali kita temui di linimasa. Bahkan gambar, tagline, hingga susunan kalimat yang sama dapat ditemui di berbagai platform media sosial. Hal ini menggambarkan media sosial adalah ruang di mana informasi dapat berasal dari segala hal dan mudahnya proses komunikasi di media sosial untuk dimanipulasi pihak mana pun bahkan pihak anonim sekali pun.

Menurut McQuail (1987) media baru memiliki beberapa ciri utama, yakni (1) desentralisasi, di mana pengadaan dan pemilihan berita tidak lagi sepenuhnya ada di tangan pemasok komunikasi; (2) kemampuan tinggi, di mana pengantaran melalui kabel dan satelit mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar siaran lainnya; (3) komunikasi timbal balik, di mana penerima dapat memilih, menjawab, menukar informasi dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung; (4) kelenturan (fleksibilitas) bentuk, isi, dan penggunaan. Jadi karakteristik media baru yang bersifat timbal balik ini memudahkan komunikasi di mana pun dengan mudahnya mengagregasi sebuah isu atau tagar yang diluncurkan secara terorganisir. Kelenturan bentuk, isi dan penggunaan pun menjadi salah satu celah mudahnya sebuah isu atau perang tagar di dunia media sosial.

Perang Tagar dalam Hilangnya Ruang Publik

Politik yang dinilai selama ini hanya berupa materiil seperti kampanye, debat, pemilu telah bergeser ke politik yang bersifat immaterial, yakni perebutan isu, perebutan wacana, hingga perebutan prioritas opini publik atau agenda publik itu sendiri. Keberadaan ruang publik pada sistem demokrasi adalah suatu kewajiban, di mana ruang publik ini menjamin adanya pemerintahan yang demokratis. Semakin terbukanya ruang publik pada era Internet ini secara teori diyakini mampu meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Mossberger (2008) menegaskan bahwa sifat terbuka dan interaktif dari internet ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politik warga Negara. Mereka terpacu untuk berpartisipasi lebih mudah, efektif, dan tidak monoton. Mereka bisa lebih terlibat aktif dalam politik. Dengan internet masyarakat dapat dengan mudah mengkomunikasikan aspirasinya sehingga akan memacu tingkat politik warga Negara. Partisipasi politik di era ini kemudian melahirkan yang disebut digital citizenship atau warga digital.

Partisipasi politik melalui media sosial adalah partisipasi politik yang seharusnya bersifat otonom, ketika partisipasi politik lahir dari niat perseorangan tanpa mobilisasi pihak lain. Huntington dan Nelson (19760) menjelaskan bahwa partisipasi politik otonom dilakukan atas inisiatif dan keinginan sendiri seorang individu, dilatari oleh beberapa pandangan, pertimbangan atau motif, misalnya didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap realitas politik, atau karena motivasi untuk merealisasikan kepentingannya atau kelompoknya. Dalam konteks ini, partisipasi politik yang dilakukan lebih karena faktor inisiatif internal dari individu yang bersangkutan. Kedua adalah partisipasi politik termobilisasi. Bentuk partisipasi politik ini dilakukan karena digerakkan oleh individu lain atau kelompoknya. Seorang individu atau kelompok, dalam konteks ini melakukan partisipasi politik karena digerakkan oleh faktor di luar dirinya.

Merujuk pada kasus perang tagar yang dilakukan oleh mesin atau kelompok terorganisir, maka partisipasi politik yang terlihat tinggi di media sosial adalah fenomena yang semu. Isu yang menjadi opini publik pun semu, hilang dari konteks agenda yang sesungguhnya di masyarakat. Kekhawatiran terbesar adalah hilangnya ruang publik untuk partisipasi politik yang otonom dan sehat. Fenomena ini juga mendorong terhambatnya pendidikan politik yang sehat di masyarakat, di mana seorang warga negara justru merasa bahwa partisipasi politik yang dijalankan tidak akan berdampak apapun pada berjalannya sistem politik yang ada. Individu tersebut berkeyakinan atau berpandangan bahwa meskipun dia menggunakan hak partisipasi politiknya atau melakukan proses komunikasi politik di media sosial, hal itu tidak akan memberikan efek apapun. Berdasarkan pandangan

atau keyakinan ini, maka ia memutuskan untuk tidak berpartisipasi politik dalam bentuk yang lebih nyata seperti tidak memilih sama sekali dalam pemilu. Bahkan perang tagar yang bersifat saling menyerang dengan kampanye negatif bahkan kampanye hitam dikhawatirkan akan membawa dampak kemauan berpolitik bagi warga digital ini. Jadi walau terlihat sederhana, trending topic di media sosial adalah cerminan pertarungan isu atau wacana di ruang publik. Ruang publik sebagai salah satu syarat demokrasi, harus dijaga kesakralannya. Ruang publik ini sebaiknya tetap menjadi area warga negara, alih-alih dikuasai oleh satu alat kekuasaan dengan menggunakan mesin-mesin pencipta tagar semu.

Daftar Pustaka

- Flew, T. (2005). *New Media: An Introduction*. London: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P., Joan M. Nelson. 1976. *No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press Cambridge, London
- McNair, Brian. (2011) *Pengantar Komunikasi Politik*. Nusa Media : Bandung
- McQuail, Dennis, 1987, *Teori Komunikasi Massa* ed. 2, Erlangga : Jakarta
- Mossberger, K. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. London: The MIT Press.

Apa yang Bisa Kita Lakukan untuk Media Sosial

Penulis: Aldinshah Vijayabwana (Mafindo)

Kita mungkin masih terkagum-kagum dengan kemajuan di zaman sekarang. Siapa yang menyangka bahwa hari ini, kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang terjadi di tempat yang jauh dalam hitungan detik. Hari ini kita bisa berinteraksi dengan kawan yang terpisah ratusan kilometer tanpa harus menunggu berhari-hari hingga tukang pos mengantarkan surat mereka pada kita. Hari ini kita bisa membeli barang dari luar negeri dengan hanya memasukkan data dari kamar kita. Hari ini kita terhubung dengan seluruh dunia melalui alat yang besarnya kurang lebih satu genggam tangan kita.

Bagi generasi yang pernah merasakan betapa sulitnya berinteraksi dengan orang yang jauh, apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang

sangat mengagumkan. Ayah saya mungkin dulu tidak membayangkan bahwa sekarang beliau bisa berinteraksi setiap hari dengan kawan-kawan beliau saat Jambore Nasional 1986 tanpa harus bertatap muka. Ibu saya mungkin dulu tidak mengira bahwa sekarang beliau bisa tahu kabar teman beliau yang ada di Selandia Baru hanya dalam hitungan detik. Kakek saya mungkin tidak pernah bermimpi saat ini bisa melatih saya berbahasa Inggris tanpa perlu menunggu saya datang ke rumah beliau di Banyuwangi, atau beliau yang berkunjung ke rumah saya di Ungaran. Saya, seorang yang tidak jelas merupakan generasi milenial karena lahir pada tahun 1999, juga masih tidak percaya dapat berkenalan dengan seorang kawan di Jakarta, dan berkawan

baik dengannya sejak 2009 hingga hari ini, meskipun belum pernah bertemu sama sekali.

Teknologi di era digital ini membantu kita dalam banyak hal. Saya sudah menyebutkan contoh-contohnya tadi, yang dialami oleh saya dan keluarga saya. Namun, di balik manfaat yang dirasakan tersebut, rupanya banyak juga dampak negatif yang muncul, khususnya dalam kehidupan berdemokrasi kita. Saat ini kita dibuat pusing dengan banyaknya hoaks, fitnah, hasutan, ujaran kebencian, dan semacamnya di media sosial, yang menyebabkan perpecahan masyarakat.

Tulisan ini adalah pandangan pribadi saya terhadap apa yang saya alami di media sosial sejak 2009 dan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk generasi kita selanjutnya. Dalam tulisan ini, saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman saya sebelum kemudian menyampaikan pemikiran saya.

Apa Tujuan Kita Bermedia Sosial?

Saya termasuk pelanggar umur dalam bermedia sosial. Saya mulai menggunakan Facebook pada tahun 2009, saat saya masih berusia 10 tahun. Waktu itu, saya bermedia sosial dengan dibimbing oleh ayah dan diawasi oleh ibu.

Tujuan awal saya bermedia sosial adalah untuk menambah interaksi dengan kawan-kawan dan keluarga. Saya menggunakan Facebook agar dapat berinteraksi dengan ayah yang bekerja di luar kota, dan juga agar saya bisa berinteraksi dengan teman sekolah di luar jam sekolah. Konten Facebook saya pun lebih banyak berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan saya dan teman-teman, dan status-status tidak jelas khas anak kecil.

Kemudian saya mengikuti laman Facebook Majalah Bobo, yang setia saya baca sejak dulu hingga sekarang. Dari sana, saya bertemu dengan kawan yang saya ceritakan di pendahuluan tadi. Karena kami seumuran, kami saling berbagi cerita tentang keseharian kami, bagaimana pengalaman kami masing-masing di sekolah, sebagaimana

biasanya anak kecil kalau baru berkenalan.

Kemudian ibu saya pun ikut membuat akun Facebook. Di kanal media sosial tersebut, ibu saya mencari kawan-kawan lama beliau yang sudah lama tidak bertemu, atau yang hanya bisa beliau temui setahun sekali saat pulang kampung ke Banyuwangi. Ibu saya yang dokter gigi juga mencari rekan-rekan sejawat yang telah terpisah oleh tempat tinggal dan lokasi bertugas. Lama kelamaan, keluarga besar kami pun ikut bermedia sosial, termasuk kakek saya yang memang orangnya asyik. Beliau menggunakan Facebook agar bisa berinteraksi dengan anak dan cucu beliau tanpa harus menunggu kami semua pulang kampung.

Ketika media sosial berbasis pesan, seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp, menjadi terkenal, keluarga kami menggunakannya. Fitur grup dalam kedua aplikasi tadi kami gunakan untuk membentuk grup silaturahmi keluarga besar yang hingga hari ini sangat aktif. Kakek saya, seorang pensiunan guru Bahasa Inggris dan memiliki pengetahuan agama yang luas, kerap membagikan nasihat-nasihat dan pelajaran berbahasa Inggris melalui grup WhatsApp itu. Beliau pun juga kerap membimbing cucu-cucunya berbahasa Inggris melalui jalur pribadi (japri).

Belakangan ini saya ketahui bahwa kakek saya belajar berbahasa Arab melalui grup WhatsApp. Dalam grup tersebut, kakek dan beberapa orang lain belajar dari seorang guru tanpa harus bertatap muka. Pelajaran diberikan melalui tulisan di WhatsApp, foto, dan voice-note.

Dari apa yang saya alami tersebut, saya menyimpulkan bahwa tujuan awal orang-orang menggunakan media sosial adalah menambah interaksi dengan keluarga dan teman-teman lamanya. Jika dulu hanya bisa berinteraksi kalau bertemu muka, sekarang mereka dapat berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial juga digunakan untuk memperluas relasi dengan orang yang sefrekuensi.

Media Sosial Semakin Tidak Sehat

Meskipun awalnya merupakan ruang untuk menambah interaksi dan memperluas relasi, lama kelamaan media sosial menjadi tempat yang

tidak sehat. Akhir-akhir ini, media sosial bahkan menjadi tempat yang 'panas'.

Tahun 2012, konten-konten politik mulai bermunculan. Tahun 2014, ujaran kebencian, fitnah, hoaks, mulai beredar dan sayangnya saya sempat terjebak dalam ini. Meskipun saya bisa 'disembuhkan' oleh ayah, hingga hari ini konten-konten seperti itu tidak menghilang. Meskipun sudah diancam dengan undang-undang, hoaks dan ujaran kebencian belum sirna hingga hari ini.

Selain konten politik, saya perhatikan bahwa orientasi konten agama juga berubah. Dari yang sebelumnya mengajak untuk bersama-sama menuju kebaikan, kini menjadi ajang untuk saling menyalahkan dan merasa paling benar. Ayat-ayat dipelintir sedemikian rupa sehingga makna aslinya hilang, dan digunakan untuk menyerang mereka yang berbeda pemikiran dan keyakinan.

Akibatnya, media sosial yang dulu mendekatkan orang, kini justru menjauhkan orang. Banyak sekali kasus teman masa kecil yang kemudian menjadi musuh, hanya gara-gara perang komentar. Orang-orang yang di dunia nyata tak pernah berinteraksi, di media sosial saling melontarkan makian hanya karena berbeda jagoan politik. Satu keluarga bertengkar di grup WhatsApp hanya karena ada yang meneruskan pesan provokatif dan ada yang merasa tersindir.

Mengapa media sosial berubah menjadi seperti ini? Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan ulang data literasi dari Programme for International Students Assesment (PISA) yang menunjukkan bahwa negara kita masih peringkat dua terbawah sedunia dalam literasi. Kita masih tidak terbiasa untuk membaca tulisan, bukan sekadar mengecek tulisan. Kita tidak terbiasa untuk kritis terhadap informasi yang ada.

Kita juga masih gamang dengan kebebasan yang kita nikmati sejak reformasi tahun 1998. Kita merasa bahwa kita bebas, namun tidak sadar bahwa kebebasan ini juga harus bertanggung jawab. Seorang kawan bahkan sampai bertanya, apakah kita sudah siap dengan kebebasan penuh di bidang informasi, setelah sebelumnya di masa Orde Baru, apa-apa dikekang? Jangan-jangan kita malah menjadi liar

dengan kebebasan penuh ini. Ternyata, beliau benar.

Kita sering merasa 'hebat' kalau menjadi yang pertama tahu akan suatu hal. Ini yang membuat kita kalau dapat informasi, langsung kita bagikan tanpa baca teliti. Kita merasa dengan membagikan itu, kita menjadi pihak yang paling tahu, yang pertama kali tahu. Hal ini yang membuat penyebaran hal-hal negatif di media sosial menjadi lebih cepat dan luas.

Ada juga pihak-pihak yang memang memanfaatkan ini. Ingat jaringan Saracen dan MCA yang menghasilkan miliaran rupiah hanya dari membuat dan menyebarkan ujaran kebencian? Mereka menguasai teknik hypnowriting yang menyerang bawah sadar kita, untuk mencapai tujuan mereka. Narasi kebencian dibangun berdasarkan teknik itu. Akibatnya, sementara kita terpecah karena narasi kebencian, mereka menikmati keuntungan dari setiap like dan share yang kita berikan untuk mereka.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Kita tidak bisa membuat aturan bermedia sosial. Paling banter kita bisa melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait dengan harapan agar mereka mempertimbangkan saran kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang diunggah oleh orang lain, kecuali melaporkan kepada sistem apabila unggahannya benar-benar tidak sesuai standar komunitas. Namun, kita bisa mengatur apa yang kita lakukan di media sosial.

Tentu saja yang pertama harus kita lakukan adalah mempertanyakan kembali tujuan kita bermedia sosial. Apakah kita hadir untuk memancing keributan atau mencari relasi baru? Apakah kita sedang membangun citra diri melalui media sosial? Semua ini kembali pada diri kita masing-masing. Namun, tentu kebanyakan dari kita berharap bisa mendapatkan tujuan awal media sosial itu tadi, menambah interaksi dengan kenalan kita dan memperluas relasi.

Setelah itu, kita harus paham bahwa media sosial sebenarnya adalah ruang sosial juga. Aturan-aturan sosial yang berlaku di dunia nyata, sekalipun itu tidak tertulis secara eksplisit dalam aturan pengelola

medsos maupun aturan pemerintah, tetap berlaku di media sosial. Apakah Anda berani untuk mendebat orang yang tidak Anda kenal sebelumnya dengan penuh kemarahan dan kata-kata kasar di dunia nyata? Kalau tidak berani, mengapa Anda berani melakukan itu di media sosial? Begitu pula dengan apa-apa yang bisa dibagikan di media sosial. Apa yang tidak bisa terang-terangan kita sampaikan secara publik di dunia nyata, seharusnya tidak kita sampaikan secara terang-terangan di media sosial.

Kita juga seharusnya kembali mengingat pelajaran PPKn ketika SD dulu. Ketika membahas demokrasi, tentu kita diajarkan bahwa menyampaikan pendapat dalam demokrasi ada etikanya. Tidak boleh emosional atau merendahkan pendapat orang lain. Ketika orang lain berpendapat, kita harus menghargainya. Ini jangan sampai hanya berhenti di kertas ujian saja, namun harus kita lakukan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

Apabila ada informasi yang tidak tepat, sudah sepantasnya kita melawan dengan cerdas. Berikan informasi pembandingan yang valid. Sampaikan secara sopan. Melawan hoaks memang tidak selalu membuat orang yang membuat atau menyebarkan jadi sadar, namun kita bisa mencegah yang lain dari ikut-ikutan menyebarkan hoaks.

Saya tidak menyarankan untuk unfriend atau blokir teman yang berbeda pendapat. Saya memiliki banyak teman di media sosial yang kutub politiknya berbeda 180 derajat dengan saya. Selama dia tidak menyerang pribadi saya, saya tidak menghapus mereka dari daftar pertemanan. Mengapa?

Alasan pertama terkait tujuan awal saya bermedia sosial. Mereka adalah teman-teman lama saya, yang sudah saya kenal sebelum kami berteman di media sosial. Mereka adalah relasi-relasi saya dari hal-hal yang kami minati bersama. Masih banyak manfaat yang bisa kami gali dari pertemanan kami, dan lebih banyak kerugian apabila kami menuruti emosi kami untuk saling blokir.

Alasan kedua, perbedaan pendapat dengan mereka semakin memperluas perspektif saya mengenai dunia ini. Saya belajar dari

mereka bahwa ada pandangan lain terhadap suatu situasi, dengan referensi yang berbeda. Dengan demikian saya bisa memandang sesuatu secara lebih luas. Dari sini, kita belajar berdemokrasi yang sesungguhnya. Kecuali jika mereka sudah menyerang kita secara pribadi. Tentu, dengan permohonan maaf yang teramat sangat, kita menghapus mereka dari media sosial kita. Demi menjaga kewarasan kita.

Bapak saya pernah berpesan terkait media sosial. Beliau mengatakan bahwa yang penting untuk kita sadari adalah bahwa media sosial hanyalah perluasan dari kehidupan di dunia nyata. Jangan jadikan media sosial sebagai kehidupan utama kita. Apalagi jika kehidupan di sana kemudian membuat kehidupan nyata kita bermasalah. Pesan beliau ini, sudah seharusnya kita pahami bersama demi media sosial yang lebih sehat.

Fenomena Nurhadi-Aldo: Menilik Demokrasi Dalam Ruang Banal Media Sosial

Penulis: Ade Irma S. M.A & Debby Dwi Elsa M.A (Japeli)

Media sosial seolah dianggap ruang yang 'serba boleh', 'serba bebas', dan mampu menjadi wadah ekspresi manusia modern tanpa terikat norma dan nilai. Dalam media sosial, individu dapat memiliki sebuah identitas virtual atau yang disebut oleh Turkel sebagai virtual self as a second self (dalam Haase, dkk. 2017:75).

Ruang media sosial mengonstruksi beragam realitas, tidak terkecuali realitas politik. Politik ialah topik menarik dan menjadi perbincangan hangat, bahkan menimbulkan permasalahan krusial yang

merembet ke dunia nyata. Dimulai sejak Pilpres 2014, pembahasan seputar politik meruncing tajam hingga menyentuh ranah pribadi semisal agama dan keyakinan.

Politik yang awal mulanya hanya berkisar di lingkup kebijakan dan polah tingkah anggota dewan maupun isu partai politik, menyentuh permasalahan SARA. Pilpres 2014 memicu munculnya fenomena hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena tersebut nyatanya tidak berhenti selepas Pilpres 2014, isu politik seolah menjadi sebuah 'pisau' yang mampu memutus pertalian sosial

dalam wujud apapun.

Media sosial dianggap sebagai ranah yang mampu mewadahi semua aspirasi, pendapat, bahkan aksi politik. Sebagian besar pengguna media sosial dapat menjelmakan diri sebagai juru kampanye dan mengonstruksi pesan politik melalui berbagai cara. Seolah menjadi sah jika setiap pengguna media sosial mendukung sampai titik darah penghabisan pada capres yang mereka idolakan. Menabrak semua aturan, warganet pengguna media sosial menciptakan sebuah kondisi baru yakni cyber war (Clarke dan Knake, 2011:5). Cyber war adalah sebuah kondisi yang tidak dapat dianggap remeh, bahkan berpotensi jatuh korban.

Mengacu pada keadaan politik dalam ranah media sosial pada pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, pilpres kali ini mengalami perbedaan yang cukup mencolok. Warganet kian akrab dengan fenomena hoaks dan ujaran kebencian. Interaksi warganet di media sosial seolah mengalami kejumudan dan karenanya memilih apatis. Humor-humor satire lantas ramai mewarnai postingan warganet dalam pembahasan isu politik. Salah satunya bisa dilihat dari fenomena capres virtual yang dikenal dengan akronim nyeleneh Dildo (Nurhadi-Aldo) sangat diminati oleh warganet di platform Instagram dan Twitter.

Identitas Digital, Identitas yang Maya

Capres fiktif Nurhadi-Aldo mulai mengunggah konten pertama dalam akun Instagram pada bulan Januari 2019. Awalnya ia hanya berfokus pada humor sosial yang menyisipkan isu politik, kemudian bergeser seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu. Daya tarik paslon Nurhadi-Aldo didasarkan pada akronim yang dianggap tabu oleh masyarakat. Nurhadi-Aldo dalam kehidupan nyata adalah individu yang tidak berkaitan dengan politik. Identitas Nurhadi-Aldo sifatnya semu, dibangun untuk mengutarakan kritik pada kondisi politik di Indonesia. Identitas semu ini berupaya melindungi teritori riil atas identitas individu dalam ranah media sosial. Nevin dalam Sloan dan Hasse (2017:75) menyatakan bahwa identitas (diri) dalam ranah media sosial adalah sebuah upaya untuk mengekspresikan bagian dari pemikiran yang bebas nilai sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan riil.

Fenomena Nurhadi-Aldo dapat dimaknai sebagai upaya mengekspresikan isu politik yang sulit dibahas dalam kehidupan nyata. Nurhadi-Aldo dalam akun Instagram-nya bahkan merencanakan dengan matang jenis unggahan yang akan dibagi pada warganet. Humor yang menyangkut isu politik kemudian bergeser menjadi sebuah literasi politik bagi warganet. Perubahan konsep unggahan tadi lantas mengonstruksi isu sosial yang teranggit pada kebijakan rezim petahana. Tidak jarang akun ini kemudian dituduh sebagai pendukung salah satu paslon atau bahkan dianggap sebagai pengusung gerakan golput. Di tengah beragam tuduhan, akun Nurhadi-Aldo rutin mengusung isu sosial merespon reaksi pemerintah pada masalah sosial yang terjadi.

Fenomena Nurhadi-Aldo tidak dapat dilepaskan dari budaya siber warganet Indonesia kala merespon hal sensitif. Seperti diketahui, budaya memiliki pengaruh yang sangat besar pada pilihan sikap individu. Indonesia yang cenderung lekat dengan budaya timur, mengidentifikasi sikap-sikap yang dianggap pantas dalam interaksi sosial. Budaya siber tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan budaya nyata yang telah diyakini dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena Nurhadi-Aldo sebagai alat kritik pada isu politik memberikan keleluasaan bagi warganet untuk mengekspresikan pendapatnya. Isu politik yang menyebabkan permasalahan sosial pada kasus Pilpres 2014 seolah menjadi pelajaran bagi warganet bahwa, penggunaan identitas riil dalam penyampaian ekspresi politik menimbulkan permasalahan sosial yang berkepanjangan.

Bahaya Tersembunyi di Balik Fenomena

Fenomena Nurhadi-Aldo seolah memberikan sudut pandang lain pada konstruksi realitas politik dalam media sosial, khususnya Instagram. Sebagai ruang banal, Instagram memberikan peluang untuk terjadinya interaksi warga net dalam membahas isu politik dalam unggahan akun Nurhadi-Aldo. Realitas yang sejatinya terjadi dalam ranah media sosial kemudian meluas hingga muncul dalam kehidupan nyata. Fenomena Nurhadi-Aldo bahkan mampu menggerakkan beberapa kelompok masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kritik politik. Celaknya realitas semu yang dibangun dari dukungan pada capres dan cawapres

virtual ini di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan politik sesungguhnya. Artikel ini tidak menyoroti siapa yang menggerakkan munculnya fenomena ini, namun lebih pada bagaimana proyeksi dampak yang mungkin muncul akibat dari fenomena.

Realitas virtual yang kemudian dibawa dalam kehidupan riil tentu memiliki permasalahan yang kompleks. Pada kasus fenomena capres dan cawapres virtual ini, pada level terendah dapat menyebabkan kebingungan masyarakat dalam agenda pemilu. Tidak jarang masyarakat kemudian menganggap bahwa capres-cawapres Nurhadi-Aldo adalah nyata. Fenomena Nurhadi-Aldo di sisi lain menjadi tantangan bahwa perlu adanya literasi politik yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Literasi politik melalui media (khususnya) dapat menjadi salah satu alat efektif sehingga memberikan pemahaman politik yang baik. Bukan sebuah utopia, dengan adanya literasi politik masyarakat akan lebih siap menghadapi beragam fenomena politik maupun sosial yang mengganggu isu politik lebih bijaksana. Demokrasi damai bukan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi bila dibarengi dengan kesiapan masyarakat yang terliterasi.

Daftar Pustaka

- Clarke, Richard A. dan Knake, Robert K. (2010), "Cyber war: the next threat to national security and what to do about it?", New York City: Harper Collins
- Sloan, Luke dan Quan-Haase, Anabel, (2017), "The SAGE Handbook of Social Media Research Methods", Thousand Oaks: SAGE Publishing

Hidup di Media Sosial Sebagai Katak Dalam Tempurung

Penulis: *Indriyatno Banyumurti (ICT Watch)*

Seberapa eratkah hubungan Anda dengan media sosial? Pernahkah Anda melewati hari tanpa membuka Instagram atau Facebook? Hubungan warganet Indonesia dengan media sosial memang bisa dibilang sangat erat. Laporan yang dirilis oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* (2019) mengungkapkan bahwa seluruh pengguna Internet di Indonesia saat ini menghabiskan waktu rata-rata hampir tiga setengah jam perhari di media sosial. Tidak hanya sebagai jejaring pertemanan, media sosial juga diperlakukan sebagai sumber informasi. Banyak warganet mengakses berita dari Facebook dan Twitter, atau sekadar mengikuti perkembangan informasi melalui Instagram maupun YouTube—dibandingkan langsung mencari

berita ke kanal resmi Detik.com, Kompas.com, Tempo.co dan sebagainya. Salah satu penyebabnya ialah fitur interaktif yang ditawarkan media sosial.

Di sana, penggunaanya bisa langsung bertukar pikiran sampai berdebat sengit; dan mengomentari berita terlepas sudah membaca isinya atau hanya judulnya. Fitur dua arah tentu lebih diminati masyarakat Indonesia yang memang mewarisi sifat komunal—interaksi di media sosial dimaknai bak ngobrol di warung kopi. Kini, lapak warung kopi berpindah ke kolom komentar Facebook, Instagram, YouTube, hingga grup-grup aplikasi pesan singkat yang berjubel banyaknya.

Melihat fenomena tersebut,

media sosial pada dasarnya merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan para pengguna meluaskan jejaring pertemanan dan memperlebar wawasan. Tetapi apakah benar begitu?

Ruang Gema dalam Media Sosial

Coba perhatikan, apakah informasi atau unggahan pada lini masa Facebook Anda sama dengan lini masa teman Anda? Tentu bakal berbeda, sebab individu yang diikuti pun tidak sama. Akan tetapi perbedaan ini juga disebabkan oleh hal lain, yaitu algoritma. Facebook mengkurasi informasi yang disajikan pada penggunanya berdasarkan aktivitas memberikan komentar, membagikan informasi, membuka foto, memutar video, dan sebagainya. Apa yang Anda temui di lini masa ialah konten pilihan yang sesuai dengan minat dan perilaku.

Hal yang mirip terjadi pula jika Anda membuka kolom pencarian di Instagram. Sebelum memasukkan kata kunci pencarian, Anda sudah terlebih dulu disuguhi rekomendasi unggahan dari akun-akun yang bahkan tidak Anda ikuti. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Setali tiga uang dengan yang dilakukan Facebook, Instagram membaca preferensi Anda berdasarkan aktivitas sebelumnya. Algoritma yang digunakan oleh perusahaan media sosial raksasa tadi dijuluki sebagai filter bubble. Mulanya istilah tersebut dipopulerkan oleh Eli Pariser dalam bukunya *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You* (2011). Algoritma membuat pengguna media sosial hanya “melihat apa yang ingin dilihat—membaca apa yang ingin dibaca”.



Gambar 1. Cara kerja algoritma dan filter bubble (Rose-Stockwell, 2016)

Algoritma membuat pengguna media sosial merasa semakin dekat dengan individu/akun yang memiliki kesamaan—sementara menjauhkan pengguna dengan individu/akun yang dirasa tidak memiliki kesamaan. Hal ini tentunya bisa membuat betah berlama-lama tinggal di media sosial, sebab merasa menjumpai banyak kawan yang, misalnya, memiliki hobi serupa. Namun diam-diam, algoritma membuat pengguna media sosial terkotak-kotak. Jika terus-menerus disuguhi informasi dari satu sudut pandang yang diyakini saja, maka bakal menumbuhkan sikap bebal dan tertutup atas perspektif lain. Akhirnya, pengguna media sosial seolah hidup di dalam ruang bergema (echo chamber) yang senantiasa meyakinkan pandangannya sebagai yang paling benar—dikarenakan konten-konten yang memang dipilhkan khusus sesuai preferensinya.

Kekhawatiran atas dampak algoritma atau filter bubble kian menguat kala Indonesia tengah bersiap menghadapi pemilihan umum tahun 2019. Akibat algoritma dan filter bubble, media sosial cenderung bersekat-sekat sesuai dengan pilihan politik penggunanya. Seseorang yang bakal memilih kandidat A disuguhi berita-berita baik tentang jagoannya, sekaligus informasi mengenai keburukan sang rival. Sementara bagi para pendukung kandidat sebelah, bakal dimanjakan dengan informasi tentang kesempurnaan si B—tentu ditambah bumbu-bumbu mengenai keburukan si A. Pendukung dari kedua kubu bakal masing-masing akan kian percaya bahwa pilihannya lah yang maha-benar. Media sosial seolah menciptakan kondisi mestakung (semesta mendukung) yang selalu mengamini pendapat masing-masing.

Ironisnya, alih-alih menjadi pemilih cerdas yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang publik yang demokratis, platform media sosial justru dituduh menjadi penyebab hancurnya demokrasi. Pasalnya, pengguna media sosial malah sulit menerima pandangan yang berseberangan karena dicekoki informasi homogen. Kepungan filter bubble dikhawatirkan dapat menggerus daya pikir kritis pengguna media sosial—atau para pendukung masing-masing paslon apabila dibingkai dalam konteks pemilu. Semua informasi yang dianggap mendukung pendapatnya bakal diyakini sebagai kebenaran hakiki. Sebaliknya, informasi yang bertentangan dengan pendapatnya bakal diabaikan dan dilabeli sebagai sebuah kebohongan.

Maka tidaklah mengherankan apabila hoaks semakin mudah ditemui, tersebar, dan menjadi konsumsi sehari-hari meski kandungan racunnya tinggi. Oleh karena itu, jangan sampai Anda menjadi pengguna media sosial bak katak dalam tempurung—terkungkung oleh dunianya sendiri tanpa sudi melihat dunia luar. Tampaknya, para pengguna media sosial (yang kerap kali panas hati) perlu menyadari bahwa yang berada di balik layar gawai adalah sesama manusia. Mereka memiliki gagasan, pikiran, dan pendapat yang berbeda. Namun harusnya tidak jadi soal karena toh kita tidak hidup sebatas di jejaring maya. Bhineka Tunggal Ika perlu tetap menjadi semboyan hidup bangsa. Sebab memang kita ditakdirkan untuk berbeda dan dari perbedaan itulah Indonesia menjadi bangsa yang kaya—yang warganya senantiasa bangga berucap “Saya Indonesia!”.

Daftar Pustaka

- Kemp, Simon, Data Reportal, 31 Januari 2019, Digital 2019: Indonesia, <<https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia>>, diakses pada 1 Maret 2019
- Rose-Stockwell, Tobias, Medium, 12 November 2016, How We Broke Democracy, <<https://medium.com/@tobiasrose/empathy-to-democracy-b7f04ab57eee>>, diakses pada 1 Maret 2019

Mengharap Kehadiran Pakar di Media Sosial

Penulis: Frida Kusumastuti (Japeli)

Kalangan akademisi dan pecinta buku tengah membicarakan buku Tom Nichols *"The Death of Expertise"*. Gara-gara buku yang mengulas fenomena matinya kepakaran dan perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan di Amerika tersebut, saya jadi terdorong untuk segera membuka Facebook dan membaca status beberapa teman. Para pemilik akun yang menuliskan status di dinding Facebook itu bukanlah pakar, kalangan intelektual, maupun cendekiawan yang karya tulisnya menjadi rujukan di ranah akademik, ilmiah, maupun forum-forum bergengsi. Namun, tulisan-tulisan mereka membuat saya terpana. Mereka menuliskan pengalaman sehari-hari, membaca relasi dengan sesama, mengungkap kontemplasi

atas peristiwa yang terjadi, dan memberi solusi atas persoalan-persoalan yang mereka alami bersama lingkungannya. Ada yang menulis dengan tata bahasa yang buruk, ada juga yang menulis dengan sangat berbobot, seolah saya membaca ulasan "seorang pakar" – yang menurut Nichols bukan pakar yang berkaitan dengan hal-hal teknis, melainkan kebijakan publik.

Saya mencoba memahami lagi apa yang menjadi kekhawatiran Nichols. Katanya, "Masyarakat sudah tidak pernah lagi menganggap penting adanya akademisi di kampus-kampus, dan merasa tidak perlu belajar kepada mereka, karena mereka merasa telah mengetahui semuanya melalui internet."

Buku Nichols berisi analisis yang menohok dan cepat diamini, terutama oleh kaum cendekiawan atau akademisi. Sayangnya, kalimat “masyarakat sudah tidak menganggap penting adanya akademisi di kampus-kampus” ditanggapi para akademisi dengan sedikit kegusaran alih-alih mencoba mawas diri. Hal ini menurut saya menunjukkan bahwa yang mempunyai masalah sebenarnya bukanlah masyarakat, melainkan para pakar. Mereka bermasalah dengan pengakuan. Inilah benang ruwet sistem kepakaran yang membelenggu “kebodohan” umat sepanjang hidup ini. Para pakar membangun benteng gagasan dan ilmu peengetahuan secara eksklusif, sehingga seolah “haram” untuk dimasuki oleh anggota masyarakat awam. Para pakar seolah merasa berhak mendominasi atas apa yang baik dan buruk bagi umat. Padahal J urgen Hubermas yang terkenal dengan teori Tindakan Komunikatif malah mempertanyakan Dominasi Kepakaran. Gagasannya tentang Masyarakat Komunikatif justru mendukung tiadanya dominasi ide di ruang-ruang publik. Dialog antarelemen masyarakat perlu dikembangkan. Namun, jika kaum akademisi, pakar, intelektual malah melihat bangkitnya suara masyarakat di era sosial media sebagai sebuah ancaman bagi kepakarannya, itu adalah pertanda kekalahan telak! Alih-alih risau dengan kondisi yang tidak bisa dihindari ini, para pakar mestinya hadir di ruang-ruang publik untuk membangun dialog, mendengarkan suara masyarakat, menyampaikan gagasan, dan bersama masyarakat menemukan solusi atas problem umat.

Hanya Teknologi yang Berubah

Pakar dan buku adalah dua hal yang tidak terpisahkan, setidaknya menurut logika yang selama ini dipegang. Dahulu kepakaran seorang diukur salah satunya dengan berapa banyak buku yang telah dibaca, berapa banyak buku yang telah diterbitkan, dan bagaimana buku-bukunya telah mengubah dunia. Buku merupakan representasi pikiran yang ditulis dan kemudian dikumpulkan dalam sebuah format cetak di atas kertas. Bentuk buku berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Saat ini kita mengenalnya dalam bentuk buku elektronik (ebook), baik buku audio maupun buku audio visual, yang berbasis teknologi digital. Apakah aneka format ini mengubah makna sang penulis? Tidak, bukan?

Mari kita mengenang kembali saat buku hanya bisa dicetak untuk menyimpan pikiran penulis dan menggandakannya. Pada waktu itu konsep literasi hanya dipahami sebagai melek huruf, bisa membacadan menulis. Ketika era elektronik datang, lahirlah radio dan kemudian televisi. Budaya masyarakat dalam mencari pengetahuan juga berubah menjadi budaya audio visual. Para pakar juga beralih menyampaikan gagasannya melalui media audio visual. Produk-produk ilmu pengetahuan dan kepakaran dihadirkan melalui format audio visual. Gerakan literasi media cetak pun berubah menjadi gerakan melek televisi atau gerakan kelompok pendengar (radio) dan pirsawan (televisi). Media cetak dan elektronik sangat dominan waktu itu. Menguasai teknologi tersebut memerlukan keterampilan tersendiri dan tentu modal, sehingga hanya segelintir orang yang mampu menguasainya. Kondisi ini melahirkan kelompok elite. Para pakar termasuk dalam kelompok elite tersebut. Tidak banyak yang begitu risau karena dominasi kepakaran tentu saja masih terpelihara.

Kini keadaan lebih revolusioner sejak ditemukannya teknologi serat optik, komputer, dan internet. Teknologi yang awalnya tampak elitis, dalam perjalanannya ternyata sangat inklusif. Produk-produk teknologi jadi semakin murah dan terjangkau oleh banyak kalangan di masyarakat. Lihatlah media sosial yang berbasis teknologi baru ini. Berbagai lapisan masyarakat pun sangat antusias memanfaatkannya. Setiap orang bisa mengunggah apa yang dipikirkan hari ini di Facebook. Setiap orang bisa melempar cuitan di Twitter dan saling berbagi apa pun di grup-grup Whatsapp. Bukankah ini revolusi komunikasi yang luar biasa layak untuk dirayakan? Internet dan media sosial telah membuat komunikasi menjadi murah, cepat, dan bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu serentak.

Pakar-Pakar Frustrasi Karena Tidak Mau Berubah

Kekhawatiran Nichols yang diamini oleh sebagian besar pakar menunjukkan bahwa tidak semua pakar, akademisi, dan intelektual siap merayakan dengan gembira revolusi teknologi komunikasi ini. Mereka meradang karena pengetahuan “diambil alih oleh orang awam”. Masyarakat (netizen) heterogen yang aktif mengirim dan mengakses

pengetahuan dari internet dianggap sebagai fenomena “kedunguan.” Padahal sekali lagi mengingat kembali sejarah perkembangan teknologi komunikasi, perubahan itu mestinya hanyalah menyangkut teknologinya. Gagasan sebagai pesan mestinya tidak berubah.

Penjelasan saya ini ingin mengajak sebanyak mungkin pakar untuk segera beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Memaksakan gagasan yang disampaikan ke dalam buku (cetak) pada generasi digital, hanya akan dilirik sebelah mata oleh generasi digital. Bukan mereka tidak mau, melainkan mereka tidak bisa menikmati media yang bukan eranya. Memang berat bagi generasi media cetak untuk menyesuaikan dinamika fitur media digital. Namun, itulah tantangan yang dihadapi. Di sinilah, menurut saya, para pakar harus hadir juga di media sosial. Mereka harus mendidik netizen yang “dungu” dengan kepakarannya melalui media yang akrab dengan masyarakat saat ini.

Kaum pascamodernisme mengatakan bahwa klaim kebenaran dicapai melalui komunikasi. Lewat cara ini klaim kebenaran ditentukan oleh siapa yang “menang bicara”. Di sinilah dibutuhkan banyak pakar berbicara supaya digunakan sebagai referensi oleh masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial, bagi saya harus dirayakan sebagai harapan kehidupan yang lebih baik. Melalui media sosial, eksistensi manusia diakui jika dia ada di sana. Sementara tidak semua warganet cakap menghadirkan gagasan dan dirinya. Di sinilah para pakar mestinya terpanggil untuk memberi teladan dan mendidik warganet agar mereka memiliki kecakapan dalam menyampaikan gagasan, pengalaman, dan solusi atas persoalan-persoalan kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dirisaukan Nichols.

Literasi Digital untuk Para Pakar

Kehadiran pakar di media sosial bukannya tidak mungkin akan sangat dirindukan warganet. Fenomena di Indonesia justru menunjukkan bahwa cuitan dan status para akademisi, seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Rocky Gerung, Sri Mulyani Indraswari, dan Rhenald Kasali – sedikit yang mewakili kaum pakar atau intelektual di Indonesia – sangat ditunggu-tunggu oleh warganet. Cuitan mereka di-retweet dan di-share oleh banyak orang. Sayangnya, segelintir pakar dan intelektual

- seperti mereka tenggelam oleh banyaknya cuitan dan unggahan lain yang barangkali kurang bermakna. Bahkan sesekali para pakar-pakar itu justru tersulut emosi massa, sehingga jari jemarinya “iseng” mengunggah sesuatu yang tidak mencerdaskan warganet.
- Berbeda dengan era buku cetak, di mana proses intelektual mendapat waktu yang cukup untuk berpikir mendalam, era elektronik “memaksa” kita berpikir secara cepat, apalagi di era digital. Tidak hanya dalam proses berpikir, proses memproduksi, dan kemudian mendistribusikan juga berubah semakin cepat, sehingga tingkat akurasi menjadi tantangan tersendiri. Gaya pesan, waktu melempar pesan, dan cara berinteraksi berbeda di setiap kanal yang kita gunakan. Pesan atau gagasan yang disiapkan untuk format digital juga memiliki keunikan tersendiri. Para pakar mesti bersaing dengan “orang-orang dungu” yang paham betul memanfaatkan media digital dengan gaya berbeda agar cepat populer.

Cara membuat kalimat, menentukan pilihan diksi, memadukan berbagai format teks, memanfaatkan hyperlink, dan menjaga interaksi dengan viewers dan followers adalah keahlian-keahlian yang mesti dikuasai oleh para pakar. Jika semua ini telah dikuasai oleh sebanyak mungkin pakar, maka dunia sosial media juga akan banyak diisi oleh ide-ide kepakaran yang compatible dengan budaya dan bahasa warganet. Dengan kata lain, warganet akan mendapatkan ulasan-ulasan bermutu tentang kebijakan publik sesuai dengan kepakaran sumber, bukan sekadar debat kusir. Saya membayangkan warganet di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini lambat laun akan menjadi terbiasa mengikuti ulasan-ulasan bermutu dari para pakar dengan menggunakan budaya warganet. Pengetahuan yang didapatkan dengan murah, namun tidak murahan, melalui ruang-ruang media sosial. Bukanlah ini sebuah perayaan yang luar biasa?

Marilah belajar dari kegagalan era televisi di Indonesia yang tidak mampu menghadirkan lebih banyak tayangan-tayangan bermutu untuk kehidupan demokrasi. Hal tersebut karena mahalnnya investasi dan kurang hadirnya pakar dalam produksi siaran televisi dibanding para pemodal yang menjadikan televisi sebagai mesin kapitalis. Maka di era digital ini para pakar mesti merayakan media digital

sebagaimana layaknya media yang mendistribusikan gagasan-gagasan kepakaran kepada warganet berdasarkan budaya komunikasi warganet, bukan lagi berdasarkan budaya kepakaran di era teknologi percetakan dan elektronik semata.

Memberi contoh kepada warganet yang sangat heterogen ini, belajar mengemukakan gagasan, menganalisis suatu kebijakan dengan dasar keilmua, dan mendorong suatu dialog yang komunikatif, saya kira menjadi pekerjaan rumah kita bersama, dan terutama para pakar. Kehadiran sebanyak mungkin pakar yang melek digital di ruang media sosial dengan membawa misi profetik (kenabian) merupakan harapan saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik. Mengapa? Karena keteladanan dan pendidikan yang dilakukan oleh para pakar, lambat laun akan mengurangi kesenjangan ilmu pengetahuan di antara warganet. Kompetensi komunikasi warganet di ruang media sosial pun akan semakin terlatih dan membaik. Impian kita adalah tercapainya Masyarakat Komunikatif, yaitu suatu kondisi tiada lagi dominasi ide, karena setiap orang bisa mengemukakan ide dengan baik, sehingga akan tercapai konsensus menuju Indonesia yang lebih baik.

Sesat Informasi di Era Informasi

Penulis: Muna Madrah (Japeli)

Saat ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat terombang-ambing dalam banjir bandang informasi yang menyesatkan. Setiap hari kita dihadapkan pada perang opini di dunia maya yang sering kali mengaburkan batas-batas nalar. Apakah yang kita terima adalah sebuah berita atau opini yang berbasis berita? Semua tampak tidak jelas. Publik seperti “overdosis” mengonsumsi informasi apa adanya, lalu begitu saja menyebarkannya. Gempuran informasi yang bertubi-tubi membuat kita tidak punya cukup waktu mencerna, mengklarifikasi dan tergulung dalam arus informasi. Bahkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan banyak beredar dan tersebar, termasuk disebarakan oleh kalangan akademisi.

Kemampuan menyerap dan menggunakan teknologi

informasi ternyata tidak serta merta diiringi dengan kemampuan menyerap dan mengolah informasi. Tanpa disadari, di era informasi ini terjadi perubahan kultur dari yang semula terbiasa dengan hanya mengonsumsi berita (pasif), menjadi terseret masuk turut mereproduksi dan mendistribusi informasi dan berita. Hasrat kita begitu menggebu-gebu untuk turut menyebarkan informasi, seolah kita adalah orang yang pertama wajib menyebarkan berita ini di komunitas kita, entah dalam grup-grup kecil di percakapan keluarga, maupun di dinding-dinding publik media sosial. Di sini posisi khalayak menjadi lebih aktif bahkan cenderung hiperaktif.

Nalar publik terperangkap pada nalar siber, yang serba cepat, serba instan, dan serba viral.

Kita malas menelusuri ulang, memastikan apakah sebuah informasi itu benar atau tidak. Kita terlalu khawatir ketinggalan dan kehilangan momentum, karena di era informasi sebuah isu bisa tiba-tiba datang dan menghilang. Unggahan yang meminta partisipasi khalayak dunia maya untuk me-“like and share” pesan tertentu agar dapat masuk surga, cepat kaya, bebas utang, begitu mudah diikuti dan dibagikan oleh ribuan orang. Bergesernya pola-pola komunikasi publik yang demikian tidak lepas dari berubahnya format masyarakat di era informasi ini.

Transisi dari Citizen ke Netizen

Konsep masyarakat jejaring (*network society*) merupakan sebuah pendekatan yang dipakai untuk memahami fenomena sosial dan budaya pada sebuah struktur sosial (Castells, 2010). Kata “netizen” pertama kali diperkenalkan oleh Michael Hubben pada tahun 1992 untuk menggambarkan pengguna internet (*user*). *Netizen*, diambil dari kata “net” (internet) dan “citizen” (warga), kemudian secara harfiah diartikan sebagai pengguna internet yang berpartisipasi aktif melalui media internet.

Pada era informasi, definisi “warga”, “masyarakat”, “community” telah mengalami transisi. Permasalahan masyarakat bukan hanya interaksi real yang berwujud, tapi juga interaksi melalui kabel-kabel, panel-panel, dan berjumpa pada layar-layar PC atau perangkat komunikasi bergerak lainnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai warganet atau netizen.

Netizen memungkinkan arus komunikasi berjalan ke mana saja. Hal ini menyebabkan relasi individu lebih berperan. Perkembangan teknologi internet memberikan pengaruh terhadap pola relasi, baik antarindividu maupun antarkelompok. Dengan kata lain, relasi yang terjadi pada media baru merupakan refleksi dari relasi yang terjadi di dunia nyata dengan menggunakan medium yang lebih bebas. Kebebasan ini kadang tidak terstruktur dan melepaskan berbagai identitas sosial yang selama ini disandanginya di dunia nyata. Ini yang menjadi ciri khas masyarakat informasi, dia bukan hanya bersentuhan dengan teknologi

informasi, melainkan juga memakai teknologi komunikasi untuk berbagai kepentingan. Meskipun demikian, transformasi dari citizen ke netizen tidak selamanya negatif. Tidak dapat disangkal bahwa gerakan netizen dalam banyak kasus mampu menggerakkan berbagai hal positif, mulai dari memengaruhi kebijakan hingga berbagai aksi nyata dalam isu sosial dan kemanusiaan. Posisi netizen menjadi unik, karena tidak lagi dapat dipisahkan. Mereka merupakan konsumen sekaligus produsen informasi.

Sama halnya dengan dunia nyata (fisik-materi), teknologi digital yang melahirkan dunia digital (maya-immateri) mempunyai permasalahan yang kompleks dan rumit, karena koneksi-koneksi yang dibangun tidak hanya berbasis pada interaksi fisik, tetapi juga terhubung oleh jaringan-jaringan data dan gambar yang termediasi melalui screen computer atau perangkat lain yang berbasis teknologi. Apakah teknologi ini akan menyesuaikan pola sosial dalam masyarakat atau sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan pola sosialnya sehingga sesuai dengan teknologi?

Dalam ruang-ruang maya, para netizen berinteraksi. Ruang publik yang digambarkan oleh Jurgen Habermas sebagai ruang tempat ide dan informasi digunakan bersama. Ruang ini juga merupakan ruang opini publik dibentuk sebagai hasil komunikasi, meskipun pada dasarnya dunia maya tidak dapat sepenuhnya dianalogikan sebagai ruang publik, karena sebetulnya publik terkadang mau tidak mau terkekang oleh platform-platform pada ruang maya yang dibangun untuk kepentingan kapitalis yang justru membentuk cara berpikir seseorang sehingga tidak benar-benar bebas.

Meski demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ruang publik ini juga dimaknai sebagai ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis dengan melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik. Pandangan Habermas ini meskipun berfokus pada masyarakat borjuis, tetapi dapat dipakai untuk membaca realitas ruang publik dalam era digital yang lebih kompleks yang menyediakan dan melibatkan publik yang lebih luas untuk mendiskusikan realitas yang ada.

Ruang-ruang maya ini adalah sebuah tempat yang tidak ada di mana pun atau justru sebaliknya ia berada di mana-mana. Ruang ini sangat sibuk. Transfer elektronik dan pesan-pesan digital berlalu-lalang dengan input dan akses hanya dengan sentuhan jari. Netizen juga telah menjadi aktor utama dalam berbagai hal, yang dapat dimaknai sebagai kebangkitan demokrasi dengan kekhasan sentuhan teknologi digital. Dalam banyak variable teori sosial dan politik, media dan sistem komunikasi menjadi landasan bagi masyarakat modern untuk melayani dan meningkatkan demokrasi. Netizen mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun demokrasi di era informasi ini. Salah satu caranya adalah dengan program-program pemberantasan buta teknologi dan buta informasi. Buta informasi yang saya maksudkan di sini bukanlah buta dalam arti tidak tahu sama sekali tentang informasi, tapi ketidakmampuan seseorang dalam mencerna informasi. Oleh sebab itu, gerakan massif tentang meleak informasi sangat mendesak untuk dilakukan.

Melek Teknologi Vs Melek Informasi

Netizen berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai faktor yang memengaruhi proses globalisasi atau sebagai komponen yang membentuk formasi masyarakat kontemporer. Kebanyakan orang menganggap ini adalah “perjalanan evolusi” dari kemajuan dan menerima dengan apa adanya (taken for granted). Masyarakat tampaknya enggan menyadari bahwa keberadaan teknologi ini memengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari yang sangat publik atau sampai hal-hal yang sangat pribadi.

Teknologi informasi dipandang sebagai solusi bagi komunikasi yang terkendala oleh jarak. Teknologi ini memungkinkan produksi dan distribusi informasi juga artefak digital dalam bentuk teks, grafis, suara, dan video. Artefak-artefak ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bentuknya (formatnya) bisa jadi tetap atau bisa juga tidak. Pada prosesnya, pemaknaan dan pembacaan ulang dari setiap informasi bisa jadi berbeda.



Ada alasan yang sangat kuat untuk percaya bahwa teknologi digital akan memiliki dampak yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Dengan sigap kita menyambutnya. Kurikulum-kurikulum baru telah disusun untuk menghindarkan kita dari ketertinggalan teknologi. Di sekolah-sekolah, instansi, dan berbagai profesi, literasi teknologi informasi menjadi menu wajib. Namun, kompetensi melek teknologi belum sepenuhnya dibarengi dengan melek informasi.

Melek teknologi informasi adalah sebuah terminologi yang merujuk pada kemampuan untuk mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, mengetahui di mana informasi tersebut, dan menempatkannya dengan efisien, serta mampu mengaksesnya kembali, mengkritisi, dan mengaksesnya dengan legal dan etis. Pada praktiknya, aspek mengkritisi dengan legal dan etis telah kalah oleh derasnya nafsu mereproduksi dan mendistribusi informasi.

Melek teknologi saja tidaklah cukup, diperlukan kemampuan lain, yaitu melek informasi. Melek informasi merujuk pada kemampuan untuk menalar setiap informasi yang masuk secara kritis, menelusur keabsahannya, dan memastikan bahwa apa yang kita “like” dan “share”, maupun opini yang kita bangun dalam ruang-ruang maya mempunyai nilai dan makna untuk dikonsumsi sebagai sebuah informasi.

Pentingnya melek informasi ini terkait dengan adab atau etika berinternet. Sebagaimana dalam dunia nyata, di dunia maya juga perlu disosialisasikan adab dan etika bagi netizen. Standar etika ini diperlukan sebagai aturan dalam berkomunikasi dan hubungan antarindividu sebagaimana di dunia nyata.

Mengapa diperlukan adab berinternet? Saya mencoba merangkumnya dari pembahasan buku Teori dan Riset Media Siber (Nasrullah, 2014). Pertama, beragamnya latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya netizen, yang menyebabkan rentan terhadap terjadinya konflik. Pemahaman terhadap keberagaman warganet ini harus dihormati. Kedua, berbagi informasi dalam ruang maya bukanlah komunikasi yang bersifat langsung, melainkan komunikasi yang termediasi oleh seperangkat alat dan jaringan (hardware), juga sistem dan program

(software). Komunikasi yang termediasi ini rentan akan pemahaman yang berbeda antara pengirim pesan dan penerima pesan yang beragam. Ketiga, adab berinternet diperlukan agar setiap pengguna memahami hak dan kewajiban sebagai warganet.

Saya juga ingin menekankan bahwa adab berinternet tidak semata-mata hanya untuk kepentingan hubungan antarmanusia. Terutama bagi kaum muslim, sudah selayaknya etika dan adab berinternet ini disosialisasikan, sebagaimana adab dalam hal keduniaan lainnya.

Adab berinternet dan meleak informasi adalah salah satu wujud sikap yang religius. Bagi umat Islam, meleak informasi adalah sebuah perintah yang hukumnya wajib. Dalam Alquran surat Al Hujarat ayat 6, diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk meneliti kebenaran berita yang diterima. Sebab runtuhnya persatuan adalah karena kita dengan sangat mudah menerima dan membagi berita tanpa perlu melakukan proses pengecekan. Etika (adab) menerima berita sudah selayaknya disosialisasikan dengan lebih intensif untuk menghindari sesat informasi. Mengklarifikasi berita menjadikan kita bertanggung jawab atas berita yang kita terima, tidak mudah hanyut dan larut dalam informasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak serta merta menghakimi seseorang berdasarkan informasi yang lemah. Diperlukan kesadaran bahwa banyak orang di dunia maya ini yang mengambil keuntungan dari kecerobohan dan ketersesatan kita dalam lautan informasi.

Lebih dari sekadar "skill", meleak informasi merupakan kesadaran yang sudah semestinya melekat pada seseorang dalam menyikapi informasi agar tidak terjadi kebingungan dan sesat pikir. Meleak informasi tidak hanya sekadar kecakapan memanfaatkan teknologi dalam menelusuri kesahihan informasi, melainkan juga kemampuan menelusuri yang berlandaskan kesadaran untuk mencari informasi yang akurat dan valid.

Demokrasi Ala Media Sosial di Kontestasi Politik 2019

Penulis: Ellen M. Yasak (Japelidi)

Sekelompok anak muda berkumpul di sebuah coffe shop wilayah Jakarta Pusat. Sesekali mereka bicara serius, sesekali bercanda dan tertawa bersama. Terdengar pembahasan mereka seputar debat Capres – Cawapres pertama pada malam sebelumnya, tentang Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Seorang di antaranya mengakses media sosial Facebook, seorang lagi terlihat sedang asik menonton siaran yang diunggah melalui saluran Youtube, dan yang lain masing-masing mengakses Instagram dan Twitter. Di era digital, kemudahan akses informasi merupakan kekuatan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan memiliki efektivitas tinggi. Merujuk pada data yang

dirilis oleh Alvara Research Center (2017), bagi millenials (mereka yang lahir akhir 1980-an hingga akhir 2000-an) gadget, internet, dan media sosial sudah merupakan kebutuhan pokok dan mereka sangat connected.

Karakter millenials yang adaptif terhadap teknologi tidak hanya berlaku pada kebutuhan pendidikan dan pekerjaan mereka, namun juga pada ranah demokrasi. Kecenderungan fleksibilitas, kreativitas, dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi membuat mereka cenderung menganggap politik merupakan urusan orang tua yang rumit dan kurang menarik. Riset yang dilakukan Alvara Research Center menunjukkan 22 persen

millenials menyukai pemberitaan politik, sedangkan 70 persen lainnya cenderung apatis terhadap politik dan lebih menyukai pemberitaan tentang lifestyle, musik, IT, maupun film (<http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/20/survei-alvara-70-persen-millennial-apatism-politik>). Berbagai saluran sosialisasi politik diakses melalui saluran yang akrab digunakan oleh millenials, seperti media sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula pada pemilu 2019 (<https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>). Angka ini sangat potensial dalam menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia. Jika tidak diperhatikan, mayoritas pemilih pemula yang apatis terhadap politik akan berpotensi Golput (Golongan Putih – yang dianggap sebagai simbol protes terhadap politik dan pemerintah). Pemilih pemula yang berjumlah besar ini, menjadi perhatian kedua pasangan Capres-Cawapres. Diwujudkan dengan strategi kampanye melalui medium yang accessible terhadap mereka. Pemilih pemula ini sangat potensial menjadi swing voters (pihak yang awalnya mendukung satu kelompok, berpindah pada kelompok lain).

Di tahun politik 2019 ini, dua calon presiden dan wakil presiden memiliki akun media sosial yang bertujuan memberikan informasi seputar kedua calon serta program-programnya. Calon capres-cawapres nomor urut 1 memiliki empat akun media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Sementara calon capres-cawapres nomor urut 2, memanfaatkan akun media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter tanpa Youtube. Berbeda dengan calon nomor urut 1 yang memiliki akun media sosial bersama, calon capres-cawapres nomor urut 2 menggunakan nama pribadi untuk mensosialisasikan kegiatan politiknya. Keduanya memiliki strategi yang berbeda untuk mendapatkan perhatian pemilih muda dan pemilih pemula.

Media sosial disebut juga sebagai saluran untuk mengkomunikasikan kekuasaan, ekonomi dan politik dalam kasus ini. Mengapa demikian? Sebab konten yang diunggah dalam berbagai media sosial tersebut tidak lepas dari Agenda Setting yang 'dimainkan' kedua calon. Pada titik ini, pengetahuan tentang Literasi Media menjadi hal yang dominan untuk dimiliki millenials dan masyarakat pada umumnya untuk

mengakses informasi sesuai kebutuhan dan mengkroscek kebenaran informasi yang diakses.

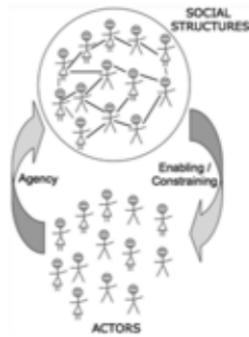
Kekuatan Media Sosial dalam Sosialisasi Politik

Istilah Media Sosial mengacu pada penggunaan teknologi berbasis web dan seluler untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif, (Baruah, 2012). Media sosial merupakan berbagai bentuk platform seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dll, yang digunakan secara luas untuk keperluan komunikasi. Interaksi sosial dalam media sosial, memungkinkan banyak orang yang tidak saling mengenal menjadi terhubung dan menjalin diskusi satu sama lain. Interaksi yang dimaksud adalah terhubung dengan kelompok pertemanan atau komunitas, mendapatkan informasi dan kognisi, dan memungkinkan adanya kerja sama (Fuchs, 2014). Hal senada juga disampaikan oleh kritikus budaya Bikerts (1994) yang menyebut sosial media dengan jaring komunikasi yang fluid (cair) dan merupakan representasi dunia sosial yang sebenarnya.

Twitter dan Facebook masing-masing memiliki karakter yang berbeda, dan memiliki penikmatnya masing-masing. Keduanya merupakan microblogging yang populer. Twitter dengan jumlah kata terbatas, hanya sekitar 280 karakter membuat banyak orang memiliki peluang untuk melempar isu dan menanggapinya dengan cepat dan singkat. Sementara Facebook lebih menekankan pada jaringan pertemanan dan komunitas yang saling terhubung. Dunia virtual adalah komunitas daring yang mengambil bentuk lingkungan simulasi berbasis komputer, di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain (Baruah, 2012). Dunia virtual tidak terbatas pada komunikasi dyad (komunikasi antara dua orang), tergantung pada tingkat kedekatan yang disajikan misalnya sampai pada obrolan komunitas berbasis teks.

Terdapat hubungan dinamis antara teknologi dan sosial media, yang dalam bahasa Anthony Giddens disebut sebagai struktur dan agensi, (Fuchs, 2014). Menurut Giddens, media merupakan sistem Teknososial - teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan aktivitas manusia menciptakan produksi pengetahuan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi dengan bantuan teknologi serta menghubungkan

struktur teknologi dan agensi manusia (dalam Fuchs, 2014).



Gambar 1 Dialektika Struktur dan Agensi (Giddens dalam Fuchs, 2014)

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dialektis antara agen dengan struktur. Penggunaan media sosial sebagai saluran kampanye politik, merupakan perwujudan struktur teknologi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang memiliki implikasi kuat terhadap kekuasaan. Tidak ada yang lebih kuat ataupun mendominasi, dan agen memiliki peran dalam

pembentukan struktur. Agen terbatas dalam melakukan tindakan, namun struktur akan mempengaruhi tindakan agen berikutnya. Internet terdiri dari infrastruktur teknologi dan jaringan manusia. Menjelaskan bagaimana data diformat, dikirim, dan diterima melalui jaringan internet menunjukkan hasil dari agensi manusia. Struktur teknologi adalah jaringan yang menghasilkan dan mereproduksi tindakan manusia dan jaringan sosial.

Merefleksikan kekuatan media sosial dalam kontestasi politik 2019 dengan meminjam kacamata Giddens, memberikan penjelasan tentang besarnya struktur dan agen yang saling mempengaruhi dalam teknologi (baca: media sosial) yang digunakan. Ketika seorang mengakses media sosial Jokowi-Amin misalnya, ada aktor yang memproduksi konten sehingga dapat diakses oleh struktur sosial dengan mudah. Tentunya sesuai dengan format yang ingin disampaikan oleh agen dan batasan teknologi yang digunakan. Sifat media yang mampu dijangkau secara personal, juga akan memberikan dampak pada sisi kognisi seseorang. Proses internalisasi informasi, menjadi berpengaruh pada proses kognisi seseorang ketika mengakses media sosial. Tujuan akhirnya adalah kepercayaan terhadap konten yang diakses, dan berpengaruh pada pilihan politik. Jangkauan secara personal yang berpengaruh terhadap kognisi ini mampu membentuk opini publik (pada struktur sosial) sesuai yang diinginkan aktor melalui agen.



Media Sosial sebagai Budaya Partisipatori

Menurut Jenkins (2008: 331) media sosial merupakan ekspresi budaya partisipatif. Jenkins mendefinisikan budaya partisipatif sebagai budaya “di mana penggemar dan konsumen berkumpul untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan dan sirkulasi konten baru”. Sifat media sosial sangat fluid (cair), sehingga memberikan kesempatan kepada audiens untuk turut serta berpartisipasi pada konten media sosial kedua pasangan calon capres cawapres seperti di bawah ini:



Konten yang disampaikan melalui media sosial kedua calon presiden ini, menunjukkan komunikasi publik keduanya pada kesempatan yang berbeda. Acara yang berbeda, feedback yang diberikan oleh audiens pun tentu berbeda. Komunikasi yang terjalin melalui media sosial menjadi sangat personal dan tidak resmi. Masing-masing 'terkesan' ingin menunjukkan kedekatan antara kandidat calon presiden dengan konstituennya. Media sosial juga membuka peluang potensi penggiringan opini dari informasi yang disampaikan, baik dari konten teks, foto, maupun video. Kekuatan konten yang berbeda ini menimbulkan dampak yang berbeda. Kekuatan teks tulis membutuhkan telaah kognitif yang membuat manusia melalui proses berpikir. Sedangkan konten foto atau video tidak banyak memberikan perspektif kepada audiens selain menerima gambar foto atau video sesuai dengan sudut pandang pembuat konten di sisi aktor melalui agennya.

Jenkins (2008: 331) mendefinisikan budaya partisipatif dengan:

1. Aksesibilitas tinggi pada keterlibatan masyarakat,
2. Memungkinkan membuat dan berbagi konten dengan orang lain,
3. Audiens memahami pentingnya kontribusi, dan
4. Ada interaksi hubungan sosial melalui

Dengan akses keterlibatan audiens yang tinggi pada media sosial, membawa peluang satu orang dengan orang yang lain menjalin komunikasi dalam kolom komen yang disediakan dalam fitur media sosial. Dengan demikian terjadi komunikasi dua arah, keterlibatan komunikasi dengan tema yang sama dari orang yang berbeda, tidak terbatas wilayah geografis, dan membuka peluang yang besar adanya heterogenitas opini publik.

Opini publik yang beragam, merupakan bentuk demokrasi. Masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Sifat media sosial ini sesuai dengan karakter millenials yang cenderung menyukai sesuatu yang cepat, nyata, dapat berinteraksi, dengan biaya yang murah dan accessible. Ketika tujuan tim sukses kedua calon presiden ini ingin memberikan informasi dan menjangar

pemilih muda dan pemula maka optimalisasi media sosial menjadi strategi yang tepat untuk digunakan.

Struktur media sosial yang di belakangnya terdapat aktor yang memiliki kepentingan untuk memperoleh kekuasaan, berhubungan erat dengan konten yang ditampilkan. Hal ini tidak lepas dari Agenda Setting untuk mencapai goal attainment untuk memperoleh kekuasaan. Konsep Luhmann (dalam Fuchs, 2014: 70) melihat kekuasaan sebagai pencapaian seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Kekuasaan berkaitan dengan kapasitas satu kelompok untuk menggunakan cara-cara pemaksaan terhadap yang lain sehingga menegaskan keinginan dan kepentingannya. Dengan demikian, memahami konten media sosial, dan struktur serta agen di belakang produksi konten tersebut, harus dimiliki oleh pemilih muda dan pemilih pemula dalam akses informasi yang dilakukan melalui media sosial. Dengan demikian, audiens yang rata-rata millenials ini mampu menggunakan cara berfikir kritis, logis, dan analitis yang korelasinya pada pilihan yang sesuai dengan profil pemimpin yang diinginkan.

Berikut media sosial yang dimiliki dua kandidat calon presiden, yang digunakan selama masa kampanye:

Jokowi - <u>Ma'ruf Amin</u>	Prabowo - <u>Sandiaga</u>
<p>Facebook: https://facebook.com/jokowi.amin (Jokowi-Amin)</p> <p>Instagram: https://instagam.com/jokowi.amin (Jokowi.Amin)</p> <p>Twitter: https://twitter.com/jokowi_amin (@jokowi_amin)</p> <p>Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLIBh_VXKckypg2gQMr1CKw (Jokowi Amin)</p>	<p>Facebook: https://facebook.com/PrabowoSubianto https://facebook.com/SandiSUno</p> <p>Instagram: https://www.instagram.com/prabowo/ https://www.instagram.com/sandiuno/</p> <p>Twitter: https://twitter.com/prabowo https://twitter.com/sandiuno</p>

Cerdas Mengakses Informasi dengan Literasi Media

Silverblatt (2008) dalam bukunya Media Literacy mengidentifikasi tujuh elemen dasar literasi media. Sementara Baran (2014) menambahkan elemen ke delapan. Berikut karakteristiknya:

1. Keterampilan berpikir kritis tentang konten media
Berpikir kritis tentang konten yang di konsumsi adalah inti dari literasi media. Mengapa mengakses media platform tertentu, mengapa membaca atau mendengarkan informasi tertentu. Ketika hendak mengakses informasi, hendaknya dapat menjawab alasan-alasan ini terlebih dahulu.
2. Pemahaman tentang proses komunikasi massa
Penting untuk mengetahui komponen proses komunikasi massa dan bagaimana hal itu saling berhubungan. Bagaimana industri media beroperasi? Apa tanggung jawab sosial media massa? Bagaimana cara media memproduksi pesan? dan lain-lain.
3. Sadar tentang dampak media pada individu dan masyarakat
Media massa mengubah pola interaksi manusia secara langsung. Jika mengabaikan dampak media akan berisiko terjebak, alih-alih mengendalikan konsumsi terhadap media.
4. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media.
Mengonsumsi pesan media, membutuhkan landasan pemikiran dan refleksi. Misalnya, memahami maksud konten video dilihat dari angle (sudut) dan pencahayaan kamera, atau strategi di balik penempatan foto.
5. Pemahaman konten media sebagai teks yang memberikan wawasan budaya
Pesan media semakin mendominasi komunikasi, membentuk pemahaman dan wawasan tentang budaya.
6. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai konten media
Literasi media untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap teks media. Belajar untuk menikmati, memahami, dan menghargai konten media termasuk kemampuan untuk menggunakan cara berfikir logis (logically thinking) dan berfikir analitis (analytical thinking) sebagai audiens.
7. Pengembangan keterampilan produksi
Individu yang melek media harus mengembangkan keterampilan produksi yang memungkinkan mereka membuat pesan media yang

bermanfaat.

8. Pemahaman tentang etika media.

Harus memahami aturan operasional media baik yang resmi maupun yang tidak.

Delapan aspek literasi media di atas menjadi pemahaman dasar, yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses media. Memahami struktur produksi konten dalam media sosial, dampak yang ditimbulkan, dan etika mengakses media sosial menjadi tiga hal terpenting yang harus menjadi perhatian. Misalnya dalam kolom komentar pada akun Instagram Jokowi-Amin di atas, terdapat pendapat pro dan kontra tentang pasangan Jokowi-Amin. Kebebasan berkomentar di kolom tersebut, merupakan cermin demokrasi yang diwujudkan dengan kebebasan berpendapat. Namun memahami lebih dalam tentang dampak media sosial, dan menuliskan kata dengan mengedepankan praduga tidak bersalah merupakan langkah awal untuk menghindari ujaran kebencian (hate speech). Demokrasi diwujudkan dengan adanya kebebasan berpendapat (freedom of speech) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression). Bebas bukan berarti tidak memiliki etika dalam menyampaikan aspirasi, bebas dalam demokrasi harus diwujudkan dengan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak atas pilihan masing-masing. Tidak menghakimi, dan tidak memandang rendah serta salah atas pilihan orang lain yang berbeda.

Penutup

1. Penggunaan media sosial sebagai saluran kampanye politik, merupakan perwujudan struktur teknologi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang memiliki implikasi kuat terhadap kekuasaan.
2. Media Sosial memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, keterlibatan komunikasi dengan tema yang sama dari orang yang berbeda, tidak terbatas wilayah geografis, dan membuka peluang yang besar adanya heterogenitas opini publik.

3. Kemampuan literasi media harus dimiliki masyarakat guna memahami struktur produksi konten dalam media sosial, dampak yang ditimbulkan, dan etika mengakses media sosial.

Daftar Pustaka

- Alvara Research Center. 2017. *The Urban Middle-Class Millenials Indonesia: Financial and Online Behaviour*. Jakarta: PT. Alvara Strategi Indonesia. <https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/whitepaper/The-Urban-Middle-Class-Millenials.pdf>
- Andayani, Dwi. 2018. Ada 5 Juta Pemilih Pemula di 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>
- Baran, Stanley J. 2014. *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*. New York: McGrawHill
- Baruah, Trisha Dowerah. 2012. Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its potential for technology enabled connections: A micro-level study. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 2, Issue 5, May 2012. ISSN 2250-3153. http://www.ijsrp.org/research_paper_may2012/ijsrp-may-2012-24.pdf
- Bikerts, Sven. 1994. *The Gutenberg Elegies*. New York: Fawcett Columbine.
- Fuchs, Christian. 2014. *Social Media a Critical Introduction*. London: Sage Publications
- Jenkins, Henry. 2008. *Convergence Culture*. New York: New York University Press.
- Martinus, Yaspen. 2018. Survei Alvara: 70 Persen Millenial Apatitis Politik. <http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/20/survei-alvara-70-persen-millennial-apatitis-politik>
- Silverblatt, Art. 2008. *Media Literacy (3rd ed.)*. Westport, CT: Praeger.

Ruang Domestik



(Mencari) Kedamaian di Tengah Hiruk Pikuk Demokrasi 4.0

Penulis: Ignatius Aryono Putranto (Mafindo)

'We are changing the world with technology' – Bill Gates

Siang hari yang terik dan tenang di sudut kota. Aman dan damai. Kedamaian yang tidak lama kemudian mulai terdisrupsi oleh kebisingan teknologi. Hiruk pikuk dan bising yang muncul dari sebuah gawai dengan beberapa aplikasi media sosial di dalamnya. Nama-nama sebutan untuk binatang yang mulai riuh rendah menggema dari setiap kubu yang mendukung calon pemimpin masing-masing. Entah apakah gawai tersebut juga tidak merasa terganggu karenanya.

Teknologi memang mampu menawarkan kemudahan dalam

segala hal termasuk dalam hal komunikasi dalam dunia maya. Kita tidak perlu lagi repot-repot bertemu dengan orang lain yang ingin kita ajak bicara, atau kita juga tidak perlu mengumpulkan banyak orang agar mereka mendengarkan apa yang ingin kita ungkapkan. Cukup dengan memiliki gawai yang terkoneksi internet, pasang aplikasi media sosial, maka akan terpenuhi hal hasrat kita untuk berorasi secara virtual. Media sosial mampu memudahkan dan mengubah cara kita berkomunikasi karena media sosial adalah aplikasi dan web yang dapat menghubungkan banyak orang untuk berbagi informasi

dan memberitahu orang lain mengenai peristiwa yang sedang terjadi melalui jejaring sosial.

Fenomena berjejaring sosial semakin menjadi gaya hidup dan mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Masih terbayang lekat di ingatan, era tahun 1990an ketika teknologi media sosial belum menampakkan wajahnya dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang politik, media massa cetak dan elektronik menjadi satu-satunya sumber informasi bagi warga (belum warganet, tentu saja). Kegiatan kampanye juga dilakukan secara luring, melibatkan banyak perjumpaan fisik dengan segala dinamikanya. Meskipun pada saat itu, konsekuensi terbesar adalah terpekakkannya telinga karena suara bising knalpot sepeda motor yang telah mengalami perubahan tertentu ketika digunakan untuk berkampanye keliling penjuru kota dengan segala atribut yang melekat.

Tentu kondisi pada saat itu memang jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Terlebih pada masa tersebut, pemerintahan Orde Baru sedang dalam rangka melanggengkan kekuasaan sehingga kontestasi politik tidak seramai sekarang. Hanya ada dua partai politik (Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan) serta satu Golongan Karya. Golongan Karya pada tahun 1990an adalah organisasi yang berisi kelompok-kelompok fungsional. Di masa tersebut, ketika manusia belum mengubah dunia melalui teknologi seperti kutipan dari Bill Gates di atas, segala hiruk pikuk perpolitikam tumpah ruah di dunia nyata. Pertemuan antarsimpatisan di jalanan terkadang tidak terelakkan. Memang pada saat itu, tidak ada kegiatan seperti debat calon presiden karena pada masa tersebut, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum sangatlah dibatasi (Dagg (2007) dalam Schoofs (2016)). Dengan segala keterbatasan yang muncul, maka hiruk pikuk demokrasi juga menjadi terbatas. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk untuk melihat apa yang dilakukan oleh calon-calon pemimpinnya.

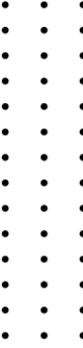
Memasuki era reformasi, ketika dominasi penguasa mulai tumbang, aktivitas demokrasi di negeri ini mulai muncul. Belenggu yang mengekang erat demokrasi di Indonesia mulai hancur lebur,

menyebabkan munculnya antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi Indonesia yang selama ini seolah terkungkung dalam penjara. Euforia dan animo semakin meningkat yang salah satunya ditandai dengan munculnya beberapa partai politik di negeri ini. Mengutip dari Dagg (2007), dalam tesisnya, Schoofs (2016) menyampaikan bahwa setelah tumbangnya Orde Baru muncul 148 partai politik di Indonesia, dan sebanyak 48 di antaranya dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Umum. Bahkan, Thompson (1999) dalam tulisannya menyebutkan bahwa kegiatan Pemilu tahun 1999 adalah kegiatan pemilihan umum terbuka pertama sejak tahun 1995. Jumlah kontestan pesta demokrasi yang semakin banyak dengan masing-masing pendukungnya, maka perdebatan program dan idealisme para calon pemimpin mulai terjadi. Semakin hiruk pikuk demokrasi terjadi.

Hiruk pikuk demokrasi semakin terfasilitasi di era saat ini. Meskipun jumlah kontestan Pemilu berkurang cukup banyak dibandingkan dengan tahun 1999, fenomena hiruk pikuk demokrasi semakin tertolong dengan maraknya teknologi informasi terutama peran dari media sosial. Seiring berjalannya waktu dan semakin mudahnya teknologi informasi diakses oleh manusia, maka hiruk pikuk demokrasi 4.0 semakin terfasilitasi. Lansiran dari laman Kompas.com (2018), pengguna aktif sosial media di Indonesia mencapai jumlah 130 juta pengguna. Masih dari sumber yang sama, angka ini berdasarkan laporan dengan judul *Essential Insight into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Around The World*. Dengan jumlah sebanyak itu, bisa dibayangkan betapa ramainya media sosial di Indonesia.

Keramaian ini mulai dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menyemarakkan pesta demokrasi Indonesia. Melalui media sosial, pendukung dan simpatisan partai politik mulai menyuarakan dukungannya. Bahkan melalui media sosial pula para pemimpin partai politik mulai 'turun gunung' untuk menyapa para pendukungnya.

Tentu banyak sekali manfaat yang bisa diambil melalui media sosial ini, salah satunya adalah keterjangkauan yang lebih luas. Jika kita ingin melihat keunggulan dari media sosial, maka kita bisa melihat dari sisi faktor utama media sosial, yaitu internet. Laudon dan Laudon (2014)



dalam bukunya yang berjudul *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, menyebutkan bahwa salah satu keunggulan internet adalah keterjangkauan global.

Internet mampu menjangkau lebih banyak manusia di berbagai belahan dunia manapun dibandingkan dengan teknologi komunikasi konvensional. Keterjangkauan global ini, pada akhirnya terwujud dalam terbentuknya interaksi baik antara pimpinan partai politik dan para pendukungnya maupun antar pendukung itu sendiri yang mampu melampaui batas wilayah Negara ini. Hanya saja, sesuatu yang memiliki keunggulan, maka juga memiliki kelemahan. Seiring semakin mudahnya terjadi perjumpaan virtual terutama dalam hal penyebaran ideologi atau nilai-nilai yang diusung (pimpinan) partai-partai politik yang ada, maka rentan pula terjadi gesekan antar pendukung karena tidak ada lagi 'sekat' di antara mereka.

Selain itu, melalui media sosial, penyebaran hoaks makin merajalela. Hal ini bisa terjadi karena media sosial memungkinkan terjadi penyebaran informasi dan berita secara cepat tanpa sempat ditelusuri kebenarannya. Contoh yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoaks di media sosial Whatsapp yang diawali (bisa juga diakhiri) dengan kalimat: 'copas dari tetangga sebelah....' (yang saya sendiri tidak pernah tahu tetangga yang sebelah mana).

Penyebaran hoaks memang sangat mengkhawatirkan karena hoaks didesain untuk memengaruhi atau memanipulasi opini-opini pengguna media sosial pada topik-topik tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu pula (Lion Gu, Kropotov&Yarochkin, 2017: p.5 dalam Nugroho (2018)). Penyebaran hoaks terutama pada masa-masa menjelang Pemilu 2019 memang menjadi masalah yang pelik. Mengutip dari laman www.idntimes.com, berdasarkan keterangan dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, konten hoaks mencapai angka 800.000 konten per tahun. Jumlah ini tentu bukanlah angka yang kecil. Bisa dibayangkan betapa ramai dan berbahayanya dunia media sosial jika jumlah hoaks ini terus meningkat.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh DailySocial.id bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Platform, media daring kumparan

menyebutkan bahwa tiga aplikasi media sosial penyebar hoaks terbesar adalah facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Tiga aplikasi ini memang sangat mudah diakses oleh siapa pun termasuk dapat memungkinkan pembuatan akun-akun palsu (fake accounts) yang dapat digunakan untuk melakukan bombardier penyebaran hoaks di dunia maya. Meskipun akun-akun palsu ini dapat dihentikan penggunaannya melalui fitur report, tetapi hal ini dirasa kurang efektif karena dalam waktu yang singkat dapat kembali muncul akun-akun palsu lainnya.

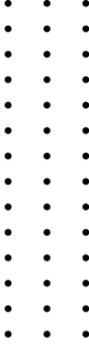
Tingginya angka konten hoaks di Indonesia ternyata juga dibarengi dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mendekteksi apakah berita atau konten yang beredar di dunia maya adalah hoaks atau bukan. Masih dari sumber yang sama, media kumparan menyatakan bahwa hasil riset menunjukkan sebanyak 44,19% responden (dari 2.032 responden) mengaku tidak memiliki keyakinan bahwa mereka punya kepiawaian dalam mendeteksi hoaks. Tingginya angka konten hoaks juga muncul karena rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Revolusi Reza, sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) yang dikutip dalam laman www.voanews.com. Reza menyatakan bahwa literasi antar masyarakat (Indonesia) sangatlah rendah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa selain Indonesia mengalami darurat hoaks, sebenarnya Indonesia juga mengalami darurat literasi.

Gesekan antarpending (pimpinan) partai politik serta penyebaran hoaks menambah suasana hiruk pikuk dalam demokrasi Negara ini terutama di era teknologi informasi seperti sekarang ini.

Untuk menutup tulisan ini, satu hal yang bisa kita refleksi bersama adalah jangan lupa untuk tetap mencari kedamaian di tengah hiruk pikuk demokrasi 4.0 dan jangan pernah dikendalikan oleh teknologi. Kita justru harus bertanggungjawab mengendalikan teknologi. Kendalikanlah teknologi dengan kepala (pengetahuan), hati (kemauan), dan tangan (keterampilan). Karena semua ini demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Ali, Asad, Anam Iqbal, and Kanwal Iqbal. 2016. Effects of Social Media on Youth: A Case Study in University of Sargodha. *International Journal of Advanced Research*. November 2016. Vol.4 (11), pp.369-372
- <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-ba-ru-suharto/item180>. Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di bawah Pemerintahan Otoriter. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:41
- Schoofs, D. 2016. The Development of Indonesian National Democratic Institutions and Compatibility with Its National Culture. Master Thesis. Tilburg University. Page 47.
- Schoofs, D. 2016. The Development of Indonesian National Democratic Institutions and Compatibility with Its National Culture. Master Thesis. Tilburg University. Page 49.
- Thompson, Eric C. 1999. Indonesia in Transition: The 1999 Presidential Election. The National Bureau of Asian Research. December, 1999. No.9. pp 1-17.
- Pertiwi, Wahyunandan Kusuma. 2018. Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia. <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>. 01 Maret 2018. Diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 21:23.
- Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon. 2014. *Management Information Systems: Managing Digital Firm*. 13th Editions. Global Edition. England: Pearson Education Limited.
- Nugroho, Andi. 2018. The Analysis of Hoax Spread in Social Media. *IOSR-Jurnal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*. Volume 23, Issue 6, Ver.6 (June 2018). PP 50-60.
- Juliawati, Linda. 2018. Angka Penyebaran Hoax Capai 800 Ribu Konten, di Pilkada Terus Meningkat. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/angka-penyeb-aran-hoax-capai-800-ribu-konten-di-pilkada-terus-meningkat/full>. 14 Maret 2018. Diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 23:07.
- <https://kumparan.com/@kumparantech/riset-44-persen-orang-indonesia-belum-bisa-mendeteksi-beri>



ta-hoax-1534904577213906127. 27 Agustus

2018. Diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 23:12.

<https://kumparan.com/@kumparantech/riset-44-persen-orang-indonesia-belum-bisa-mendeteksi-berita>

hoax-1534904577213906127. 27 Agustus 2018. Diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 23:12.

Walden, Max. <https://www.voanews.com/a/ahead-of-2019-election-indonesia-and-its-media-battle-fake-news/4628680.html>. 25 Oktober 2018. Diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 23:24.

Emak, Jangan Tabur Benci Didadaku.

(Mengkaji Ulang “The Power of Emak-Emak” Dalam Demokrasi Damai

Penulis: Lintang Ratri Rahmiaji (Japelidi)

Rutinitas bermedia khalayak perempuan di era digital banyak berubah, bertambah lebih tepatnya, karena selain mengonsumsi yang konvensional (koran, televisi, dan radio), mereka butuh juga membaca berita. Mayoritas di antaranya berformat berita cepat saji yang kualitasnya sebangun dengan makanan cepat saji rendah gizi, mulai dari konten hiburan media daring, lini masa media sosial, atau berselancar di antara blog

dan vlog tutorial.

Satu dasawarsa lalu pada tahun 2010, Nielsen Media Research (NMR) memetakan pola konsumsi media perempuan. Ada kecenderungan pilihan informasi khalayak perempuan lebih memilih membaca tabloid daripada koran, apalagi bagi penonton setia televisi. Pendek kata, perempuan lebih memilih kemasan informasi yang menghibur pun bertabur drama,

ketimbang informasi padat yang menggugah daya pikir. Dipetakan lebih lanjut, NMR menjelaskan untuk kategori remaja perempuan media yang lebih disukai adalah bioskop dan Internet, sedangkan televisi didominasi ibu rumah tangga, sementara radio dan media cetak dipilih perempuan bekerja.

Setali tiga uang dengan temuan riset Ivollx Hodiny, Growth Director Asia pada Opera Software, yang menyatakan bahwa khalayak perempuan gemar mencari informasi mengenai gaya hidup, kesehatan, hiburan, atau gosip. Dalam riset yang dilakukan antara Januari-Juni 2015 di Amerika Serikat oleh Pew Internet Project, perempuan lebih banyak menggunakan Internet untuk media sosial (seperti Facebook dan Instagram) dibandingkan laki-laki. Tahun 2018, ada peningkatan signifikan penggunaan Internet oleh khalayak perempuan, dimana 79,92 persen internet yang diaksesnya digunakan untuk kebutuhan media sosial.

Kebiasaan bermedia sosial dan informasi yang dikonsumsi bakal mempengaruhi pola pikir dan sikap yang kita pilih. Di era *The Power of Emak-Emak*, asupan informasi menjadi penentu paling signifikan dalam rangka menghasilkan “kuasa”. Mengapa kuasa emak-emak terutama dalam konteks demokrasi damai di era digital dipertanyakan kembali? Sebabnya, beberapa kasus melibatkan emak-emak menunjukkan situasi menumbuhkan kebencian yang mencemaskan. Terma konvensional pengasuhan di Indonesia masih menempatkan ibu sebagai tokoh sentral. Sehingga interaksi di rumah, konten yang dibagikan dan didengar oleh anak, bisa sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Bukan hanya kebaikan yang diteruskan, namun juga prasangka dan nilai-nilai permusuhan.

Perempuan Sebagai Agen Kekerasan

Penyebaran kecemasan bertema pilpres ditemui pula pada aksi dua orang emak-emak pada Februari 2019. Dalam video viral berdurasi 53 detik yang diproduksi di Karawang, Jawa Barat, tiga perempuan relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES) melakukan kampanye hitam dari rumah ke rumah, memfitnah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka mengangkat isu agama terkait

pelarangan adzan dan larangan berhijab bagi perempuan, selain itu mereka juga menyatakan bahwa pernikahan sejenis bakal dilegalkan jika Jokowi terpilih kembali. Kasusnya sudah dibawa ke ranah hukum berdasarkan aturan UU Pemilu, namun efek dari kampanye hitam tersebut tentu menyisakan endapan kegusaran di tengah mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia.

Di forum politik praktis, tiga tokoh nasional perempuan seperti Sukmawati Sukarnoputri, Ratna Sarumpaet, dan Neno Warisman juga pernah tercatat menyemai benih kebencian dalam aksi publiknya. Jika Sukma dan Ratna mengambil perspektif nasionalis, Neno mengambil sisi sensitivitas agama. Puisi kontroversial Sukmawati berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan dalam pagelaran Indonesia Fashion Week April 2018 jelas menyerang langsung keberadaan identitas agama Islam. Hal ini terbaca dalam teks: "Ibu Indonesia, Aku tak tahu Syariat Islam, Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah, Lebih cantik dari cadar dirimu" masih dalam narasi yang sama Sukma juga menulis "Aku Tak tahu syariat Islam, Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok lebih merdu dari alunan adzanmu".

Lain halnya dengan pernyataan-pernyataan keras Ratna kala menebar kecemasan pada kasus tenggelamnya Kapal Sinar Bangun di Danau Toba, Juli 2018. Di antara pernyataan tebar kecemasan Ratna adalah bahwa penghentian pencarian korban bukan karena alat, tetapi tidak adanya kemauan pemerintah. Ujaran tersebut melukai keluarga korban. Puncaknya ketika kasus hoaks penganiayaan dirinya yang dibumbui opini adanya pembungkaman demokrasi. Namun terbukti bahwa Ratna tidak dianiaya, melainkan tengah melangsungkan prosedur operasi plastik. Kasus ini menjadi kasus nasional karena melibatkan banyak elite politik.

Adapun Neno Warisman dalam perjalanan politiknya juga menggunakan isu agama dalam menebar kecemasan, dimulai dari kasus pidato permintaan maaf keterlambatan penerbangan di pesawat Lion Air, Agustus 2018. Neno menjelaskan drama penolakan kedatangan di Pekanbaru dalam rangka deklarasi #2019GantiPresiden. Dalam penjelasan kepada media, Neno menggunakan terma emak-emak selaku insan yang tidak hanya bisa melahirkan anak tetapi juga

menegakkan izzah (kemuliaan) dan marwah negara.

Puncaknya adalah ketika Neno menyisipkan doa Perang Badar dalam puisi yang dibacakan saat acara Munajat 212, Februari 2019. Teks yang dipersoalkan adalah “Dan jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu”. Neno, yang selalu membahasakan dirinya Bunda (panggilan untuk Ibu), mendompleng nilai keibuan dengan segala nilai atributnya. Teks yang diproduksi dalam acara Munajat 212 jelas menguatkan polarisasi bernuansa kebencian ber dasar agama. Memposisikan lawan politik seperti dalam Perang Badar menyiratkan bahwa kompetisi ini sebuah perang agama, bukan lagi kontestasi demokrasi yang sehat.

Mendulang Suara dari Perempuan

Pertanyaan selanjutnya yang juga mendasar adalah mengapa peran perempuan begitu signifikan dalam kontestasi demokrasi? Mengapa pula perempuan kini menjadi komoditas baru dalam percaturan politik? Hipotesis penulis didasarkan pada data dari Nations Population Fund, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.

Pada konteks pemilih perempuan, KPU RI telah merilis daftar pemilih tetap (DPT) jilid kedua yang disempurnakan. Dari 192 juta DPT, pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Terlihat betapa potensialnya perempuan menyumbang suara di pemilu 2019. Sekiranya inilah alasan kubu pasangan calon Prabowo-Sandi mengusung frasa emak-emak dan kubu paslon Jokowi-Amin mengusung istilah ibu bangsa.

Jadi, siapa perempuan yang disebut emak-emak? Mak dalam KBBI diartikan sebagai entitas yang sederhana, orang tua perempuan yang sepadan dengan ibu. Sebutan emak lazim digunakan dalam bahasa daerah Betawi, serupa ambu di Bandung, simbok di Jawa Tengah, inang di Sumut, ina di Sumba, atau mace di Papua. Feminis Indonesia, Julia Suryakusumah, Ruth Indiah, dan Dinda Nuranisa melihat adanya bias kelas dalam penyebutan emak. Perempuan yang disebut emak

diposisikan berasal dari kelas menengah ke bawah yang oleh politikus bakal diangkat derajatnya.

Hal ini diperkuat oleh pendapat pengamat budaya Remy Sylado yang menjelaskan penyebutan emak lekat dengan fungsi ibu.

Namun dengan mengulanginya menjadi emak-emak atau inang-inang memberikan nuansa yang berbeda—nilainya menjadi negatif, merujuk pada perempuan separuh baya yang tidak berpendidikan, tidak produktif, serta miskin. Meski demikian, dalam politik sensitivitas subordinasi inilah yang dikelola menjadi gerakan perlawanan. Situasi ini ditangkap dengan cerdas oleh mesin kampanye Prabowo-Sandi melalui slogan “The Power of Emak-Emak”. Beberapa teks kampanye paslon ini selalu menggunakan terma emak-emak, “Emak-emak adalah pioner kehidupan. Tanpa emak-emak, bapak-bapak kelimpungan. Emak-emak tahu mana yang terbaik. Pilihan emak-emak selalu tepat.”

Pentingnya Literasi Bagi Perempuan

Masalah muncul manakala perempuan yang berjumlah lebih dari 131 juta terlibat aktif dalam penyebaran disinformasi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Perempuan sedang menjadi sasaran kampanye sekaligus motor penggerakannya. Dengan aktivitas bermedia sosial yang didominasi isu gaya hidup dan gosip, perempuan rentan diterpa hoaks serta menyebarkannya. Apalagi tingkat literasi perempuan di Indonesia masih terhitung rendah. Mengutip tulisan Andreas Maryoto yang berjudul “Literasi Ibu Rumah Tangga Mencemaskan”, posisi Indonesia berada pada urutan kedua terakhir dari 26 negara. Perempuan cenderung menerima mentah-mentah informasi yang didapatkan dari media daring.

Menurut psikolog media Laras Sekarasih, aksi individu menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian dilandasi oleh afirmasi kepercayaan yang sudah ada. Menurutnya Laras, individu cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang telah dimiliki. Apabila individu telah berprasangka pada orang lain maupun kelompok tertentu, ia bakal mati-matian menentang apa saja fakta yang tidak mengafirmasi opini dan pendiriannya—begitupun sebaliknya. Di sisi lain terjadi pula hyperpersona ketika individu terlalu

memuja tokoh kelompok tertentu, hingga dapat menumpulkan sikap berpikir kritis. Perasaan terafirmasi tersebut menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi, yang bahkan tidak dapat dipercaya, ke pihak lain.

Rendahnya literasi atau terbatasnya pengetahuan juga menjadi alasan bagi seseorang mudah percaya pada hoaks. Tidak adanya pengetahuan dasar tentang informasi yang diterima bisa jadi memengaruhi individu mudah percaya. Tingkat kerentanan individu terhadap hoaks bergantung pada kemampuannya berpikir kritis, mengevaluasi informasi, serta melakukan literasi media. Tidak hanya soal kecanggihan dalam menggunakan teknologi informasi. Mengingat literasi perempuan terhadap media digital masih sangat rendah, kecemasan menjadi lumrah dirasakan.

Hal lain yang juga mengkhawatirkan penulis ialah posisi dan peran ibu dalam mendidik anak-anaknya di unit terkecil masyarakat. Adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan muatan-muatan positif kepada anak-anaknya. Sudah saatnya perempuan, baik ibu maupun emak, memperkaya pengetahuan agar makna demokrasi kembali pulih dan toleransi atas keberagaman menguat. Kuasa perempuan perlu diberdayakan untuk menabur banyak cinta, bukan kebencian.

Daftar Pustaka

- Asfar, Adib Muttaqin, Solopos.com, 23 Februari 2019, Isi Teks Lengkap Puisi Munajat 212 Neno Warisman, <<https://news.solopos.com/read/20190223/496/973949/isi-teks-lengkap-puisi-munajat-212-neno-warisman>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2018), Statistik Indonesia 2018, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, dapat diunduh melalui <<https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>>

- Detik.com, 25 Februari 2019, Kontroversi Ibu-Ibu Sosialisasi 'Jika Jokowi Menang Kawin Sejenis Sah', <<https://news.detik.com/berita/4442120/kontroversi-ibu-ibu-sosialisasi-jika-jokowi-menang-kawin-sejenis-sah>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Katadata.co.id, 8 Juni 2018, Jumlah Penduduk Perempuan Indonesia pada 2018, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/08/jumlah-penduduk-perempuan-indonesia-pada-2018-mencapai-1319-juta-jiwa>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Marsus, Bunyanun, Kiblat.net, 2 April 2018, Begini Isi Puisi Sukmawati yang Sudutkan Syariat Islam, Cadar, dan Adzan, <<https://www.kiblat.net/2018/04/02/begini-isi-puisi-sukmawati-yang-sudutkan-syariat-islam-cadar-dan-adzan/>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Mujib, Ilyas Lestianto, IDN Times, 18 Desember 2018, DPT Pemilu 2019, Pemilih Perempuan Lebih Banyak dari Laki-Laki, <<https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto-mujib-1/dpt-pemilu-2019-pemilih-perempuan-lebih-banyak-dari-laki-laki>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Prasongko, Dias, Tempo.co, 5 Oktober 2018, Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, <<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Respati, Sheila, Kompas.com, 23 Januari 2017, Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita Hoaks?, <<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Subagja, Indra, Kumparan.com, 28 Agustus 2018, Pidato Permintaan Maaf Neno Warisman di Pesawat atas Izin Kapten Pilot, <<https://kumparan.com/@kumparannews/pidato-permintaan-maaf-neno-warisman-di-pesawat-atas-izin-kapten-pilot-1535457333096522333>>, diakses pada 24 Maret 2019
- Tribun Medan, 6 Juli 2018, Ratna Sarumpaet Sebut Evakuasi Korban Kapal Tenggelam Dihentikan, <<http://medan.>

tribunnews.com/2018/07/06/ratna-sarumpaet-sebut-evakuasi-korban-kapal-tenggelam-dihentikan-bukan-karena-alat-tapi>, diakses pada 24 Maret 2019

Zaenudin, Ahmad, Tirto ID, 19 Februari 2018, Beda Perilaku Laki-Laki dan Perempuan dalam Menggunakan Internet, <<https://tirto.id/beda-perilaku-laki-laki-dan-perempuan-dalam-menggunakan-internet-cEWT>>, diakses pada 24 Maret 2019

Keluarga dan Pendidikan Demokrasi di Era Digital

Penulis: Rita Nurlita (Keluarga Digital Indonesia)

Dalam sebuah grup keluarga di media sosial, percakapan yang biasanya berlangsung hangat dan penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi tegang dan gaduh gara-gara debat soal pilihan politik. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa pilihannya yang paling baik dan hebat, sedangkan lawannya penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Beragam foto, video, dan narasi baik yang mengandung fakta maupun kabar bohong berhamburan dari masing-masing pihak. Fitnah dan hinaan tak henti diparadekan tanpa keinginan untuk saling mengapresiasi, mendengarkan fakta, dan melakukan klarifikasi kebenaran. Anggota yang jengah dan gerah memilih keluar dari grup, sedangkan yang lainnya

memilih bungkam, mengabaikan, atau mengalihkan topik pembicaraan.

Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada percakapan di bidang politik saja. Perbedaan pendapat tentang pilihan menjadi ibu bekerja atau ibu rumah tangga, melahirkan dengan cara caesar atau normal, pendukung vaksin atau non-vaksin, ibu menyusui atau tidak menyusui, hingga bubur yang diaduk atau tidak diaduk; seringkali memercikkan nuansa konflik di media sosial. Dampaknya, silaturahmi di dunia nyata bisa merenggang. Apalagi di tahun politik seperti menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hawa sosial

media jadi terasa semakin “panas” dengan beragam perang wacana. Alhasil, aksi unfriend dan unfollow kepada orang-orang yang dinilai tak sejalan menjadi hal yang marak dilakukan.

Era digital yang ditandai dengan kemudahan akses menerima dan mengirimkan informasi melalui jejaring sosial telah membawa banyak perubahan. Tidak terkecuali pada demokrasi di Indonesia. Apabila sebelumnya kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat masih bersifat konvensional dan terbatas, di era digital ini semua orang seolah bisa “bersuara” dan memiliki panggung yang sama dalam menyampaikan pendapat. Di ruang maya, tak ada lagi perbedaan strata. Antara petinggi negara, pejabat publik, selebritas, hingga masyarakat biasa bisa bebas beropini, berdebat, dan berdiskusi secara setara dalam ruang publik yang sama.

Namun ibarat dua sisi mata pedang, demokrasi era digital selain memberikan dampak positif berupa kemudahan untuk menyampaikan informasi dan kebijakan kepada jutaan orang yang saling terkoneksi; Internet juga memberikan dampak negatif seperti maraknya konten negatif dan pornografi, perundungan siber, kasus pencemaran nama baik, hingga pelanggaran data pribadi. Selain itu, kemudahan dan besarnya pengaruh media sosial seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kabar bohong dan berita palsu yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menyikapi hal ini, tentunya sangat penting bagi semua orang untuk memahami literasi digital sehingga bisa menciptakan iklim ber-Internet dan ber-media sosial yang positif, damai, serta kondusif. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari (Riel, dkk., 2012:3). Sedangkan menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat,

dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. (Kompas, 30/10/2018). Secara sederhana, literasi digital bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang mendapatkan konten, berpikir kritis, memilih yang baik dan benar, lalu membagikannya kepada orang lain. Lebih jauh, dalam literasi digital juga masyarakat diharapkan mampu memproduksi konten-konten positif dan bermanfaat untuk dibagikan ke Internet dan media sosial.

Literasi Digital dan Pendidikan Demokrasi dalam Keluarga

Sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membangun demokrasi bangsa. Dari lingkungan keluarga, anak-anak akan belajar tentang agama, etika, nilai moral, dan mengenal kehidupan untuk pertama kalinya. Dengan pola pengasuhan yang baik, maka diharapkan akan terlahir generasi-generasi bangsa yang tak hanya cerdas tapi juga bijak, berpikiran terbuka, dan berkepribadian baik. Pendidikan demokrasi di dalam keluarga bisa menjadi alternatif untuk membangun generasi Pancasila dimana nilai-nilai Pancasila ini sudah sesuai prinsip dan substansi dalam agama Islam. Mulai dari ketuhanan (uluhiyah), kemanusiaan (insaniyah), persatuan (ukhuwah), kerakyatan (ra'iyah) dan keadilan (al-'adalah).

Nilai-nilai demokrasi menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan kepada keluarga dan anak-anak sejak usia dini, karena saat keluarga menjalankan perannya secara optimal dalam menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, maka semua anggotanya secara otomatis akan mampu berkontribusi terhadap iklim kehidupan yang demokratis di masyarakat. Pendidikan demokrasi di dalam keluarga bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti membiasakan bersikap adil, memberi kebebasan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat, saling menghargai, dan toleran terhadap berbagai perbedaan, menumbuhkan rasa empati dan semangat bekerja sama, berfokus pada solusi bukan pada masalah, melatih berpikir kritis dan jujur sehingga mampu menyampaikan opini yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di era digital hampir semua orang memiliki akun media sosial untuk mengekspresikan pemikiran, karya, serta pendapatnya dengan

mudah. Pendidikan demokrasi di dalam keluarga sangat penting untuk disandingkan dengan pendidikan literasi digital, supaya kebebasan yang dimiliki tidak sampai kebablasan dan merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Apalagi Internet dan media sosial hadir sebagai ruang publik baru, tempat semua orang bisa berkumpul dan berinteraksi tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, usia, strata sosial, dan budaya. Tentu literasi digital telah menjadi sebuah keharusan agar anak dapat bergaul dengan aman di dunia maya serta dapat memanfaatkan internet secara kreatif dan produktif sejak dini.

Pendidikan literasi digital dan demokrasi di internet dan sosial media di dalam keluarga bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana, antara lain dengan menerapkan rumus 4D, yaitu:

1. Dekat

Membangun kedekatan dengan anak-anak dan keluarga adalah hal yang sangat penting dilakukan di era digital. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kedekatan adalah dengan menempatkan diri sebagai sahabat bagi anak-anak dan membangun suasana komunikasi efektif yang menyenangkan. Dengan terciptanya komunikasi yang baik, maka akan lebih mudah bagi orang tua untuk memasukan nilai-nilai positif dalam aktivitas keseharian.

2. Dukung

Di era digital ini, perkembangan TIK telah kian canggih dan tidak bisa dibendung lagi. Menerapkan larangan menggunakan Internet bukanlah pilihan yang bijak. Guna mempersiapkan mereka menjadi para pemenang di era digital, diperlukan adanya dukungan orang tua untuk memperkenalkan anak pada teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya bagi kebaikan. Misalnya: mengenalkan anak pada berbagai profesi dan kegiatan yang bisa dilakukan dengan Internet seperti animator, pengembang aplikasi dan permainan edukatif, penulis blog, dan sebagainya. Kemudian biarkan anak-anak memilih kegemarannya sesuai dengan usia, minat, dan bakat.

3. Dampingi

Selain memberikan banyak kemudahan dan pengaruh positif, teknologi Internet juga membawa dampak negatif, seperti banyaknya konten kekerasan dan pornografi, ancaman perundungan siber,

penguntitan, kecanduan, predator daring, dan sebagainya. Maka ketika anak-anak menggunakan gawai dan Internet, orang tua sebaiknya melakukan pendampingan untuk menghindarkan anak-anak dari pengaruh buruk tersebut.

4. Diskusi

Menerapkan pendidikan demokrasi dan literasi digital sejak dini bisa dilakukan dengan memperbanyak diskusi bersama anak-anak. Selain mengajarkan toleransi dan menghargai pendapat orang lain, diskusi juga bisa melatih anak-anak untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka dapatkan saat ber-Internet. Ada beberapa hal yang bisa didiskusikan juga bersama keluarga dan anak-anak, seperti situs mana saja yang aman untuk usia mereka dan kesepakatan mengenai batasan waktu yang baik untuk menggunakan internet dan sosial media.

Penutup

Melalui beberapa cara di atas, diharapkan keluarga bisa membangun budaya demokrasi yang sehat di era digital. Dengan membangun iklim komunikasi yang baik, membiasakan berdiskusi, serta mendengarkan pendapat anak, dan berempati pada perasaannya, merupakan contoh kecil demokrasi yang sejatinya dapat diterapkan dalam keluarga. Karena setiap zaman memang memiliki tantangannya masing-masing. Mengutip nasihat Ali bib Abi Thalib RA, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan dirimu. Maka dengan pembiasaan-pembiasaan positif seperti memberikan rasa saling menghargai dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi bekal kepada si buah hati untuk saling menghargai dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti di masyarakat luas dan jagat digital media sosial.

Pendidik Unggul Bagi Generasi Milenial

Penulis: Diena Haryana (Sejiwa)

Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi terbesar adalah hadirnya Internet, dimana semua orang termasuk anak-anak dapat mengakses dengan sangat mudah dan cepat, serta tak terbatas.

Anak-anak dapat mengakses segala informasi baru, pengetahuan, serta hiburan yang dapat mengembangkan wawasan mereka. Namun konten negatif dalam Internet perlu kita cermati dan layak menjadi perhatian. Beragam kasus dampak buruk Internet, yakni seperti yang terjadi antara Januari hingga akhir Juli 2016, berupa 198 kasus pornografi daring dan

kejahatan siber yang dilaporkan karena membahayakan anak-anak—meningkat 15 persen dibandingkan tahun lalu antara Januari hingga Juli 2015.

Di awal tahun 2017, publik dikejutkan dengan adanya “Lolly Candy Group” di Facebook. Sebuah forum bagi oknum yang menyalahgunakan foto dan video anak dengan jumlah sekitar 7000 anggota. Selain itu, anak-anak juga rentan untuk terkena dampak perundungan siber, kejahatan siber, adiksi terhadap pornografi, dan game daring, serta adiksi terhadap gawai itu sendiri.

Para orang tua dan guru perlu memiliki cara-cara yang tepat dalam mendampingi serta melindungi anak di dunia maya

agar mereka tidak terlalu larut di dalamnya. Pendampingan perlu dilakukan dengan baik agar anak dapat bertransformasi menjadi “Netizen Unggul” seperti yang tergambar di bawah ini:

- Cerdas, berkarakter, dan mandiri: anak memiliki kesantunan, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab atas segala yang menjadi kewajibannya, baik di dunia nyata maupun daring.
- Mampu hidup di dunia nyata dengan keterampilan yang membuatnya tangguh. Namun juga mampu menggunakan teknologi digital untuk memenuhi segala kebutuhan, misalnya: mencari informasi, berteman, sampai membeli barang.
- Sadar untuk mengasah keterampilan sosialnya, sehingga pergaulan dengan keluarga, teman-temannya, serta masyarakat di lingkungannya tetap terjaga baik; tidak hanya terjebak di berkutat di dunia maya.
- Aktif, ceria, ramah, menyenangkan, dan ‘up to date’.
- Memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya, sehingga mampu mencapai impian-impianya.
- Dalam menggunakan Internet, ia mampu memilih apa saja yang bermanfaat untuk dirinya, serta sadar untuk menolak hal-hal yang negatif.
- Dekat dengan keluarga, guru-guru, teman-temannya, serta memiliki kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan potensi diri.
- Kreatif dan mampu menciptakan ide-ide yang ‘*out of the box*’.

Setelah menyimak karakteristik anak yang unggul di dunia maya, lantas bagaimana menjadi pendidik yang unggul di era digital?

1. Memiliki integritas yang tinggi

Integritas diwujudkan melalui kata-kata yang terucap sesuai dengan tindakannya. Contohnya ketika guru mengajak anak-anak belajar

tentang literasi digital, dirinya pun harus mampu mengimbangi siswanya dalam penggunaan gawai serta memahami segala aturan-aturan dalam ber-Internet sehat. Selain itu apabila anak diminta tidak menggunakan gawai pada jam-jam tertentu, maka orang tua/guru perlu melakukannya pula.

Berikut beberapa cara bagi orang tua untuk mengajarkan nilai integritas pada anak:

- a. menerapkan integritas dalam keseluruhan sikap dan perilaku sebagai pendidik,
- b. mengajak anak untuk selalu konsisten mengimbangi kata-kata dan perilakunya,
- c. memberikan teguran jika anak berperilaku negatif, tak sesuai dengan nilai-nilai integritas yang kita tanamkan, atau kata-katanya tak sesuai dengan perilakunya.

2. Menjadi pendidik yang “top of mind”

Pendidik top of mind berarti berada di benak teratas anak, di atas posisi teman-teman, gawai, hobi, dan hal-hal lain yang dianggapnya penting. Dalam rangka menjadi orang tua yang top of mind, perlu mendekatkan diri pada anak sehingga bisa mengalahkan segala tantangan negatif dari luar yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Berikut beberapa cara bagi orang tua agar menjadi pendidik yang top of mind:

- a. bersikap FAB (fun, asyik, bergaul): orang tua FAB mampu dekat dengan anak berikut teman-temannya. Mendengarkan mereka dengan antusias, membuat suasana yang ramah, hangat, dan penuh canda. Ikut menikmati musik atau hobi yang disukai anak.
- b. memiliki kemampuan literasi digital yang baik: melek tentang dunia digital merupakan hal yang menguatkan respek anak. Tidak hanya terampil menggunakan gawai, namun juga memahami aturan-aturan di

- dunia digital, konten-konten positif yang dapat dibagi dengan anak, serta konten-konten negatif yang perlu dicegah untuk dikonsumsi anak. Sadar pula mendampingi anak dengan bijak di Internet.
- c. mendampingi anak dalam kesulitan: orang tua hadir pada masa-masa sulit yang dihadapi anak. Situasi sulit mulai dari perundungan siber, patah hati, prestasi yang menurun, konflik dengan sahabat, hingga ditegur guru. Mendukungnya, mendengarkannya, menginspirasinya, dan mengajaknya beraktivitas, adalah hal-hal yang bisa membantu anak keluar dari kesulitannya.

3. Konsisten online/ offline

Menjalankan semua contoh-contoh perilaku baik secara berkelanjutan oleh orang tua dan guru baik secara daring maupun luring. Contohnya, di dunia daring orang tua dan guru selalu menggunakan kata-kata yang santun, tidak menyebarkan hoaks, mengatur waktu sehingga tidak meninggalkan keluarganya demi media sosial.

Di dunia nyata, mereka perlu dicontohkan berperilaku santun, penuh empati, dan mengutamakan keluarga di atas segalanya. Begitupun terhadap anak, perlu menjaga perhatian dan tuntunan.

Bila terjadi perilaku yang tidak konsisten dari pendidik, maka bisa jadi anak-anak cenderung mencari pelarian karena mereka kesal dengan aturan-aturan yang tak konsisten penerapannya. Kemungkinan salah satu pelariannya adalah ke teman digitalnya, alias gawai. Hal-hal turunannya bisa terjadi, misalnya adiksi terhadap pornografi, adiksi terhadap games, atau adiksi terhadap gawai itu sendiri, terhadap media sosial, atau bisa pula pertemanan anak dengan orang asing di dunia maya yang bisa sangat membahayakannya.

4. Kompeten atau mampu

Orang tua dan guru perlu secara terus-menerus menambah pengetahuan, terutama literasi digital. Hal ini amat diperlukan agar pendidik mendapatkan respek dan rasa percaya anak. Pengetahuan

yang dimiliki orangtua dan guru akan menjadi kekuatan meyakinkan anak, bernegosiasi, maupun berargumentasi. Jika pendidik enggan belajar, mereka cenderung menggunakan cara-cara lama dalam mendidik anaknya, padahal begitu banyak metode pengasuhan efektif yang bisa dipetik. Selain itu, apabila orangtua dan guru enggan belajar menggunakan gawai dan memahami dunia Internet, maka anak akan merasa orang tua dan gurunya ketinggalan zaman.

5. Mendampingi anak

Orang tua hadir untuk mendampingi anak, baik dalam kegiatan-kegiatan di rumah, dalam pergaulan, maupun dalam bidang akademis. Orang tua perlu mengetahui kekuatan-kekuatan anak, tantangan-tantangan yang dihadapinya, termasuk orang-orang yang dia anggap dekat, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Orang tua diharapkan mau mendampingi, mendukung, memotivasi, dan membimbing tanpa mudah mengkritik atau menghakimi.

Apakah prinsip yang perlu dipegang pendidik dalam mendampingi anak, termasuk di media sosial?

- Dekat namun tetap menjaga privasinya: tidak berlaku layaknya polisi terhadap terdakwa—yang harus terus menerus ingin mengetahui kesehariannya. Pasalnya, anak juga ingin dipercaya orangtuanya. Demikian pula dengan apa yang dilakukan dengan gawainya, anak ingin dipercaya sehingga cara pendidik dalam mendampinginya harus menggunakan cara-cara yang ramah.
- Tidak menggurui: upayakan menjauhi kata “jangan” dan “harus”. Sebaliknya, sering bertanya dan melibatkan anak dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan, misalnya: “Menurut kamu, kamu akan mengisi apa pada liburan ini?”; atau “Apakah kamu memerlukan dukungan menyelesaikan pekerjaan?”
- Tidak panik bila menghadapi masalah dengan anak: suatu saat anak bisa saja melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Bila kita panik, maka respon yang keluar biasanya cenderung memarahi atau menghardik. Dalam situasi seperti ini, kita akan kehilangan kesempatan memahami hambatan yang betul-betul dialami anak, serta

- alasan-alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut.
- Memperhatikan screen-time: anak-anak perlu diberikan batasan tentang berapa lama ia boleh menggunakan gawainya. Bila tidak, mereka menjadi tidak terkontrol di ranah daring, yang dapat mengarah kepada obsesi gawai.

Kesimpulan

1. Orang tua dan Guru perlu memiliki pemahaman tentang pola asuh digital, yaitu pemahaman tentang bagaimana mereka mampu mendampingi dan melindungi anak di dunia digital. Pada saat yang sama, orang tua dan guru perlu mendorong anak agar mampu menggunakan Internet untuk menguatkan kreativitas dan kemajuan pendidikan mereka.

2. Agar dapat mendampingi dan melindungi anak di dunia digital, orang tua dan guru perlu menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi suri tauladan. Pendidik sangat dianjurkan memiliki ilmu tentang literasi digital, yaitu bagaimana menggunakan gawai dengan bijak, memahami aturan-aturan, serta mampu memilih dan memilih apa yang tepat bagi diri dan keluarga.

3. Dengan menjadi suri tauladan, orang tua dan guru akan menjadi dekat dengan anak sehingga mampu memberi contoh positif. Agar menjadi pendidik top of mind, gaya komunikasi asertif perlu dikembangkan orang tua dan guru, agar pendidik tetap bisa tegas tetapi tetap mengutamakan sikap ramah, santun, dan mendengarkan aspirasi anak. Maka anak akan merasa nyaman dan aman untuk mengekspresikan apa saja kepada pendidik, termasuk tantangan dan kesulitan yang sedang dihadapinya.

4. Selanjutnya, konsistensi dan komitmen orang tua dan guru dalam menjalankan semua yang tertulis di atas harus mampu dilakukan secara terus menerus. Hal ini akan menguatkan hubungan dengan anak, serta memantapkan karakter positif yang akan menjadi bekal mereka.

Materi di atas sebagian dinukil dari program “Smart School Online”, yang salah satunya membahas tentang Digital Parenting oleh SEJIWA. Dua modul lain yang dibawakan dalam program “Smart School Online” adalah Literasi Digital oleh ICT Watch, serta modul tentang Eksploitasi Seksual Anak dan Kejahatan Siber oleh ECPAT Indonesia. Program tersebut telah terlaksana di kota Ambon, Lombok, Kupang, Palembang, Cirebon, Banyumas, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Pontianak, dan Pare-Pare.

Pertemanan: Perbedaan Adalah Keniscayaan

Penulis: Cahya Suryani (Mafindo)

Sosial media merupakan aplikasi yang hampir semua individu miliki. Facebook, Instagram, Twitter merupakan tiga sosial media yang cukup “in” saat ini. Pertemuan pertama selain tukar nomor handphone biasa juga diselingi pertanyaan nama akun sosmedmu apa? Sosial media sebagai penyambung komunikasi lintas zaman. Sebelum maraknya sosial media cara individu untuk berkomunikasi adalah saat berkumpul bersama. Topik obrolan pun bermacam-macam mulai dari bahasan ringan hingga bahasan yang berat seperti politik dan kekuasaan.

Perkembangan teknologi memberikan sebuah perubahan dalam hal berkomunikasi. Obrolan mengenai politik dapat dilakukan dengan menggunakan

sosial media. Sejak pemilu tahun 2014, postingan politik yang berseliweran di timeline media sosial sudah tidak terbandung lagi. Postingan inilah yang menjadi benih-benih perpecahan dalam hubungan pertemanan. Perbedaan pilihan politik antara satu individu dengan individu lain yang di tuliskan di timeline media sosial cenderung membuat pertemanan jadi kurang harmonis. Dukungan pro akan di berikan pada pilihan politik yang di pilih, namun bila ada postingan yang kontra saat itu juga pasti akan terjadi perang komentar antara pendukung satu dengan pendukung lainnya. Sehingga munculah istilah cebong dan kampret.

Politik vs pertemanan di media sosial

Pembahasan mengenai politik vs pertemanan di media sosial dapat di telaah dari sudut politik, sudut terbentuknya sebuah hubungan pertemanan

Pertama, pembahasan mengenai seluk beluk politik. politik merupakan kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan dalam. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari politik itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan politik merupakan kegiatan untuk mewujudkan satu tujuan . Aristoteles memberikan gambaran politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik merupakan suatu kebaikan, individu yang berpolitik berarti mewujudkan *The Good of Life*. Namun sekarang ini politik pun mengalami pergeseran makna tujuan. Sesuai dengan pengertian politik yaitu untuk mewujudkan satu tujuan, terkadang individu atau kelompok menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kedua pertemanan, Konsep awal dari pertemanan adalah individu merupakan makhluk sosial, dimana setiap individu pasti membutuhkan individu lain untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk berbagi cerita maupun pengalaman. Sejak lahir manusia selalu hidup bersama dengan orang lain, setiap individu memiliki keinginan mendasar untuk membentuk dan mempertahankan hubungan. Pertemanan dapat terbentuk karena saling berbagi cerita, dan memiliki perasaan yang sama atau perilaku yang sama antara individu satu dengan individu lainnya. Hal mendasar dari hubungan pertemanan adalah sebuah kerelaan, hubungan timbal balik, egaliter memiliki kesamaan , individu yang menjalin hubungan mengakui dan memperlakukan satu sama lain dengan perlakuan yang sama. Saat individu berinteraksi dan berteman maka mereka akan membentuk konteks yang unik, dimana mereka akan belajar mengenai konflik, negoisasi, membentuk perspektis kemampuan dan empati serta memenuhi kebutuhan sosial utuk menjalin persahabatan dan keintiman.

Seseorang yang tidak dapat membentuk pertemanan, maka individu tersebut akan merasa asing atau terasing. Pembentukan pertemanan

memiliki fungsi yang penting sebagai sumber dukungan sosial dan emosional yang dapat membantu individu melewati tantangan dan menghadapi stres dalam kehidupannya. Afeksi merupakan salah satu pondasi yang kuat dalam terbentuknya sebuah pertemanan, afeksi merupakan sebuah kesamaan dan keinginan untuk membentuk persahabatan. Proses pembentukan pertemanan memiliki tiga syarat utama pertama, individu yang menjalin pertemanan harus memiliki satu persamaan perilaku satu perasaan, kesenangan, dan keinginan untuk bersama. Kedua, sebuah teman harus memiliki interaksi yang terbentuk dari berbagai cerita. Ketiga pertemanan terbentuk dari hubungan yang terdiri dari keintiman, seorang teman harus terbuka dan merespon satu sama lain karena memiliki pemahaman yang sama(5).

Sebuah hubungan pertemanan tidak dapat dibentuk dengan cara sederhana, karena individu yang membentuk pertemanan dengan individu lainnya harus memiliki waktu untuk bersama, berbagi cerita maupun berbagi perasaan. Pertemanan juga terbentuk karena adanya keintiman, untuk terus bersama berbagi cerita mengenai apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, hal yang ingin dicapai, menceritakan suatu hal yang rahasia. Selain itu juga pertemanan juga memiliki rasa toleransi dan empati yang timbul karena adanya persamaan afeksi. Saat ini pertemanan dapat mudah dibentuk melalui sosial media hanya dengan memilih dan mengajukan pertemanan apabila seseorang yang kita klik setuju untuk menerima pertemanan kita, maka saat itu pertemanan dapat terjalin. Proses pertemanan yang terbentuk di media sosial tidak selalu memiliki persamaan afeksi, tidak harus menghabiskan waktu bersama dan tidak selalu intim. Hal inilah yang menjadikan dasar betapa mudahnya benih-benih perpecahan muncul di media sosial.

Politik dan teman (pertemanan) adalah dua hal yang saling mempengaruhi, entah “politik” dalam berteman ataupun pertemanan dalam politik. “Politik” dalam berteman dapat diasumsikan sebagai proses otomatis setiap individu dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan, dimana setiap individu yang memutuskan untuk berteman memiliki tujuan pertemanan yang jelas. Misalnya saja pertemanan yang terjalin dalam sebuah komunitas AntiHoaks, maka

individu yang terlibat dalam komunitas tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memerangi penyebaran hoaks. Sedangkan pertemanan dalam berpolitik bisa diartikan untuk mewujudkan tujuan politiknya dapat membentuk sebuah koalisi dalam artian berteman. Kedua hal ini tentu saja memiliki perbedaan, koalisi atau pertemanan dalam politik hanya mengenal istilah teman atau musuh, sekarang teman, besok bisa menjadi musuh, namun dalam konteks “politik” dalam berteman justru “politik” dapat mempererat pertemanan karena hubungan tersebut memiliki tujuan pertemanan yang sama sehingga pertemanan memiliki dinamika sendiri.

Teori kulit bawang dapat digunakan untuk menganalisa sebuah hubungan pertemanan. Penetrasi sosial merupakan sebuah teori dari Irwin Daltman dan Dalmas Taylor. Teori ini merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan dimana individu yang berada dalam sebuah hubungan bergerak dari komunikasi superfisial menuju komunikasi intim(6). Intim yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya berupa keintiman fisik tapi juga keintiman secara intelektual dan emosional.

Menurut teori ini sebuah hubungan bergerak dari tidak dekat menjadi dekat melalui berbagai tahapan. Empat asumsi dari teori penetrasi sosial :

1. hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim
2. secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi.
3. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi
4. pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan.

Penjelasan dari ke-empat asumsi tersebut terletak pada pembukaan diri sebagai sebuah proses yang menggerakkan suatu hubungan untuk menjadi intim, namun tidak menutup kemungkinan hubungan dapat bergerak mundur (depenetrasi) yaitu saat terjadi konflik yang diakibatkan karena kurangnya keterbukaan diri dalam sebuah hubungan. Keterbukaan diri merupakan salah satu pemicu dari awet tidaknya sebuah hubungan. Saat ini semua individu dapat mengeluarkan komentar mengenai pilihan politiknya hanya dengan menuliskannya di sosial media lalu semua orang dapat membacanya. Komentar-

komentar inilah yang menjadi salah satu permasalahan terbesar dalam pertemanan di sosial media. seseorang yang tidak sejalan dengan pemikirannya dapat langsung di unfollow atau di serang melalui kalimat-kalimat sindiran.

Teori penetrasi sosial ini juga dapat dikatakan sebagai teori bawang karena struktur teori ini memiliki kemiripan dengan bawang yaitu terdiri dari lapisan. Lapisan pertama merupakan lapisan terluar yaitu citra publik yang tampak dan dapat dilihat secara langsung oleh orang lain. Misalnya jenis kelamin. Lapisan terluar ini bisa terkupas atau di kelupas saat individu mau membuka diri dengan bercerita mengenai apa yang di alaminya, misalnya rasa kecemasan. Tahap Resiprositas merupakan keterbukaan balik dari seseorang kepada yang lainnya, tahapan ini merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh orang lain, dimana sebagai proses yang mengarahkan orang lain itu untuk terbuka pada dirinya. Resiprositas ini merupakan kunci dari keintiman sebuah hubungan.

Struktur lapisan yang dimaksud dalam sebuah hubungan meliputi area topik yang akan di ceritakan. Dimana ini berhubungan juga pada dua dimensi keluasaan dan kedalaman . keluasaan merujuk pada topik apa yang akan dibicarakan dalam suatu hubungan, sedangkan kedalaman merupakan tingkat keintiman yang mengarah pada topik apa yang akan di diskusikan. Pada awalnya sebuah hubungan memiliki keluasaan yang luas dan kedalaman yang dangkal, itu sangat wajar namun saat pembukaan diri mulai terjadi maka lapisan dalam sebuah hubungan akan terbuka. Hal terpenting yang perlu di ingat Lapisan citra publik tidak memberikan pengaruh besar pada pergerakan sebuah hubungan. Persamaan dari pertemanan dan politik terletak pada tujuannya.

Politik vs Pertemanan Berdampingan atau Bertolak Belakang?

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis akan memberikan gambaran mengenai contoh positif hubungan dalam pertemanan yang tidak bermasalah walaupun ada perbedaan pilihan politik. coba perhatikan dalam pertemanan yang kita jalani apa selalu terisi dengan konflik karena adanya perbedaan. Tentu saja jawabannya tidak, masih banyak kita jumpai pertemanan yang terbentuk dari perbedaan namun



hubungan tersebut akrab, sebagai contoh hubungan pertemanan saya dengan beberapa teman juga masih terasa nyaman dan aman serta tentram walaupun terkadang kami memiliki perbedaan. Misalnya saja ketika berjalan saya inginnya makan siang di warung tapi teman lainnya ingin ke mall untuk berbelanja, terjadi perbedaan kan nah apa kami harus bertengkar atau diam-diaman, tentu saja semua bisa di selesaikan dengan baik- baik. Sebuah hubungan pertemanan pasti memiliki perbedaan, hal yang mustahil dalam berteman selalu memiliki kesamaan pendapat. Perbedaan dalam sebuah hubungan itu sangat wajar, perbedaan pilihan politik pun juga sangat wajar. Saat sebuah hubungan menjadi kacau bahkan terjadi konflik yang membuat hubungan menjadi jauh karena perbedaan pilihan politik, berarti ada yang salah dengan pendidikan politik di masyarakat, bagaimana sesungguhnya politik dipahami dengan tepat, bukanny menjadikan pilihan politik sebagai sebuah pilihan hidup dan mati.

Idealnya dalam sebuah hubungan baik pertemanan di dunia nyata maupun di dunia maya ya seperti pemaparan di atas, namun ternyata saat ini banyak masalah dalam sebuah hubungan. Saat penulis mengakses sosial media facebook penulis menjumpai postingan berisi sindiran bahkan hujatan antara satu teman dengan teman lainnya, saling sindir antara teman yang mendukung kubu A dan kubu B. Gemes deh, gimana tidak gemes awalnya mereka saling serang debat itu awalnya sahabatan, dekat banget namun entah mengapa saat ini postingan dari mereka isinya sangat tidak bersahabat miris bin ngenes, sebuah hubungan yang dibangun dari tidak akrab menjadi akrab rusak hanya karena perbedaan pilihan politik. saling perang di status media sosial seperti melupakan jalinan.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menggurui, murni kegalauan yang penulis rasakan... sebelum memutuskan untuk saling menyerang baik berupa sindiran atau hujatan, coba renungkan awal terbentuknya pertemanan, bagaimana suka cita hadir saat memulai sebuah hubungan, bagaimana konflik kecil mewarnai hubungan dan membuat hubungan itu menjadi lebih akrab. Saat ini karena perbedaan politik ada yang hilang dari pertemanan. Nilai toleransi, rasa saling menghargai karena sesama ciptaan Tuhan, waktu berkumpul, waktu untuk tertawa bersama. Falsafah Mangan ga mangan asal ngumpul pun seakan tenggelam karena terjebak pada panasnya pilihan politik.

Tentu saja falsafah ini dapat di menjadi contoh pertemanan dalam politik, makan ora makan sing penting ngumpul, makan ataupun tidak makan kepentingan untuk kumpul bersatu menjadi prioritas.

Hayuuuk, perbanyak guyon dan ngopi agar nilai yang tenggelam ini bisa terasa hadir lagi. Sayang loh hubungan yang di bentuk menjadi rusak karena perbedaan pilihan politik. ingat kata Aristoteles politik itu untuk membentuk *The Good Of Life*. Politik untuk kebaikan bukan untuk sesuatu yang buruk. Kembali ke fungsi utama di media sosial sebagai sarana menjalin komunikasi tanpa terikat perbedaan waktu dan tempat.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. cet. ke 4. PT. Gramedia Jakarta.
- Baumeister, R. F. (2012). Need-to-belong theory. *Handbook of theories of social psychology*, 2, 121-140.
- Rubin, K. H., Barstead, M. G., Smith, K. A., & Bowker, J. C. (2018). Peer relations and the behaviorally inhibited child. In *Behavioral Inhibition* (pp. 157-184). Springer, Cham.
- Sullivan, H. S. (2013). *The interpersonal theory of psychiatry*. Routledge.
- Jeske, D. (2008). *Rationality and moral theory: how intimacy generates reasons*. Routledge
- West, R. L., Turner, L. H., & Zhao, G. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application (Vol. 2)*. New York, NY: McGraw-Hill.

Mendidik Keluarga Digital

Penulis: M. Said Hasibuan (RTIK)

Demokrasi di era digital ialah suatu permasalahan yang dihadapi semua bangsa di dunia. Adapun pemicu utama dari demokrasi di era digital adalah kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK). Kemajuan TIK menjadikan demokrasi sulit di awasi. Semua dapat bersuara dengan tanpa etika .

Kemajuan TIK ini juga belum bisa bersamaan dengan kemajuan mental ataupun pemikiran personal dari masyarakatnya. Masyarakat yang selama ini berkomunikasi hanya dengan menggunakan audio dan terbatas ruang dan waktu. kini berubah semua dapat dilakukan dengan visualisasi dan tidak terbatas. Bisa saja pemicu keributan di suatu negara berasal dari luar negara tersebut. Identitas dapat berubah dan disamarkan, hal ini merupakan dampak Teknologi Informasi. Sehingga dibutuhkan

pemahaman terkait konsep demokrasi di era digital.

Konsep Demokrasi di Era Digital

Konsep Demokrasi diyakini sebagai kebebasan setiap orang menyampaikan pendapatnya sesuai dengan norma-norma yang ada di negaranya. Namun ada penambahan di era digital yang menjadi poin penting yang perlu disampaikan pada tulisan ini. Era digital menghilangkan jarak maupun waktu, semua dapat dijangkau seketika secara real time.

Pemerintah Indonesiapun sudah menyiapkan UU ITE sebagai rule of the game di demokrasi di era digital. Sosialisasipun dibutuhkan lebih banyak dilakukan karena 76.000 pulau ini sangat luas. UU ITE bermaksud “menjaga” rakyatnya untuk mematuhi norma-norma dan etika

berdemokrasi.

Kebebasan berpendapat saat ini kebablasan hingga penyampaiannya bukan saja dengan tulisan, namun dengan meme yang menggambarkan ketidakpuasan maupun kekecewaan yang seharusnya mengikuti koridor norma yang ada. Namun apa daya, pembuatan konten dengan imajinasinya hanya berorientasi keuntungan. Sementara produsen konten atau pemilik media seringkali sarat kepentingan.

Pembuat konten ini biasanya terdiri dari para ahli penyuntingan foto, video, dan seni, yang bisa membolak-balikkan fakta. Namun sebenarnya mereka hanya perlu pendekatan agar melampiaskan kemampuannya ke arah yang lebih positif. Misalnya, melalui wadah berkreasi dengan masuk ke lembaga pemerintahan guna mempercantik konten atau menyampaikan informasi pemerintahan dengan pendekatan yang lebih populer. Untuk itu, pemerintah memerlukan mitra yang memiliki kapasitas dan kapablitas, serta sifat persebaran nasional yang mampu mengarahkan anak muda kreatif ini kepada kegiatan yang mampu membangun bangsa.

Relawan TIK

Relawan TIK merupakan organisasi nasional yang bertugas membantu pemerintah menjadi jembatan kegiatan pusat ke daerah. RTIK, demikian sering disingkat, sudah ada di 34 provinsi dan hampir di 350 kabupaten dan kota, serta ratusan desa dan kampus. Mereka yang bergabung dalam RTIK biasanya sudah bertekad menyedekahkan ilmunya tanpa pamrih.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Relawan TIK untuk menyelamatkan demokrasi dari praktik yang kebablasan di era digital, yakni melalui kegiatan anti-hoaks dengan beberapa pemangku kepentingan mitra Relawan TIK, seperti kepolisian, kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintahan daerah, serta institusi pendidikan. Relawan TIK secara konsisten menyasar anak-anak muda yang tersebar di sekolah dan pesantren, begitu pula masyarakat umum dengan latar belakang berlainan.

Literasi Digital dalam Keluarga

Keluarga merupakan organisasi terkecil yang ada di sistem masyarakat. Dari keluarga, akan lahir aktor-aktor penggunaan teknologi informasi. Sejak lahir, anak sudah diperkenalkan dengan silau sinar kamera ponsel orang tua. Bahkan tidak jarang informasi pribadi bisa muncul di lini masa orang tuanya.

Setidaknya saat ini ada tiga (3) kelompok orang tua, yakni orang tua zaman old yang lahir pada tahun 60-an, orang tua zaman peralihan yang lahir pada tahun 70-an, dan orang tua zaman now yang lahir pada tahun 80-an. Permasalahan setiap orang saat ini sama beratnya. Namun lebih berat ditanggung orang tua zaman old. Anak-anak bahkan cucu mereka lebih canggih karena lebih dulu mengenal teknologi. Sedangkan orang tua zaman peralihan tergantung dari sisi orang tuanya, tetapi memang agak lebih mudah karena mereka sendiri mengalami dua zaman: tanpa dan dengan teknologi. Sedangkan orang tua zaman now pastinya sudah tidak masalah lagi.

Pendidikan di keluarga sangat dibutuhkan terutama pada zaman old. Pasalnya, informasi yang disampaikan oleh anak-anak mereka atau cara mereka sendiri mengkomunikasi ke publik saat ini berubah drastis. Jika kasak-kusuk zaman dulu berkulat di lingkaran sosial yang lebih sempit, kini bisa tersebar dengan mudahnya ke seluruh dunia. Bagi orang tua yang paham etika komunikasi sebenarnya tidak masalah dalam menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi. Kendala utama bagi pengguna Internet dari generasi yang lebih tua ialah adanya UU ITE yang dapat menjerat seseorang yang bermasalah di dunia daring.

Pendidikan pada orang tua zaman old perlu dilakukan dengan masif. Pendidikan ini dapat dalam bentuk literasi digital. Kegiatan ini biasanya dimotori oleh Dinas Kominfo setempat. Mereka bekerja sama dengan organisasi seperti Relawan TIK untuk melakukan edukasi kepada semua orang tua zaman old. Adapun materi yang diberikan, seperti:

1. pengenalan dasar Internet,
2. mendampingi anak di dunia daring,
3. membuat surel,
4. membuat media sosial,
5. belajar bisnis dengan Internet, dan
6. penerapan UU ITE

Sedangkan pada orang tua zaman peralihan juga dibutuhkan literasi digital dalam bentuk pelatihan dengan modul pendukung di beberapa bidang:

1. bisnis daring,
2. mendampingi anak di dunia daring,
3. mengatur waktu menggunakan gawai, dan
4. penerapan UU ITE

Terakhir adalah literasi digital yang diberikan pada orang zaman now. Sebenarnya tidak banyak materi lagi yang diberikan namun lebih kepada perubahan perilaku. Perilaku terkait penggunaan gawai dan pengawasan media sosial, serta pendidikan anak.

Jejak Digital, Masa Depanmu

Untuk anak-anak zaman now, perlu memperhatikan etika dalam menggunakan TIK. Unggahan di media sosial bisa sangat menentukan masa depan. Suatu saat nanti, di samping ijazah yang diperoleh dari sekolah, pihak perusahaan maupun pemerintahan serta instansi akan menanyakan alamat media sosial. Akun media sosial akan menjadi referensi untuk diterima-tidaknya di perusahaan atau pemerintahan untuk bekerja.

Jadi sudah saatnya sebelum mengunggah berita foto maupun informasi perlu dicek terlebih dahulu kontennya. Generasi muda dituntut memiliki etika sopan dan santun dalam menggunakan media sosial. Identitas anak zaman sekarang sudah dapat diawasi dari jejak digital yang mereka tinggalkan. Apa yang ditinggalkan berupa jejak digital akan sangat mudah diakses dan tidak dapat direkayasa. Rekaman jejak digital akan selalu hadir selama Internet itu ada. Maka

media sosial perlu digunakan dengan bijaksana ketika berkomunikasi, berbagi, maupun bersenang-senang.

Manfaatkan era digital ini dengan cara positif, misalnya memperbanyak teman, membesarkan bisnis, dan mengenalkan potensi diri. Dengan Internet, pengguna media sosial sudah masuk ke dalam pergaulan global. Maka unggahan, celotehan, dan bahkan makian di media sosial, tidak dapat hilang, ditarik, maupun dibatalkan secara daring. Jejak digital akan menjadi saksi siapa Anda sebenarnya.

Perihal Demokrasi



Digitalisasi Demokrasi VS Demokrasi Digital

Penulis: Made Dwi Anjani (Japeli)

Iklim kebebasan melalui gerakan reformasi nampaknya telah mengubah banyak hal dalam pembangunan sosial kultural di Indonesia. Mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, interaksi, dan komunikasi—bahkan sesuatu yang sifatnya pribadi pun mudah menjadi sorotan publik. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya digitalisasi menggiring masyarakat Indonesia pada ruang publik yang dipenuhi dengan realitas virtual. Kehadiran teknologi dengan layanan fitur media sosial yang beragam dan lengkap berperan besar dalam memperluas ruang publik.

Virtualisasai dan digitalisasi telah menjadi wahana baru yang membantu aktivitas keseharian serta membuat masyarakat lebih bebas mengutarakan pendapat, aspirasi, kritik dan

keluhan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Digitalisasi demokrasi menjadi arena baru dalam dinamika komunikasi politik. Berkat digitalisasi, demokrasi memungkinkan masyarakat bebas berpendapat di beragam media informasi. Rakyat dengan mudah bercanda dan mencaci elite negara, tak jarang rakyat mengkritik pemerintah melalui media sosial lewat karya kreatif seperti meme. Sehari-harinya media sosial dipenuhi dengan lalu lalang kata, ujaran, dan frasa satire. Sepintas ujaran seperti itu menjadi kudapan yang ringan dan lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi sejatinya memungkinkan terbentuknya dialog dalam komunikasi politik. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Demokrasi tanpa dialog nampak jelas dalam

pertarungan politik baik dari kubu petahana maupun dari kubu oposisi. Keduanya tidak henti-henti menyiapkan narasi politik yang dipenuhi fitnah, ujaran kebencian, dan saling kritik secara membabi buta. Saat ini publik terlibat dalam adu argumentasi di media sosial dengan saling membagi informasi tanpa disaring terlebih dahulu. Tak jarang di ruang interaksi virtual seperti grup WhatsApp ramai dipenuhi perundungan pada mereka yang dianggap berseberangan pilihan politik.

Digitalisasi demokrasi ialah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Fenomena saling serang bakal terus berlanjut menyebar, mengakar, dan bertumbuh secara agresif dibandingkan dengan sejarah demokrasi di abad sebelumnya. Di sinilah kemudian perlu adanya upaya-upaya untuk mengembalikan muruah demokrasi ke tempat yang sebenar-benarnya.

Memaknai Demokrasi di Era Digital

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. Kata ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan “kekuasaan rakyat”. Pengertian demokrasi secara umum ialah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikianlah Indonesia memungkinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat dengan cara terbuka.

Sementara itu, ada beberapa definisi tentang demokrasi digital. Alexander dan Pal (1998) mengemukakan bahwa demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan partisipatif dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Sedangkan menurut Abecker (1998), demokrasi digital adalah fenomena tentang bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi praktik demokrasi dan proses-proses politik. Menurut Hacker dan Dijk (2000) demokrasi digital ialah upaya mengimplementasikan konsep demokrasi tanpa terkungkung oleh



- limitasi waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya dengan menggunakan teknologi digital.

- Demokrasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka melalui perangkat yang dimilikinya. Akan tetapi, kesadaran untuk memaknai kebebasan mengeluarkan pendapat ini sepertinya tidak diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Maka aktivitas menganalisis informasi sangat jarang dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, publik mudah percaya dengan apapun yang terpampang di media sosial dan dengan mudahnya membagikan hoaks, ujaran kebencian, maupun hasutan.

Demokrasi Era Digital dalam Ruang Publik

Dunia maya sekarang ini sudah menjelma menjadi ruang publik baru yang memungkinkan bagi setiap warga negara menuangkan opini dan aspirasinya. Fungsi dunia maya menjadi tempat untuk mendiskusikan berbagai masalah dan kebijakan pemerintah. Ketersediaan ruang publik bagi perwujudan demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas memungkinkan terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Peralannya, dalam ruang publik tersebutlah segenap lapisan masyarakat akan memiliki ruang dan kesempatan mengawasi kebijakan pemerintah.

Penggunaan konsep ruang publik memungkinkan untuk terciptanya kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan berkumpul. Beberapa dekade lalu, pertukaran gagasan antar-individu mengandalkan perjumpaan fisik. Namun sekarang tanpa harus bertemu langsung asalkan terkoneksi dengan internet mereka bisa dengan leluasa berbincang-bincang secara virtual melalui media sosial yang dimiliki. Ruang publik baru ini bila dibandingkan dengan ruang publik pendahulunya memang memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tidak ada batasan yang mengikat (borderless) sehingga informasi bisa diperoleh dari manapun dan kapanpun dan banyak sumber informasi alternatif selain media massa arus utama.

Sifat dari media digital inilah menjadi modal politik yang potensial

untuk mengagregisasi aspirasi serta kepentingan publik dalam setiap tahapan pengambilan keputusan oleh otoritas. Namun peristiwa politik akhir-akhir ini justru penuh dengan unggahan yang mengedepankan sentimen SARA, dan kabar bohong berupa disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Ruang publik perlu dijaga agar menjadi kekuatan efektif di era demokrasi digital agar kompetensi pengelolaan pemerintahan terbangun. Imbasnya kelak rasa keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan pada keberagaman bakal terbentuk. Selain itu juga bakal menumbuhkan aksi kolektif yang positif penuh solidaritas kemanusiaan seperti yang terjadi pada kasus Koin untuk Prita beberapa tahun yang lalu.

Daftar Pustaka

- Alexander, C.J., & Pal, L.A. (eds.). 1998. *Digital Democracy: Policy and Politics in the Wired World*. Oxford: Oxford University Press
- Becker, T. 1998. *Governance and electronic innovation: A clash of paradigms*. *Information, Communication and Society* Vol. 1, No.3
- Hacker, K. L. & Dijk, I. (eds.) 2000. *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London: Sage.
- Dayanto. 2017. <https://parliamentresponsiveforum.wordpress.com/2017/10/07/ruang-tanpa-ruang-merawat-ruang-publik-baru-di-era-teknologi-digital> diakses tanggal 1 Maret 2019

Etika Media Baru: Pengintegrasian Kebebasan dan Tanggung Jawab Demi Demokrasi Damai

Penulis: Puji Rianto (Japelidi)

Setidaknya ada sepuluh keuntungan yang dapat diharapkan (desirable consequences) dari demokrasi, di antaranya adalah pencarian perdamaian (peace-seeking) (1). Kant mengemukakan bahwa pemerintahan demokratis akan dikontrol oleh rakyatnya sehingga tidak akan membawa negara ke dalam pertumpahan darah (2).

Meskipun pernyataan ini tidak diterima secara mutlak, dan beberapa ilmuwan politik menyanggah hal ini, tapi ada

banyak bukti bahwa negara-negara demokratis tidak saling menyerang satu dengan lainnya (3). Ketika negara-negara demokrasi menyebar luas, konflik dan peperangan antarnegara demokratis akan semakin berkurang sehingga perdamaian dunia dapat diwujudkan.

Sejak perang Dunia Kedua, secara relatif, dunia menikmati perdamaian panjang meskipun konflik tidak pernah berhenti sama sekali. Ketika konflik di antara negara berkurang, konflik

dalam negara justru meningkat. Konflik-konflik itu dilatarbelakangi oleh identitas etnis, suku, dan agama, serta berlangsung di banyak negara. Di era sekarang ini, identitas–berkelindan dengan faktor ekonomi dan politik–tampaknya menjadi penyulut bagi banyak konflik di dunia, dan beberapa di antaranya terjadi di negara-negara demokrasi.

Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan hal ini. Demokrasi tidak hanya menjanjikan transisi pemimpin yang damai, tapi juga menyulut politik identitas. Dalam politik identitas itu, seseorang atau kelompok dengan mudah melakukan peng–*other*–an pihak lain. Demokrasi, dalam hal ini, tidak lagi dimaknai sebagai partisipasi politik yang setara atau, meminjam Habermas, diskursus rasional dalam ruang publik demokratis (4) yang menjadi sarana memecahkan masalah bersama dalam kerangka *res publica* (5), tapi sekadar sebagai perjuangan memperebutkan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi bukannya menjamin transisi kepemimpinan pemerintahan secara damai, tapi justru–dalam masa pemilu ke arah transisi itu–terjadi konflik di antara warga negara.

Hannah Arendt mengemukakan, “Politik berlangsung di antara manusia-manusia maka politik berada di luar manusia.”(6) Oleh karena politik di luar manusia, maka komunikasi menjadi penting. Hal ini karena melalui komunikasiilah manusia memahami yang lain sehingga terjadi proses ‘peleburan.’(7) Masalahnya bahwa komunikasi tidak menciptakan peleburan, tapi justru mempertegas perbedaan. Maka, politik–dalam konteks Indonesia saat ini–bukanlah kebersamaan-dan-kesalingan-dari-yang-berbeda-beda sebagaimana Arendt kemukakan (8), tapi justru pemecah-belah dan sarana pemertegas perbedaan. Di sini, situasinya menjadi sangat ironis. Jika komunikasi dibutuhkan, karena perbedaan demi memahami satu dengan lainnya yang memungkinkan kedua subjek melebur secara mental, maka yang kemudian terjadi justru sebaliknya. Komunikasi menjadi sarana untuk membuat garis demarkasi yang tegas. Dalam garis demarkasi itu, bahasa mempertegas antara “saya” dan “kamu”, “kita” dan “mereka”.

Dalam politik termediasi saat ini, pe-liyan-an terjadi dalam skala



yang jauh lebih masif. Keberadaan media baru yang memungkinkan pengguna (*user*) terlibat aktif dalam proses komunikasi ternyata memberikan implikasi negatif bagi demokrasi. Media baru memang menjanjikan partisipasi warga negara yang mampu menggerakkan perubahan positif,⁽⁹⁾ tapi juga menciptakan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan bagi demokrasi.

Ruang online, seperti ditunjukkan Brown, membuat pelaku tidak terlihat secara fisik sehingga menghilangkan ketakutan akan tanggung jawab.⁽¹⁰⁾ Media baru juga memungkinkan para pengguna membangun jaringan dengan individu-individu lain dengan pola pikir sama yang memungkinkannya membangun “kelompok pembenci.” Kelompok yang dianggap sebagai musuh, menurut Lim, dipotret dalam bingkai perbedaan, penyimpangan, dan ancaman.⁽¹¹⁾ Situasi ini diperparah oleh—karena dorongan untuk tidak perlu bertanggung jawab—manipulasi pesan demi menyerang “yang lain” tadi, sehingga kebebasan dalam menggunakan media baru, baik dalam kerangka memproduksi maupun menyebarkan pesan-pesan komunikasi, tidak lagi digunakan untuk membuka diskursus rasional, tapi menjadi sarana untuk membangun narasi yang menyesatkan, tidak jujur, emosional, dan menyebarkan kebencian. Rasio dikalahkan oleh emosi.

Di sinilah, etika media baru menjadi sesuatu yang mendesak. Dengan etika, para pengguna media baru diharapkan tidak akan secara gegabah memanipulasi pesan demi pemenuhan hasrat kebencian mereka, tapi mempertimbangkan setiap dampak dan kegunaan pesan yang diproduksi dan disebarluaskan. Dengan cara demikian, demokrasi digital akan berlangsung secara sehat, tidak dipenuhi konflik, ataupun ujaran-ujaran kebencian sehingga demokrasi yang damai dapat terwujud.

Tulisan ini akan membahas mengenai etika media baru dalam konteks demokrasi digital. Tesis yang diajukan dalam tulisan ini bahwa demokrasi digital hanya mungkin berlangsung secara sehat dan damai jika komunikasi melalui media baru dilandasi oleh etika. Pada bagian awal, akan dipaparkan kebebasan dan tanggung jawab, sedangkan bagian berikutnya akan memaparkan sumber-sumber ajaran etika dalam penggunaan media baru. Tulisan akan ditutup dengan

kesimpulan dan saran

Tuntutan Etis Media Baru: Kebebasan dan Tanggung Jawab

Media baru berbeda dibandingkan dengan media konvensional (koran, radio, dan televisi). Jika tuntutan etis media konvensional lebih banyak diletakkan dalam kerangka pekerja profesional media—misalnya jurnalis—maka tidak demikian media baru. Dalam media baru, ada perubahan mendasar dalam pola-pola komunikasi ketika “audiences” berubah menjadi “users” dan dari “konsumer” menjadi “produser”. Dalam media baru, seseorang dapat menjadi penerima dan produsen pesan sekaligus. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan media massa konvensional di mana pembedaan antara pemroduksi pesan (institusi media massa) dan penerima pesan (khalayak) menjadi sangat jelas. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya tuntutan tinggi atas etika bagi para profesional media seperti etika jurnalistik (untuk jurnalis), etika periklanan atau etika penyiaran (P3 dan SPS). Untuk menjalankan kerja itu, mereka dilindungi oleh peraturan perundangan yang menjamin kebebasan mereka. Kebebasan adalah prasyarat seseorang dapat dituntut pilihan etisnya.

Para pengguna media baru mempunyai kebebasan yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan para profesional media. Para pengguna media baru dapat memproduksi pesan dan menyebarkan pesan itu kapan pun. Bahkan, sifatnya yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas menciptakan situasi kebebasan yang hampir tanpa batas. Namun, tidak ada suatu bentuk kebebasan apa pun yang tanpa batas (13) dan lepas tanggung jawab. Seperti dikemukakan Corliss Lamont, seseorang yang mempunyai kebebasan lebih besar, maka akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pula dibandingkan dengan yang tidak.(14) Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan segala alternatif yang ada akan mempunyai tanggung jawab lebih besar, dan, dengan demikian, mempunyai tuntutan moral lebih besar pula. (15)

Dalam perspektif ini, kebebasan akan senantiasa menuntut tanggung jawab, dan itu berarti tuntutan moral sehingga tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Di sini, dapat dikatakan bahwa meluasnya

hoaks dan ujaran kebencian terjadi karena langkanya moralitas dalam penggunaan kebebasan. Padahal, etika atau moralitas bukan hanya menuntun orientasi hidup seseorang dalam kehidupan bersama dan bagaimana seseorang menjalani hidup bersama dengan yang lain, tapi yang lebih penting bahwa etika menyangkut keberterimaan dalam kehidupan bersama.(16) Dengan kata lain, semakin etis seseorang maka semakin diterimalah orang itu dalam kehidupan sosial, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, kebebasan dalam media baru harus disertai dengan tanggung jawab etis agar kehidupan bersama tidak penuh konflik dan kebencian.

Sumber Etika dan Beberapa Prinsip Dasar

Jika kebebasan dalam menggunakan media baru harus dilandasi dengan tanggung jawab etis, maka di manakah kita menemukan dasarnya? Dalam teori etika, biasanya orang akan mempertanyakan setiap manfaat tindakan ataupun berdasarkan kewajiban moral universalnya Emanuel Kant.(17) Dalam visi utilitarianisme, suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk jika mampu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Dalam etika utilitarianisme, konsekuensi tindakan menjadi dasar pertimbangan, dan karena tujuan manusia adalah meraih kebahagiaan, maka baik buruk tindakan harus diletakkan dalam kerangka: apakah konsekuensi tindakan memberikan kebahagiaan banyak orang atukah tidak? Dalam kata-kata Jeremy Bentham, "*the greater happiness of the greatest number.*" Maka, sederhananya, dilihat dari konsekuensi tindakan, kebohongan dan kebencian dalam media sosial bukanlah tindakan etis karena akibatnya tidak membahagikan banyak orang.

Deontologi atau kewajiban moral universal Kant, sebaliknya, mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk jika perbuatan itu sesuai dengan kewajiban moral (*moral-duty based*). Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan atau tindakan itu adalah sesuatu yang diwajibkan berdasarkan atas hukum meskipun tindakan hukum juga harus dilihat aspek moralitasnya. Dalam etika Kant, tujuan mempunyai peran yang penting, dan tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, perbuatan menyebar hoaks dan kebencian dengan menggunakan media sosial adalah tidak baik karena bertentangan dengan moralitas universal. Ini karena tidak ada

satu pun moralitas yang dapat menerima kebohongan atau membenci orang lain.

Moralitas universal justru menginginkan kejujuran, kasih sayang, dan maaf. Agama juga dapat menjadi sumber ajaran etika. Islam, misalnya, mengenal beberapa prinsip etis komunikasi. Islam mengajarkan perkataan lemah lembut, tidak mengatakan perkataan yang membuat marah dan permusuhan, dan sebagainya.(19) Islam juga mengajarkan pentingnya kejujuran (*qaulan sadidan*) yang berarti bahwa dalam berkomunikasi hendaknya selalu mengatakan sesuatu yang benar atau lurus dan jujur, serta adil, tidak ada rekayasa atau penyimpangan informasi.(20) Ini hanya beberapa hal yang diajarkan dalam etika Islam, dan masih banyak hal lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar rujukan dalam menggunakan komunikasi digital. Dengan merujuk dasar etis ini, seorang muslim mestinya pantang dalam menyebarkan berita bohong, kebencian, dan hal-hal yang menimbulkan amarah. Sebaliknya, segala sesuatunya harus disampaikan dengan cara yang jujur dan penuh kelembahlembutan. Jika ini dilakukan, demokrasi kiranya akan benar-benar membawa perdamaian.

Penutup

Kita berada dalam kehidupan yang sangat plural, yang dilingkupi banyak realitas. Oleh karena itu, agar kehidupan sosial dan politik aman dan damai maka setiap manusia yang hidup di dalamnya harus mempunyai kesadaran plural.(21) Media baru, di sisi lain, membuat kehidupan sosial dan politik semakin kompleks dan plural karena memperluas persinggungan antarindividu sehingga kebutuhan akan keterbukaan pada realitas yang plural semakin tinggi. Namun, ini hanya satu sisi untuk membangun kehidupan demokrasi digital yang damai. Sisi lainnya, kebebasan dalam media baru haruslah disertai tanggung jawab. Dalam arti, senantiasa mempertimbangkan dimensi moralitas dalam setiap penggunaan media baru, terutama dalam konteks politik digital sekarang ini. Tanpa tanggung jawab semacam itu, media baru hanya akan menjadi bagian dari perluasan konflik dan kebencian.(22)

Dalam menggunakan media sosial dan media baru lainnya, seseorang harus secara kritis memikirkan apakah tindakannya itu dibenarkan

secara moral ataukah tidak? Dasar pertimbangan itu dapat dilihat dengan menghitung manfaat, kewajiban-kewajiban universal, ataupun ajaran etis agama yang dianutnya. Hanya dengan cara demikian, media sosial akan memberikan manfaat bagi perdamaian di era demokrasi digital yang kini tengah berlangsung.

Daftar Pustaka

Lihat Robert Dahl, *On Democracy*, Yale University Press: New Haven & London, hal. 46.

Lihat Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, penyunting dan pengantar Tadjudin Noer Effendi, CCSS, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Lihat F Budi Hardiman (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius "Kepublikan berarti bahwa segala kebijakan yang menyangkut kepentingan umum harus diuji secara diskursif dalam pembentukan opini dan kehendak kolektif dalam ruang politik."

F Budi Hardiman, (2005). *Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal.34

Di sini, menyatu bukan dalam pengertian fisik, tapi dalam pengertian mental. Ketika seseorang berkomunikasi dengan yang lain maka akan terjadi proses penyingkapan, dan semakin intens komunikasi akan semakin dalam pula penyingkapan itu. Ini akan membuat orang-orang semakin memahami satu dengan lainnya sehingga menipiskan perbedaan diantara orang-orang itu. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Driyarkara (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kanisius, Kompas, Gramedia

Budiman, *Memahami Negativitas*, hal. 34

Lihat Studi Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarief (2012). *Melampui*

- Aktivisme click? Meida baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer, Jakarta: FES
- Dikutip dari Budi Gunawan dan Barito Mulyo Retmono, (2014).
Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia. Jakarta: KPG, hal. 97; sebagai pembanding lihat Anthony G. Wilhelm (2003). Demokrasi di Era Digital, penyunting dan pengantar Heru Nugroho, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS
- Gunawan dan Ratmono, hal. loc.cit., 99
- Martin Lister, John Dovey, Seth Gidding, Ian Grant & Kieran Kelly (2009).
New Media: A Critical Introduction. London & New York: Routledge
- Kebebasan dapat dibatasi karena alasan public good, dan penggunaan kebebasan yang mengancam publik dapat diberi hukuman. Lihat Michael J. Quinn (2006). Ethics for the Information Age, second edition, Pearson Education, Inc.
- Corliss Lamont (1980). "Freedom of Choice and Human Responsibility"
Dalam John R Burry/Milton Goldinger (eds.) Philosophy and Contemporary Issues, third edition, MacMillan Publishing Co., Inc, London & New York
- Lamont, ibid
- Lihat Frans Magnis-Suseno (1987). Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius
- K Bertens (2013). Etika, edisi revisi, Yogyakarta: Kanisius; lihat juga Louis Alvin Day (2003). Ethics in Media Communications: Cases and Controversies, Australia, Canada, Mexico: Thompson-Wadsworth
- K. Bertens, ibid., hal. 192
- H.M. Tata Taufik (2012). Etika Komunikasi Islam. Bandung: Pustaka Setia
Bandung, hal. 169
- Taufik, loc.cit., bab IV
- Lihat Bagus Takwin (2005). Kesadaran Plural: Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas. Bandung: Jalasutra
- Analisis mengenai peran media baru ini dalam menciptakan konflik dan tragedi dapat dilihat dalam Stephanie Alice Baker (2014). Social Tragedy: The Power of Myth, Ritual, and Emotion in the New Media Ecology. New York: Palmgrave Macmillan

Keberagaman dan Dinamika Demokrasi Indonesia di Era Digital

Penulis: Marvin. F. Lurens

“Masalah terbesar bagi demokrasi Indonesia bukanlah terorisme tetapi intoleransi yang mejalar dari kelompok radikal yang pinggiran ke arah arus utama (mainstream),” tulis Sidney Jones.

Indonesia adalah negara yang besar: setidaknya ada 16.056 pulau di gugusannya, jumlah penduduknya pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa dengan 86 persen dari total populasi berada pada jenjang usia produktif. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, pengguna Internet di

Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,7 persen dari total populasi. Luas wilayah, jumlah penduduk, berikut dengan tingkat penetrasi Internet yang tinggi, berdampak pada demokrasi era digital. Arus informasi kini sudah tak terbendung dan memantik kegamangan publik: apakah informasi yang beredar di Internet bisa dipercaya apabila didominasi hoaks semata dan ujaran kebencian?

Ancaman Keberagaman dalam Demokrasi Digital

Perkembangan penetrasi internet di Indonesia, membuat platform

media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi chat seperti Whatsapp serta Telegram menjadi ladang subur sirkulasi produk-produk hoaks dan ujaran kebencian. Survei Daily Sosial (2018) terhadap 2.032 pengguna Internet di Indonesia menyatakan bahwa 81,25 persen responden menerima informasi hoaks melalui Facebook; 56,55 persen melalui WhatsApp; sebanyak 29,48 persen melalui Instagram; serta 30 persen responden melalui Twitter. Sementara itu, tidak kurang dari 32,97 persen responden menerima hoaks melalui Telegram.

Dahulu, ujaran kebencian yang ditujukan kepada minoritas hanya disebarkan oleh pihak-pihak tertentu lewat ruang luring (offline) yang seringnya tidak dilirik oleh media arus utama. Kini, pihak-pihak yang ingin mengambil untung di panggung politik dan kekuasaan begitu lihai mengelola isu agama. Para tukang pelintir pintar melihat peluang perkembangan teknologi dan secara masif menggunakan platform media sosial dalam menyebarkan hoaks dan menyiarkan ujaran kebencian.

Aksi mengambil kesempatan dalam kesempatan di era digital bisa disaksikan pada kasus viralnya video yang dengan sengaja disunting dan dicerabut dari konteks aslinya—lantas direspon dengan aksi unjuk rasa besar-besar hingga sang penutur dijerat pasal penodaan agama. Sementara sekelompok massa di daerah lain mengikuti seruan seorang pengkhotbah untuk menyerang anggota kelompok minoritas, baik secara daring maupun serangan fisik secara langsung. Belum lagi politikus yang membakar sentimen rasial menggunakan hasutan bahwa pribumi yang tengah dijajah pendatang.

Sistem demokrasi yang diamalkan di Indonesia semestinya dapat melindungi ruang-ruang publik dan mampu membuka ruang dialog berkualitas di tengah pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Demokrasi harusnya mampu menjamin individu untuk beribadah dan meyakini kepercayaan masing-masing dalam kesetaraan dan tanpa rasa takut. Sehingga tidak ada tempat di tengah masyarakat bagi sifat dan sikap intoleransi. Pemanfaatan isu politik identitas marak terjadi menjelang pemilihan presiden tahun 2014



- silam dan pilkada Jakarta 2017. Pengalaman tercorengnya demokrasi dengan isu yang memecah-belah di dua pemilu tersebut membuat kita semua khawatir atas apa yang akan terjadi di pemilu serentak tahun 2019 ini.

- Para oportunist begitu efektif menggunakan sentimen agama di tengah masyarakat, sehingga dapat merembet ke upaya mobilisasi massa yang anti-demokrasi. Panggung kekuatan rakyat justru melemahkan kekuatan rakyat—hukum yang seharusnya dapat melarang penyalahgunaan berekspresi untuk tujuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas dilanggar tanpa ampun. Tidak jarang isu politik dan SARA saling bertumbukan, kemudian tumpang tindih. Perlu kita sadari bahwa hoaks politik bernuansa SARA ini perlu menjadi perhatian serius dan menantang demokrasi kita ke depan.

Hoaks politik bernuansa SARA seringkali berisi hasutan dan merekayasa ketersinggungan, seperti konsep pelintiran kebencian dari Cherian George dalam bukunya “Hate Spin” (2017) yang telah diterjemahkan oleh PUSAD Paramadina. Pelintiran kebencian melibatkan dua hal, yakni ujaran kebencian dan keterhasutan. Pelintiran kebencian perlu dilawan karena hasutan berupaya untuk merendahkan martabat manusia bahkan seringkali menysar orang-orang yang terpinggirkan. Hasutan juga menyuburkan prasangka dan diskriminasi yang bisa mengakibatkan pengucilan dan presekusi. Hasutan kebencian terbukti memicu kekerasan baik secara fisik yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian non-materil. Apabila tidak ditangani, hasutan kebencian dapat meruncing menjadi konflik antar-kelompok sampai berakhir pada tragedi pembersihan etnis di tataran ekstremnya.

Hoaks politik bernuansa SARA seringkali berisi hasutan dan merekayasa ketersinggungan, seperti konsep pelintiran kebencian dari Cherian George dalam bukunya “Hate Spin” (2017) yang telah diterjemahkan oleh PUSAD Paramadina. Pelintiran kebencian melibatkan dua hal, yakni ujaran kebencian dan keterhasutan. Pelintiran kebencian perlu dilawan karena hasutan berupaya untuk merendahkan martabat manusia bahkan seringkali menysar orang-orang yang terpinggirkan. Hasutan juga menyuburkan prasangka dan diskriminasi yang bisa

mengakibatkan pengucilan dan presekusi. Hasutan kebencian terbukti memicu kekerasan baik secara fisik yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian non-materil. Apabila tidak ditangani, hasutan kebencian dapat meruncing menjadi konflik antar-kelompok sampai berakhir pada tragedi pembersihan etnis di tataran ekstremnya.

Beberapa ketentuan hukum telah dibuat untuk mengatasi hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia, seperti yang ditemui pada Pasal 20 Ayat (2) “Konvenan Hak – Hak Sipil dan Politik” pada UU Nomor 12/2005, kemudian Pasal 48 “Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis” pada UU Nomor 4/2008. Ada pula Pasal 156 “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)” dan Pasal 19 Tahun 2016 mengenai “UU Informasi dan Transaksi Elektronik”. Namun bukan berarti semua hasutan kebencian harus diselesaikan lewat pidana, karena tergantung konteksnya.

Ujaran kebencian bisa didefenisikan sebagai penghinaan atas identitas suatu kelompok dengan maksud menindas serta mengurangi hak-hak mereka. Pelintiran kebencian menjadi fenomena global serta berdampak regulasi kebebasan berekspresi di negara-negara demokratis. Pelintiran kebencian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni ujaran kebencian dan manipulasi ketersinggungan. Menggodanya untuk memperlakukan kedua jenis pelintiran kebencian sebagai permasalahan remeh yang mudah disembukan. Padahal aksi pelintiran kebencian ini berpotensi besar berujung pada kekerasan.

Dilema dalam Berdemokrasi

Ketika membahas konflik agama, maka mayoritas orang akan berpikir tentang terorisme. Meskipun tidak mendapat cukup perhatian seperti halnya terorisme, pelintiran kebencian melahirkan disrupsi dan ketakutan yang sama dengan terorisme. Setiap tahun, angka korban kekerasan dan diskriminasi kian meningkat bahkan jiwa yang tewas dan terluka lebih banyak dari aksi terorisme. Pelintiran kebencian memiliki dampak negatif yang beragam. Dari tingkat elektoral yang memanipulasi isu-isu politik, sektor sosial di mana marjinalisasi agama minoritas, hingga keputusan menyensor buku-buku dan karya seni yang menantang narasi dominan. Yang sedang dipertaruhkan adalah

kemampuan berdemokrasi menghadapi keberagaman agama.

Maluku memiliki pengalaman konflik agama tahun 1999, saat terjadi perkelahian yang terekskalasi ke isu identitas suku, lalu makin meluas ke isu agama. Konflik horizontal di Maluku kala itu terjadi ketika akses Internet dan gawai belum banyak dipakai. Namun dampak ujaran kebencian tetap bisa tersebar begitu cepat melalui percakapan di ruang domestik. Konflik di sana memang sudah terhenti pada tahun 2004, akan tetapi ia meninggalkan endapan berupa segregasi tempat tinggal berdasarkan identitas agama dan kesukuan.

Kita telah menyaksikan bagaimana masyarakat dengan mudah terprovokasi berkat pusaran hoaks dan ujaran kebencian. Di tahun 2011, peristiwa kematian tukang ojek beragama Islam di daerah mayoritas Kristen memicu perkelahian antar-kelompok akibat dibakar ujaran kebencian melalui SMS dan platform Facebook. Apa yang ditemui di media sosial, konflik terkesan begitu gawat dengan tajuk utama “Kerusuhan di Ambon” padahal kenyataan di lapangan ‘hanyalah’ kericuhan dari masalah personal.

Pertikaian kolektif terjadi di Maluku dari tahun 1999-2004 meninggalkan memori kolektif berkat pelintiran kebencian disebarkan melalui platform media sosial yang dengan cepat berevolusi memantik kericuhan. Jika kita melihat menggunakan lensa politik pertikaian, agen-agen pemelintir kebencian ini layaknya komandan gerakan sosial—bekerja begitu efektif agar muncul solidaritas dan mendukung tujuan politis mereka.

Kata-kata dan simbol memang tidak seberbahaya menyimpan kadar bahaya yang sama dengan zat kimia beracun atau limbah radioaktif—kekuatannya dapat merusak serta melukai tatanan kultural dalam demokrasi, kebangsaan, dan bernegara. Seperti pelintiran kebencian yang terjadi pada saat Pilkada Jakarta 2017 ketika narasi-narasi sederhana dapat memengaruhi pola pikir dan menyetir keputusan serta perilaku kita. Narasi tersebut memiliki beberapa dimensi, yakni: dimensi emosional yang mengeksploitasi ketakutan, harapan, dan amarah; dimensi spasial yang memberikan konteks ruang atau tempat; dan dimensi temporal yang memberikan konteks lebih luas terhadap konflik masa kini dan masa yang akan datang.

Politik dengan balutan pelintiran kebencian pada Pilkada Jakarta 2017 yang mengeksploitasi isu agama dan minoritas-mayoritas, turut berimbas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia; seperti Bali yang mayoritas Hindu, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua yang mayoritas Kristen. Jika isu sektarian ini dibiarkan merasuk ke wilayah-wilayah politis maka di masa yang akan datang akan sangat berpotensi merusak tatanan demokrasi Pancasila.

Narasi Alternatif untuk Melawan Hasutan Kebencian

Kontra-narasi yang dilakukan untuk melawan pelintiran kebencian pada tahun 2011 di Ambon adalah melalui platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pada platform Facebook, kontra-narasi kebencian dilakukan dengan berbagi informasi tentang nilai-nilai kultur hidup bersaudara dan keindahan alam Maluku. Filter informasi dibuat guna melawan isu-isu hoaks dan pelintiran kebencian yang beredar di masyarakat melalui pesan pendek dan sosial media. Dengan melakukan cek fakta pada setiap lokasi dalam informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu Twitter juga digunakan untuk melakukan konfirmasi ke media arus utama terkait tajuk utama dan berita-berita yang menggunakan kata “Rusuh dan Konflik” dalam rangka menjaga kredibilitas berita.

Ketika suatu tatanan masyarakat memiliki kebiasaan dalam melakukan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan, maka benturan dan perselisihan berbasis agama bakal menemui takdir berdarahnya. Karena itu kita harus lawan hasutan atau plintiran kebencian dengan kontranarasi untuk merebut ruang – ruang public yang telah di penuhi dengan ekspresi kebencian, kemudian menggantikannya dengan nilai – nilai keberagaman dan perdamaian.

Menurut data statistik UNESCO (2017), Indonesia berada di peringkat ke-60 paling rendah terkait tingkat literasi dari total 61 negara. Kemampuan literasi memiliki hubungan erat dengan kompetensi menelaah informasi sehingga menyuburkan penyebaran konten-konten hoaks dan ujaran kebencian. Pola ketersinggungan warga akan gambar, judul narasi, serta video hasil produk pelintiran kebencian begitu mudahnya dikonsumsi masyarakat tanpa filter dan cek fakta

terlebih dahulu. Maka dari itulah konten-konten kontra-narasi perlu diproduksi, kemudian disebar, guna menangkal serta mendorong perubahan yang berkelanjutan. Pasalnya, kini produsen, penyebar, dan pemelintir kebencian memiliki jaringan yang luas serta strategi yang canggih dan sistematis. Seperti apa yang ditemui pada jaringan Saracen dan Muslim Cyber Army yang memiliki organisasi, jaringan, kapasitas TIK, sumber dana memadai.

Menurut Abdul Malik Gismar, kekerasan berbasis agama hanyalah setitik dari secawan penuh kasus kekerasan. Kehidupan masyarakat di Indonesia memang sering diwarnai kekerasan, biasanya menasar para pejabat. Meninjau pengalaman dan catatan buruk demokrasi di Indonesia, serta kaitannya dengan kekerasan etnis dan agama, sebagai masyarakat Indonesia di era digital saat ini perlu membangun dan memiliki kesadaran lebih dalam melawan hoaks dan ujaran kebencian—utamanya yang memakai identitas suku, agama, ras, dan etnis.

Keberagaman bangsa Indonesia adalah suatu harmoni toleransi dan warisan dari para pendiri bangsa. “Demokrasi itu mampu memperbaiki dirinya sendiri”, begitu kata Cherian George. Kita masih dapat mengandalkan sistem demokrasi Indonesia jika warga dan negara paham bahwa demokrasi merupakan proses yang memerlukan komitmen aktif serta berkelanjutan sesuai dengan bunyi sila keempat dari Pancasila: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Cerita di Balik Kesuksesan Pemerintah Tarik Pajak Google*, Edisi 22 Maret 2018
George, Cherian (2017), *Pelintiran Kebencian*, Jakarta: PUSAD Paramadina
- Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. t.t., *Buku Saku Penanganan Hasutan Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: Komnas HAM.

Mengembangkan Literasi Digital, Merawat Demokrasi yang Damai

Penulis: Wisnu Martha Adiputra (Japelidi)

Merebaknya Hoaks Buruk Bagi Demokrasi

Menjelang dan setelah debat capres kedua, kita dapat mengamati dua kejadian yang menggembirakan dan mengkhawatirkan. Kejadian yang pertama adalah yang menggembirakan, yaitu kerja sama dua puluh empat wartawan dari berbagai institusi media yang bersiap menguji pernyataan dua kandidat presiden yang akan muncul dalam debat. Para wartawan tersebut, yang juga didukung oleh Google Indonesia, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan cekfakta.com dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), bertugas mengecek apakah pernyataan yang disampaikan oleh kedua

capres mengandung pengutipan informasi dan data yang terindikasi keliru, tidak tepat, atau mengandung klaim berlebihan.

Kejadian kedua yang mengkhawatirkan adalah peretasan situs cekfakta.com yang menjadi salah satu media pembongkar hoaks. Walau situs cekfakta.com tidak bisa diakses hanya dalam waktu beberapa jam, upaya tersebut adalah bukti adanya upaya menghalangi warga untuk mengetahui fakta atau informasi yang sebenarnya. Pengaburan fakta dan penyebaran informasi bohong atau hoaks adalah indikasi awal untuk mengganggu demokrasi.

Bahaya hoaks sebenarnya bukan hanya terhadap demokrasi, tetapi

juga bagi kehidupan kita secara umum. Paling tidak terdapat dua bahaya hoaks bagi warga. Pertama, pemahaman menghadapi dunia menjadi keliru. Informasi memiliki arti secara umum sebagai apa pun yang berguna mengurangi ketidakpastian. Informasi berwujud tulisan, gambar, video, simbol, dan kombinasi dari semuanya. Kita mencari, mengumpulkan, memilih, dan memilah informasi untuk kehidupan kita, yaitu memahami dunia sekitar kita, berinteraksi dengan pihak lain, dan merencanakan hidup untuk mencapai harapan-harapan kita. Apa yang terjadi bila informasi yang kita miliki tersebut ternyata salah atau bahkan tidak ada? Pada level individual saja kehidupan dapat terganggu karena informasi yang keliru. Dapat dibayangkan apa terjadi pada level masyarakat bila basis untuk hidup bersama tersebut adalah informasi yang tidak memadai.

Bahaya hoaks yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang terhambat atau bahkan berhenti berkembang. Sekumpulan informasi yang tertata adalah pengetahuan bagi seorang individu. Karena itulah, individu yang cerdas adalah individu yang memiliki banyak informasi sekaligus mampu menatanya dengan baik. Pengetahuan yang diorganisasi dengan baik melalui metode yang tepat, fokus dan lokusnya jelas, serta dikembangkan dalam komunitas akademik adalah nama lain dari ilmu pengetahuan. Pada level komunitas akademik, informasi mengenai bidang tertentu adalah basis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bila informasinya keliru atau metode pengumpulannya tidak sesuai, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Itulah sebabnya hoaks biasanya muncul di masyarakat yang tidak mau mengumpulkan informasi atau mencari jalan pintas sehingga informasi yang dikumpulkan tidak menjadi pengetahuan.

Bahaya hoaks yang ketiga adalah khusus di bidang politik. Sudah banyak pihak menyatakan bahwa hoaks berbahaya bagi demokrasi. Informasi adalah oksigen bagi demokrasi dan informasi bohong adalah racun bagi demokrasi. Informasi yang berkualitas akan mendorong demokrasi. Hoaks yang menysar pada kelompok tertentu akan memunculkan kebencian terhadap pihak lain, apalagi bila satu hoaks yang menyerang tersebut digaungkan terus menerus. Hoaks bertema politik adalah hoaks yang paling banyak bila dibandingkan dengan

hoaks bertema lain di media sosial Indonesia menjelang Pemilu 2019. Hal tersebut mulai terlihat sejak akhir tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil riset kajian tim Pengecekan Fakta Mafindo, selama tahun 2018 terdapat 997 hoaks yang beredar di masyarakat. Dari jumlah tersebut, 488 hoaks adalah hoaks politik. Intensitas maraknya hoaks politik semakin terasa setelah penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada September 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Santi Indra Astuti, ketua Komite Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Inilah yang disebut sebagai era pasca kebenaran (post truth) di mana kebohongan dipercaya sebagai kebenaran, karena hoaks yang diulang-ulang terus. Gejala ini adalah gejala yang umum terjadi di banyak negara sebagai akibat penggunaan politik identitas dalam politik praktis dan perkembangan media sosial. Efek negatif ini telah terjadi di Indonesia, antara lain terjadi di media sosial yang sangat riuh dengan saling menyerang. Dasar argumen untuk menyerang pihak lain tersebut terkadang merupakan hoaks. Berkombinasi dengan fanatisme yang berlebihan, panasnya polarisasi tersebut kemudian mewujudkan dalam konflik nyata di dunia sosial. Insiden yang terjadi di Sampang, Madura, adalah contoh kasus yang memilukan.

Kondisi ini sangat disayangkan terjadi di era demokrasi seperti sekarang ini, karena demokrasi di Indonesia diperoleh dengan susah payah oleh masyarakat pada tahun 1998. Kita masih bisa mengingat dan merasakan kondisi-kondisi yang tidak demokratis di masa lalu. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi, pengekangan kebebasan pers, terbatasnya kebebasan berserikat, berkumpul, dan berusaha bagi warga. Tidak ada juga pemilihan pemimpin secara langsung sehingga tidak ada pesta demokrasi bernama pemilu.

Setelah 1998, tugas kita sebagai warga adalah tetap menjaga demokrasi sebagai sebuah sistem dan terus memperbaikinya. Demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara adalah anugerah bagi kita semua. Anugerah yang lain adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat kita rasakan sampai sekarang ini.

Kita seolah melupakan bahwa di dalam demokrasi melekat pula kewajiban sebagai warga negara, tidak hanya hak-hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi malah diartikan bebas sepenuhnya menyerang dan menistakan pihak lain. Kebebasan pers diartikan mendukung sepenuhnya penguasa tanpa kritik yang membangun dan menyerang semua kebijakan penguasaan tanpa data yang konkret. Begitu juga dengan kebebasan berserikat dan berkumpul diartikan lebih jauh untuk mengganggu pihak-pihak lain yang juga berkumpul. Kebebasan berusaha untuk memenuhi hidup yang layak diartikan sebagai kebebasan mencari dan menjual hoaks. Demikian juga dengan pemilihan langsung para pemimpin yang diberikan sebagai hak pada warga, diartikan sebagai mendukung calon berdasarkan fanatisme buta dan lupa mengecek informasi mengenai latar belakang yang bersangkutan.

Arti Penting Literasi Digital

Pada titik ketika informasi di era digital menjadi oksigen bagi demokrasi, literasi digital menempati posisi yang penting bagi demokrasi saat sekarang ini. Literasi digital, seperti halnya literasi media, selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu informasi, kompetensi, dan kehidupan sosial warga. Ketiga dimensi tersebut hadir dan saling melengkapi dalam praktik literasi digital sehari-hari warga.

Literasi digital yang dikuasai dengan baik akan membantu warga mampu mencari, memilih, memilah, dan mendistribusikan informasi. Di era media sosial ini informasi berjumlah luar biasa banyak berpotensi besar menjadi “tsunami” informasi, tidak lagi sekadar banjir informasi, bila warga tidak bisa mengelolanya dengan baik. Begitu juga dengan kompetensi pada literasi digital. Kompetensi adalah kemampuan bertingkat yang dapat dimiliki oleh individu ketika berhadapan dengan informasi. Paling tidak terdapat sepuluh kompetensi literasi digital seperti yang telah digagas oleh Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi), yaitu: mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusi, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi.

Lima kompetensi pertama adalah kompetensi fungsional, sementara

lima yang lain adalah kompetensi kritis. Kemampuan mengakses sampai dengan memverifikasi adalah standar minimal yang mesti dimiliki seorang individu ketika menggunakan media digital. Sementara kemampuan mengevaluasi sampai dengan berkolaborasi adalah tingkat lanjut yang sebaiknya dimiliki oleh warga untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi. Khusus dua kompetensi yang terakhir, berpartisipasi dan berkolaborasi, mendapatkan fokus yang besar dalam diskusi-diskusi yang dikembangkan oleh Japelidi, karena pada dasarnya bermedia digital atau bermedia baru adalah berkolaborasi.

Bagaimanapun juga aktivitas bermedia sosial adalah aktivitas bersama-sama di mana warga bisa saling membantu dan bekerja sama. Sayangnya, rangkaian kompetensi tersebut belum dikuasai secara memadai oleh warga Indonesia. Warga seringkali gamang ketika menggunakan media sosial dan dihadapkan pada informasi tanpa batas dan juga pertemanan yang sangat luas. Alih-alih memberikan manfaat, media sosial malah memberikan efek destruktif karena penyebaran hoaks, memunculkan kebencian, dan menyulut permusuhan. Ketiadaan atau tidak memadainya kompetensi literasi digital menyebabkan demokrasi tidak lagi damai. Komunikasi antar manusia melalui media sosial tidak lagi manusiawi. Demokrasi yang salah satu karakternya adalah menghargai manusia lain dengan hak dan kewajiban yang sama menjadi kontradiktif ketika pemahaman literasi digital tidak hadir.

Di tahun politik ini, di tengah berlangsungnya era pasca kebenaran, pemahaman dan penguasaan kesepuluh kompetensi literasi digital sangatlah mendesak bagi warga, karena mereka menghadapi dua dunia, yaitu dunia sosial yang sesungguhnya dan dunia maya. Diskusi-diskusi politik yang mengasyikkan terjadi di pos ronda, rumah ibadah, dan rapat-rapat Rukun Tetangga untuk dunia nyata. Sementara di dunia maya, diskusi-diskusi politik terjadi di linimasa media sosial dan grup-grup aplikasi percakapan. Sekarang ini sulit bagi warga menghindari isu-isu politik. Karena itulah, warga perlu dibekali dengan kompetensi literasi digital yang memadai. Di dunia sehari-hari saja kompetensi mengolah informasi sangat penting, apalagi di dunia maya yang sepiintas tidak terlihat, namun menjadi tempat warga hidup

bersama.

Demokrasi yang Damai Adalah Tanggung Jawab Bersama

Melalui literasi digital yang terus dikembangkan, demokrasi yang lebih berkualitas juga akan ikut tumbuh. Demokrasi adalah alat sekaligus tujuan bersama kita semua. Demokrasi adalah kesepakatan buatan manusia yang dapat terus diperbaiki. Sungguh disayangkan bila demokrasi yang didapat dengan susah payah kemudian menurun kualitasnya karena kita tidak bersama merawatnya. Tanggung jawab untuk merawat demokrasi ada pada kita semua sebagai warga. Dengan memahami dan menguasai literasi digital yang baik, kita akan dapat menggunakan media digital, termasuk media sosial, dengan baik pula. Literasi digital membuat kita peka dengan hoaks, sehingga tidak mengakses, memproduksi, dan turut menyebarkannya. Berkat literasi digital, kita juga berinteraksi dengan warga lain secara baik melalui media sosial, sebab media sosial telah menjadikan kita terhubung dengan banyak individu lain dan memiliki kemampuan mirip media massa. Karena itulah komunikasi di era digital sekarang ini disebut oleh Manuel Castells sebagai era mass-self communication.

Negara juga harus hadir agar literasi digital dipahami dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan negara, antara lain adalah dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Kebijakan komunikasi yang terdiri dari bidang pers, penyiaran, keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, dan perfilman dinilai belum sepenuhnya berpihak pada warga. Kepentingan penguasa dan industri masih lebih dikedepankan seperti yang tersurat dalam semua kebijakan tersebut dan juga di dalam implementasinya.

Demokrasi juga sebuah tujuan. Dua tujuan yang dapat dicapai melalui demokrasi adalah kesejahteraan dan perdamaian. Demokrasi yang damai, yang menjadikan warga hidup berdampingan dan saling membantu walaupun berbeda pilihan dalam politik, adalah harapan kita bersama. Kita dapat bersama-sama merawat demokrasi yang damai melalui literasi digital. Dengan demikian akan hadir kebebasan warga yang bertanggung jawab ketika menggunakan media sosial.

Informasi yang diproduksi dan didistribusi melalui media sosial juga merupakan informasi yang berguna bagi warga lain. Intinya, warga masyarakat dan negara sama-sama berupaya mewujudkan demokrasi yang damai. Dengan demikian, kita semua akan menuju hidup bersama yang lebih berkualitas. Semoga harapan ini bukan utopia.

Ayo mengembangkan literasi digital dan terus merawat demokrasi yang sudah kita rasakan!

Daftar Pustaka

- Lihat <https://nasional.kontan.co.id/news/kolaborasi-24-wartawan-siap-cek-fakta-atas-pernyataan-capres-saat-debat-nanti> diakses tanggal 22 Februari 2019.
- Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/20/17455231/situs-cek-fakta-diretas-pasca-debat-pilpres-apa-kata-timses-capres> diakses tanggal 22 Februari 2019.
- Kompas, 12 Februari 2019, "Disinformasi: Temuan Hoaks Terkait Politik Mendominasi".
- Banyak buku membahas tentang pasca kebenaran di mana hoaks menjadi fokus utamanya. Dua di antaranya adalah James Bal1 (2017). *Post-Truth: How Bullshit Conquered the World*. London: Biteback Publishing dan Evan Davis (2017). *Post-Truth: Why We Have Reached Peak Bullshit and What We Can Do about It*. London: Little Brown.
- Rohmatin Bonasir, "Pembunuhan Terkait Capres di Sampang: "Beda Pilihan Presiden, Asal Tidak Saling Menghina", *bbc.com* tanggal 26 November 2018. Diakses tanggal 22 Februari 2019.
- Beragam tulisan menarik membahas media di Indonesia pada masa transisi menuju demokrasi terdapat dalam Hidayat, Dedy N., Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi S.K (ed). (2000). *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Memahami media sosial tidak hanya secara fungsional melainkan juga secara kritis melalui buku Christian Fuchs (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. London: Sage.
- Kegiatan Jaringan Penggiat Literasi Digital, terutama perumusan sepuluh kompetensi literasi digital termuat dalam Novi Kurnia

& Santi Indra Astuti (2017). Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra. INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 47. Nomor 2. Desember 2017, 149-166.

Terry Flew menjelaskan bahwa media baru adalah 4C, yaitu communication, content, computer, dan collaboration. Lihat Terry Flew (2014). *New Media. Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Lihat buku-buku karya Manuel Castells yang melihat masyarakat di tengah era digital dengan mendalam dan komprehensif, antara lain dalam Manuel Castells (2010). *The Rise of the Network Society. Second Edition*. Oxford: Wiley-Blackwell dan Manuel Castells (2013). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.

Banyak hasil penelitian mengulas fenomena ini, antara lain penelitian dari PR2Media yang melihat sistem komunikasi di Indonesia Rahayu, dkk (2016). *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.

Menyongsong Demokrasi Damai Indonesia

Penulis: Zainuddin Muda Z Monggilo (Japelidi)

Bukan hal yang sulit untuk mengomunikasikan pesan baik demi meraih demokrasi Indonesia yang damai di era digital.

Bukan suatu kesalahan untuk mengajak peran serta keluarga dan kerabat di sekitar kita dalam mewujudkannya. Bukan pula tawar-menawar antara untung dan rugi yang harus dijadikan basis sebelum melakukannya. Dalam hal ini, hanya ada satu semangat yang sebaiknya Anda, saya, dan kita semua pegang teguh, yaitu bersatu padu dalam menciptakan demokrasi damai di Indonesia mulai dari sekarang. Tulisan ini berupaya menghadirkan semangat dan optimisme tersebut dengan membaginya ke dalam lima noktah yang saling terhubung, yaitu memaknai kemerdekaan, perjalanan sejarah demokrasi, fenomena demokrasi era digital,

aturan kebebasan, dan songsong asa untuk demokrasi damai di Indonesia.

Renungkan Sejenak

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”

Kemerdekaan ialah hak segala bangsa! Ia lantang sebagai pernyataan posisi bangsa yang dengan segala harkat dan martabatnya, menolak keras segala bentuk penjajahan di muka bumi pertiwi. Merdeka atau terjajah bukanlah pilihan, karena secara manusiawi tidak ada yang

menginginkan belenggu atas kebebasannya.

Kalimat di atas memang tidak asing bagi kita. Namun, tidak sedikit dari kita yang terasing dari perenungan akan makna mendalam yang dikandungnya. Sebuah keberkahan dari Sang Pencipta bahwa kita dilahirkan setelah masa kemerdekaan. Tetapi, di sisi lainnya, barangkali ini adalah bentuk suka berujung duka bagi para pejuang bangsa sebab penerusnya masih kerap terlena dalam kemerdekaan itu sendiri. Oleh karena itu, jika hingga saat ini kita masih saja terlelap dalam ayunan kemerdekaan, maka bangunlah. Bergegaslah maju untuk mengisi kemerdekaan dengan cara yang lebih baik. Jangan biarkan kita kembali dijajah oleh kemerdekaan kita sendiri.

Kemerdekaan Pintu Demokrasi

Kemerdekaan yang sudah susah payah diperjuangkan sesungguhnya adalah gerbang bagi demokrasi bangsa. Sejarah mencatat bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan, negara kita telah melalui empat masa pemerintahan dengan riaknya masing-masing. Kurun 1945-1959, Indonesia dijiwai demokrasi parlementer dengan penguasaan negara oleh presiden dibantu oleh sejumlah menteri. Di masa ini, tepatnya tahun 1955, pemilu pertama dilakukan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Pada periode 1959-1965, demokrasi parlementer berubah haluan menjadi demokrasi terpimpin yang didominasi oleh presiden, menguatnya peranan ABRI, terbatasnya peranan partai politik, dan berkembangnya paham komunisme. Pada periode 1965-1998, atau dikenal juga dengan sebutan masa Orde Baru, demokrasi Pancasila adalah napas baru yang ditandai dengan semakin kuatnya posisi presiden dan diadakannya pemilu pertama sepanjang sejarah bangsa. Selama periode ini, tercatat telah diadakan enam kali pemilu yaitu pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Periode 1998-sekarang, yang disebut sebagai Era Reformasi, menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik demokrasi Indonesia

melalui pemerataan kekuasaan presiden dan lembaga negara lainnya serta kebebasan warga untuk memilih dan mendirikan partai politik. Hasilnya adalah terselenggaranya pemilu anggota DPR dan DPRD 1999, pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2004, 2009, 2014, pemilu kepala daerah dan wakilnya untuk pertama kalinya tahun 2005 dan dilakukan serentak pada 2015, 2017, dan 2018, serta pemilu presiden dan wakilnya untuk pertama kalinya di tahun 2004, 2009, 2014.

Tahun 2019 adalah tahun demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden yang cukup spesial dan sudah dinantikan. Hal ini karena telah lebih dulu diawali dengan pemilu kepala daerah serentak. Selain itu, polarisasi politik di tahun 2014 serta serangan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang makin mengganas melalui media digital setelahnya, kian menjadikan pesta demokrasi terakbar tahun ini sebagai sorotan dari dalam maupun luar negeri. Tahun ini juga akan kembali menguji praktik demokrasi di Indonesia yang sudah cukup tersohor sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia. Hasilnya tidak hanya akan dirasakan pada lima tahun mendatang, tetapi lebih dari itu, dijadikan tolok ukur bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia bahkan dunia yang lebih baik.

Fenomena Demokrasi Era Digital

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan selama Agustus-Desember 2018 terdapat 62 konten hoaks terkait pemilu 2019. Sedangkan Mafindo menemukan hoaks bermuatan politik sebanyak 135 konten selama Juli-September 2018. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Jika dibiarkan, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian akan terus menggerogoti praktik demokrasi sehat. Dampak buruknya, konten negatif itu akan melekat sebagai karakter bangsa.

Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian bermuatan politik yang mulai mewabah sejak pemilu 2014 adalah efek samping dari kebebasan demokrasi di era digital. Kebebasan ini didukung dengan kepemilikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, akses dan penetrasi internet yang terus meluas, serta ruang publik/diskusi daring dan luring yang makin terbuka.

Kebebasan ini juga turut mentransformasikan cara pandang politik (way of politics) dan cara berpolitik (way of political participation) warga negara yang sekaligus warganet—politik bukan lagi sebuah ideologi tetapi bidang praktis nan taktis untuk meraih dan/atau mendukung kekuasaan dengan cara apa pun.

Bila sebelumnya kita sulit mendapatkan informasi, maka setelah perkembangan digital dan inovasi di dalamnya bermunculan, informasi semakin bervariasi jenis dan jumlahnya. Kita pun semakin terbiasa dengan kemudahan dan kebebasan untuk mencari, mendapatkan, menyeleksi, dan menggunakan informasi. Platform media digital yang semakin beragam pun turut andil dalam penyebarluasan informasi secara cepat dan masif. Alhasil, tidak jarang dari kita tidak benar-benar mempertimbangkan dengan matang akan dampak informasi tersebut terhadap orang lain. Ironisnya lagi, terdapat oknum atau sindikat (seperti Muslim Cyber Army dan Saracen) yang memang secara sadar dan terorganisasi memproduksi konten hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.

Media digital sedianya dimanfaatkan untuk menjangkau dukungan politik yang lebih luas, menyebarkan program kerja secara transparan, mewadahi kritik dan saran dari masyarakat, serta mengevaluasi diri ke arah yang lebih baik. Ternyata telah terjadi pergeseran dalam cara pandang dan partisipasi politik di era ini. Salah satunya ditunjukkan dengan penyelewengan penggunaan media digital dalam berpolitik ke arah yang dangkal, yaitu berkompetisi kotor dengan memfitnah kubu lawan. Internal dan simpatisan fanatik suatu kubu politik bahkan bekerja sama untuk menciptakan dan memviralkan framing isu tertentu (seperti isu kebangkitan komunis, invasi tenaga kerja asing, penculikan aktivis 1998) yang menyerempet sebagai hoaks, fitnah dan ujaran kebencian terhadap lawan. Padahal, survei Indikator Politik Indonesia per Desember 2018 menyatakan bahwa hoaks tidaklah berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas kedua pasang calon. Hoaks masih cenderung dipercayai secara parsial, yaitu didukung jika hoaks merugikan lawan dan sebaliknya. Singkatnya, preferensi politik yang sudah terbangun masih lebih kebal untuk bisa ditembus oleh suntikan hoaks dan kawan-kawannya.

Aturan Kebebasan Berdemokrasi Era Digital

Kebebasan demokrasi di era digital pun terkesan lemah kendali karena adanya pemaknaan kebebasan sebagai pemenuhan atas hak asasi individu dan menafikan hak asasi manusia lainnya. Hal ini yang barangkali disalahartikan sehingga tanpa ragu ada saja yang berujar fitnah dan kebencian.

Tidak dimungkiri bahwa kebebasan dilindungi oleh negara melalui UUD 1945 khususnya dalam Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan Pasal 28F yaitu, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Kendati demikian, kita perlu sadar bahwa pada Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Inilah batasan yang tidak bisa semena-mena diabaikan oleh setiap kita.

Selain itu, perlu diingat bahwa terdapat aturan lain yang juga mengatur kebebasan tersebut. Misalnya penyebar berita hoaks dapat dikenai sanksi pidana 2, 3, bahkan 10 tahun sesuai dengan jenis pelanggaran dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 28 ayat 1 dan

2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dengan tegas melarang penyebaran berita bohong, kebencian, dan permusuhan antarkelompok berdasarkan SARA. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur hukum disiplin ringan dan berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyebaran hoaks.

Peraturan-peraturan tersebut idealnya mampu mengurangi kenaikan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang mewarnai demokrasi Indonesia asalkan dapat dilakukan dengan konsisten, diamandemen sesuai keperluan, dan ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Menyalakan Harapan untuk Demokrasi Damai

Demokrasi damai adalah kata kunci yang perlu dijadikan sebagai pedoman dan upayakan secara kontinu. Tujuan damai ini bukanlah utopis karena secara fitrah, kedamaian membawa ketenangan dan kerukunan. Demokrasi damai juga merupakan tujuan dari pemerintahan demokratis dan responsif yang ditunjukkan dengan kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik yang sehat. Pemilu tahun 2019 adalah momentum yang tepat dan belum terlalu terlambat untuk memulainya. Sejumlah kekuatan yang muncul di tengah-tengah kita saat ini, seperti forum daring dan luring anti-hoaks, gerakan daring dan luring anti-hoaks, aplikasi pintar anti-hoaks, himpunan media pemeriksa fakta, gerakan literasi media/digital nasional, dan program pemerintah untuk memberantas hoaks, merupakan kolaborasi nyata sekaligus harapan yang terus menyala untuk menyongsong demokrasi Indonesia yang lebih damai dan kondusif tanpa hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Harapan ini ibarat tanaman yang akan terus kita semai dan pupuk secara bersama-sama hingga ia berakar kuat dan menjulang tinggi nantinya.

Daftar Pustaka

Dielaborasi dari berbagai sumber di antaranya Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008); <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/15380041/rekam-jejak-pemilu-dari-masa-ke->

masa; <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>; <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>; <https://infopemilu.kpu.go.id/> (diakses 5 Maret 2019).

<https://www.beritasatu.com/nasional/514379/indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia> (diakses 5 Maret 2019).

https://kominfo.go.id/content/detail/15820/siaran-pers-no-01hmkominfo012019-tentang-62-konten-hoaks-terkait-pileg-dan-pilpres/0/siaran_pers (diakses 5 Maret 2019).

<https://katadata.co.id/berita/2018/10/16/mafindo-catat-hoaks-politik-merajalela-jelang-pilpres-2019> (diakses 5 Maret 2019).

Dielaborasi dari berbagai sumber di antaranya <https://www.liputan6.com/news/read/3344576/muslim-cyber-army-dan-saracen-saling-terhubung-dalam-sebar-hoax>; <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43287955>; <https://www.dw.com/id/bagaimana-muslim-cyber-army-beroperasi/a-42759196>; <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/11570261/polri-ada-kaitan-muslim-cyber-army-dengan-kelompok-saracen> (diakses 5 Maret 2019).

Tersedia di <https://tirto.id/hoaks-tidak-efektif-pengaruhi-pemilih-sampai-januari-2019-ddLw> (diakses 5 Maret 2019).

Tersedia di <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> (diakses 5 Maret 2019).

Tersedia di <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> (diakses 5 Maret 2019).

Dielaborasi dari berbagai sumber di antaranya https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media; <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyabar-berita-hoax/>; <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyabar-berita-hoax/> (diakses 5 Maret 2019).

Netizen, Kewarganegaraan Digital dan Kepemimpinan Digital

Penulis: Yohanes Widodo (Japelidi)

Akhir-akhir ini di media sosial dan kolom komentar sering muncul frasa “maha benar netizen” dengan segala komentarnya” terutama ketika membahas isu-isu kontroversial dan sensitif. Frase ‘maha-benar-netizen’ ini seolah menggambarkan bahwa netizen adalah maha benar: selalu (merasa) benar, suka mencaci maki, menuduh, menyudutkan, asal menilai, menanggapi isu dengan membabibuta tanpa kejernihan berpikir, berprasangka, bahkan cenderung ngawur.

Di luar itu, ada beberapa masalah lain terkait dunia

digital, mulai dari perundungan siber hingga kejahatan siber, kecanduan internet dan masalah privasi daring, maraknya ujaran kebencian, serta masalah lain yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh generasi sebelumnya. Tulisan ini hendak mengupas seperti apa idealisasi dan makna netizen, kewargaan digital (digital citizenship) dan kepemimpinan digital (digital leadership).

Menjadi Netizen

Istilah netizen mulai diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Michael Hauben pada

pertengahan 1990-an untuk menyebut orang-orang yang mendiami daerah baru bernama Internet. Netizen adalah lakuran dari kata warga (citizen) dan Internet yang artinya warga Internet (citizen of the net) (Hauben, 2015). Sejak itu istilah netizen banyak dipergunakan secara bergantian dan sinonim dengan beberapa istilah lain, seperti: warga jaringan (network citizen), warga digital (digital citizen), atau warga siber (cyber citizen). Di Indonesia, istilah netizen yang bersinonim dengan warganet dimasukkan ke KBBI V Daring (Suryowati, 2017).

Secara fisik seseorang menjadi warga sebuah negara sekaligus warga dunia dan menjadikan semua orang sebagai sesama warga (compatriot). Pada artikel berjudul *The Net and Netizen: The Impact the Net Has on People's Lives* (1995) Michael Hauben menulis: "Selamat datang di abad ke-21. Anda adalah netizen (warga Internet) dan Anda hadir sebagai warga dunia, semua karena konektivitas global yang bisa diwujudkan oleh Internet. Anda memandang semua orang sebagai sesama warga (compatriot). Secara fisik mungkin Anda sedang hidup di satu negara, tapi Anda sedang berhubungan dengan sebagian besar dunia melalui jaringan komputer global. Secara virtual, Anda hidup bersebelahan dengan setiap netizen di seluruh dunia. Keterpisahan secara geografis digantikan dengan keberadaan di dunia virtual yang sama."

Ada dua pengertian yang dipakai oleh Hauben. Pertama, istilah netizen secara luas merujuk pada siapa saja yang menggunakan Internet, untuk tujuan apa pun—baik atau buruk. Kedua, istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang peduli tentang Internet untuk mengembangkan suasana kooperatif dan kolektif yang bermanfaat bagi dunia yang lebih besar. Dalam hal ini, netizen mewakili aktivitas positif: orang-orang yang mengembangkan Internet, bergabung pada komunitas daring dan berkontribusi terhadap pengembangan Internet untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (great shared social wealth).

Menurut Michael Hauben (1995), netizen bukan sembarang orang yang menjadi daring atau orang yang menjadi daring untuk keuntungan pribadi. Netizen adalah orang yang memahami bahwa



- butuh upaya dan tindakan setiap orang untuk menjadikan Internet sebagai komunitas dan sumber daya yang regenerative dan vibrant.
- Netizen adalah orang yang berkomitmen mencurahkan waktu dan upaya untuk membuat Internet menjadi bagian dari dunia yang baru, menjadi tempat yang lebih baik.
- Netizen memahami konsep kewargaan (citizenship) Internet dan mampu menggunakan teknologi secara tepat. Kewargaan Internet dimulai ketika seseorang menggunakan email, mengunggah gambar, atau menggunakan e-commerce untuk belanja. Lebih dari itu, netizen mampu menggunakan Internet secara luas, membuat blog, menggunakan jejaring sosial, dan berpartisipasi dalam jurnalisme daring. Seorang netizen memahami hak dan tanggung jawab sebagai penghuni ruang maya.

Menurut Morteza (2015), netizen bisa didefinisikan menjadi beberapa karakter atau perilaku: (1) mengacu pada warga negara (dari ruang fisik) yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk terlibat dalam masyarakat, politik, dan partisipasi pemerintah (Mossberger, 2011); (2) warga Internet yang terhubung secara global (Aksel, 2014). Mereka yang menggunakan Internet secara teratur dan efektif (Mossberger, 2011); (3) orang-orang yang menggunakan Internet secara reguler dan efektif (Wellborn, 2013); (4) orang yang bertanggung jawab dan peduli terhadap Internet (Rebecca, 2012); (5) orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan akses untuk menggunakan Internet lalu gawai untuk berinteraksi dengan orang lain (Naavi, 2004). Konsep kewargaan menyangkut hak dan tanggung jawab, maka netizen adalah orang yang memiliki hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas Internet.

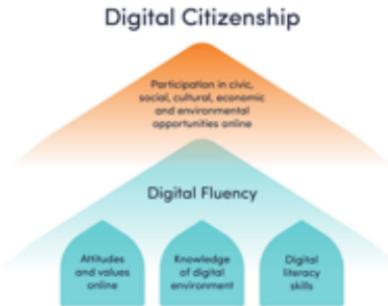
Dengan demikian, netizen adalah orang yang memiliki kompetensi: (1) menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, budaya, dan ekonomi; (2) menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis di dunia maya; (3) menggunakan Internet untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara yang positif dan bermakna; menunjukkan kejujuran dan integritas serta perilaku etis dalam penggunaan Internet, (4) menghormati privasi dan kebebasan berbicara di dunia digital; serta (5) berkontribusi dan

secara aktif mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan digital.

Digital Citizenship

Jika netizen adalah orangnya, digital citizenship atau net citizenship pada dasarnya adalah partisipasi secara daring dalam bidang sipil, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi ini bisa diwujudkan ketika seseorang memiliki kefasihan digital (digital fluency) yang meliputi perilaku dan nilai-nilai daring, pengetahuan tentang lingkungan digital, dan keterampilan literasi digital.

Digital citizenship secara prinsip mengacu pada kemampuan seseorang (1) menggunakan teknologi untuk membuat komunitas lebih baik; (2) menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan berbeda; serta (3) menggunakan teknologi untuk membuat suara Anda didengar oleh para elite politik dan untuk membentuk kebijakan publik.



Gambar 1. Definisi Digital Citizenship (NetSafe, 2018)

Menurut Netsafe (2018), digital citizenship mengombinasikan penggunaan keterampilan dan strategi untuk mengakses teknologi untuk berkomunikasi, terhubung, berkolaborasi, dan menciptakan sikap atau perilaku, yang didukung oleh nilai-nilai integritas pribadi dan hubungan positif dengan orang lain, memahami dan memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan konteks digital di mana mereka bekerja, dan bagaimana mengintegrasikan ruang online dan offline;

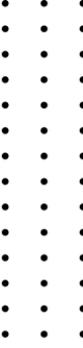
dan secara kritis menggunakan kompetensi 'digital fluency' untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, sipil), dan untuk mencapai tujuan mereka.

Mark Ribble (2015) mengembangkan tiga prinsip untuk mengajarkan netizen cara bertanggung jawab menggunakan teknologi. Tiga prinsip tersebut meliputi: penghargaan (Respect), mendidik (Educate), dan melindungi (Protect) atau REP. Setiap prinsip berisi tiga dari sembilan elemen kewarganegaraan digital. Penghargaan meliputi: elemen etiket, akses, dan hukum digunakan untuk menghormati pengguna digital lainnya. Mendidik meliputi: unsur-unsur literasi, komunikasi, dan perdagangan digunakan untuk mempelajari tentang penggunaan dunia digital yang tepat. Melindungi meliputi: elemen-elemen hak dan tanggung jawab, keamanan, serta kesehatan dan kesejahteraan, digunakan untuk tetap aman di dunia digital dan non-digital.

Ini sejalan dengan pandangan Terry Heick (2016) bahwa digital citizenship adalah kualitas kebiasaan, tindakan, dan pola konsumsi yang berdampak pada ekologi konten digital dan komunitas. Singkatnya, ini mengurus 'hal-hal' yang kita andalkan dalam ruang digital. Konsep citizenship menjadi konsep yang penting namun seringkali salah dipahami. Menurutnya, unsur-unsur digital citizenship sebenarnya tidak berbeda dari prinsip dasar kewarganegaraan tradisional: bersikap baik hati, penuh hormat dan bertanggung jawab, dan lakukan saja hal yang benar. Yang sama sekali baru adalah cara menerapkan cita-cita atau nilai-nilai ini ke era digital.

Partisipasi dan Keterlibatan

Menurut Mary & Jack (dalam Abdipourfard, dkk, 2017) netizen adalah pengguna Internet yang menggunakan Internet sebagai cara untuk berpartisipasi dalam masyarakat sosial dan politik, misalnya untuk bertukar pandangan, memberi informasi, dan memilih (voting). Internet memungkinkan orang berpartisipasi dan terlibat aktif dalam dinamika dan isu-isu sosial di sekitar mereka. Hal ini terjadi karena Internet menyediakan ruang informasi yang hampir tak terbatas; memungkinkan konfigurasi baru hubungan komunikasi; menggabungkan komunikasi sinkron dan asinkron; memungkinkan



mitra komunikasi untuk saling berinteraksi; mengurangi keterbatasan biaya, waktu, dan ruang komunikasi; dan mengintegrasikan konten tekstual dan audiovisual (Emmer, M., & Kunst, M. (2018).

Lewat Internet, komunikasi bisa berkembang menjadi jejaring dan lebih interaktif, akses individu serta organisasi di bidang politik pun kian luas. Sebagai netizen, individu dapat berpartisipasi dalam demokrasi digital, memperluas praktik dan perilaku mereka di ranah digital serta pada saat yang sama mampu mengembangkan berbagai bentuk aktivitas baru.

Di beberapa negara, netizen menggunakan Internet untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan, korupsi, bahkan konflik militer. Misalnya, pengguna Ushahidi pada Pemilu di Kenya (2007), serta gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) yang menggunakan media untuk mendokumentasikan protes. Dalam konteks warga negara, Internet bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan pendapat, menggerakkan massa serta menggerakkan hati masyarakat.

Tariq West (2010) menggarisbawahi bahwa netizen adalah warga dalam dunia ide (a world of ideas) serta partisipan dalam penciptaan pengetahuan dan nilai. Keterlibatan di Internet, seperti keterlibatan sipil di dunia offline, merupakan 'tugas' netizen. Tariq menambahkan, jika kita ingin nilai-nilai budaya kita tercermin dalam konten Internet, jika kita menginginkan informasi terbaik muncul, kita harus melibatkan diri kita melalui semua mekanisme yang tersedia.

Lebih lanjut, Tariq West (2010) mengatakan, ketika banyak orang mengkonsumsi konten dan lebih sedikit orang yang secara aktif mengkurasi atau membuat konten, ini mengkhawatirkan. Di Internet berlaku dictatorships of the loud—orang yang sering membuat konten dan pandai mempromosikannya, mampu memengaruhi percakapan terlepas dari bagaimana ide-ide mereka. Mereka yang sering bersuara ngawur seringkali menang atas yang mereka yang menyuarakan konten yang berguna atau mendalam.

Kepemimpinan Digital

Citizenship barangkali juga bukan konsep yang menarik atau mudah untuk dipahami, terutama bagi orang muda. Selama ini kewarganegaraan sering kali direduksi menjadi gagasan politik. Pekerjaan rumah sekaligus tantangan kita berikutnya adalah bagaimana bergerak dari sekadar digital citizenship menjadi kepemimpinan digital (digital leadership).

Jika Digital citizenship menekankan bagaimana menggunakan Internet dan media sosial dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Menurut George Couros (2013), kepemimpinan digital adalah bagaimana menggunakan Internet dan media sosial untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan, dan situasi orang lain.

Ketika teknologi digital dan media sosial telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa perubahan itu telah tiba waktunya. Apa yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana, jika Anda ingin disebut sebagai netizen, pandanglah orang lain bukan sebagai musuh, namun sebagai sesama warga (compatriot).

Sesama artinya sama-sama (satu golongan). Netizen tidak menganggap orang lain musuh, sehingga harus dihabisi dan dicaci maki. Sebaliknya, orang lain adalah sesama, orang kita, golongan kita, yang harus dihargai dan dicintai. Jika itu tercipta, maka tidak ada lagi perbedaan. Ujungnya, perdamaian akan senantiasa tumbuh dan bersemi.

Daftar Pustaka

- Abdipourfard, E., Minaei-Bidgoli, B., & Morteza, V. N. (2017). Identification in Cyberspace as a Main Challenge of e-Government (A Legal Approach to e-Identity Management System). *International Journal of Social Sciences (IJSS)* Vol, 7.
- Aksel B. S. (2014), *Global Citizen: Challenges and Responsibility*, Sense Publishers: Netherland
- Couros, G. (2013) *Digital Leadership Defined*. Diakses dari <https://georgecouros.ca/blog/archives/3584>

- Emmer, M., & Kunst, M. (2018). "Digital Citizenship" Revisited: The Impact of ICTs on Citizens' Political Communication Beyond the Western State. *International Journal of Communication*, 12, 21.
- Hauben, M. (1995). *The Net and Netizens: The Impact the Net Has on People's Lives*. Diakses dari http://www.columbia.edu/~hauben/ronda2014/THE_NET_AND_NETIZENS.pdf
- Heick, T. (2018). *The definition of Digital Citizenship*, diakses dari <https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/the-definition-of-digital-citizenship/>
- Morteza, V.N., 2015. *Electronic Citizenship law: Rights and Responsibilities of Electronic Citizens in the International and Iranian Law*. *The Electronic City Vol.1* (2015) 97–106
- Mossberger, K. Caroline J.T., and Ramona S. (2011), *Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation*, MIT Press: U.K.
- Naavi, N.V. (2004), *Cyber Laws for Every Netizen in India*, Ujvala Consultants Pvt Ltd: India
- Netsafe. (2018). *From Literacy to Fluency to Citizenship: Digital citizenship in education* (2nd ed.). Wellington, NZ: Netsafe.
- Rebecca.M.K. (2012), *The Netizen*, *Development* 55(2), 201–204.
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*. *International Society for Technology in Education*.
- Suryowati, E. (23/8/2017) ""Warganet" dan "Netizen" Kini Sudah Masuk KBBI V Daring", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/19441601/warganet-dan-netizen-kini-sudah-masuk-kbbi-v-daring>.
- Wellborn, J. (2013), 'Cyber citizenship: Helping Teenagers Be Good Netizens', *International Journal of Human and Social Science*, 30(1):171-197
- West, T (2010) *What does it mean to be a netizen?* Diakses dari <http://www.columbia.edu/~hauben/ronda2014/what-does-citizenship-look-like-online.pdf>

Overkomodifikasi Konflik: Bahan Bakar Kebencian di Era Digital

Penulis: *Gilang Jiwana Adikara (Japelidi)*

Ketika dihadapkan pada tingginya minat khalayak pada berita tentang konflik, insan pers disodori dua pilihan: mencari resolusi atau mengomodifikasi dan mengeksploitasi konflik demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Di Indonesia, sejauh ini agaknya industri pers masih menjatuhkan pilihan pada opsi kedua.

Sebagai salah satu isu yang memiliki nilai berita, konflik selalu layak menjadi pertimbangan untuk menyiarkan suatu informasi. Dalam konflik dapat muncul berbagai drama yang membuat banyak orang tertarik untuk menyimak bahkan berkomentar. Sejumlah institusi media pun sadar akan

potensi keuntungan yang besar dari pemberitaan konflik dan membuat mereka kerap kali mengemasnya dalam berbagai sudut pandang. Target utamanya tak lain agar dapat memancing khalayak untuk setia mengonsumsi berita yang disajikan.

Memang tidak ada yang salah ketika media mengangkat berita tentang konflik. Nilai berita ini muncul lebih sebagai bumbu atas nilai berita yang lain. Tokoh tenar yang berkonflik akan menarik. Konflik yang melibatkan kepentingan orang banyak juga menarik. Bahkan konflik yang terjadi karena alasan yang sangat sepele namun unik sekalipun bisa dipoles menjadi sebuah “berita”

yang seksi dan menarik minat baca yang tinggi.

Itu sebabnya dalam teori jurnalistik, konflik dianggap memiliki nilai berita tinggi yang membuat suatu informasi layak disebarluaskan. Makin panas konfliknya, makin tinggi peluang berita itu memantik kontroversi. Pada akhirnya berita kontroversial ini akan memiliki peluang semakin besar untuk mengorek pundi-pundi uang dari tingginya interaksi dalam berita tersebut.

Masalahnya, memberitakan konflik melalui media massa, terutama media massa daring (online) bak pedang bermata dua. Di satu sisi, konflik terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak sangat layak dan penting untuk diberitakan. Namun di sisi yang lain, memberitakan konflik secara berlebihan dan tanpa upaya resolusi tak ubahnya dengan upaya adu domba dan dapat berujung pada perpecahan.

Perubahan Pola Konsumsi

Permasalahan ini semakin pelik ketika kita masuk pada era komunikasi digital. Kultur masyarakat digital yang ingin serba cepat dan praktis ditambah dengan kebiasaan menggunakan gawai untuk melakukan beragam aktivitas digital telah melahirkan pola baru dalam mengonsumsi berita. Konsep ini dikenal dengan incidental news. Ringkasnya, pengguna internet terutama dari kalangan muda kini tidak dengan sengaja mengakses portal berita untuk mendapatkan informasi terbaru. Berita dan informasi aktual justru lebih sering mereka dapatkan secara tidak sengaja (insidental) melalui linimasa media sosial mereka, baik melalui hasil berbagi pengguna media sosial lain maupun hasil promosi pengelola situs berita (lih. Boczkowski dkk., 2017).

Survei yang dilakukan Satu Vasantola dan dipublikasikan oleh Reuters Institute for the Study of Journalism memberikan pandangan lain mengenai perilaku generasi muda. Kelompok konsumen yang aktif dan mendominasi media sosial ini memiliki perilaku yang senang membagikan berita yang dibacanya. Hasil riset ini menunjukkan berita



- yang mengedepankan pandangan pribadi, seperti profil, artikel opini, ataupun berita opini baik yang didukung maupun tanpa data yang mendasari mendapatkan perhatian lebih banyak dan mampu memikat lebih banyak orang untuk mengklik tombol share (lih. Vasantola, 2015). Fenomena ini tak lepas dari munculnya rasa kepuasan karena pandangan personalnya sudah ada yang mewakili dan dianggap penting karena dimuat di laman media massa arus utama.

Kebiasaan baru ini membuat berita yang dikonsumsi Generasi Y (milenial) dan Generasi Z lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang di lingkaran pertemanan media sosial mereka. Jika dipadukan dengan algoritma linimasa media sosial yang menjadikan relevansi minat dan intensitas interaksi sebagai dasar prioritas tampilan di linimasa, maka konsumsi berita para generasi pengguna aktif media sosial ini lebih didominasi dengan berita-berita yang memuaskan pandangan dan ideologi yang dianutnya.

Media massa agaknya sadar dengan fenomena ini. Itu sebabnya sejumlah berita-berita opini pribadi yang dapat mempertajam suatu konflik terus menerus diproduksi. Semakin sensasional dan kontroversial komentar yang dicelektikkan sosok dalam berita itu, semakin tinggi pula nilai beritanya, karena berpotensi menjadi viral dan mendapatkan banyak perhatian. Topik-topik sosial dan politik pun paling mudah dijumpai di media-media yang suka memoles pernyataan kontroversial menjadi berita yang gurih dan nikmat. Dengan strategi ini, topik receh dan remeh pun bisa jadi isu nasional.

Bagaimana pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat capres putaran kedua menjelang Pemilu 2019 yang mempertanyakan maksud istilah unicorn digoreng sedemikian rupa menjadi berita sensasional merupakan salah satu contoh. Dalam tayangan debat itu sang lawan politik sekaligus petahana Joko Widodo menanyakan pendapat Prabowo seputar perusahaan rintisan dengan nilai valuasi melampaui USD 1 miliar yang biasa disebut unicorn. Selepas acara debat, media seakan panen raya dari fenomena ini dan tak henti-hentinya mengorek berita dari pendukung di kedua kubu. Media silih berganti membahas tentang “unicorn”, tapi tak menukik ke konteks dan problem utamanya.

Masih dari acara yang sama, sejumlah orang menduga Joko Widodo mengenakan earpiece dan berkomunikasi secara diam-diam dengan tim suksesnya dengan pulpen sebagai alat kontrol. Sebuah dugaan konyol yang tak penting dibahas sebenarnya, karena faktanya calon petahana ini tak mengenakan alat bantu dan walaupun mengenakan, hal itu tak melanggar aturan apa pun. Namun, media tetap menganggap ada yang bisa diolah dari pembahasan ini. Lagi-lagi topik tak substantif ini digoreng dengan melibatkan saling lempar komentar pedas antara kedua kubu dan dieksloitasi selama sehari-hari.

Media massa jelas meraup untung besar dari fenomena ini. Selama sehari media massa terus menggali berbagai sisi dari debat yang sudah digelar. Mulai dari hal yang penting sampai remeh dan tak substansial tak luput dikorek. Bagi media digital, semakin ramai perbincangan dan makin tinggi jumlah interaksi pada suatu artikel jelas menjadi pundi-pundi uang yang sangat berharga. Tak mengherankan strategi ini masih terus saja digunakan untuk mendulang untung. Konflik politik telah dikomodifikasi secara berlebihan.

Upaya media mengeruk keuntungan dari konflik menyimpan bom waktu untuk semakin menjerat pembacanya ke dalam lubang hitam opini pribadi dan hilangnya kemampuan untuk berpikir objektif dari berbagai perspektif. Yang tak suka menjadi benci, yang suka semakin memberhalakan pandangan kelompoknya.

Mengharap Resolusi Konflik

Jangan remehkan efek samping komodifikasi konflik secara berlebihan oleh media massa. Eksploitasi konflik yang berlebihan ini terbukti mampu mempertajam kebencian dan diskriminasi. Sejumlah riset menunjukkan bahwa meskipun media massa memiliki peran mulia sebagai pembawa informasi dan pengetahuan, media massa juga dapat berperan sebagai penyedia bahan bakar utama untuk membenci kelompok yang berbeda pandangan.

Penelitian Christiany Juditha pada 2017 menunjukkan, meskipun media massa berupaya berimbang dalam memberitakan isu seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, berita-berita yang mereka

hasilkan faktanya malah memicu lahirnya beragam ujaran kebencian (Juditha, 2013). Bahkan ruang-ruang komentar di laman berita menjadi “medan laga” bagi berbagai kubu untuk saling melemparkan dan melampiasikan rasa benci. Sejumlah ujaran kebencian bahkan menyeret isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan membuat suasana Pilkada DKI 2017 begitu panas.

Yang patut diketahui, pertikaian karena ujaran kebencian bukan semata terjadi latar belakang negara berkembang. Di negara maju sekalipun konflik atas dasar kebencian yang dipicu dengan perbedaan pandangan politik juga terjadi. Di Britania Raya, pemberitaan media arus utama rupanya memiliki kontribusi terhadap meningkatnya ujaran kebencian dan konflik antarkelompok.

Dalam kasus “Brexit 2016”, kicauan para politisi dan ekspose komentar-komentar politikus di media massa arus utama menjadi salah satu bahan bakar yang memicu tindak kriminal berdasarkan rasa benci. Tensi yang sebelumnya sudah meninggi antara pendukung dan penolak referendum Uni Eropa semakin panas dan mengarah pada kriminalitas (Chakraborti dan Hardy, 2016). Situasi itu tentu saja tidak akan pernah kita harapkan terjadi di Indonesia, meskipun gejala tindak kriminal karena kebencian dan perbedaan pandangan politik sempat beberapa kali terjadi seperti yang terjadi di Sampang pada pengujung November 2018 (Rahmatin, 2015).

Solusinya sebenarnya sudah dirumuskan oleh para jurnalis sejak jauh-jauh hari. Lahirnya konsep *peace journalism* atau diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai jurnalisme damai merupakan upaya yang lahir dari pemikiran para jurnalis untuk menghadirkan pemberitaan yang mampu meresolusi konflik. Berita dengan resolusi damai lahir dari kekhawatiran para jurnalis akan efek samping dari pemberitaan yang mereka lakukan. Konsep ini pernah diterapkan di Indonesia dan menjadi diskursus yang ramai diperbincangkan ketika konflik Aceh memanas. Sejumlah jurnalis Tanah Air kemudian menggalang gerakan untuk melakukan pemberitaan konflik yang mengedepankan empati dan mengikis informasi yang provokatif.

Harus diakui bahwa ketika pertama kali dicetuskan, jurnalisme damai merupakan jawaban untuk konflik besar seperti peperangan. Namun, rasanya tidak ada salahnya bila saat ini kita mencoba mengadaptasi konsep jurnalisme damai untuk meredam potensi konflik yang lahir dari proses pembelajaran demokrasi di negeri yang tengah belajar menghadapi tantangan perbedaan ini. Toh suatu peperangan selalu dilandasi atas kepentingan politik.

Hanya saja perlu diingat bahwa penerapan jurnalisme damai memang memiliki dampak pada pemberitaan yang berkurang tingkat kemenarikannya. Berkurangnya ekspose pada konflik akan membuat berita-berita dengan perspektif jurnalisme damai terasa lebih hambar bagi sebagian orang. Namun, sesuai kata pepatah, mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Daripada menunggu negeri ini terpecah karena komodifikasi konflik yang berlebihan, tentu akan lebih baik bila sejak awal kita mengantisipasinya dengan tidak terlalu mengekspose konflik atas hal yang kelewat remeh-temeh.

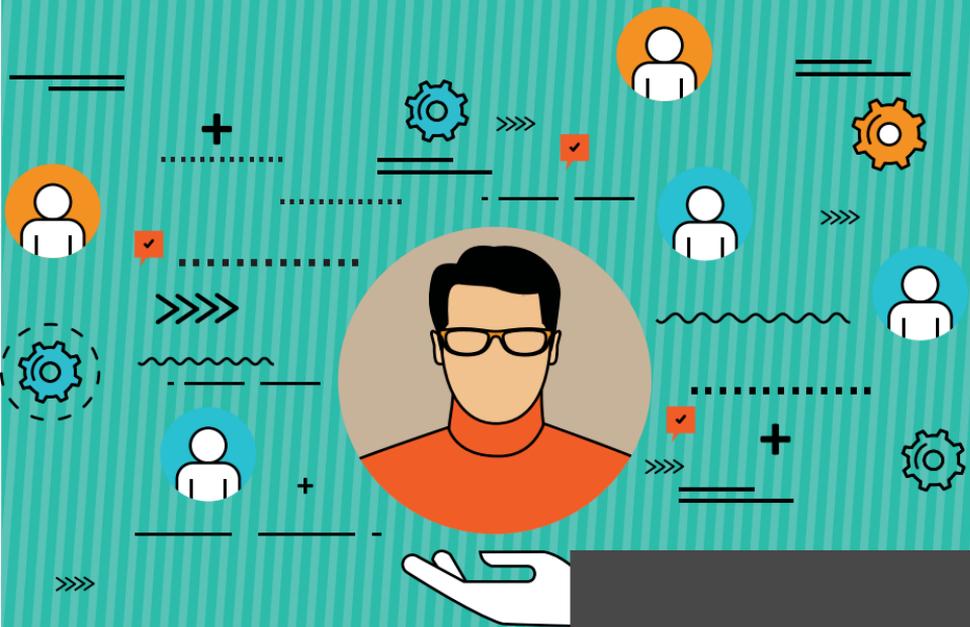
Pertanyaannya sekarang, masihkah ada semangat dari media massa dan jurnalis masa kini untuk bersama menuju resolusi konflik pada era digital? Ataukah saat ini media massa kita sudah menempatkan keuntungan finansial sebagai tujuan utama?

Daftar Pustaka

- Boczkowski P, Mitchelstein E and Matassi M (2017) Incidental news: how young people consume news on social media. In: Proceedings of the 50th Hawaii international conference on system sciences, Waikola, HI, 4–7 January, pp. 1785–1792. Honolulu, HI: University of Hawaii
- Chakraborti, Neil dan Dr Stevie-Jade Hardy(2016) Politicians and media fuel hate crime in Britain, University of Leicester, diakses melalui <<https://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2016/june/politicians-and-media-fuel-hate-crime-in-britain-2019-say-university-of-leicester-experts>>
- Juditha, Christiany (2017) Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017

- • Rahmatin, Bonasir (2018), BBC Indonesia, Pembunuhan terkait capres di Sampang: 'Beda pilihan presiden, asal tidak saling menghina', <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46345977>>
- • Vasantola, Satu (2015) Do You Think It's Sex? You're Wrong. This is What People Share Most on Social Media, Oxford: Reuters Institute

Profil Penulis



Profil Wicaksono (Editor)

Wicaksono lebih akrab di kancah media sosial Indonesia sebagai Ngoro Kakung. Dia memiliki lebih dari 240 ribu pengikut di akun Twitternya yang terverifikasi. Lulus dari Universitas Gadjah Mada, ia memulai karirnya sebagai jurnalis untuk Mode Magazine Indonesia pada tahun 1990, ia bergabung dengan Media Indonesia (1994-1998), Tempo (1998-2011), portal ID MSN (2011-2015), dan Beritagar.id (2015-2016). Dia sekarang bekerja di Maverick PR sebagai Advisor-at-Large. Dia adalah ketua Pesta Blogger pada 2008, sebuah acara blogger nasional. Dia adalah pelatih media sosial untuk perusahaan pemerintah dan swasta.

Profil Adya Nisita (Asisten Editor)

Penggemar karya fiksi dan pernah menghabiskan masa kuliahnya di Jogja menjadi pegiat jurnalistik. Saat ini dia dipercaya sebagai Manajer Riset pada Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Dapat dihubungi melalui email adyanst@gmail.com.

Profil Alvidha Septianingrum (Asisten Editor)

Alvidha Septianingrum, menyelesaikan studi sarjananya di Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Pernah menjadi bagian dari Indonesian Internet Governance Forum (ID-IGF) dan saat ini aktif menjadi bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi

Profil Dedy Permadi (Asisten Editor)

Dedy Permadi menamatkan pendidikan Sarjana dan Master dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fisipol, UGM antara tahun 2004-2009. Ia kemudian melanjutkan studi Doktorat di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore dari tahun 2012 sampai 2016 dan menjadi Visiting Doctoral Student di Department of Politics and International Relations, University of Oxford pada tahun 2015-2016. Dedy adalah Dosen Tetap pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UGM sejak tahun 2009; menjadi Direktur Center for Digital Society (CfDS) UGM sejak 2016; dan sekaligus Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sejak 2017 sampai sekarang.

Profil Ade Irma Sukmawati

Ade Irma Sukmawati, Dosen tetap prodi Ilmu Komunikasi UTY peneliti media digital, cultural studies dan kajian gender. Telah berpengalaman melakukan penelitian pada masyarakat Tionghoa muslim, khususnya di wilayah Jawa. Tergabung sebagai anggota JAPELIDI sejak 2017 dan aktif serta telah memberikan sumbangsih untuk peningkatan literasi media digital bekerja sama dengan dinas P3AP2KB kabupaten Sleman. Alamat kontak : ade.sukmawati@staff.uty.ac.id

Profil Aldinshah Vijawabwana

Aldinshah Vijayabwana atau biasa dipanggil Aldin lahir di Semarang, 22 Juli 1999. Aldin pernah bersekolah di SD Hj. Isriati Moenadi (2005-2011), SMPN 1 Ungaran (2011-2014), dan SMAN 3 Salatiga program akselerasi (2014-2016). Saat ini Aldin menempuh pendidikan S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selain berkuliah, Aldin menjadi pembimbing tim OSN IPA SD Hj. Isriati Moenadi, dan berhasil membimbing siswanya meraih medali perak dalam ajang Hidayatullah Mathematics and Science Olympiad (HIMSO) 2019. Aldin juga aktif sebagai relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), dan telah mengikuti fact-checking workshop yang diselenggarakan Google pada tahun 2018. Penggemar motorsport ini kerap menuliskan opini politik di situs PepNews.com, dan mengisi ceramah agama di lingkungan tempat tinggalnya

Profil Astri Dwi Andriani

Astri Dwi Andriani lahir di Cianjur, 21 April 1991. Menempuh pendidikan S1 jurusan Jurnalistik di Universitas Putra Indonesia. Selama jadi mahasiswa, Astri aktif menjadi wartawan di media cetak di bawah naungan Jawa Pos Group. Pengalaman tersebut mengantarkannya menjadi Pimpinan Redaksi Majalah Haiyong Inspiring People (PT Umbul Mas Abadi). Gelar Master Ilmu komunikasi (S2) diperoleh di Universitas Islam Bandung, dengan konsentrasi Komunikasi Bisnis pada tahun 2015. Saat ini dirinya sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran Bandung, dengan fokus pada kajian Komunikasi Terapeutik. Sejak tahun 2010 sudah jatuh cinta pada

dunia pendidikan. Pernah jadi guru di SMK Broadcast Al-lanah, dan kini aktif sebagai dosen di Universitas Putra Indonesia dan Universitas Terbuka. Disela-sela aktivitasnya sebagai dosen, Astri aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan jadi narasumber berbagai seminar bertema komunikasi. Pernah menjadi peneliti di Poldata Research Center (fokus pada isu komunikasi politik), dan bergabung di Next Generation (NXG) Indonesia sebagai Divisi Riset sejak tahun 2018 hingga kini.

Profil Cahya Suryani

Cahya Suryani SIP, M.A. Lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Haluoleo (UHO) Kendari dan melanjutkan jenjang pendidikan Magister Psikologi Sains di Universitas Gadjahmada Yogyakarta. Pernah mengajar di salah satu prodi Ilmu Komunikasi kampus swasta di Jawa Timur. Saat ini menjadi Anggota Japelidi (jaringan penggiat literasi digital), anggota komite Litbang MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), anggota tim riset pemetaan hoaks MAFINDO dan sebagai Koordinator MAFINDO Mojokerto. Sejak penyusunan skripsi sudah berkecimpung dalam kajian dan penelitian mengenai psikologi komunikasi, tertarik pada literasi digital sejak penyusunan tugas akhir magister. Penulis bisa dihubungi di Cahyasuryani01@gmail.com.

Profil Debby Dwi Elsha

Debby Dwi Elsha, dosen tetap prodi Ilmu Komunikasi UTY, akademisi dan peneliti film, media digital dan kajian gender. Tergabung dalam komunitas film independent serta berpengalaman memproduksi dan mengapresiasi film khususnya film Indonesia. Tergabung sebagai anggota JAPELIDI sejak tahun 2017 dan aktif serta telah memberikan sumbangsih untuk peningkatan literasi media digital bekerja sama dengan dinas P3AP2KB kabupaten Sleman .Alamat kontak : debby. elsha@staff.uty.ac.id

Profil Diena Haryana

Diena Haryana adalah pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). Yayasan ini berdiri pada 2004 dan bergerak di bidang perlindungan anak, khususnya mengkampanyekan anti kekerasan pada anak, baik online maupun offline. Beliau juga adalah salah satu anggota Dewan Pengarah pada Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital. Selain itu, beliau juga aktif bergerak untuk ID COP (Indonesia Child Online Protection), mengupayakan kesadaran orangtua, guru dan anak dalam perlindungan anak di ranah daring, bersama lembaga-lembaga lain: ICT Watch, Ecpat Indonesia, KPAI, Relawan RTIK, Nawala dan lainnya.

Profil Donny B.U.

Penyuka serial Tintin dan kisah Mahabharata. Pernah berprofesi sebagai jurnalis di sebuah media online, kini dia aktif sebagai pegiat literasi digital Internet Sehat – ICT Watch. Dapat dihubungi melalui email dbu@donnybu.id

Profil Edi Santoso

Dr. EDI SANTOSO, S.Sos., M.Si., sehari-hari beraktivitas sebagai pengajar pada jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Mengkaji Ilmu Komunikasi sejak kuliah S1 di Universitas Diponegoro Semarang kemudian berlanjut ke S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dan S3 Universitas Indonesia, dengan bidang kajian serupa, yakni Ilmu Komunikasi. Dalam dunia jurnalistik, pernah bekerja sebagai reporter rubrek Etalase Harian Suara Merdeka dan editor Suara Merdeka CyberNews Semarang. Di sesela kuliah doktoral di UI Jakarta, juga sempat menjadi redaktur pelaksana Majalah Tarbawi. Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain Teori Komunikasi (Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta), Pengendalian Dampak Video Game pada Remaja (Kanal Media, Jakarta), Lidah Tak Bertulang: Sketsa Etika Komunikasi (Tarbawi Press, Jakarta), Jurnalisme Subjektif : Perspektif Humanis dalam Pemberitaan (Pustaka Literasi Bangsa, Purwokerto), dan Dopokan Banyumasan di Media Sosial (Pustaka Literasi Bangsa, Purwokerto).

Profil Ellen. M. Yasak

Ellen Meianzi Yasak, M.A, memiliki ketertarikan dalam bidang Jurnalistik dan Studi Media sejak kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sela kuliahnya, dia aktif di organisasi JUFOC (Jurnalistic Fotografi Club) dan menjadi jurnalis di Harian Surya Malang. Setelah lulus S1, dia mengawali karier jurnalistiknya di Suara Surabaya Media, salah satu media konvergen di Kota Surabaya. Ketertarikannya pada dunia Ilmu Komunikasi, membawanya menempuh pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pasca lulus, pihaknya menjadi Dosen Tetap Ilmu Komunikasi di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang dan menjadi pendiri komunitas literasi media Mediadiet di Malang. Bergabung dengan Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi) sejak 2017, dan saat ini juga sedang menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.

Profil Firly Annisa

Firly Annisa adalah dosen Ilmu Komunikasi UMY. Sejak 2008 berfokus dalam kajian media, muslim dan budaya populer, gender dan literasi media. Aktif sebagai penulis dan aktivis literasi media membuatnya terpilih menjadi salah satu peserta Muslim Exchange Program yang disponsori oleh pemerintah Australia pada tahun 2016. Salah satu tulisannya berjudul Representation of Fashion as Muslima Identity in Paras Magazine, dipublikasikan oleh Cambridge Scholar Publisher, UK dalam ontologi buku "Muslim Societies in The Age of the Mass of Consumption, Politics, Culture, and Identity between the Local and Global". Saat ini aktif menjadi mahasiswa doctoral di Keele University, UK dengan tema penelitian Media Sosial dan Kontestasi Kesalahan Muslim. Penulis dapat dihubungi di alamat email firly84@gmail.com

Profil Frida Kusumastuti

Frida Kusumastuti, dosen Ikom Universitas Muhammadiyah Malang, anggota JAPELIDI. Penulis 5 modul, 4 buku. Microblog-nya tentang anak autis pernah mendapatkan penghargaan BRONZ internet sehat.

Berminat pada kajian Public Relations, Sosiologi Komunikasi, dan Media & Masyarakat.

Profil Gilang Desti Parahita

Staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM untuk peminatan Jurnalisme dan Media. Bersama dengan kolega E. Wendratama, Gilang mengelola laman wargajogja.net yang menampung karya mahasiswa-mahasiswi Komunikasi UGM. Gilang selalu berminat dengan isu-isu kelompok termarjinalkan dan kaitannya dengan media (digital maupun legacy), misalnya kelompok penyintas pelanggaran HAM berat, perempuan, buruh, anak, dan LGBTQ. Keikutsertaan Gilang di Japeli di didorong oleh fakta global maupun lokal bahwa akses, pengetahuan, dan representasi perempuan terhadap dan pada teknologi digital maupun industri digital masih sejang dari laki-laki. Cita-cita Gilang adalah membangun sebuah platform yang dapat menjadi pertukaran nilai, pengetahuan dan keterampilan di antara perempuan-perempuan urban dan rural Indonesia untuk mempersempit beragam kesenjangan di antara kelompok perempuan itu sendiri, lalu bersama-sama membuat perubahan. Gloria Steinem idolanya. Hobi Gilang di waktu luang adalah melukis, doodling, memajang refleksi diri di Instagram sembari mencerna konten-konten feminis dan kartun-kartun satire, tak lupa menertawakan Trump bersama Trevor Noah melalui "The Daily Show." Ia dapat dihubungi di gilang_parahita@ugm.ac.id.

Profil Gilang Jiwana Adikara

Gilang Jiwana Adikara lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. Cita-cita sejak kecil membawanya terjun di dunia jurnalistik sebagai wartawan di sebuah surat kabar di Yogyakarta selepas lulus studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Kesempatan berkarya sebagai jurnalis ini dilalui sembari menyelesaikan studi lanjut di program S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Kariernya di dunia jurnalistik berlanjut sampai menduduki posisi sebagai redaktur, sebelum akhirnya memutuskan untuk berganti haluan dan membagikan pengalamannya sebagai jurnalis dengan menjadi dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Sampai

saat ini dia masih aktif menulis artikel baik ilmiah maupun populer dan dapat dihubungi melalui surel gilang.ja@uny.ac.id.

Profil Ignatius Aryono Putranto

Ignatius Aryono Putranto, SE.,M.Acc.,Akt lahir di Klaten 8 Agustus 1984. Saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah: SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan, Kuliah S1 Akuntansi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pendidikan berikutnya adalah Pendidikan Profesi Akuntan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pendidikan terakhir adalah Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bidang riset dan pengajaran beliau adalah Sistem Informasi Akuntansi.

Profil Indriyatno Banyumurti

Indriyatno Banyumurti merupakan koordinator program dari ICT Watch, sebuah organisasi sosial masyarakat yang memulai gerakannya sejak tahun 2002, untuk mengembangkan, memberdayakan, dan mendukung literasi digital melalui program Internet Sehat. Juga merupakan co-founder dari Relawan TIK Indonesia yang bergerak di bidang edukasi masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasi. Banyumurti juga merupakan anggota Multi-stakeholder Advisory Group Indonesia Internet Governance Forum (MAG ID-IGF) serta co-founder dan Direktur dari PT. Chelonind Integrated, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan pelatihan TIK. Saat ini, Banyumurti aktif dalam menjalankan edukasi dan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Email: banyumurti@ictwatch.id

Profil Lintang Ratri Rahmiaji

Dr. Lintang Ratri Rahmiaji. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Pengampu Siaran Literasi Media di Kampung Sarasehan Radio Idola

92.6 FM Semarang, Instruktur Cerdas Bermedia Sosial di Polda Jateng, Aktif di Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Bergerak di penelitian komunikasi bertema media, anak dan perempuan serta isu-isu budaya minoritas. Terkait dengan literasi digital, penulis memfokuskan pada digital parenting, hoaks dan kekerasan berbasis gender online.

Profil Made Dwi Andjani

Made Dwi Andjani adalah Staf Pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Menyelesaikan pendidikan S 1 dan S 2 di bidang Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan juga menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen SDM di STIE Dharma Putera Semarang. Sejak kuliah sudah mencoba berbagai pekerjaan mulai dari surveyor, marketing, sekretaris hingga presenter televisi. Pengalamannya sejak tahun 1997-2013 sebagai pembaca berita Jawa Tengah dan host acara Tepa Tulada akhirnya membuatnya memutuskan untuk berbagi pengetahuan dengan mahasiswa di Unissula sebagai dosen selain masih sering menjadi MC dan narator. Ibu tiga putra ini juga aktif sebagai anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), Perhumas Semarang, ASPIKOM dan editor in chief Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna.

Profil Marvin. F. Laurens

Marvin F. Laurens adalah salah seorang pekerja kreatif warga dari Paparisa Ambon Bergerak. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, aktif di komunitas Ambon Bergerak, Milanisti Indonesia Sezione Ambon, Relawan TIK Maluku, GenPI Maluku, Mafindo Ambon dan Komunitas Bela Indonesia Maluku, serta terlibat dalam beragam aktivasi kampanye sosial yang dilakukan. Kampanye social #ambonbergerak berbasis internet dan media social diantaranya kampanye #SaveAru maupun kegiatan-kegiatan pelatihan Konflik dan Perdamaian, Internet Sehat, Media Social dan Hoax. Tahun 2016 Marvin berkesempatan menimba ilmu di SKP (Sekolah Pengelolaan Keberagaman) dari CRCs UGM, serta tahun 2017 berkesempatan menimba ilmu di SOP (School of Peace) dari Sekolah Damai Indonesia (Sekodi), tahun 2018

berkesempatan masuk dalam organisasi MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan Komunitas Bela Indonesia. Aktif menggunakan media social untuk menyebarkan pesan kreatif, serta peduli dalam aktivitas peningkatan kapasitas warga net untuk menolak kabar palsu dan mengatasi ujaran kebencian di media social.

Profil Muna Yastuti Madrah

Saat ini tercatat sebagai dosen pengampu mata kuliah sosiologi pendidikan di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Menekuni kajian tentang Masyarakat, Media dan Pendidikan. Aktif mengkampanyekan internet sehat bagi keluarga pada kelompok perempuan di wilayah nya di kota Demak. Beberapa publikasi terkait dengan media antara lain, Stigma Media & Terorisme (2012), Sosialita di Era Internet (2013), Konstruksi Status Remaja pada Unggahan di Facebook (2014), dan Peran Netizen dalam Kampanye Pilpres 2014 (2018). Muna Madrah juga bergabung dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI). Kontributor dapat dihubungi melalui email : munamadrah@unissula.ac.id

Profil Muhammad Said Hasibuan

Muhammad Said Hasibuan, Lahir di Rantau Prapat Sumatera Utara, tanggal 12 januari 1977. Saat ini, tercatat sebagai mahasiswa doktoral Universitas Gadjah Mada (UGM) program studi Teknik Elektro dan Teknologi Informasi 2015-2019. Bertugas sebagai dosen pascasarjana magister teknologi informasi di kampus Institute Business dan Informatika Darmajaya Bandar Lampung sejak tahun 2004. Penulis juga aktif sejak tahun 2011 sebagai pengurus pusat Relawan TIK Indonesia dan sebagai pengurus pusat Aptikom (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) untuk bidang kerjasama industri. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan terkait e-learning, edukasi TIK pada orang tua, remaja dan UKM, riset sosial media impact dan pengembangan e-government.

Profil Ni Made Ras Amanda

Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel S.Sos M.Si Lahir di Bogor. Menghabiskan masa kecil hingga bekerja di Bogor, Depok, dan Jakarta, kini berdomisili di Guwang, Sukawati, Gianyar, Bali, menikah dan memiliki 3 anak. Ia memperoleh gelar sarjana dan magister ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Gelar doktoral diraih pada usia 34 tahun, di Kajian Budaya, Universitas Udayana. Menjadi dosen adalah profesi pilihannya setelah lebih dari 7 tahun berprofesi sebagai jurnalis, reporter, hingga presenter di BaliTV hingga AntaraTV. Ia pernah menjadi wartawan Istana Kepresidenan pada masa Presiden Megawati hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengalamannya dalam jurnalis mendukung dalam mata kuliah yang diajarkan yakni di bidang jurnalistik dan politik. Selain mengajar, penelitian yang pernah dilakukannya di bidang media bekerjasama dengan KPI, KPU Kabupaten/Kota, Dewan Pers, TVRI dan beberapa Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan pengabdian yang dilakukan selama ini di bidang literasi media dengan kampanye “bijak bermedia sosial”.

Profil Novi Kurnia

Novi Kurnia adalah staf pengajar dan ketua program studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Flinders University, Australia, pada tahun 2014. Novi Kurnia aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital di Indonesia dengan menjadi salah satu pendiri dan koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). Ia juga merupakan salah satu anggota Dewan Pengarah Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Minat kajian yang ditekuninya baik dalam bidang pengajaran dan penelitian adalah: literasi digital, gender dan komunikasi, sinema Indonesia dan ekonomi politik media. Berbagai publikasi mengenai topik-topik tersebut bisa didapatkan di berbagai artikel jurnal dan buku baik yang diterbitkan di Indonesia maupun luar negeri. Catatan tentang publikasinya bisa dilihat di google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=JsTz43QAAAAJ&hl=en>. Sedangkan alamat email yang bisa digunakan untuk menghubunginya adalah: novikurnia@ugm.ac.id.

Profil Olivia Lewi Pramesti

Penulis adalah staf pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ia memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) di jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2013. Minat risetnya di antaranya jurnalisme, hukum dan etika media, media dan isu kebencanaan, serta literasi media. Buku yang diterbitkan: “Sport, Komunikasi, dan Audiens, Arena Olahraga dalam Diskursus Ekonomi-Politik, Bisnis, dan Cultural Studies”(2014-ASPIKOM), “Media Terpenjara Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014 (2015-TIFA Foundation dan Masyarakat Peduli Media), “Modul Pelatihan Jurnalisme Online “Jurnalisme Online: Memberi Bobot Publik” (2016-Digi Journalism UGM-TIFA Foundation), “Inspirasi Alumni, Berbagi Kisah Sukses Perjalanan Hidup” (2016- UAJY), dan Kualitas Jurnalisme Publik di Media Online: Kasus Indonesia (Editor (2017)-Gadjah Mada University Press-Digi Journalism UGM), Literasi Media & Informasi dan Citizenship (2019-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jaringan Penggiat Literasi Digital/Japelidi, Siberkreasi). Penulis pun aktif menulis opini di media massa. Penulis dapat dihubungi melalui olivialewipramesti@gmail.com.

Profil Puji Rianto

Puji Rianto adalah dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Menyelesaikan studi S1 di Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta dan S2 di Sekolah Pascasarjana Kajian Budaya dan Media UGM. Selain menjadi dosen, juga aktif sebagai pegiat Jaringan Literasi Digital (Japelidi) dan peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA). Hasil penelitiannya mengenai etika dan regulasi media, ekonomi politik media dan riset audiens telah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional (AJMC), serta beberapa diantaranya dipresentasikan di seminar dan konferensi nasional dan internasional. Beberapa buku yang pernah ditulis secara mandiri ataupun bersama tim diantaranya adalah Digitalisasi Televisi di Indonesia (2012, penulis pertama), Dominasi Televisi (Nasional) di Indonesia (2012, penulis pertama), Kepemilikan dan Intervensi Siaran (2016, Penulis pertama), Sistem

Informasi Desa (2017, penulis pertama), Etika Profesi Komunikasi (2017), dan Filsafat dan Etika Komunikasi (Januari 2019).

Profil Radityo Widiatmojo

Radityo Widiatmojo, M.Si., dosen muda yang memiliki pengalaman sebagai independent photojournalist sejak 2002. Karya foto-fotonya sudah dipublikasikan secara nasional (Tempo, Jawapos, Republika, Jurnal Nasional, Hai, Getaway) dan internasional (Daily Mail UK, The Wall Street Journal USA, The Guardian UK, CATC, Think!, Billy Blue Australia). Pada tahun 2016 menerbitkan Photobook berjudul Solitude dan Déjà vu di tahun berikutnya. Dalam hal keilmuan, sangat tertarik pada kajian komunikasi visual, literasi visual serta fotografi kritis. Saat ini menjadi pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi UMM. Penulis bisa dihubungi di r.widiatmojo@gmail.com

Profil Ratri Rizki Kusumalestari

Ratri Rizki Kusumalestari lahir di Denpasar, Bali pada 31 Januari 1975. Pendidikan formalnya mulai SD hingga perguruan tinggi ditempuh di banyak kota, yaitu Beograd, Jakarta, Pati, Solo, Semarang dan Bandung. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dan mendapatkan gelar magister ilmu komunikasi di perguruan tinggi yang sama. Saat ini ia adalah dosen pengajar mata kuliah Media Literacy, Kajian Media, Dasar Jurnalistik, Psikologi Komunikasi, Fotografi dan Jurnalistik Foto di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Buku pertamanya berjudul Jurnalistik Foto: Suatu Pengantar yang ditulis bersama koleganya, Rita Gani, diterbitkan tahun 2013. Selain itu, ia juga aktif menulis, melakukan penelitian, menjadi konsultan dan pemateri untuk pelatihan fotografi, media literasi dan bidang komunikasi lainnya.

Profil Rita Gani

Rita Gani, merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA. Mengajarkan beberapa kuliah umum seperti Pengantar Filsafat, Dasar Logika, Pengantar Ilmu Komunikasi, Dasar Jurnalistik, dan Opini Publik.

Dan beberapa mata kuliah khusus ilmu Jurnalistik seperti Media Literasi, Etika Hukum Pers/Media dan Jurnalistik Foto. Gelar Doktornya di dapat dari Universitas Padjajaran tahun 2015. Selain mengajar, ia juga aktif menulis di surat kabar dan melakukan berbagai penelitian, serta konsultan ahli dan narasumber dalam beberapa bidang pekerjaan di berbagai institusi. Buku pertamanya yang berjudul "Jurnalistik Foto, Suatu Pengantar" (ditulis bersama Ratri Rizki-2013) menjadi salah satu buku best seller terbitan Simbiosis Rekatama Media. Membaca buku, berolahraga yoga, fotografi dan traveling adalah kegemarannya. Bisa dihubungi via email : ritagani911@gmail.com atau berkomunikasi melalui medsos IG/FB : ritagani

Profil Rita Nurlita Setia

Rita Nurlita Setia adalah seorang Ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan literasi digital dan kepenulisan. Saat ini, selain menjadi Pranata Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Rita juga mendirikan Keluarga Digital Indonesia (Kugi Indonesia), Komunitas Internet Sahabat Anak (KISA) dan Kisa Muda yang bergerak di bidang literasi digital untuk orang tua, anak-anak, dan remaja. Rita juga menulis buku literasi digital untuk anak-anak berjudul "Terjebak di Dunia Maya" dan komik "Anak Hebat di era Digital". Novel pertamanya berjudul "Terjebak di Dunia Maya" yang bercerita tentang cara menggunakan internet secara sehat untuk anak-anak (2015), berhasil masuk nominasi sebagai novel non-fiksi terbaik anak-anak di Islamic Book Fair 2016. Berbagai inovasinya dalam kegiatan literasi digital dan internet sehat di masyarakat, membuatnya menerima penghargaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi tingkat Kota Depok, ASN berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat (2017), dan Tokoh Metro Tempo dari Koran Tempo (2018) Rita bisa dihubungi melalui sosial media: Facebook : Rita Nurlita Setia, Instagram : ritanurlitasetia, Email: ritanurlitasetia@gmail.com

Profil Unggul Sagena

Unggul Sagena adalah blogger dan pegiat literasi digital yang merupakan Ketua Harian Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) Indonesia periode 2016-2020.

Penulis juga merupakan Kepala Divisi Akses Informasi, jejaring kebebasan berekspresi di Asia Tenggara (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan anggota Internet Development Institute (ID Institute). Pendidikan formal diselesaikan di bidang ilmu administrasi publik dan Master of Public Policy pada Universitas Indonesia (UI) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu Master of Arts in Technology Governance diselesaikan di negara dengan kategori “bebas/free” dalam hal kebebasan akses internet dan kebebasan pers (Freedom on the Net; Freedom House, 2018) dan salah satu negara acuan model penerapan e-government dunia yaitu dari Tallinn University of Technology (TalTech), Republik Estonia.

Profil Wisnu Martha Adiputra

Wisnu Martha Adiputra, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada. Selain beraktivitas di kampus, juga aktif meneliti dan mengadvokasi hadirnya regulasi komunikasi yang lebih adaptif dan demokratis di Indonesia bersama-sama beberapa rekan di PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) dan mengembangkan kompetensi warga dalam berkomunikasi digital bersama sekitar enam puluh orang penggiat dan peneliti di komunitas Japelidi (Jaringan Penggiat Literasi Digital). Sejak aktif di Japelidi pada tahun 2017 telah meneliti dan menulis satu buku dan tiga buku panduan literasi digital. Tertarik pada isu-isu literasi digital, kebijakan komunikasi, dan komunikasi politik, serta meyakini bahwa ketiga penting bagi sistem komunikasi yang adil dan demokratis. Dapat dihubungi melalui alamat email wisnumartha@ugm.ac.id dan wisnumartha14@gmail.com.

Profil Yohanes Widodo S.Sos., M.Sc

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 2010. Mengajar mata kuliah Jurnalisme Multimedia, Produksi Multimedia, Penulisan Naskah Digital, dan Desain Media. Sebelum menjadi dosen, ia menekuni dunia penyiaran sebagai Kepala Studio Radio Sonora Palembang selama 10 tahun. Lulus Strata 1 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(1999) dan program Master in Applied Communication Science dari Wageningen University, The Netherlands (2009). Fokus kajiannya tentang media, jurnalisme, dan media baru. Mantan Sekretaris Jendral Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda sekaligus salah satu pendiri Radio PPI Dunia, radio pelajar Indonesia di luar negeri. Sempat menjadi trainer untuk program Saat ini bergabung dalam Jaringan Pegiat Literasi Media (Japelidi), Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) dan editor di Jurnal ASPIKOM. Email: yohanes.widodo@uaj.ac.id.

Profil Zainuddin Muda Z. Monggilo, S.I.Kom., M.A.

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) bidang ilmu komunikasi dan media dari Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Minat risetnya di antaranya adalah komunikasi digital, media baru, jurnalisme digital, dan literasi digital. Publikasi terkini yang ditulisnya terkait dengan literasi digital di antaranya adalah Yuk, Tanggap dan Bijak Berbagi Informasi Bencana Alam Melalui Aplikasi Chat (2018) dan Yuk, Lawan Hoaks Politik, Ciptakan Pemilu Damai (2019). Ia juga terlibat aktif sebagai anggota dari Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) sejak tahun 2018. Penulis dapat dihubungi melalui zainuddinmuda19@ugm.ac.id.



 www.siberkreasi.id  [@siberkreasi](https://twitter.com/siberkreasi)  [@siberkreasi](https://www.instagram.com/siberkreasi)  info@siberkreasi.id